

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2015



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2015

Penanggung Jawab :

Kepala PKP2A I Lembaga Administrasi Negara

Tim Penyusun :

Susy Ella, S.Si., MA.

Shafiera Amalia, S.IP.

Dr.H. Baban Sobandi, SE., M.Si.

Drs. Dayat Hidayat, M.Si.



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

B A N D U N G

2015

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2015

Penulis : Susy Ella, *et.al.*
Desain Sampul : Irman Hermansyah, Budi Permana

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2015

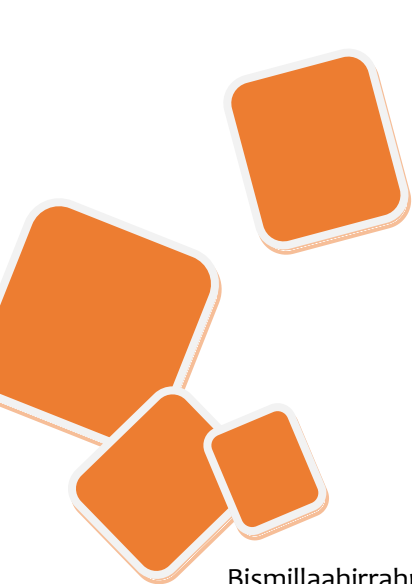
Silahkan mengutip isi buku ini untuk kepentingan studi dan/atau kegiatan non-komersial dengan mencantumkan sumbernya.

Hak Penerbitan pada:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055
E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id
Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-90-6

Tim Penyusun :

1. Susy Ella, S.Si., MA.
2. Shafiera Amalia, S.IP.
3. Dr. H. Baban Sobandi, SE., M.Si.
4. Drs. Dayat Hidayat, M.Si.



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya, kami sebagai tim kajian PKP2A I LAN dapat menyelesaikan salah satu tugas kami dalam menyusun buku **“Statistik Aparatur Indonesia 2015”**. Kehadiran buku ini merupakan suatu usaha untuk memenuhi ketersediaan data mengenai aparatur yang terintegrasi dan komprehensif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan perumusan kebijakan, maupun bagi keperluan akademis. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data terkait dengan aparatur.

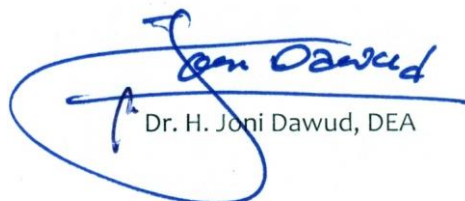
Adapun isi dari buku ini adalah mengenai data statistik aparatur dari berbagai aspek yaitu aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan pemerintah, dan aspek kinerja aparatur/birokrasi. Data yang disajikan dalam buku ini diperoleh dari berbagai instansi/lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya.

Buku Statistik Aparatur Indonesia 2015 merupakan lanjutan dari buku yang sama di tahun 2012, 2013, dan 2014. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan isi buku ini agar data yang disajikan lebih memadai. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah dengan menambahkan beberapa data baru. Selain itu, sebagian data aparatur yang kami sajikan pada buku ini juga dapat dilihat di website <http://dataaparatur.bandung.lan.go.id>.

Walau demikian, kami tentu menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan pada buku ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk peningkatan kualitas buku ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini.

Sumedang, November 2015
Kepala PKP2A I LAN



Dr. H. Joni Dawud, DEA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xxi

Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Isi Buku	2
D. Kegunaan dan Manfaat	2
E. Teknik Pengumpulan Data	2

Bagian I Kelembagaan	7
A. Kelembagaan Pemerintah	7
B. Struktur Organisasi	8
C. Ketersediaan Assessment Center di Lembaga Pemerintah	8

Bagian II Ketatalaksanaan	89
A. Sistem Perencanaan Kerja	89
B. Sistem Prosedur Kerja	89
C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian	91

Bagian III Sumber Daya Manusia Aparatur	118
A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	118
B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	118
C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	119
D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	120
E. Pensiun Pegawai Negeri Sipil	120

Bagian IV Keuangan/Fiskal Pemerintah	190
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	190
B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur	190
C. Alokasi Belanja Negara untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	191
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	191
E. Pendapatan Asli Daerah	192
F. Dana Perimbangan	192

	G. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah	194	
Bab V	Kinerja Aparatur/Birokrasi		215
	A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi	215	
	B. Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan	216	
	C. Integritas Sektor Publik	216	
	D. Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	216	
	E. Peringkat Doing Business Indonesia dan Negara ASEAN	217	
	F. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN	218	
	G. Peringkat dan Nilai Human Development Index Indonesia dan Negara ASEAN	218	
	H. Peringkat dan Nilai e-Government Indonesia dan Negara ASEAN	219	

DAFTAR TABEL

Bagian I	Kelembagaan	
Tabel I.1	Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Tahun 2013 dan 2015	9
Tabel I.2	Nomenklatur Kementerian Tahun 2013 dan 2015	10
Tabel I.3	Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013 dan 2015	11
Tabel I.4	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Tahun 2013 dan 2015	12
Tabel I.5	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2013 dan 2015	13
Tabel I.6	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Tahun 2013 dan 2015	13
Tabel I.7	Nomenklatur Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri Tahun 2013 dan 2015	14
Tabel I.8	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013 dan 2015	14
Tabel I.9	Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012 - 2013	14
Tabel I.10	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Negara Tahun 2013 dan 2015	18
Tabel I.11	Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2010 - 2014	20
Tabel I.12	Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2010 - 2014	21
Tabel I.13	Daerah Otonom Baru Tahun 1999 - 2014	22
Tabel I.14	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945	23
Tabel I.15	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945	25
Tabel I.16	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	27
Tabel I.17	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	28
Tabel I.18	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	30
Tabel I.19	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	31

Tabel I.20	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kejaksaan Agung)	33
Tabel I.21	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kepolisian RI)	35
Tabel I.22	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)	36
Tabel I.23	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	37
Tabel I.24	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	38
Tabel I.25	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	39
Tabel I.26	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	40
Tabel I.27	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kesekretariatan Mahkamah Agung)	42
Tabel I.28	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)	43
Tabel I.29	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	43
Tabel I.30	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	44
Tabel I.31	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural	45
Tabel I.32	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Negara Tahun 2015	46
Tabel I.33	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Tahun 2015	49

Tabel I.34	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Negara Tahun 2015	51
Tabel I.35	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri Tahun 2015	52
Tabel I.36	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2015	52
Tabel I.37	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Nonstruktural Tahun 2015	52
Tabel I.38	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Seluruh Lingkungan Kementerian dan Lembaga Tahun 2015	54
Tabel I.39	Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu 2014	54
Tabel I.40	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2014	57
Tabel I.41	Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun 2012 - 2013	58
Tabel I.42	Nomenklatur Lembaga Pusat / Pemerintah Daerah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2013 dan 2015	88
Bagian II	Ketatalaksanaan	
Tabel II.1	Jumlah Instansi Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013	92
Tabel II.2	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013	92
Tabel II.3	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013	92
Tabel II.4	Jumlah Keseluruhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013	92
Tabel II.5	Jumlah Instansi Pusat yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013	93
Tabel II.6	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013	93
Tabel II.7	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013	93
Tabel II.8	Jumlah Keseluruhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013	93
Tabel II.9	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2013	94
Tabel II.10	Jumlah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2014	95
Tabel II.11	Jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Telah Ditetapkan	95
Tabel II.12	Data Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2014 - 2015	96
Tabel II.13	Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Menerapkan e-	98

	Government Tahun 2012	
Tabel II.14	Jumlah Domain Instansi Pemerintah Tahun 2012-2015	99
Tabel II.15	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Website Tahun 2012	99
Tabel II.16	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013	100
Tabel II.17	Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013	100
Tabel II.18	Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	102
Tabel II.19	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Kepala K/L Mengenai SPIP yang Diterbitkan Tahun 2009 – 2012	105
Tabel II.20	Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP yang Diterbitkan Tahun 2009 – 2012	105
Tabel II.21	Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Sampai Tahun 2015	116
Bagian III	Sumber Daya Manusia Aparatur	
Tabel III.1	Jumlah PNS Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2013 - 2014	121
Tabel III.2	Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	121
Tabel III.3	Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	121
Tabel III.4	Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	122
Tabel III.5	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	122
Tabel III.6	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	123
Tabel III.7	Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	123
Tabel III.8	Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	124
Tabel III.9	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 - 2015	124
Tabel III.10	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	125
Tabel III.11	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	125
Tabel III.12	Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	126
Tabel III.13	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	127
Tabel III.14	Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang	127

	Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014	
Tabel III.15	Jumlah Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014	128
Tabel III.16	Jumlah Umum PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014	128
Tabel III.17	Jumlah Umum PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014	128
Tabel III.18	Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2013 - 2014	129
Tabel III.19	Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	129
Tabel III.20	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	130
Tabel III.21	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	130
Tabel III.22	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	131
Tabel III.23	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	131
Tabel III.24	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	132
Tabel III.25	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	132
Tabel III.26	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	133
Tabel III.27	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	133
Tabel III.28	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	133
Tabel III.29	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	134
Tabel III.30	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	134
Tabel III.31	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	134
Tabel III.32	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	135
Tabel III.33	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	135
Tabel III.34	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	136

Tabel III.35	Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2013 - 2014	136
Tabel III.36	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	137
Tabel III.37	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	137
Tabel III.38	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	138
Tabel III.39	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	138
Tabel III.40	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	139
Tabel III.41	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	139
Tabel III.42	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	140
Tabel III.43	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	140
Tabel III.44	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	140
Tabel III.45	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	141
Tabel III.46	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	141
Tabel III.47	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	141
Tabel III.48	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	141
Tabel III.49	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	142
Tabel III.50	Jumlah PNS Provinsi Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	143
Tabel III.51	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	143
Tabel III.52	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2010 - 2014	144
Tabel III.53	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2010 - 2014	144

Tabel III.54	Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2010 - 2014	144
Tabel III.55	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2010 - 2014	145
Tabel III.56	Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013 – 2014	145
Tabel III.57	Rasio Mahasiswa per Dosen (Tenaga Edukatif) Tahun 2013 - 2014	145
Tabel III.58	Tabel III.58 Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014	146
Tabel III.59	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014	146
Tabel III.60	Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014	146
Tabel III.61	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014	146
Tabel III.62	Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014	146
Tabel III.63	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014	147
Tabel III.64	Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014	147
Tabel III.65	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014	147
Tabel III.66	Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014	147
Tabel III.67	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014	147
Tabel III.68	Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014	148
Tabel III.69	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014	148
Tabel III.70	Jumlah Guru TK Menurut Usia Tahun 2013 – 2014	148
Tabel III.71	Jumlah Guru SD Menurut Usia Tahun 2013 - 2014	148
Tabel III.72	Jumlah Guru SMP Menurut Usia Tahun 2013 - 2014	149
Tabel III.73	Jumlah Guru SMA Menurut Usia Tahun 2013 - 2014	149
Tabel III.74	Jumlah Guru SMK Menurut Usia Tahun 2013 - 2014	149
Tabel III.75	Jumlah Guru SLB Menurut Usia Tahun 2013 - 2014	150
Tabel III.76	Jumlah Guru TK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014	150
Tabel III.77	Jumlah Guru SD Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014	150
Tabel III.78	Jumlah Guru SMP Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014	150
Tabel III.79	Jumlah Guru SMA Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014	151
Tabel III.80	Jumlah Guru SMK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014	151
Tabel III.81	Jumlah Guru SLB Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014	151
Tabel III.82	Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	151
Tabel III.83	Persentase (%) Pertumbuhan (%) Jumlah Guru TK Menurut	151

	Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2014	
Tabel III.84	Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	152
Tabel III.85	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	152
Tabel III.86	Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	152
Tabel III.87	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2014	152
Tabel III.88	Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	152
Tabel III.89	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	153
Tabel III.90	Jumlah Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	153
Tabel III.91	Persentase (%) Pertumbuhan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	153
Tabel III.92	Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	153
Tabel III.93	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014	153
Tabel III.94	Perkembangan Rasio Siswa Per Guru (Termasuk Kepala Sekolah) Tahun 2010 - 2014	154
Tabel III.95	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2014	154
Tabel III.96	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2014	154
Tabel III.97	Jumlah Total PNS (Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor Tahun 2013-2014	155
Tabel III.98	Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2013- 2015	155
Tabel III.99	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2013 - 2015	155
Tabel III.100	Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2013 - 2015	156
Tabel III.101	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2013 - 2015	156
Tabel III.102	Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2015	156
Tabel III.103	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2015	156
Tabel III.104	Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015	157
Tabel III.105	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015	157
Tabel III.106	106 Jumlah Penyidik KPK Tahun 2011 - 2015	157
Tabel III.107	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenjang Tahun 2014 - 2015	157
Tabel III.108	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 - 2015	157
Tabel III.109	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 - 2015	158
Tabel III.110	Jumlah SDM Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) dan Jajarannya di Seluruh Indonesia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013	158
Tabel III.111	Jumlah SDM Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Seluruh	158

	Indonesia Tahun 2015	
Tabel III.112	Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Jenjang Tahun 2013 - 2014	159
Tabel III.113	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013	160
Tabel III.114	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013	160
Tabel III.115	Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014	160
Tabel III.116	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	160
Tabel III.117	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	161
Tabel III.118	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	161
Tabel III.119	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	162
Tabel III.120	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	162
Tabel III.121	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	163
Tabel III.122	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	163
Tabel III.123	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014	163
Tabel III.124	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	164
Tabel III.125	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	164
Tabel III.126	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	164
Tabel III.127	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014	165
Tabel III.128	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	165
Tabel III.129	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	165
Tabel III.130	Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	166
Tabel III.131	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014	167
Tabel III.132	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan Tahun 2012 - 2015	167

Tabel III.133	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis Tahun 2012 - 2015	168
Tabel III.134	Jumlah Keseluruhan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang Terakreditasi	168
Tabel III.135	Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015	168
Tabel III.136	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015	168
Tabel III.137	Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015	169
Tabel III.138	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015	169
Tabel III.139	Gaji Pokok PNS Golongan I Tahun 2013 – 2015	170
Tabel III.140	Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2013 - 2015	172
Tabel III.141	Gaji Pokok PNS Golongan III Tahun 2013 - 2015	174
Tabel III.142	Gaji Pokok PNS Golongan IV Tahun 2013 – 2015	176
Tabel III.143	Tunjangan Jabatan Struktural	179
Tabel III.144	Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2015	179
Tabel III.145	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2012 - 2014	184
Tabel III.146	Persentase (%) Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan PNS Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2012 - 2014	184
Tabel III.147	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2012 - 2014	184
Tabel III.148	Persentase (%) Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan PNS Menurut Golongan Kepegawaian 2012 - 2014	185
Tabel III.149	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014	185
Tabel III.150	Jumlah Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2012 - 2014	186
Tabel III.151	Persentase (%) Pertumbuhan Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2012 - 2014	186
Tabel III.152	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2012 - 2014	186
Tabel III.153	Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Per Kelompok Tahun 2012 - 2014	186
Tabel III.154	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2014	187
Tabel III.155	Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2014	187
Tabel III.156	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2014	188
Tabel III.157	Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2014	189

Bagian IV	Keuangan Pemerintah	
Tabel IV.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 – 2015 (dalam Miliar Rupiah)	195
Tabel IV.2	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan Tahun 2012 – 2015 (dalam Triliun Rupiah)	197
Tabel IV.3	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan Tahun 2012 – 2015 (dalam Triliun Rupiah)	198
Tabel IV.4	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur Tahun 2012 – 2015 (dalam Triliun Rupiah)	199
Tabel IV.5	Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 – 2014	200
Tabel IV.6	Persentase (%) Pertumbuhan Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014	200
Tabel IV.7	Anggaran Lidik-Sidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun 2012 – 2015 (dalam Milyar Rupiah)	200
Tabel IV.8	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)	201
Tabel IV.9	Persentase (%) Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2013 – 2015	201
Tabel IV.10	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)	201
Tabel IV.11	Persentase (%) Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015	201
Tabel IV.12	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	201
Tabel IV.13	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	202
Tabel IV.14	Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	202
Tabel IV.15	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	202
Tabel IV.16	Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)	203
Tabel IV.17	Persentase (%) Pertumbuhan Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015	203
Tabel IV.18	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	203
Tabel IV.19	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	203
Tabel IV.20	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	204
Tabel IV.21	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota	204

	Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	
Tabel IV.22	Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)	204
Tabel IV.23	Persentase (%) Pertumbuhan Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015	204
Tabel IV.24	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	205
Tabel IV.25	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	205
Tabel IV.26	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	205
Tabel IV.27	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	206
Tabel IV.28	Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)	206
Tabel IV.29	Persentase (%) Pertumbuhan Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015	206
Tabel IV.30	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	206
Tabel IV.31	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	207
Tabel IV.32	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	207
Tabel IV.33	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015	207
Tabel IV.34	Total Dana Bagi Hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)	207
Tabel IV.35	Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015	208
Tabel IV.36	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	208
Tabel IV.37	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	208
Tabel IV.38	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	209
Tabel IV.39	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota	209

	Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	
Tabel IV.40	Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)	209
Tabel IV.41	Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)	209
Tabel IV.42	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	210
Tabel IV.43	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	210
Tabel IV.44	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	210
Tabel IV.45	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	211
Tabel IV.46	Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015	211
Tabel IV.47	Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015	211
Tabel IV.48	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	211
Tabel IV.49	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	212
Tabel IV.50	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	212
Tabel IV.51	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	212
Tabel IV.52	Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015	212
Tabel IV.53	Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015	213
Tabel IV.54	Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	213

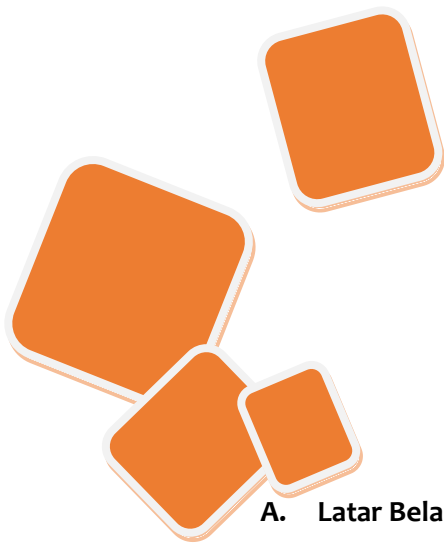
Tabel IV.55	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	213
Tabel IV.56	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	214
Tabel IV.57	Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015	214
Tabel IV.58	Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015	214
Tabel IV.59	Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015	214
Bagian V	Kinerja Aparatur / Reformasi Birokrasi	
Tabel V.1	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 - 2013	220
Tabel V.2	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2011 - 2013	220
Tabel V.3	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2011 - 2013	220
Tabel V.4	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2013	224
Tabel V.5	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2013	225
Tabel V.6	Data Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014	237
Tabel V.7	Perkembangan Evaluasi Akuntabilitas Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014	241
Tabel V.8	Data Akuntabilitas Kinerja Provinsi Tahun 2010-2014	241
Tabel V.9	Perkembangan Evaluasi Akuntabilitas Provinsi Tahun 2010-2014	242
Tabel V.10	Data Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014	242
Tabel V.11	Perkembangan Evaluasi Akuntabilitas Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014	253
Tabel V.12	Perkembangan Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Tahun 2008 - 2012	253
Tabel V.13	Perkembangan Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga Tahun 2011 - 2014	254
Tabel V.14	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Secara Nasional Tahun 2012 – 2013	254
Tabel V.15	Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2009-2014	268
Tabel V.16	Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2009	269

	- 2014	
Tabel V.17	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2010 – 2015	269
Tabel V.18	Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh KPK Tahun 2010 – 2015	269
Tabel V.19	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Dittipidkor Polri Tahun 2011 – 2015	270
Tabel V.20	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima oleh KPK Tahun 2009 – 2014	270
Tabel V.21	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Diterima oleh KPK Tahun 2012 – 2014	271
Tabel V.22	Peringkat Doing Business Negara ASEAN Tahun 2012 - 2015	271
Tabel V.23	Rangking (<i>Rank</i>) dan Nilai (<i>Value</i>) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN Tahun 2011 - 2013	271
Tabel V.24	Nilai Komponen (components) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN Tahun 2012 – 2013	272
Tabel V.25	Peringkat E-Government Negara ASEAN Tahun 2010 - 2014	272
Tabel V.26	Pemeringkatan e-Government Indonesia Tingkat Kementerian Tahun 2013-2014	272
Tabel V.27	Pemeringkatan e-Government Indonesia Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2013-2014	274
Tabel V.28	Pemeringkatan e-Government Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2013-2014	276

DAFTAR GAMBAR

Bagian I	Kelembagaan	
Gambar I.1.	Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat	19
Gambar I.2.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945	24
Gambar I.3.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945	26
Gambar I.4	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	27
Gambar I.5	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	29
Gambar I.6	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	30
Gambar I.7.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	32
Gambar I.8.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung	34
Gambar I.9.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi	34
Gambar I.10.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Sekretariat Kabinet)	36
Gambar I.11.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	37
Gambar I.12.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	38
Gambar I.13.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	39
Gambar I.14	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur	41

	dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	
Gambar I.15	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	44
Gambar I.16.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	45



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

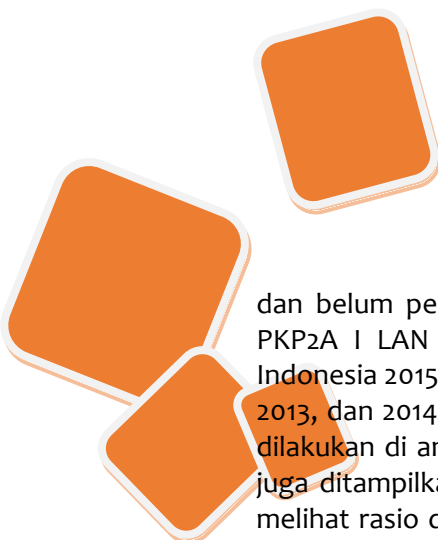
Dewasa ini data mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memproduksi dan mengkonsumsi data, baik pada tingkat individu, organisasi swasta dan masyarakat, dan juga pada organisasi pemerintah. Pada organisasi pemerintah, data mutlak diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Data diperlukan dalam proses perumusan, implementasi hingga evaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Data juga diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di seluruh sektor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan yang benar dan nyata; data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Pentingnya ketersediaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai bahan pertimbangan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketidaktersediaan data yang memadai akan menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan atau merencanakan pembangunan, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai dan hanya memboroskan sumber daya yang ada.

Melihat pentingnya data dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi ini mengemukakan dan mengharuskan dua hal, yaitu bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data; dan yang kedua data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan harus data yang valid dan akurat. Walaupun telah tersedia data untuk proses perencanaan pembangunan, tetapi data tersebut tidak valid dan akurat maka dapat terjadi kesalahan dan kegagalan dalam proses perencanaan pembangunan.

Sebagai bagian dari aspek pemerintahan, pengelolaan dan pembangunan aparatur mutlak memerlukan data yang memadai, valid dan akurat sebagai input utama dalam merumuskan berbagai kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Namun kenyataannya, belum tersedia data yang memadai, valid dan akurat mengenai aparatur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Misalnya saja saat ini terjadi perbedaan data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Data jumlah PNS ini hanya merupakan bagian dari data aparatur yang harus diperbaiki ketersediannya dan dijamin kevalidan dan keakuratannya. Masih banyak data lain mengenai aparatur yang diperlukan tetapi belum dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh instansi yang berwenang; atau bahkan data tersebut belum ada



dan belum pernah dikumpulkan sama sekali. Kondisi inilah yang melatarbelakangi PKP2A I LAN untuk melaksanakan kegiatan penyusunan buku Statistik Aparatur Indonesia 2015. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang sama pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan berbagai penyempurnaan. Penyempurnaan dan penambahan dilakukan di antaranya terhadap jenis data yang disajikan. Selain itu, dalam buku ini juga ditampilkan pengolahan data sederhana untuk membantu pembaca/pengguna melihat rasio dan/atau pertumbuhan dari data yang disajikan. Diharapkan data yang tersedia semakin memadai untuk keperluan perumusan kebijakan aparatur maupun keperluan akademis. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap cara mempublikasikan data. Selain dipublikasikan dalam bentuk buku ini, berbagai data terkait aparatur dapat dilihat di website <http://dataaparatur.bandung.lan.go.id>.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengumpulkan dan menyusun data aparatur yang tersedia pada instansi yang berwenang dan menyajikannya dalam bentuk publikasi yang mudah dimengerti dan digunakan oleh berbagai stakeholder.

C. Isi Buku

Buku ini berisikan data mengenai aparatur yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

1. Bagian I berisikan data kelembagaan
2. Bagian II berisikan data ketatalaksanaan
3. Bagian III berisikan data sumber daya manusia aparatur
4. Bagian IV berisikan data keuangan pemerintah
5. Bagian V berisikan data kinerja aparatur/birokrasi

D. Kegunaan dan Manfaat

Adapun kegunaan dari buku ini yang utama adalah sebagai bahan bagi perumusan kebijakan perencanaan makro (RPJM) bidang aparatur oleh Bappenas. Selain itu, buku Statistik Aparatur 2015 ini juga dapat digunakan oleh berbagai *stakeholder* yang memerlukan data untuk proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur serta untuk kebutuhan data kajian/penelitian terkait aparatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data di bidang aparatur menggunakan teknik Studi pustaka (*desk research*) yang dilakukan di beberapa lembaga pemerintah. Diantaranya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,



Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Lembaga Transparency International, UNDP, UNPAN, BPJS Kesehatan, dan PT Taspen.

Data yang ada pada instansi-instansi tersebut dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Data kelembagaan yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Data ketatalaksanaan yang ditampilkan dalam buku ini bersumber dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah serta berdasarkan database internal.
3. Data sumber daya manusia aparatur yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, BKKBN, LAN, PT Askes, dan PT Taspen. Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah serta berdasarkan database internal.
4. Data keuangan pemerintah yang ditampilkan dalam buku ini bersumber dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah serta berdasarkan database internal.
5. Data Kinerja Aparatur/Birokrasi yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kemendagri yang mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah dan berdasarkan database internal. Sementara data dari Lembaga Transparency International, UNDP, dan UNPAD yang di akses melalui jaringan internet merupakan laporan hasil survey.

BAGIAN I

KELEMBAGAAN

Bab ini menyajikan data kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan pemerintah, struktur organisasi dan ketersediaan *assessment center* di lembaga pemerintah. Kelembagaan pemerintah dibagi ke dalam dua jenis data yaitu data kelembagaan pemerintah pusat dan data kelembagaan pemerintah daerah. Struktur organisasi dibagi ke dalam empat jenis data yaitu data pemetaan titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga, jumlah jabatan struktural (eselon) di lembaga Negara, nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan instansi pembinaanya, serta nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan kementerian/lembaga. Sedangkan ketersediaan *assessment center* di lembaga pemerintah hanya terdiri dari satu jenis data yaitu nomenklatur lembaga pusat/pemerintah daerah yang telah memiliki *asesment center*.

A. Kelembagaan Pemerintah

Data mengenai kelembagaan pemerintah pusat yang disajikan dalam buku ini adalah data jumlah dan nomenklatur lembaga pemerintah pusat tahun 2013 dan 2015. Pada tahun 2015 ini, terdapat beberapa perubahan jumlah dan nomenklatur lembaga pemerintah pusat yang dilakukan oleh Presiden terpilih. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenpan dan RB, pada tahun 2013 tercatat ada sebanyak 17 kementerian yang memiliki Wakil Menteri, namun pada tahun 2015 mengalami pengurangan menjadi 2 kementerian saja. Jumlah kesekretariatan lembaga Negara pemegang cabang kekuasaan Negara dan lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri juga mengalami pengurangan sebanyak satu lembaga dari tahun sebelumnya. Untuk lembaga non struktural, data yang disajikan pada buku ini masih data tahun 2012 dan 2013. Karena belum diperoleh data terbaru dari Kemenpan dan RB.

Dari segi nomenklatur lembaga, ada beberapa nomenklatur kementerian yang berubah di tahun 2015. Sedangkan untuk nomenklatur lembaga lainnya belum ada perubahan sampai saat buku ini disusun. Untuk lebih lengkapnya, data mengenai nomenklatur lembaga negara dapat dilihat pada tabel I.1 sampai tabel I.9, dan pada tabel I.10 untuk data rekapitulasi sementara jumlah lembaga Negara tahun 2013 dan 2015.

Data mengenai kelembagaan pemerintah daerah yang disajikan dalam buku ini adalah data jumlah pemerintah daerah propinsi kabupaten/kota antara tahun 2010 sampai 2014. Data mengenai jumlah propinsi/kabupaten/ dan kota tersedia pada tabel I.11 dan tabel I.12. Buku ini juga menyajikan data daerah otonom baru. Penambahan



jumlah propinsi dan kabupaten disebabkan dilaksanakannya kembali kebijakan pemekaran daerah. Pada periode tahun 2012-2014, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 19 daerah pemekaran baru, yaitu 1 propinsi, 17 kabupaten, dan 1 kota. Data selengkapnya mengenai jumlah daerah otonom baru dapat dilihat pada tabel I.13.

B. Struktur Organisasi (struktur dan jabatan)

Data yang disajikan dalam bagian ini berupaya untuk menggambarkan struktur organisasi lembaga pemerintah pusat sehingga dapat diketahui titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga dan instansi pusat, jumlah dan nomenklatur jabatan fungsional tertentu, dan nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan instansi pusat. Sementara untuk data mengenai struktur organisasi pemerintah daerah masih belum tersedia dan perlu dibangun. Adapun data pada tabel I.14 sampai tabel I.31 dan gambar I.2 sampai gambar I.16 mengenai titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga belum diperbaharui oleh Kementerian PAN dan RB. Data mengenai jumlah jabatan struktural yang ada di lingkungan instansi pusat dapat dilihat pada tabel I.32 sampai tabel I.38. Pada tahun 2015, jumlah jabatan struktural di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat masih sama dengan data pada tahun 2014. Data di dalam publikasi ini masih belum mengikuti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut belum dapat diberlakukan optimal karena masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah yang lebih teknis.

Data mengenai jumlah, nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan instansi pembina dapat dilihat pada tabel I.39 dan tabel I.40. Dan data mengenai jenis dan nomenklatur jabatan fungsional umum yang ada di lingkungan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel I.41. Data yang disajikan masih sama dengan data pada buku sebelumnya karena Kementerian PAN dan RB belum memberikan data terbaru.

C. Ketersediaan Assessment Center di Lembaga Pemerintah

Dewasa ini pengembangan *assessment center* / *assessment* kompetensi aparatur dirasa sangat penting untuk memperoleh aparatur publik yang berkualitas. Oleh karena itu, lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia berupaya untuk membangun dan mengembangkan *assessment center*. Pada tahun 2015 tercatat 18 instansi pemerintah yang memiliki *assessment center*. Data ini diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina. Melihat pentingnya pengembangan *assessment center* tersebut, seharusnya kebijakan ini memperoleh perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun data jumlah dan nomenklatur instansi pusat/pemerintah daerah yang telah memiliki *assessment center* dapat dilihat pada tabel I.42.



Tabel I.1 Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Tahun 2013 dan 2015

No	Lembaga Negara Tahun 2013	Lembaga Negara Tahun 2015	Cabang Kekuasaan Negara yang Dipegang	Pasal dalam UUD 1945
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Mengubah dan menetapkan UUD	Pasal 3
2.	Presiden	Presiden	Memegang kekuasaan pemerintahan	Pasal 4
3.		Wakil Presiden	Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya	Pasal 4
4.	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat beserta Alat Kelengkapan DPR	Membentuk Undang-Undang	Pasal 20
5.	Dewan Perwakilan Daerah	Dewan Perwakilan Daerah	Mengajukan, membahas, dan menimbang rancangan Undang-Undang dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang yang sesuai dengan kewenangannya	Pasal 22D
6.		Komisi Pemilihan Umum*	Menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu)	Pasal 22E
7.		Bank Sentral*	Memegang otoritas dibidang moneter, menjalankan ekonomi pemerintahan	Pasal 23D
8.	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara	Pasal 23E
9.	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU	Pasal 24A
10.		Komisi Yudisial	Mengusulkan pengangkatan hakim agung	Pasal 24B
11.	Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu	Pasal 24 C
	Jumlah Tahun 2013 = 7 Lembaga	Jumlah Tahun 2015 = 11 Lembaga		

Sumber : Buku Statistik Aparatur Indonesia 2014 (data tahun 2013), dan Kementerian PAN dan RB 2015 (data tahun 2015)

Keterangan :

* Eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945 dan ketentuan lebih lanjut di atur dengan UU





Tabel I.2 Nomenklatur Kementerian Tahun 2013 dan 2015

No.	Jenis Kementerian	2013	2015
1.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang secara tegas di sebutkan dalam UUD 1945	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan	a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan
2.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945	a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral d. Kementerian Perindustrian e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Pertanian g. Kementerian Kehutanan h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi k. Kementerian Pekerjaan Umum l. Kementerian Kesehatan m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan n. Kementerian Sosial o. Kementerian Agama p. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif q. Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral d. Kementerian Perindustrian e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Pertanian g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan j. Kementerian Ketenagakerjaan k. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat l. Kementerian Kesehatan m. Kementerian Agraria dan Tata Ruang n. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan o. Kementerian Sosial p. Kementerian Agama q. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif r. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah	a. Kementerian Riset dan Teknologi b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Kementerian Lingkungan Hidup d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Lanjutan Tabel I.2

No.	Jenis Kementerian	2013	2015
		e. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara i. Kementerian Perumahan Rakyat j. Kementerian Pemuda dan Olahraga k. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian m. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat n. Kementerian Sekretariat Negara	d. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi e. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi f. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara h. Kementerian Pemuda dan Olahraga i. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan j. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian k. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman l. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan m. Kementerian Sekretariat Negara
		Jumlah Tahun 2013 = 34 Kementerian	Jumlah Tahun 2015 = 34 Kementerian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel I.3 Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013 dan 2015

No	Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013	Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2015
1.	Kementerian Pertanian	Kementerian Keuangan
2.	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Luar Negeri
3.	Kementerian Perhubungan	
4.	Kementerian Perindustrian	
5.	Kementerian Perdagangan	
6.	Kementerian Keuangan	
7.	Kementerian Pertahanan	



Lanjutan Tabel I.3

No	Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013	Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2015
8.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
9.	Kementerian Kesehatan	
10.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	
11.	Kementerian BUMN	
12.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	
13.	Kementerian Luar Negeri	
14.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	
15.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
16.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
17.	Kementerian Agama	
Jumlah 17 Kementerian		Jumlah 2 Kementerian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013 dan <http://setkab.go.id>, di akses tanggal 29 September 2015

Tabel I.4 Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Tahun 2013 dan 2015

No	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2013	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2015
1	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	Arsip Nasional Republik Indonesia
3	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara
4	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik
7	Badan Standardisasi Nasional	Badan Standardisasi Nasional
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Badan Tenaga Nuklir Nasional
10	Lembaga Sandi Negara	Lembaga Sandi Negara
11	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
12	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
13	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
14	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
15	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
16	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Badan Koordinasi Penanaman Modal
17	Badan Pertahanan Nasional	Badan Pertahanan Nasional
18	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
19	Lembaga Ketahanan Nasional	Lembaga Ketahanan Nasional





Lanjutan Tabel I.4

No	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2013	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2015
20	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
21	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
23	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24	Badan SAR Nasional	Badan SAR Nasional
25	Badan Narkotika Nasional	Badan Narkotika Nasional
26	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
27	Badan Informasi Geospasial	Badan Informasi Geospasial
	Jumlah Tahun 2013 = 27 LPNK	Jumlah Tahun 2015 = 27 LPNK

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel I.5 Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2013 dan 2015

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2013	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2015
1	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4	Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
5	Sekretariat Mahkamah Agung	a. Kesekretariatan Mahkamah Agung b. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung c. Sekretariat Panitera Mahkamah Agung
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
	Jumlah Tahun 2013 = 6 Lembaga	Jumlah Tahun 2015 = 6 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel I.6 Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Tahun 2013 dan 2015

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2013	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2015
1.	Sekretariat Komisi Yudisial	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
2.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	-
3.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi





Lanjutan Tabel I.6

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2013	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2015
4.	Sekretariat Ombudsman Republik Indonesia	Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
	Jumlah Tahun 2013 = 4 Lembaga	Jumlah Tahun 2015 = 3 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel I.7 Nomenklatur Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri Tahun 2013 dan 2015

No	Nomenklatur Lembaga Tahun 2013	Nomenklatur Lembaga Tahun 2015
1.	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.	Tentara Nasional Republik Indonesia	Tentara Nasional Indonesia
4.	Sekretariat Kabinet	Sekretariat Kabinet
5.	Badan Intelegen Negara	-
	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga	Jumlah Tahun 2015 = 4 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel I.8 Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013 dan 2015

No	Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013	Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2015
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
	Jumlah Tahun 2013 = 2 Lembaga	Jumlah Tahun 2015 = 2 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel I.9 Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
KOMISI		
1.	Komisi Hukum Nasional	Komisi Hukum Nasional
2.	Komisi Kepolisian Nasional	Komisi Kepolisian Nasional
3.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
6.	Komisi Kejaksaan	Komisi Kejaksaan
7.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
8.	Komisi Nasional Lanjut Usia	Komisi Nasional Lanjut Usia
9.	Komisi Penyiaran Indonesia	-
10.	Komisi Banding Merek	Komisi Banding Merek



Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
11.	Komisi Banding Paten	Komisi Banding Paten
12.	Komisi Informasi Pusat	Komisi Informasi Pusat
13.	Komisi Pengawas Haji Indonesia	Komisi Pengawas Haji Indonesia
14.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
15.	Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum
16.	Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi	-
	Jumlah Tahun 2012 = 16 Komisi	Jumlah Tahun 2013 = 14 Komisi
DEWAN		
1.	Dewan Buku Nasional	Dewan Buku Nasional
2.	Dewan Gula Nasional	Dewan Gula Nasional
3.	Dewan Riset Nasional	Dewan Riset Nasional
4.	Dewan Koperasi Indonesia	Dewan Koperasi Indonesia
5.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
6.	Dewan Kelautan Indonesia	Dewan Kelautan Indonesia
7.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
8.	Dewan Pengupahan Nasional	Dewan Pengupahan Nasional
9.	Dewan Ketahanan Pangan	Dewan Ketahanan Pangan
10.	Dewan Energi Nasional	Dewan Energi Nasional
11.	Dewan Pers	Dewan Pers
12.	Dewan Pertimbangan Presiden	Dewan Pertimbangan Presiden
13.	Dewan Sumber Daya Air Nasional	Dewan Sumber Daya Air Nasional
14.	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)
15.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
16.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
17.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
18.	Dewan Ketahanan Nasional	Dewan Ketahanan Nasional
19.	Dewan Nasional Perubahan Iklim	Dewan Nasional Perubahan Iklim
20.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	Dewan Jaminan Sosial Nasional
21.	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
22.	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
23.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
	Jumlah Tahun 2012 = 23 Dewan	Jumlah Tahun 2013 = 23 Dewan
BADAN		
1.	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
2.	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional





Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
3.	Badan Pendukung Pengembangan System Penyediaan Air Minum	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
5.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
6.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
8.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum
9.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
10.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
11.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12.	Badan Amil Zakat Nasional	Badan Amil Zakat Nasional
13.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	Badan Koordinasi Keamanan Laut
14.	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
15.	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
16.	Badan Olahraga Professional	Badan Olahraga Professional
17.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
18.	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
19.	Badan Pertimbangan Kepegawaian	Badan Pertimbangan Kepegawaian
20.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
21.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
22.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
23.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
24.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
25.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
26.	Badan Benih Nasional	Badan Benih Nasional
	Jumlah Tahun 2012 = 26 Badan	Jumlah Tahun 2013 = 26 Badan
KOMITE		
1.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
2.	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak



Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
3.	Komite Akreditasi Nasional	Komite Akreditasi Nasional
4.	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
5.	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
6.	Komite Standar Akuntansi Pemerintah	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
7.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
8.	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
9.	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (<i>Avian Influenza</i>) dan Kesiapsiagaan Menghadapi <i>Pandemic Influenza</i>	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (<i>Avian Influenza</i>) dan Kesiapsiagaan Menghadapi <i>Pandemic Influenza</i>
10.	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
11.	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Komite Olahraga Nasional Indonesia
12.	Komite Inovasi Nasional	Komite Inovasi Nasional
13.	Komite Anti Dumping Indonesia	Komite Anti Dumping Indonesia
14.	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
	Jumlah Tahun 2012 = 14 Komite	Jumlah Tahun 2013 = 14 Komite
LEMBAGA		
1.	Lembaga Sensor Film	Lembaga Sensor Film
2.	Lembaga Kerja Sama Tripartit	Lembaga Kerja Sama Tripartit
3.	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
4.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
5.	-	Lembaga Produktivitas Nasional
	Jumlah Tahun 2012 = 4 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga
TIM		
1.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2.	Jumlah Tahun 2012 = 1 Tim	Jumlah Tahun 2013 = 1 Tim
NOMENKLATUR LAIN		
1.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2.	Ombudsman Republik Indonesia	-
3.	Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
4.	Konsil Kedokteran Indonesia	Konsil Kedokteran Indonesia





Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
5.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
6.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
	Jumlah Tahun 2012 = 6 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga
	Jumlah Total LNS Tahun 2012 = 90 LNS	Jumlah Total LNS Tahun 2013 = 88 LNS

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Catatan :

1. Komisi Kepegawaian Negara sebagai amanat UU Nomor 43 Tahun 1999 pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sampai saat ini belum dibentuk.
2. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai saat ini juga masih belum dibentuk.

Tabel I.10 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Negara Tahun 2013 dan 2015

No.	Jenis Lembaga Negara	2013	2015
1.	Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang Diatur dalam UUD 1945	7	11
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang*	4	-
3.	Kementerian	34	34
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	27	27
5.	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara	6	6
6.	Kesekretariatan Lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945	4	3
7.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	5	4
8.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2	2
9.	Lembaga Non Struktural*		
	a. Komisi	14	-
	b. Dewan	23	-
	c. Badan	26	-
	d. Komite	14	-
	e. Lembaga	5	-
	f. Tim	1	-
	g. Nomenklatur lain	5	-
	Total Lembaga	177	87

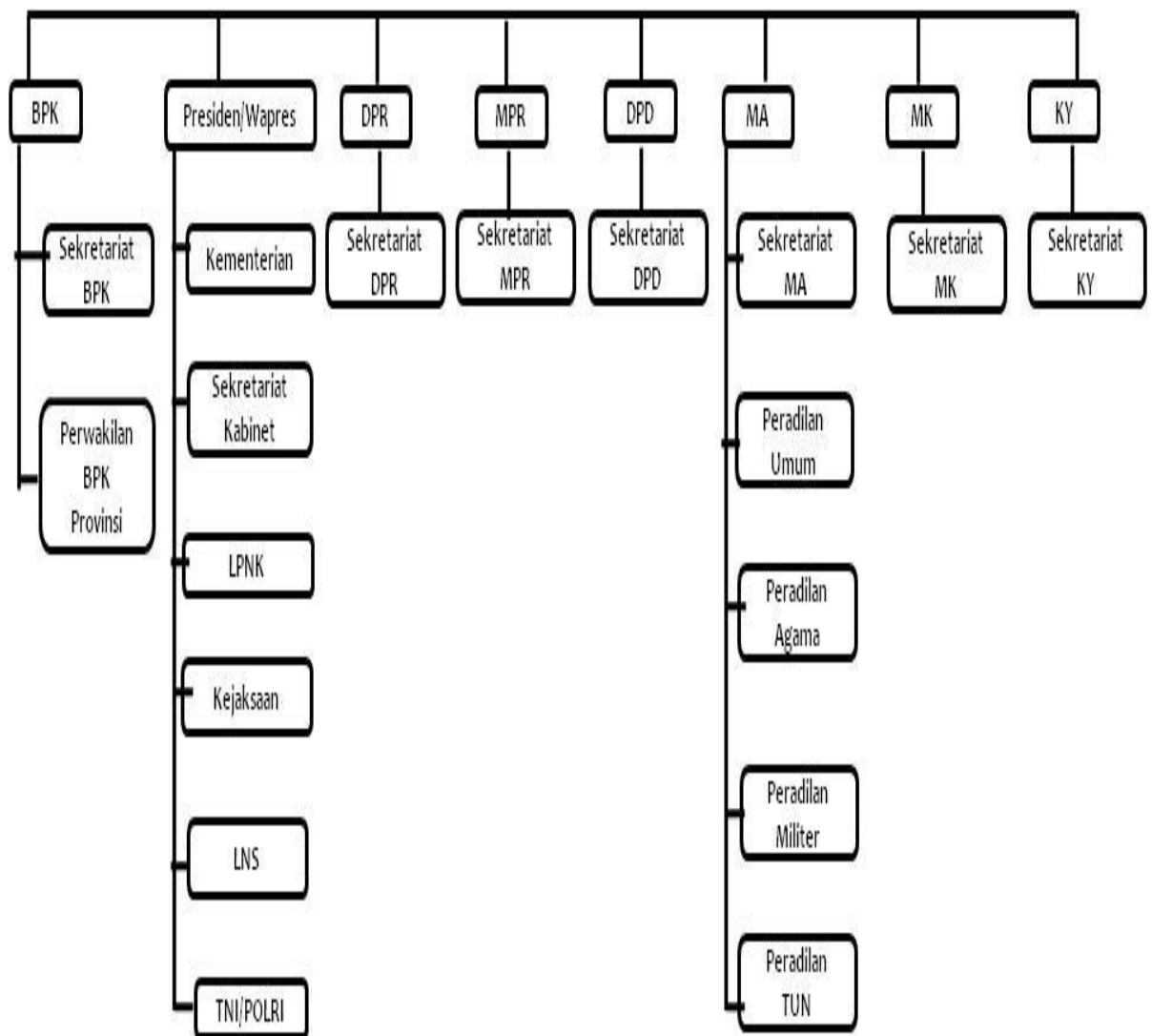
Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2015

Keterangan :

* Data tahun 2015 belum tersedia



Gambar I.1 Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.11 Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2010 - 2014

No.	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Aceh	18	18	18	18	18
2.	Sumatera Utara	25	25	25	25	25
3.	Sumatera Barat	12	12	12	12	12
4.	Riau	10	10	10	10	10
5.	Kepulauan Riau	5	5	5	5	5
6.	Jambi	9	9	9	9	9
7.	Sumatera Selatan	11	11	11	12	13
8.	Kepulauan Bangka Belitung	6	6	6	6	6
9.	Bengkulu	9	9	9	9	9
10.	Lampung	12	12	12	13	13
11.	DKI Jakarta	1	1	1	1	1
12.	Jawa Barat	17	17	17	18	18
13.	Banten	4	4	4	4	4
14.	Jawa Tengah	29	29	29	29	29
15.	DI Yogyakarta	4	4	4	4	4
16.	Jawa Timur	29	29	29	29	29
17.	Bali	8	8	8	8	8
18.	Nusa Tenggara Barat	8	8	8	8	8
19.	Nusa Tenggara Timur	20	20	20	21	21
20.	Kalimantan Barat	12	12	12	12	12
21.	Kalimantan Tengah	13	13	13	13	13
22.	Kalimantan Selatan	11	11	11	11	11
23.	Kalimantan Timur	10	10	10	7	7
24.	Kalimantan Utara				4	4
25.	Sulawesi Utara	11	11	11	11	11
26.	Gorontalo	5	5	5	5	5
27.	Sulawesi Tengah	10	10	10	11	12
28.	Sulawesi Selatan	21	21	21	21	21
29.	Sulawesi Barat	5	5	5	6	6
30.	Sulawesi Tenggara	10	10	10	11	15
31.	Maluku	9	9	9	9	9
32.	Maluku Utara	7	7	7	8	8
33.	Papua	28	28	28	28	28
34.	Papua Barat	10	10	10	12	12
Indonesia		399	399	399	410	416

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2015





Tabel I.12 Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2010 - 2014

No.	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Aceh	5	5	5	5	5
2.	Sumatera Utara	8	8	8	8	8
3.	Sumatera Barat	7	7	7	7	7
4.	Riau	2	2	2	2	2
5.	Kepulauan Riau	2	2	2	2	2
6.	Jambi	2	2	2	2	2
7.	Sumatera Selatan	4	4	4	4	4
8.	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
9.	Bengkulu	1	1	1	1	1
10.	Lampung	2	2	2	2	2
11.	DKI Jakarta	5	5	5	5	5
12.	Jawa Barat	9	9	9	9	9
13.	Banten	4	4	4	4	4
14.	Jawa Tengah	6	6	6	6	6
15.	DI Yogyakarta	1	1	1	1	1
16.	Jawa Timur	9	9	9	9	9
17.	Bali	1	1	1	1	1
18.	Nusa Tenggara Barat	2	2	2	2	2
19.	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1
20.	Kalimantan Barat	2	2	2	2	2
21.	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
22.	Kalimantan Selatan	2	2	2	2	2
23.	Kalimantan Timur	4	4	4	3	3
24.	Kalimantan Utara				1	1
25.	Sulawesi Utara	4	4	4	4	4
26.	Gorontalo	1	1	1	1	1
27.	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
28.	Sulawesi Selatan	3	3	3	3	3
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Tenggara	2	2	2	2	2
31.	Maluku	2	2	2	2	2
32.	Maluku Utara	2	2	2	2	2
33.	Papua	1	1	1	1	1
34.	Papua Barat	1	1	1	1	1
Indonesia		98	98	98	98	98

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2015





Tabel I.13 Daerah Otonom Baru Tahun 1999 - 2014

No.	Provinsi	Jumlah Daerah Otonom Baru 1999 - 2008				Jumlah Daerah Otonom Baru 2012 - 2014			
		Prov.	Kab.	Kota	Total	Prov.	Kab.	Kota	Total
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	10	3	13	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	12	2	14	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	4	1	5	0	0	0	0
4	Riau	0	6	1	7	0	0	0	0
5	Jambi	0	5	1	5	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	5	3	8	0	2	0	2
7	Bengkulu	0	6	0	6	0	0	0	0
8	Lampung	0	6	1	7	0	1	0	1
9	Kep. Bangka Belitung	1	4	0	5	0	0	0	0
10	Kep. Riau	1	4	2	7	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	1	4	5	0	1	0	1
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Banten	1	0	3	4	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	1	1	0	0	0	0
16	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	2	1	3	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	8	0	8	0	1	0	1
20	Kalimantan Barat	0	6	1	7	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	8	0	8	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	1	3	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	6	1	7	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara					1	4	1	6
25	Sulawesi Utara	0	8	0	8	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	6	0	6	0	2	0	2
27	Sulawesi Selatan	0	3	1	4	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	6	1	7	0	5	0	5
29	Gorontalo	1	4	0	5	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	2	0	3	0	1	0	1
31	Maluku	0	7	1	8	0	0	0	0
32	Maluku Utara	1	5	2	8	0	1	0	1
33	Papua	0	22	0	22	0	0	0	0
34	Papua Barat	1	7	1	9	0	2	0	2
Total		7	156	32	203	1	17	1	19

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2015

Catatan : Tahun 2009 sampai 2011 diberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dalam RPJM 2010 – 2014 tidak ada pembentukan DOB usulan pemerintah (Moratorium).





Tabel I.14 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945

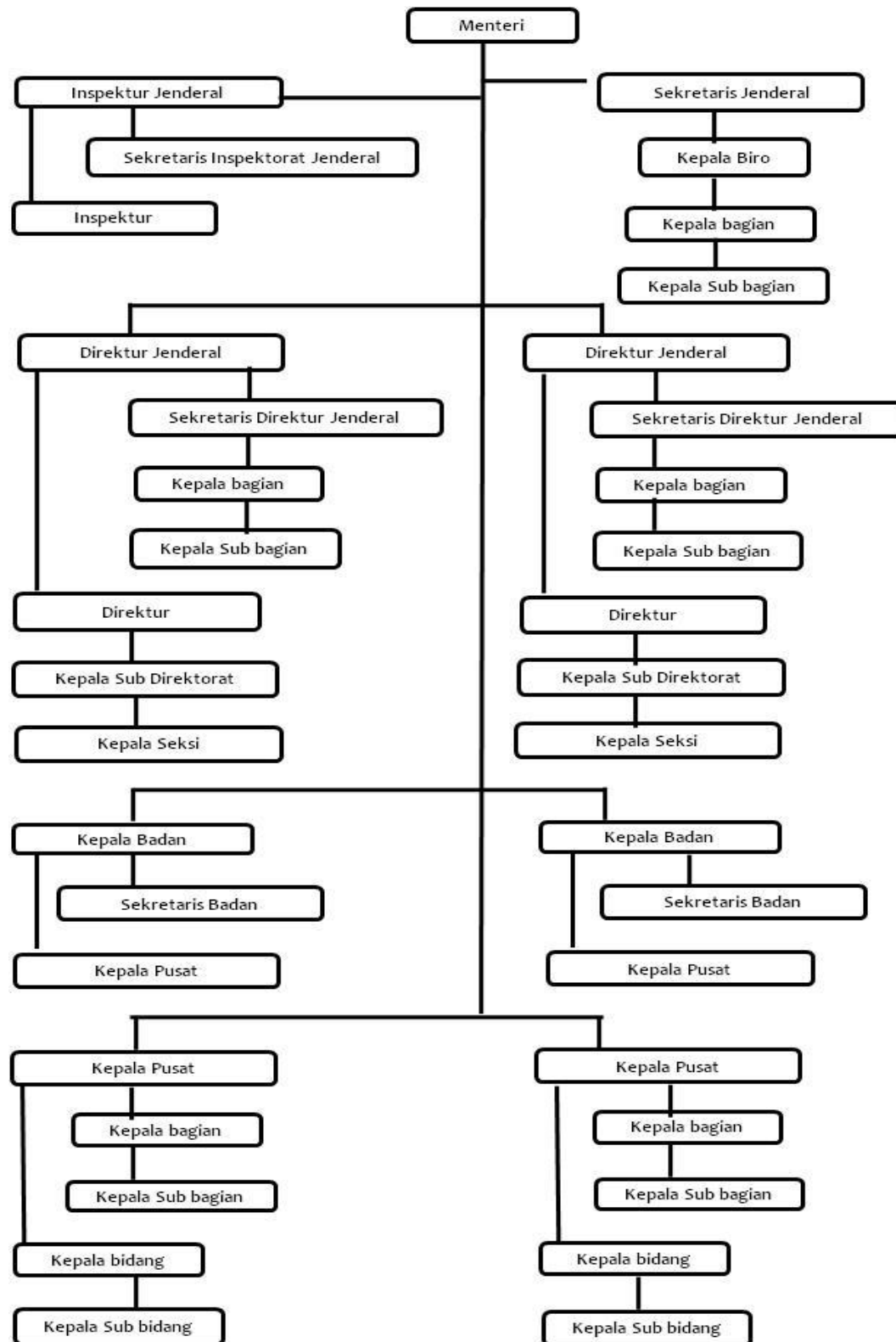
No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektorat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Gambar 1.2 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel 1.15 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945

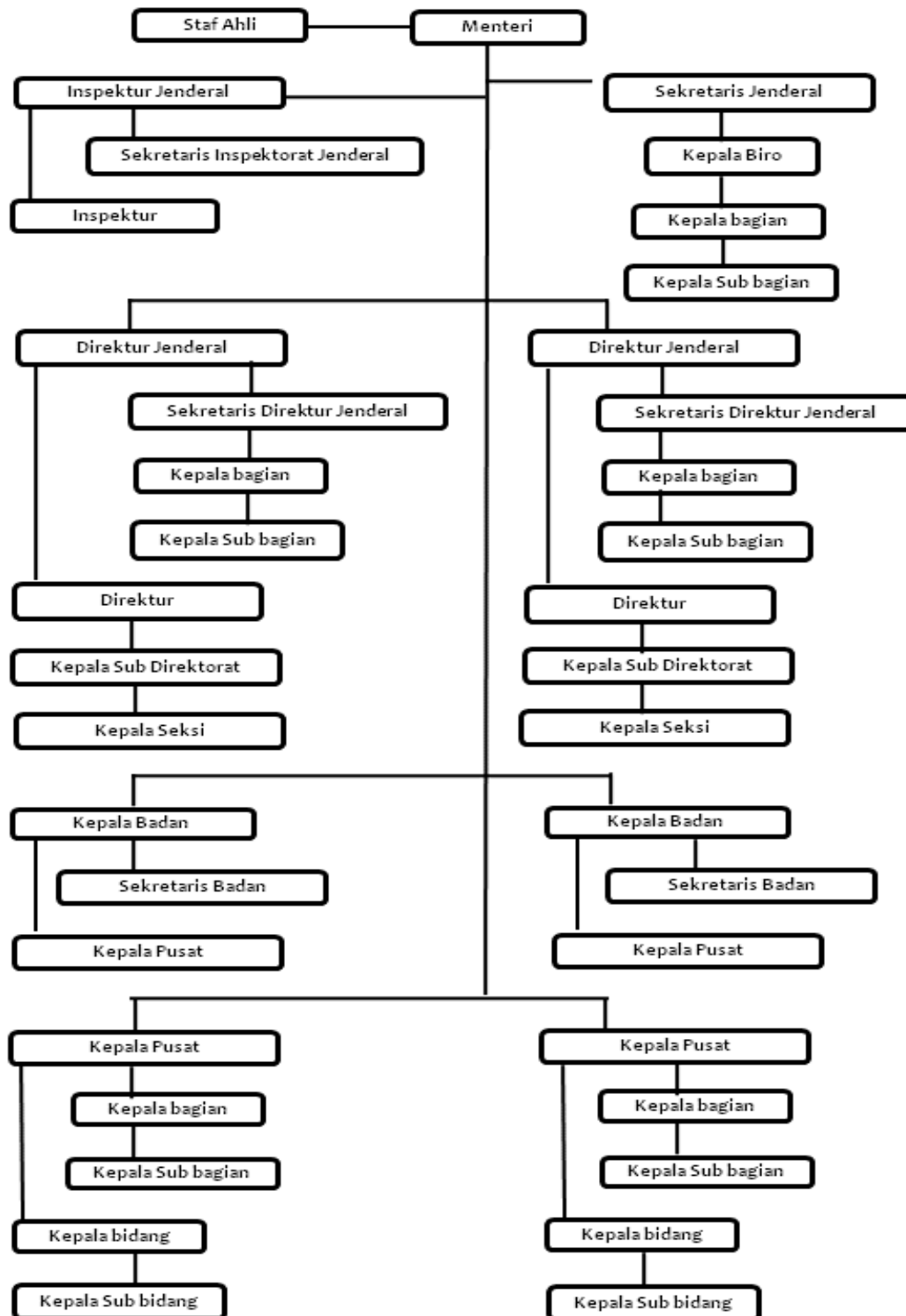
No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal e. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Gambar 1.3 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945



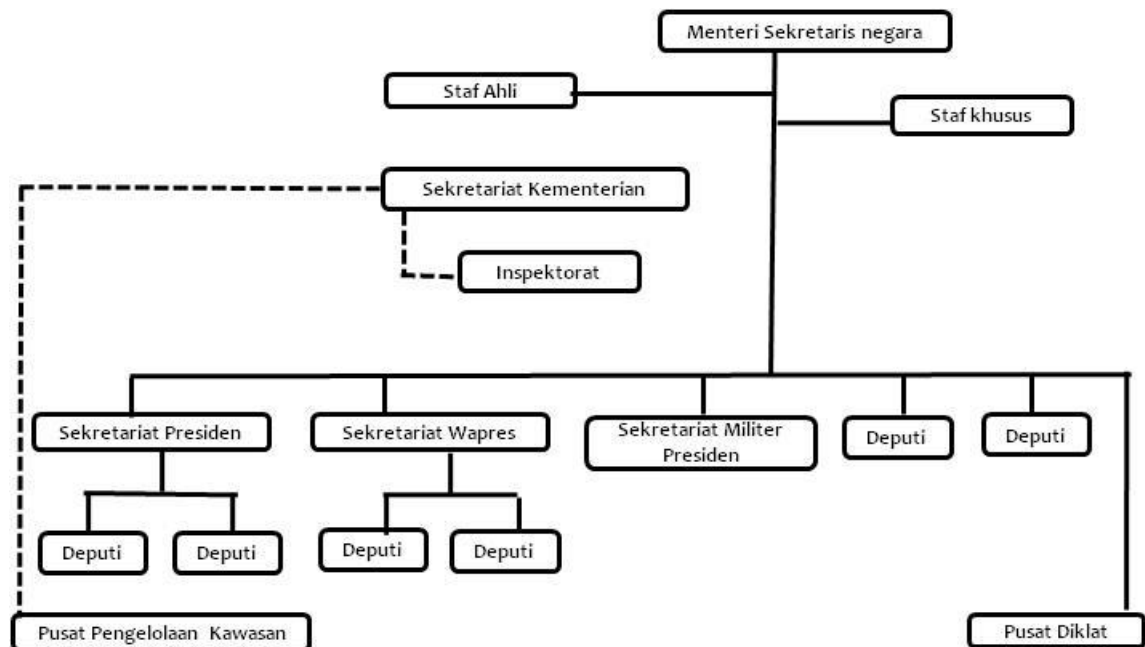
Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel 1.16 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan b. Sekretaris Wakil Presiden c. Sekretaris Militer d. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara e. Deputi di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Negara f. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala istana d. Kepala unit
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.4 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



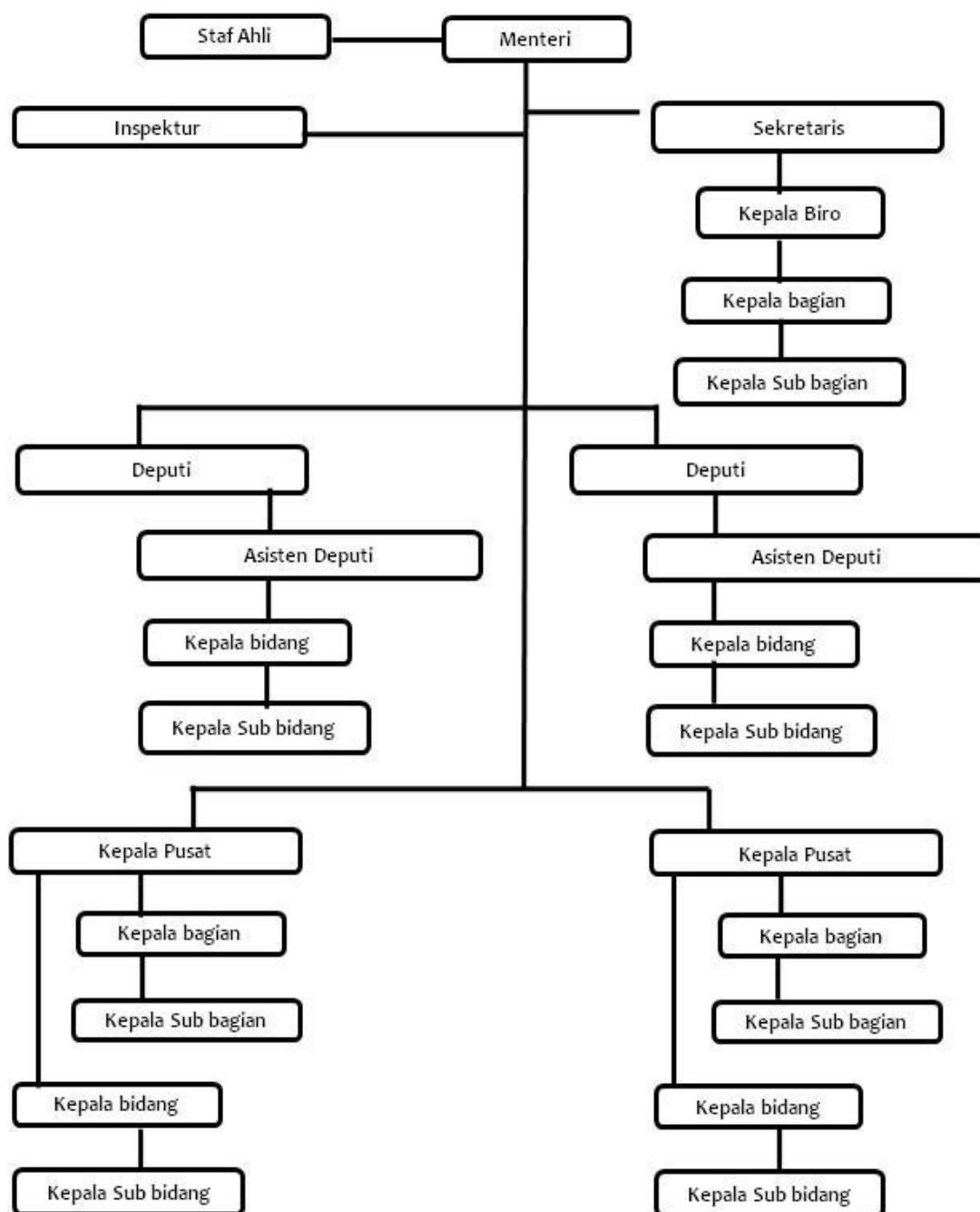
Tabel 1.17 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Kementerian b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Kepala pusat c. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian e. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar 1.5 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

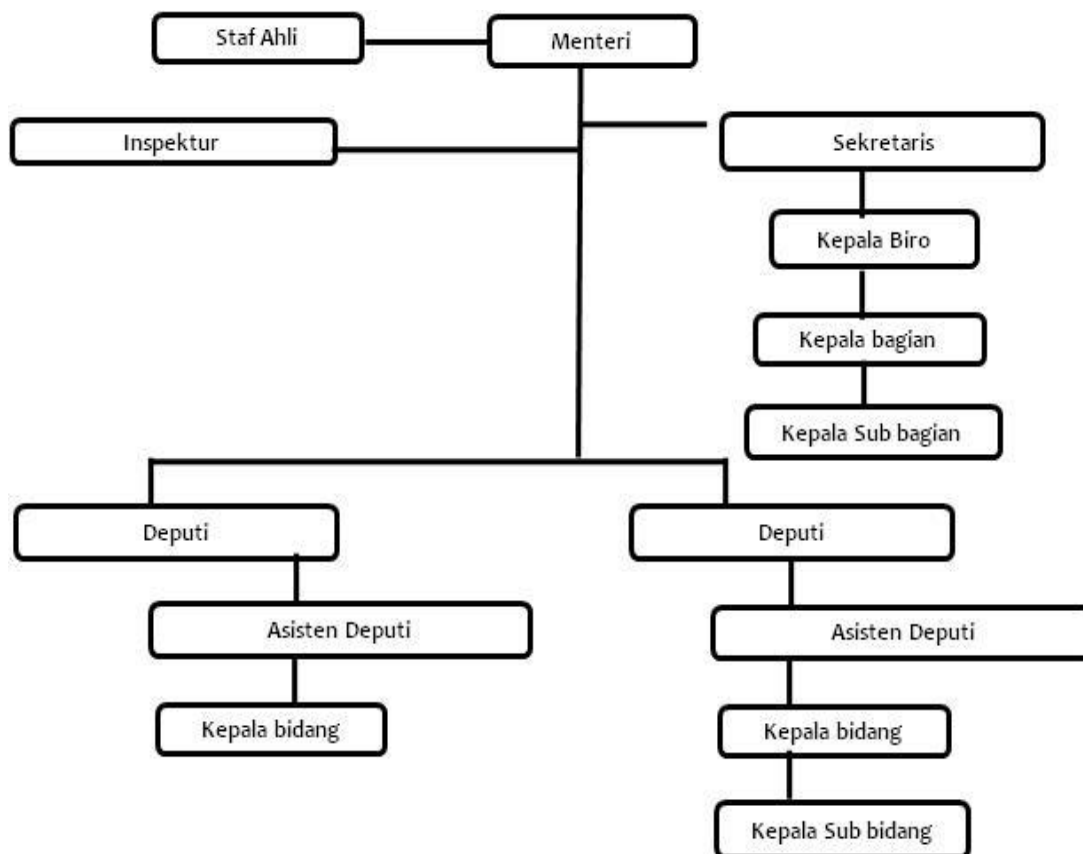


Tabel 1.18 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Kementerian Koordinator b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.6 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.19 Titeltur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian

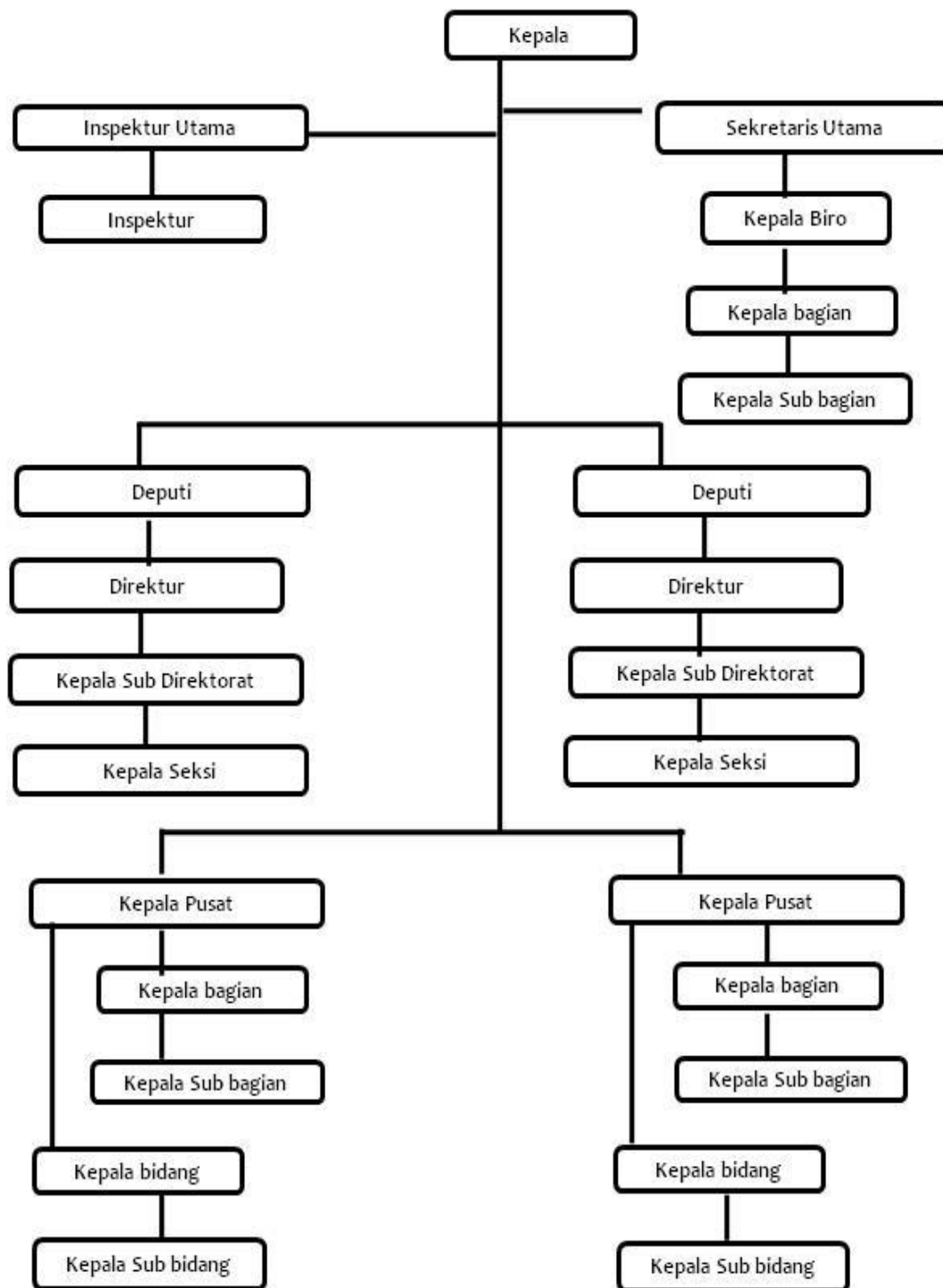
No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Kepala b. Gubernur (Lemhanas) c. Wakil gubernur (Lemhanas) d. Deputi e. Inspektur utama f. Sekretaris utama
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Direktur c. Kepala pusat d. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Gambar 1.7 Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.20 Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kejaksaan Agung)

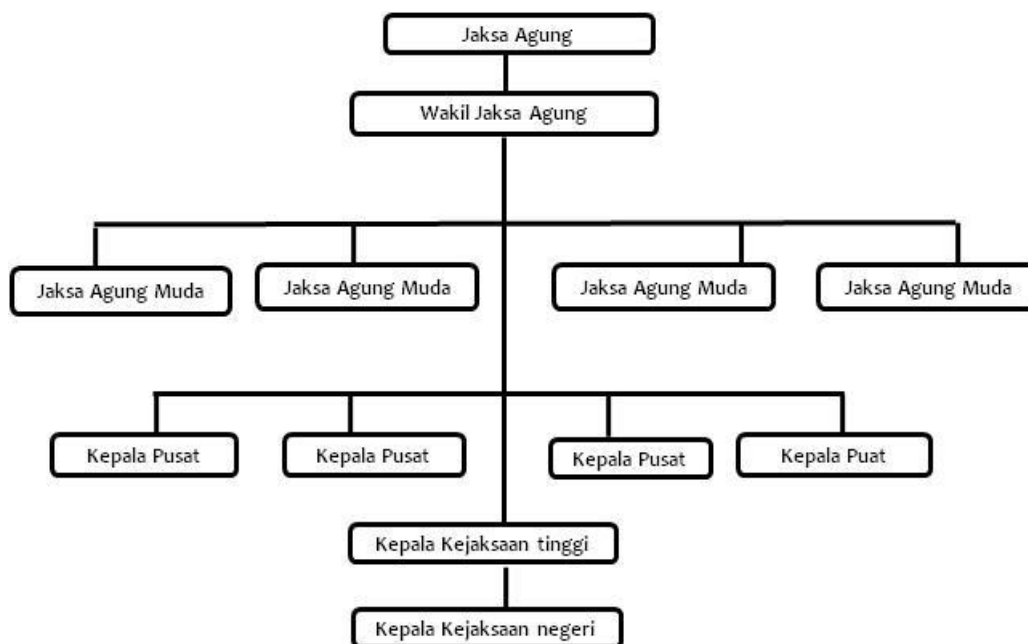
No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Wakil jaksa agung b. Jaksa agung muda c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Sekretaris jaksa agung muda b. Kepala biro c. Direktur d. Kepala Pusat e. Inspektur Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan tinggi b. Wakil kepala kejaksaan tinggi
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat d. Inspektur pembantu Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan negeri tipe a b. Kepala bagian pada kejaksaan tinggi c. Asisten pada kejaksaan tinggi d. Kepala kejaksaan negeri tipe b Di lingkungan kejaksaan tinggi, dibentuk juga jabatan tenaga pengkaji
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang d. Pemeriksa Instansi vertikal: a. Kepala cabang kejaksaan negeri b. Kepala subbagian c. Kepala seksi
5.	Eselon V	Instansi vertikal: a. Kepala urusan b. Kepala subseksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



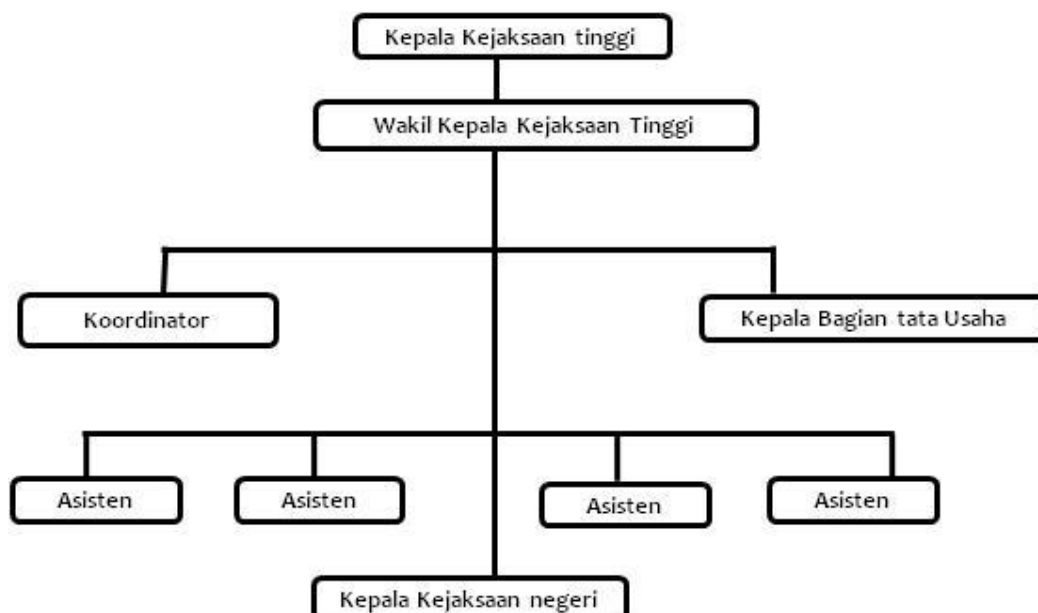


Gambar I.8 Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.9 Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Tabel I.21 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kepolisian RI)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (wakapolri); b. Inspektur (irwasum) ; c. Kepala badan; d. Deputi kapolri; e. Kepala badan; f. Wakil inspektur; g. Kepala sekolah staf dan pimpinan kepolisian; h. Gubernur (PTIK dan AKPOL); i. Kepala lembaga (Lemdiklat); j. Kepala divisi; k. Wakil kepala badan; l. Kepala korps (Korbrimob).
2.	Eselon II	a. Kapolda ; b. Wakil kepala divisi; c. Kepala biro; d. Kepala pusat ; e. Direktur; f. Insvektur wilayah; g. Kepala sekolah (Selapa dan secapa); h. Kepala rumah sakit polri; i. Kepala detasemen (Densus 88); j. Kepala bagian; k. Instruktur bidang.
3.	Eselon III	a. Kepala bagian; b. Kepala subdirektorat; c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian; b. Kepala seksi; c. Kepala subbidang
5.	Eselon V	a. Kepala urusan; b. Kepala Subseksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



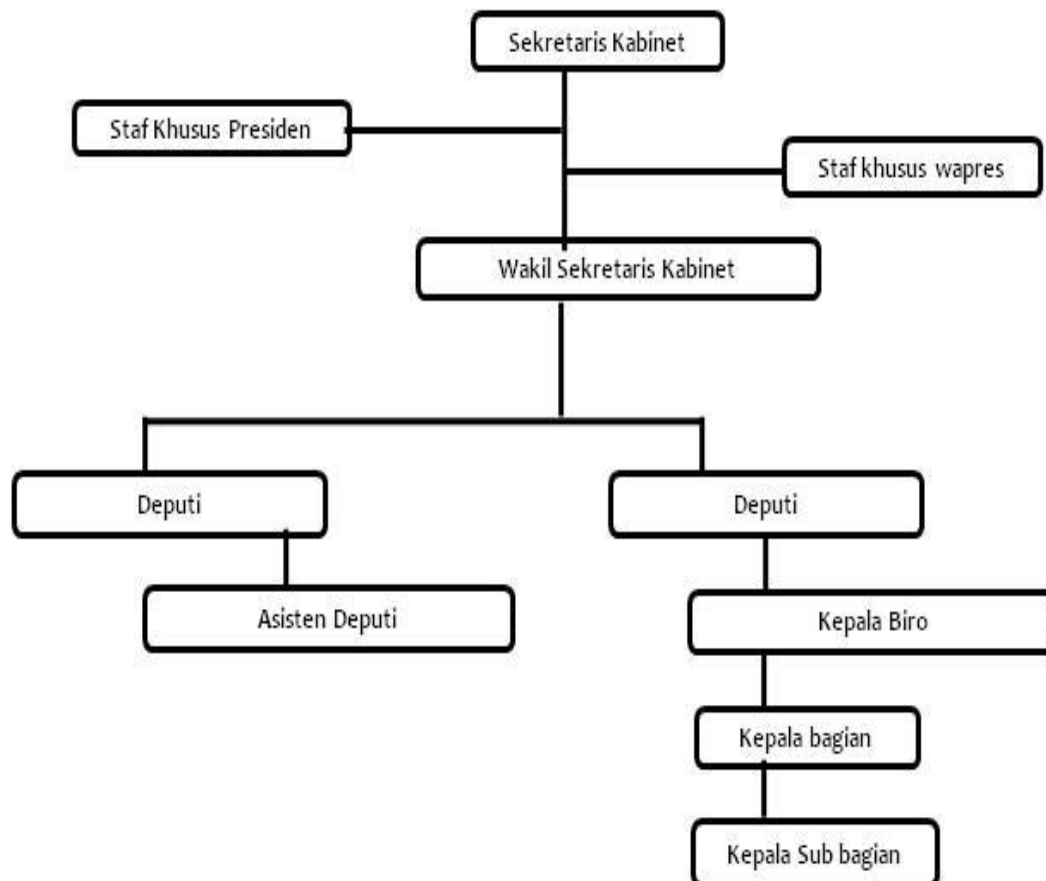


Tabel I.22 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Wakil Sekretaris Kabinet; b. Deputi ; c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro
3.	Eselon III	a. Kepala bagian
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian.

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.10 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

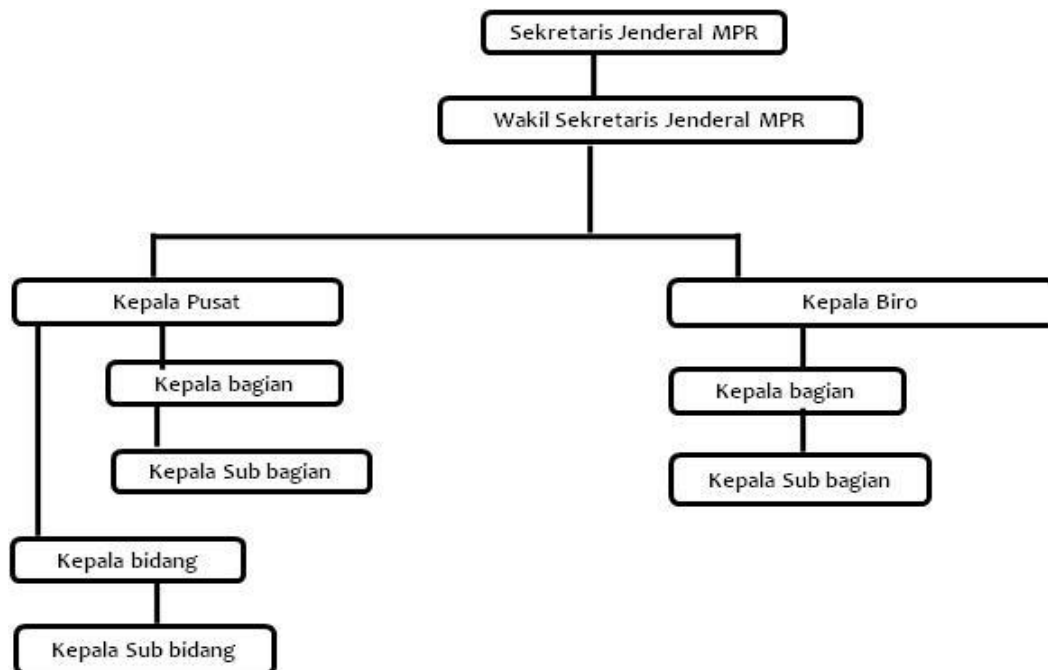


Tabel I.23 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal MPR RI b. Wakil Sekretaris Jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.11 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

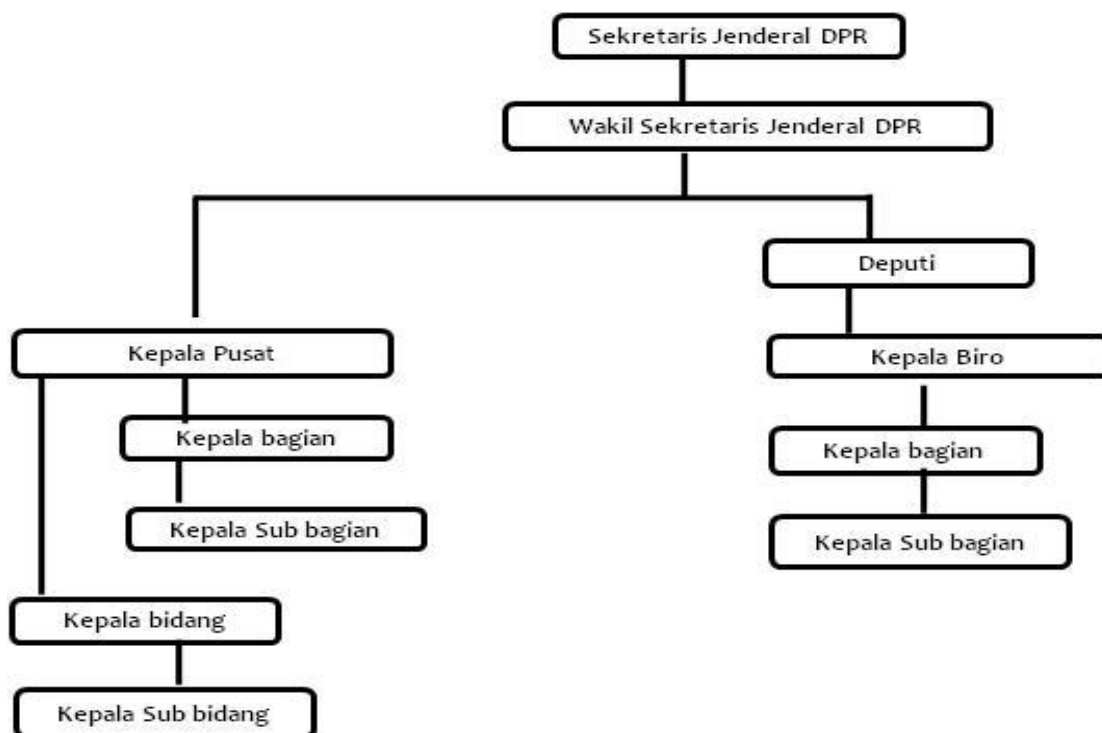


Tabel 1.24 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretariat Jenderal DPR RI b. Wakil sekretaris jenderal c. Deputi
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.12 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)



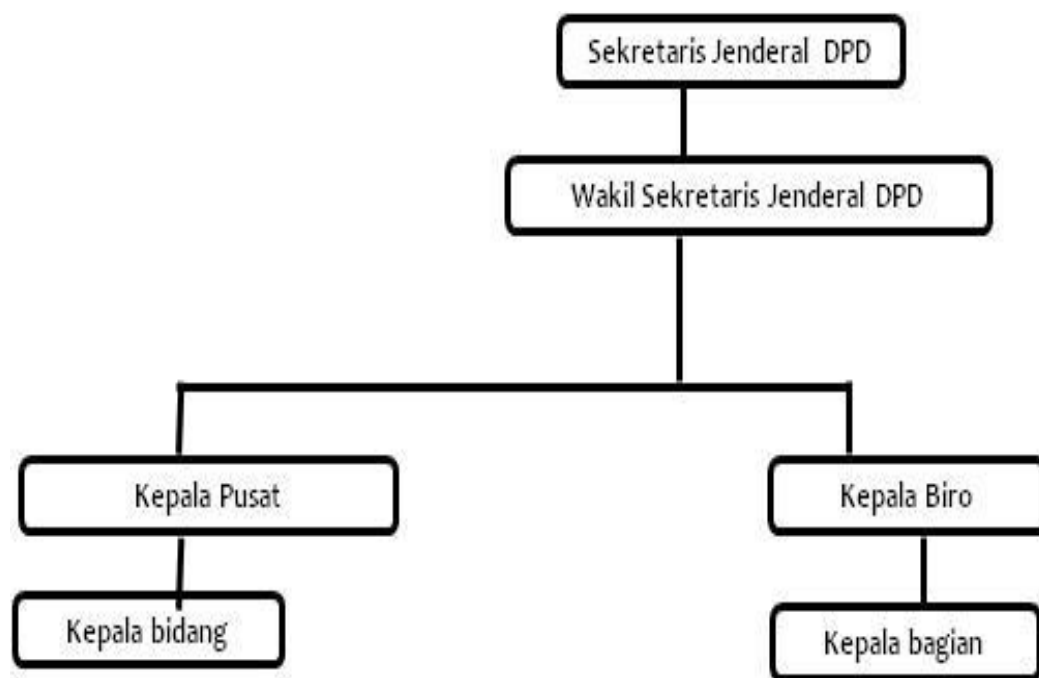
Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel 1.25 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.13 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



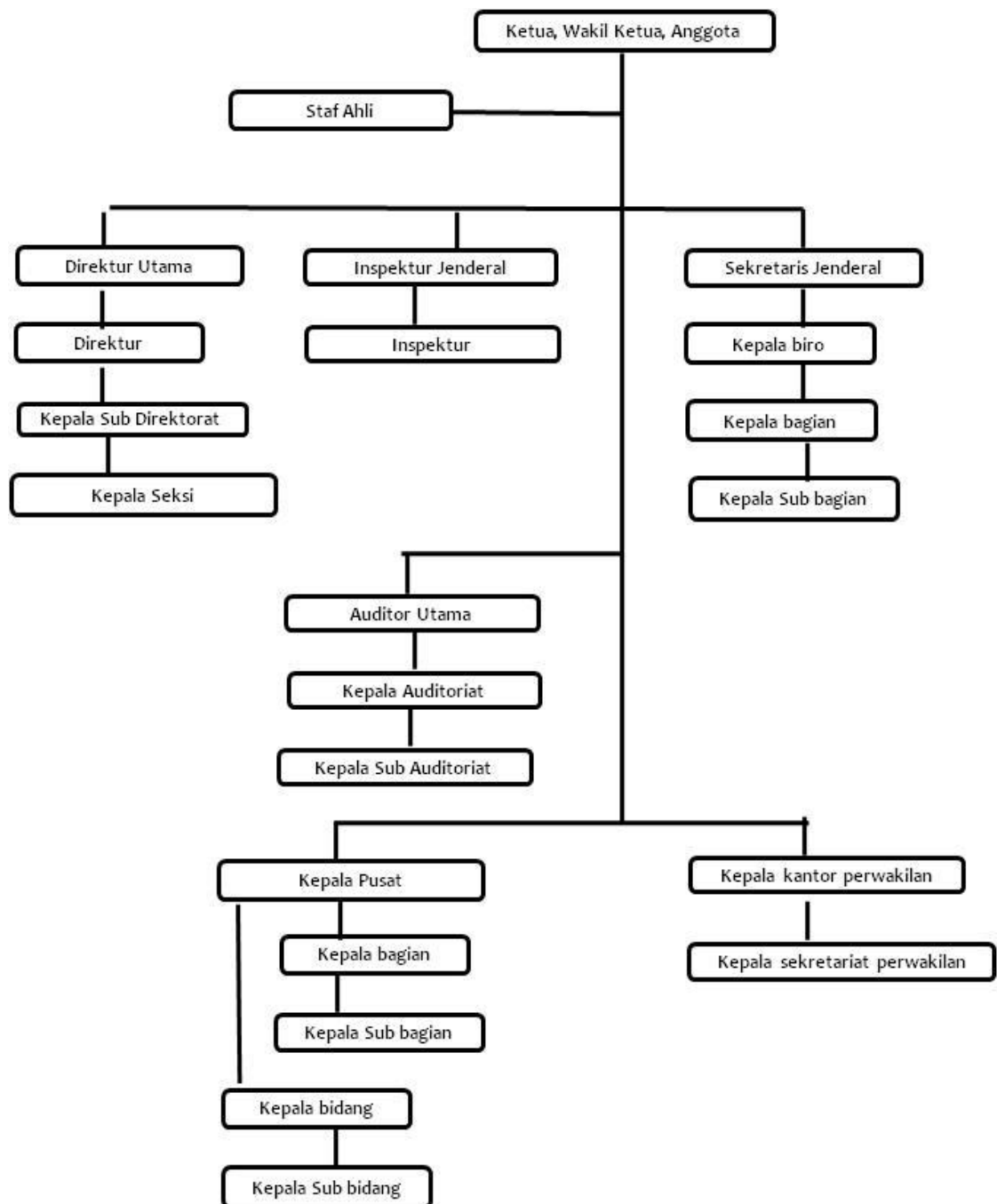
Tabel 1.26 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Inspektur jenderal c. Direktur utama d. Auditor utama e. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Inspektur c. Direktur d. Kepala pusat e. Kepala auditorat f. Kepala kantor perwakilan
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala subdirektorat d. Kepala sekretariat perwakilan
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang c. Kepala seksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar 1.14 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel 1.27 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kesekretariatan Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris b. Direktur jenderal c. Kepala badan
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat - Inspektur Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Tinggi TUN b. Sekretaris pada Pengadilan Tinggi , Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe A c. Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi TUN
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala subdirektorat Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Wakil Sekretaris Pada pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan Tinggi b. Sekretaris Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer Kelas A, Pengadilan TUN Tipe A c. Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus , Pengadilan Negeri Kelas IA, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe A Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas B, Pengadilan TUN tipe B
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang c. Kepala seksi Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Kepala subbagian b. Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas IB c. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IA d. Kepala subbagian pada Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas B e. Sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas II f. Wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas IB





Lanjutan Tabel I.27

No.	Eselonering	Titelatur
5.	Eselon V	Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : a. Wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas II b. Kepala subbagian pada Pengadilan Agama Kelas IB c. Kepala urusan pada Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas II

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel I.28 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	
2.	Eselon II	Sekretaris panitera
3.	Eselon III	Kepala bagian
4.	Eselon IV	Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel I.29 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)

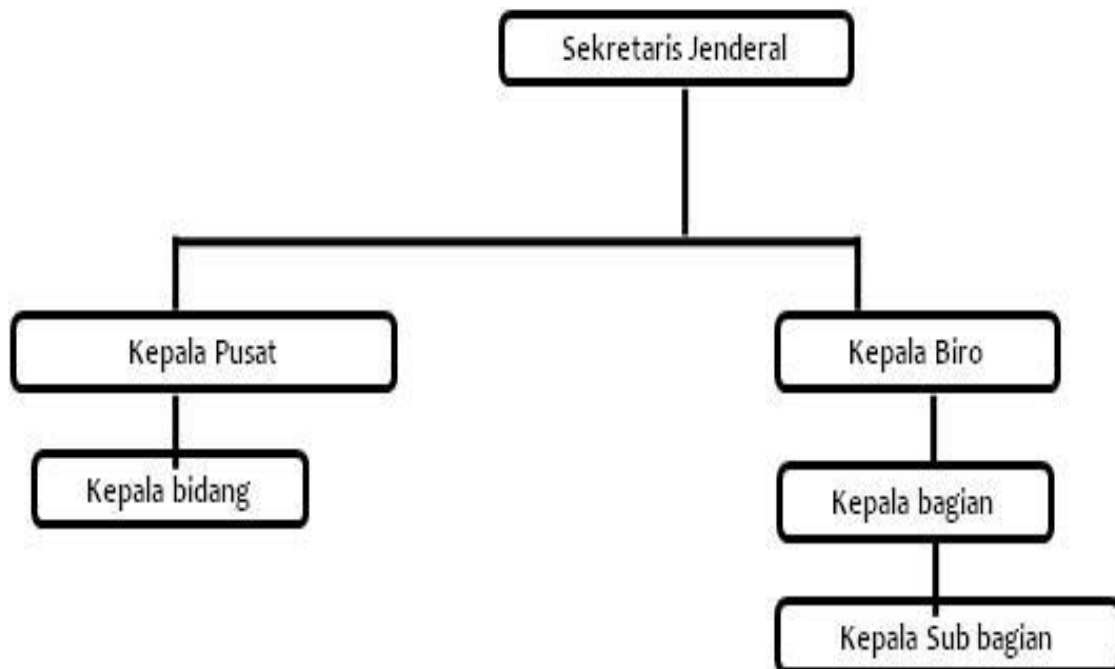
No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012





Gambar 1.15 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)



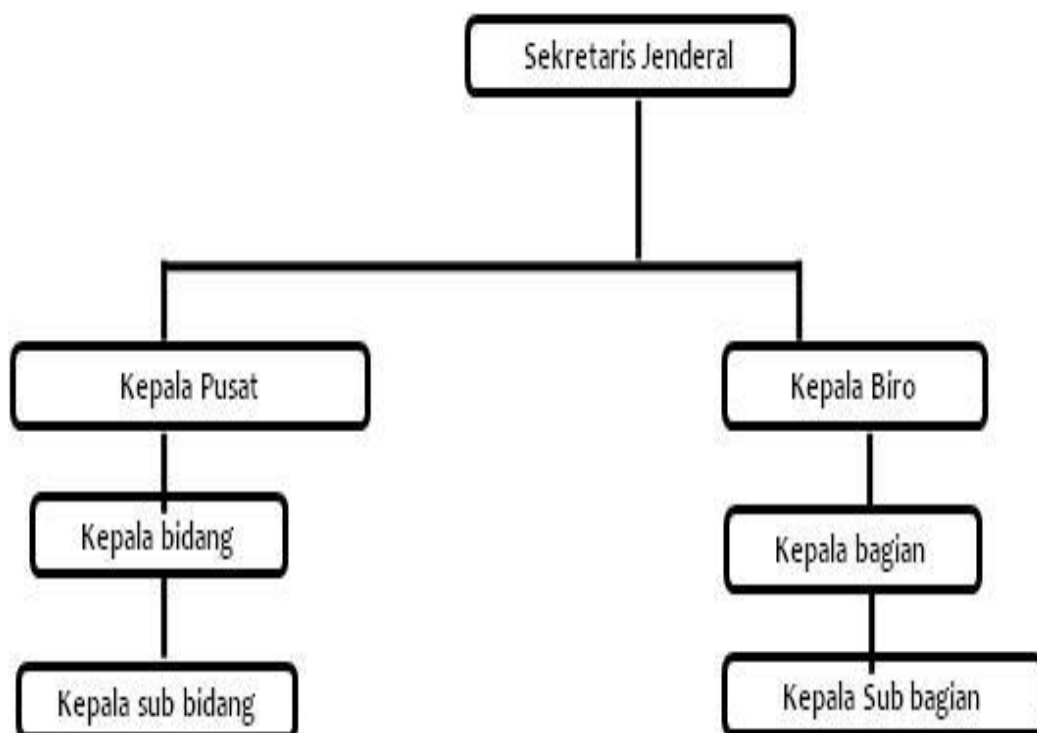
Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel 1.30 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.16 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel I.31 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Kepala pelaksana harian c. Deputi (khusus wantanas) d. Pembantu deputi (setinggi-tingginya Eselon I.b dan serendah-rendahnya eselon II.a) (khusus wantanas)
2.	Eselon II	a. Sekretaris , untuk sekretaris LNS eselon II; b. Kepala biro c. Inspektur d. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Sekretaris, untuk sekretariat LNS eselon III; b. Kepala bagian c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel 1.32 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Negara Tahun 2015

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								Ket
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	8	5	39	-	82	-	67	-	
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	8	5	39	-	89	-	194	-	
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	5	4	24	-	68	-	38	-	
4.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Kebudayaan	8	5	33	-	77	-	166	-	
5.	Kementerian Sekretariat Negara	13	5	46	2	167	-	412	-	
6.	Kementerian Dalam Negeri	11	5	68	-	277	-	673	-	
7.	Kementerian Luar Negeri	10	4	54	-	208	-	690	-	Masih data 2014 karena belum diusulkan penataan
8.	Kementerian Pertahanan	9	5	52	-	174	-	492	-	Masih data 2014 karena belum diusulkan penataan
9.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	11	5	67	-	242	-	675	-	



Lanjutan Tabel I.32

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								Ket
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
10.	Kementerian Keuangan	11	5	93	-	383	-	1.384	-	Masih data 2014 karena belum diusulkan penataan
11.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	9	3	45	-	126	-	319	-	
12.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	5	52	-	202	-	490	-	
13.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	9	5	46	-	181	-	417	-	Masih data 2014 karena belum diusulkan penataan
14.	Kementerian Perindustrian	9	3	44	-	149	-	372	-	Masih data 2014 karena belum diusulkan penataan
15.	Kementerian Perdagangan	9	4	53	-	187	-	407	-	Masih data 2014 karena belum diusulkan penataan
16.	Kementerian Pertanian	11	5	64	-	213	-	518	-	
17.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	5	8	-	315	-	769	-	
18.	Kementerian Perhubungan	8	5	50	-	212	-	515	-	Masih data 2014 karena masih dalam pembahasan eselon II ke bawah
19.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	4	56	-	211	-	517	-	
20.	Kementerian Tenaga Kerja	7	4	41		134	-	326	-	
21.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11	5	67	-	266	-	635	-	





Lanjutan Tabel I.32

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								Ket
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
22.	Kementerian Kesehatan	8	4	52	-	175	-	431	-	
23.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	8	4	47	-	155	-	393	-	
24.	Kementerian Sosial	6	5	35	-	122	-	297	-	
25.	Kementerian Agama	10	5	46	-	154	-	443	-	Masih data 2014 karena belum diusulkan penataan
26.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	7	5	42	-	142	-	350	-	Masih data 2014 karena masih dalam pembahasan eselon II ke bawah
27.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	7	3	34	-	111	-	261	-	
28.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	7	3	40	-	113	-	241	-	
29.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	4	28	-	65	-	139	-	
30.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5	5	27	-	64	-	54	-	Masih data 2014 karena masih dalam pembahasan eselon II ke bawah
31.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	2	5	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan tugas fungsi dilaksanakan oleh Bappenas
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	8	-	2	-	22	-	46	-	



Lanjutan Tabel I.32

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								Ket
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
33.	Kementerian Pariwisata	5	4	28	-	100	-	215	-	
34.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	6	4	29	-	57	-	191	-	Masih data 2014 karena masih dalam pembahasan eselon II ke bawah
JUMLAH		284	147	1451	2	5243	-	13137	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Catatan : Belum termasuk jumlah eselon pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis (UPT).

Tabel I.33 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Tahun 2015

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								Ket
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Lembaga Administrasi Negara	5	-	19	-	47	-	46	-	
2.	Arsip Nasional Republik Indonesia	5	-	18	-	48	-	77	-	
3.	Badan Kepagawaian Negara	7	-	29	-	78	-	193	-	
4.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3	-	10	-	22	-	26	-	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	8	-	46	-	149	-	24	-	
6.	Badan Pusat Statistik	8	-	24	-	76	-	218	-	
7.	Badan Standardisasi Nasional	4	-	11	-	-	-	-	-	
8.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	-	13	-	32	-	24	-	
9.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	4	-	22	-	88	-	174	-	





Lanjutan Tabel I.33

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
10.	Lembaga Sandi Negara	5	-	12	-	28	-	38	-	
11.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8	-	29	-	77	-	180	-	
12.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	4	-	13	-	41	-	41	-	
13.	Badan Informasi Geospasial	5	-	12	-	29	-	18	-	
14.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	6	-	28	-	75	-	61	-	
15.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8	-	31	-	82	-	173	-	
16.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7	-	28	-	85	-	72	-	
17.	Badan Koordinasi Pananaman Modal	9	-	28	-	70	-	158	-	
18.	Badan Pertanahan Nasional	7	-	33	-	84	-	193	-	
19.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	5	-	23	-	73	-	164	-	
20.	Lembaga Ketahanan Nasional	4	-	20	-	59	-	120	-	
21.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	5	-	15	-	43	-	92	-	
22.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	4	-	18	-	52	-	120	-	
23.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	6	-	20	-	49	-	101	-	
24.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	-	15	-	33	-	66	-	
25.	Badan SAR Nasional	4	-	11	-	24	-	53	-	



Lanjutan Tabel I.33

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
26.	Badan Narkotika Nasional	8	-	24	-	49	-	87	-	
27.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5	-	12	-	23	-	16	-	
Jumlah		153	0	563	0	1.513	0	2.527	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Catatan : Belum termasuk jumlah eselon pada instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), mengingat saat ini sedang dalam proses penataan organisasi LPNK berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008

Tabel I.34 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Negara Tahun 2015

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Sekretariat Mahkamah Agung	7	-	30	-	97	-	278	-	
2.	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	1	7	-	26	-	48	-	
3.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	6	-	15	-	61	-	128	-	
4.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	1	1	9	-	35	-	79	-	
5.	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	12	5	34	-	76	-	227	-	
6.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	1	-	6	-	13	-	23	-	
7.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1	-	6	-	15	-	28	-	
JUMLAH		29	7	107	-	323	-	811	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015



**Tabel I.35 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri Tahun 2015**

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Kejaksaan Agung	8	6	36	16	104	-	177	-	
2.	Kepolisian Negara RI	10	19	81	497	1.119	1.302	1.445	763	
3.	Badan Intelijen Negara	10	5	47	-	166	-	67	-	
4.	Tentara Nasional Indonesia*	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Sekretariat Kabinet	6	3	20	-	62	-	132	-	
JUMLAH		34	33	184	513	1451	1302	1821	763	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Keterangan :

* Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Pasal 177 Perpres 10/2010 tentang Susunan Organisasi TNI, pelaksanaan ditetapkan oleh Panglima TNI tanpa melalui persetujuan Meneg PAN-RB.

Tabel I.36 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2015

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*	-	1	4	3	15	11	54	-	
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia*	-	1	4	3	22	3	56	-	
JUMLAH			2	8	6	37	14	110		

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Keterangan :

*Kesetaraan Eselon.

Tabel I.37 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Nonstruktural Tahun 2015

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Ombudsman Republik Indonesia	1	-	3	-	9	-	19	-	
2.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	-	4	-	10	-	26	-	
3.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1	-	-	-	-	-	-	-	



Lanjutan Tabel I.37

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015								Ket
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
4.	Komisi Pemilihan Umum	1	1	41	-	592	-	2143	-	
5.	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	-	-	1	-	4	-	10	-	
6.	Komisi Kejaksaan	-	-	1	-	3	-	6	-	
7.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	-	-	1	-	3	-	6	-	
8.	Komisi Informasi Pusat	-	-	1	-	3	-	6	-	
9.	Dewan Gula Indonesia	-	-	-	-	1	-	3	-	
10.	Dewan Ketahanan Nasional	5	5	17	-	48	-	22	-	
11.	Dewan Kelautan Indonesia	-	-	-	1	-	3	-	8	
12.	Dewan Pers	-	-	1	-	3	-	6	-	
13.	Dewan Energi Nasional	1	-	3	-	8	-	18	-	
14.	Dewan Pertimbangan Presiden	1	-	2	-	6	-	18	-	
15.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	1	-	3	-	7	-	
16.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	-	-	1	-	3	-	6	-	
17.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	-	1	-	4	-	12	-	
18.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	1	-	4	-	11	-	28	-	
19.	Badan Pengatur Jalan Tol	-	-	1	-	5	-	11	-	
20.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	4	-	11	-	24	-	48	-	
21.	Lembaga Sensor Film	-	-	-	-	1		5	-	
22.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	-	-	1		4		9	-	
23.	Konsil Kedokteran Indonesia	-	-	1	-	4	-	12	-	
24.	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	-	-	1		2		6	-	
Jumlah		16	6	97	1	751	3	2427	8	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015



Tabel 1.38 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Seluruh Lingkungan Kementerian dan Lembaga Tahun 2015

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2015							
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1.	Kementerian Negara	279	169	1490	2	5031	-	12614	-
2.	LPNK	153	0	563	0	1513	0	2527	-
3.	Sekretariat Lembaga Negara	29	7	107	-	323	-	811	-
4.	Lembaga Setingkat Menteri dan Lembaga Pemerintah Lainnya	34	35	192	519	1488	1316	1931	763
5.	Lembaga Non-Struktural	16	6	97	1	751	3	2427	8
JUMLAH		511	217	2449	522	9106	1319	20310	771

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel 1.39 Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu 2014

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2014
1.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah
2.	Kementerian Luar Negeri	2. Diplomat
3.	Kementerian Pertahanan	3. Kataloger
4.	Kementerian Hukum dan HAM	4. Pemeriksa merek 5. Pemeriksa paten 6. Perancang peraturan Perundang-undangan 7. Pemeriksa Desain Industri
5.	Kementerian Keuangan	8. Penilai pajak bumi dan bangunan 9. Pemeriksa bea dan cukai 10. Pemeriksa pajak 11. Penyuluh pajak
6.	Kementerian ESDM	12. Pengamat gunung api 13. Penyelidik bumi 14. Inspektur ketenagalistrikan 15. Inspektur tambang 16. Inspektur gas dan minyak bumi
7.	Kementerian Perindustrian	17. Penyuluh perindustrian dan perdagangan
8.	Kementerian Perdagangan	18. Penguji mutu barang 19. Penera
9.	Kementerian Pertanian	20. Medik veteriner 21. Paramedik veteriner 22. Pengawas benih tanaman 23. Pengawas bibit ternak 24. Pengawas mutu hasil pertanian 25. Pengawas mutu pakan 26. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan 27. Penyuluh pertanian 28. Analis pasar hasil pertanian 29. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman





Lanjutan Tabel I.39

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2014
10.	Kementerian Kehutanan	30. Penyuluh kehutanan 31. Polisi kehutanan 32. Pengendali ekosistem hutan
11.	Kementerian Perhubungan	33. Pengendali frekuensi radio 34. Teknisi penerbangan 35. Pengawas keselamatan pelayaran 36. Penguji kendaraan bermotor
12.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	37. Pengendali hama dan penyakit ikan 38. Pengawas perikanan (penggabungan dengan pengawas benih ikan) 39. Penyuluh perikanan 40. Analis Pasar Hasil Perikanan
13.	Kementerian Tenaga Kerja	41. Pengawas ketenagakerjaan 42. Instruktur 43. Mediator hubungan industrial 44. Pengantar Kerja 45. Penggerak swadaya masyarakat
14.	Kementerian Pekerjaan umum	46. Teknik pengairan 47. Teknik penyehatan lingkungan 48. Teknik jalan dan jembatan 49. Teknik tata bangunan dan perumahan 50. Penata ruang 51. Pembina Jasa Konstruksi
15.	Kementerian Kesehatan	52. Administrator kesehatan 53. Apoteker 54. Asisten apoteker 55. Bidan 56. Dokter 57. Dokter gigi 58. Epidemiolog kesehatan 59. Entomolog kesehatan 60. Fisioterapis 61. Fisikawan medis 62. Nutrisiologi 63. Okupasi terapis 64. Ortosis prostetis 65. Penyuluh kesehatan masyarakat 66. Perawat 67. Perawat gigi 68. perekam medis 69. Pranata laboratorium kesehatan 70. Psikolog klinis 71. Radiografer 72. Refraksiologi optik 73. Sanitarian 74. Teknisi elektromedis 75. Teknisi gigi 76. Terapis tranfusi darah 77. Terapis wicara 78. Dokter pendidik klinis 79. Pembimbing kesehatan kerja





Lanjutan Tabel I.39

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2014
16.	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	80. Dosen 81. Guru 82. Penilik 83. Pamong belajar 84. Pengawas sekolah 85. Pengembangan teknologi pembelajaran 86. Pranata laboratorium pendidikan
17.	Kementerian Sosial	87. Pekerja sosial 88. Penyuluh sosial
18.	Kementerian Agama	89. Penghulu 90. Penyuluh agama
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91. Pamong budaya
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	92. Adikara siaran 93. Teknisi siaran 94. Andalan siaran 95. Pranata hubungan masyarakat
21.	Kementerian Lingkungan Hidup	96. Pengendali dampak lingkungan 97. Pengawas lingkungan hidup
22.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	98. Perencana
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	99. Widyaiswara 100. Analis kebijakan
24.	Arsip Nasional (ANRI)	101. Arsiparis
25.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	102. Analis kepegawaian 103. Auditor kepegawaian 104. Asesor SDM aparatur
26.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	105. Pustakawan
27.	Badan Pusat Statistik (BPS)	106. Statistisi 107. Pranata komputer
28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	108. Pengawas radiasi
29.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	109. Pranata nuklir
30.	Badan Intelijen Negara (BIN)	110. Agen
31.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	111. Sandiman 112. Operator transmisi sandi
32.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	113. Penyuluh keluarga berencana
33.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	114. Surveyor pemetaan
34.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	115. Auditor
35.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	116. Peneliti
36.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	117. Teknisi penelitian dan perekayasa 118. Perekayasa
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	119. Pengawas farmasi dan makanan





Lanjutan Tabel I.39

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2014
38.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan GEOFISIKA (BMKG)	120. Pengamat meteorologi dan geofisika
39.	Kejaksaan Agung	121. Jaksa
40.	Sekneg	122. Penerjemah
41.	BPK	123. Pemeriksa
42.	LKPP	124. Pengelola pengadaan barang/jasa

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2014

Tabel I.40 Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2014

No.	Instansi Pembina	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2014
1.	Kementerian Dalam Negeri	1
2.	Kementerian Luar Negeri	1
3.	Kementerian Pertahanan	1
4.	Kementerian Hukum dan HAM	4
5.	Kementerian Keuangan	4
6.	Kementerian ESDM	5
7.	Kementerian Perindustrian	1
8.	Kementerian Perdagangan	2
9.	Kementerian Pertanian	10
10.	Kementerian Kehutanan	3
11.	Kementerian Perhubungan	4
12.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4
13.	Kementerian Tenaga Kerja	5
14.	Kementerian Pekerjaan umum	6
15.	Kementerian Kesehatan	28
16.	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	7
17.	Kementerian Sosial	2
18.	Kementerian Agama	2
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4
21.	Kementerian Lingkungan Hidup	2
22.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	1
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	2
24.	Arsip Nasional (ANRI)	1
25.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	3
26.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	1
27.	Badan Pusat Statistik (BPS)	2
28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	1
29.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1
30.	Badan Intelijen Negara (BIN)	1
31.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	1
32.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1





Lanjutan Tabel I.40

No.	Instansi Pembina	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2014
33.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	1
34.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1
35.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	1
36.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	2
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	1
38.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	1
39.	Kejaksaan Agung	1
40.	Sekneg	1
41.	BPK	1
42.	LKPP	1
JUMLAH		124

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2014

Tabel I.41 Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun 2012 - 2013

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
Kementerian Koordinator			
1.	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	1. Analis polhukam	1. Analis politik 2. Analis hukum 3. Analis keamanan 4. Analis hubungan kelembagaan ormas 5. Analis hubungan kelembagaan lembaga negara 6. Analis produk hukum
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2. Analis dampak ekonomi	7. Analis ekonomi 8. Penyuluh perekonomian 9. Analis kerjasama dan permodalan
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	3. Analis kesejahteraan rakyat	10. Analis kesejahteraan rakyat 11. Penyuluh kemasyarakatan



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
Kementerian Negara			
4.	Kementerian Dalam Negeri	4. Satpol PP (nama jabatan sedang di evaluasi) 5. Petugas pemadam kebakaran 6. Analis tatapraja 7. Analis kesbang linmas 8. Analis pendapatan daerah 9. Analis dampak politik, pertahanan dan keamanan	12. Pranata linmas 13. Pranata tatapraja 14. Analis pendapatan daerah 15. Pranata pemadam kebakaran 16. Analis sosial budaya masyarakat 17. Analis kelembagaan masyarakat 18. Analis bidang badan layanan umum 19. Analis kerjasama lintas sektor 20. Analis kerjasama pusat dan daerah 21. Analis penanganan masalah sosial 22. Analis pengaduan pemerintahan 23. Analis pengelolaan dana alokasi khusus 24. Analis pengelolaan dana alokasi umum 25. Analis pengelolaan dana bagi hasil pajak & SDA 26. Analis pengelolaan dana otsus dan dana transfer lainnya 27. Analis pengelolaan kekayaan daerah 28. Analis pengembangan pasar 29. Analis pengembangan perdesaan 30. Analis pengembangan wilayah 31. Analis pengembangan dan penataan batas antar negara 32. Analis organisasi 33. Evaluator 34. Konselor 35. Analis perlindungan hak-hak sipil dan HAM 36. Satpol PP 37. Pranata pembinaan P2UP



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
5.	Kementerian Luar Negeri	10. <i>Legal advisor</i> perlindungan WNI 11. Pengamat politik luar negeri 12. Atase perdagangan 13. Petugas komunikasi diplomasi	38. Atase 39. <i>Legal advisor</i> perlindungan WNI 40. Analis politik luar negeri 41. Pranata komunikasi diplomasi 42. Pranata pembinaan diplomasi
6.	Kementerian Pertahanan	14. Analis Pertahanan Negara	43. Analis pertahanan negara 44. Penyuluh pertahanan negara 45. Pranata pembinaan kataloger
7.	Kementerian Hukum dan HAM	15. Pemeriksa dokumen imigrasi 16. Petugas imigrasi 17. Komandan/petugas lapas 18. <i>Legal drafter</i>	46. Pranata lapas 47. Pranata imigrasi 48. PPNS 49. Konsultan hukum 50. Penyuluh hukum 51. Penyuluh narapidana 52. Pranata izin tinggal 53. Analis operasi intelijen keimigrasian 54. Penyuluh HAM 55. Pranata sidik jari 56. Pemeriksa desain industri 57. Pranata pembinaan perancang peraturan Perundang-undangan 58. Pranata pembinaan pemeriksa merek dan paten
8.	Kementerian Keuangan	19. Bendaharawan 20. Penata laporan keuangan 21. Verifikator keuangan 22. Analis pendapatan negara 23. Analis belanja negara 24. Analis kekayaan negara 25. Asisten akuntan 26. Penyusun anggaran / analis anggaran 27. Bendahara (gaji, penerimaan, pengeluaran) 28. Bendahara rutin 29. Pengadministrasi barang milik negara (BMN) (Kemenkeu)	59. Analis anggaran 60. Akuntan 61. Bendahara 62. Analis pengelola barang milik negara (BMN) 63. Verifikator keuangan 64. Analis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 65. Analis penyelesaian LHP/TP/TGR 66. Analis rencana program dan kegiatan 67. Bendahara penerima 68. Bendahara pengeluaran 69. Pembuat daftar gaji 70. Pemegang buku kas 71. Pemegang buku pajak 72. Penata laporan keuangan (Petugas SAI) 73. Perencana anggaran





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			74. Analis pinjaman dan obligasi 75. Pranata pembinaan pemeriksa bea dan cukai 76. Pranata pembinaan penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa pajak, penyuluh pajak
9.	Kementerian ESDM	30. Analis sumber daya terbarukan 31. Analis potensi tambang	77. Analis pertambangan 78. Analis usaha energi 79. Analis keselamatan pertambangan dan energi 80. Pranata laboratorium sumber energi 81. Pengawas bengkel 82. Penyelidik sumber daya alam 83. Pranata pembinaan pengamat gunung api, penyelidik bumi, inspektur kelistrikan, inspektur tambang, inspektur minyak dan gas bumi
10.	Kementerian Perindustrian	32. Asesor industri 33. Analis industri	84. Asesor industri 85. Analis industri 86. Pengawas industri 87. Penilai mutu produk 88. Pranata pembinaan penyuluh perindustrian dan perdagangan
11.	Kementerian Perdagangan	34. Analis perdagangan dalam negeri 35. Analis perdagangan luar negeri 36. Atase perdagangan	89. Analis perdagangan 90. Atase perdagangan 91. Pengamat tera 92. Pranata laboratorium kemetrollogian 93. Pranata pembinaan penguji mutu barang, penera
12.	Kementerian Pertanian	37. Analis potensi pangan 38. Analis tanah 39. Pengembangan bibit pertanian	94. Pemeriksa perlindungan varietas tanaman 95. Pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi 96. Pengawas pupuk dan pestisida 97. Analis ketahanan pangan 98. Karantinawan 99. Pengawas alat mesin pertanian 100. Analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			101. Analis pakan ternak 102. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Pertanian)
13.	Kementerian Kehutanan	40. Analis potensi hutan 41. Pengembangan bibit tanaman hutan/perkebunan	103. Analis potensi hutan 104. Pranata pengembangan bibit tanaman hutan/perkebunan 105. Pranata DAS 106. Analis biofisik 107. Analis hutan dan lahan (RHL) 108. Analis genetik 109. Analis pengembangan hutan 110. Analis perkebunrayaan 111. Pranata taman 112. Analis tanaman hias/tanaman koleksi 113. Pemelihara bibit tumbuhan 114. Pemelihara sarana kebun 115. Pengadministrasi karcis 116. Pengawas perkebunrayaan 117. Pengolah kompos 118. Perawat koleksi tumbuhan 119. Peregistrasi data koleksi tumbuhan 120. Teknisi bank biji 121. Teknisi herbarium 122. Teknisi pembibitan 123. Pawang gajah 124. Pemelihara kebun wanariset (1) 125. Pemelihara, perawat satwa/ tumbuhan 126. Penelaah data pengendalian bahan baku 127. Penelaah data pengolahan industri primer 128. Penelaah data pengujian mutu persuteraan alam 129. Penelaah data pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			130. Penelaah data pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu 131. Penelaah data sertifikasi dan akreditasi telur ulat sutera 132. Penelaah data sertifikasi mutu benih/bibit 133. Penelaah data sistem informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan 134. Penelaah data statistik pengelolaan DAS 135. Penelaah data sumber benih 136. Penelaah data sumberdaya genetik 137. Penelaah data tanda legalitas hasil hutan 138. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Kehutanan)
14.	Kementerian Perhubungan	42. Pemandu lalu lintas udara 43. Mualim 44. Juru mesin 45. Pilot 46. Juru mudi 47. Pengawas lalu lintas angkutan darat 48. Pengawas lalu lintas perkereta apian 49. Pengawas lalu lintas laut	139. Pengawas lalu lintas udara 140. Pengawas lalu lintas darat 141. Pengawas lalu lintas laut 142. Pengawas perkeretaapian 143. Pilot 144. co pilot 145. Supir 146. Asisten Supir 147. Nakhoda 148. Masinis 149. Juru mesin 150. Auditor keselamatan 151. Anak buah kapal 152. Juru masak kapal 153. Juru minyak kapal 154. Kepala kamar mesin 155. Kerani kapal 156. Masinis kapal 157. Mualim kapal 158. Pembantu kamar mesin kapal





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			159. Analis HSE (kesehatan, keselamatan dan lingkungan) serta security kapal 160. Perwira instrumen kapal 161. Pramuka kapal 162. Investigator 163. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kemementerian Perhubungan)
15.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	50. Penyuluh perikanan 51. Anak buah kapal 52. Analis alokasi usaha penangkapan ikan 53. Analis budidaya 54. Analis kebutuhan impor 55. Analis data spasial 56. Analis dan penyajian data statistik perikanan tangkap 57. Analis mutu hasil perikanan 58. Analis pasar dalam negeri 59. Analis pasar luar negeri 60. Analis pemeriksa keselamatan pelayaran 61. Analis pengelolaan kawasan konservasi 62. Analis pengelolaan sumber daya ikan 63. Analis pengembangan usaha pelabuhan perikanan 64. Analis potensi kelautan 65. Analis sarana kesyahbandaran 66. Analis sumber daya Pesisir dan lautan 67. Analisis bahan organisasi dan tata laksana 68. Kelasi 69. Juru mudi 70. Penyusun konsep bahan bimbingan teknis kelaikan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	164. Analis budidaya perikanan 165. Analis mutu hasil perikanan 166. Pranata kawasan konservasi 167. Analis kesyahbandaran 168. Analis kesehatan ikan dan lingkungan 169. Pengawas pelabuhan perikanan 170. Analis pasar ikan hias 171. Analis perlindungan dan pelestarian ikan 172. Analis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 173. Teknisi kapal perikanan 174. Analis konservasi kawasan 175. Analis perlindungan dan pelestarian ikan 176. Analis dampak perubahan iklim 177. Analis identifikasi pulau-pulau kecil 178. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Kelautan)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		71. Penyusun konsep bahan rumusan kelaikan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 72. Penyusun konsep bahan rumusan rancang bangun alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 73. Petugas pelayanan penerbitan dokumen penangkapan ikan 74. Petugas pemantauan wilayah pesisir 75. Petugas pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 76. Petugas tata laksana pelayanan dokumen penangkapan ikan 77. Syahbandar perikanan 78. Teknisi budidaya 79. Teknisi kelaikan alat penangkap perikanan teknisi kelayakan alat perikanan 80. Teknisi perawatan kapal pengawas 81. Verifikator gambar desain kapal perikanan 82. Kepala kamar mesin 83. Markonis 84. Masinis 85. Mekanisasi peralatan 86. Mualim kapal perikanan 87. Nahkoda kapal perikanan 88. Nahkoda kapal pengawas 89. Oiler 90. Operator aplikasi sistem PPKA 91. Pelaksana operasional kapal 92. Pembantu teknisi perawatan kapal 93. Penata keselamatan pelayaran 94. Penata usaha informasi pasar luar negeri teknis industri	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		95. Penata usaha jaringan distribusi 96. Penata usaha bimbingan penata usaha bimbingan teknis mikro, kecil, dan menengah 97. Penata usaha kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan 98. Penatalaksana tugas kesyahbandaran 99. Pencatatan dan pendokumentasi pendaftaran kapal perikanan 100. Pengadministrasi konservasi jenis ikan 101. Pengadministrasi konservasi kawasan 102. Pengadministrasi mitigasi bencana lingkungan 103. Pengadministrasi pemanfaatan kawasan dan jenis ikan 104. Pengadministrasi penanggulangan sumber daya pesisir dan laut 105. Pengadministrasi identifikasi pulau-pulau kecil 106. Pengadministrasi sarana pulau-pulau kecil 107. Pengadministrasi sumber daya kelautan 108. Pengadministrasi alat dan bahan laboratorium dan instalasi 109. Pengadministrasi bahan teknis budidaya 110. Pengadministrasi bahan teknis kesehatan ikan dan lingkungan 111. Pengadministrasi bahan teknis perbenihan 112. Pengadministrasi bahan teknis prasarana dan sarana budidaya 113. Pengadministrasi bahan teknis usaha budidaya	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		114. Pengadministrasi rencana tata ruang dan zonasi wilayah 115. Pengadministrasi rencana tata ruang laut nasional 116. Penggambar desain kapal perikanan 117. Penyiap bahan administrasi pengusahaan penangkapan ikan 118. Penyiap bahan perumusan kebijakan pengawakan kapal perikanan 119. Penyiap bahan evaluasi dan laporan pemulihan sumber daya ikan perairan umum 120. Penyiap bahan evaluasi dan laporan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan 121. Penyiap bahan evaluasi dan laporan produktivitas kapal penangkap ikan 122. Penyiap bahan evaluasi dan laporan tata kelola sumber daya ikan perairan umum 123. Penyiap bahan evaluasi pelabuhan perikanan samudera, nusantara, dan pelabuhan perikanan pantai 124. Penyiap bahan evaluasi labuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta 125. Penyiap bahan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 126. Penyiap bahan evaluasi pengembangan usaha penangkapan ikan	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		127. Penelaah gambar desain alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 128. Pengevaluasi pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan 129. Penyiap bahan identifikasi sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas 130. Penyiap bahan pedoman identifikasi sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas 131. Penyiap bahan pedoman tata kelola sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas 132. Penata usaha identifikasi dan evaluasi sentra pengelolaan produk 133. Penata usaha kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah 134. Penata usaha kerja sama industri 135. Penata usaha kimia dan hayati 136. Penata usaha mikro biologi dan organoleptik 137. Penata usaha monitoring cemaran biologi 138. Penata usaha monitoring cemaran kimia 139. Penata usaha pelayanan usaha besar 140. Penata usaha pelayanan usaha mikro , kecil, dan menengah 141. Penata usaha pengamanan dan perlindungan akses pasar 142. Penata usaha pengembangan produk skala besar	





Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		143. Penata usaha peningkatan akses pasar 144. Pengelola sumber daya ikan 145. Pengelola informasi dan publikasi 146. Pengelola laboratorium 147. Pengelola pemanfaatan BMN 148. Pengidentifikasi hasil pengukuran dan dokumen kapal perikanan 149. Pengumpul dan pengolah data statistik perikanan tangkap 150. Penyiap bahan kebijakan tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas 151. Penyiap bahan pemantauan dan evaluasi ketenagakerjaan perikanan 152. Penyiap bahan pemantauan dan evaluasi pengawakan kapal perikanan 153. Penyiap bahan pemantauan dan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan 154. Penyiap bahan pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan 155. Penyiap bahan pemantauan pengembangan usaha penangkapan ikan 156. Penyiap bahan pemantauan produktivitas kapal penangkap ikan 157. Penyiap bahan pengembangan sistem informasi pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		158. Penyiap bahan pengembangan sistem informasi pelabuhan perikanan swasta, pangkalan pendaratan ikan 159. Penyiap bahan penyusun pedoman dan bimbingan bidang identifikasi dan kapasitas nelayan 160. Penyiap bahan penyusun pedoman dan bimbingan pengelolaan usaha 161. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis bidang kenelayanan 162. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang tata operasional pelabuhan perikanan 163. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang keselamatan pelayaran 164. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta 165. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengembangan prasarana pelabuhan pendaratan ikan 166. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengembangan prasarana pelabuhan perikanan 167. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang tata pemeliharaan dan rehabilitasi	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		168. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang kesyahbandaran	
		169. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	
		170. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang investasi usaha penangkapan ikan	
		171. Penyiap bahan penyusunan pedoman diversifikasi usaha	
		172. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta	
		173. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	
		174. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan tata pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan pendaratan ikan	
		175. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan kelaikan kapal	
		176. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis penerapan standar rancangan bangun dan konstruksi kapal	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		177. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimtek pengembangan prasarana pelabuhan pendaratan ikan 178. Penyiap bahan penyusunan pedoman dan bimbingan kesyahbandaran 179. Penyiap bahan penyusunan pedoman identifikasi dan pengukuran kapal perikanan 180. Penyiap bahan penyusunan pedoman keselamatan pelayaran 181. Penyiap bahan penyusunan pedoman pencatatan dan dokumentasi kapal perikanan 182. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis pengembangan prasarana pelabuhan perikanan 183. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis tata operasional pelabuhan perikanan 184. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimtek investasi usaha penangkapan ikan 185. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimtek permodalan usaha penangkapan ikan 186. Penyiap bahan perumusan kebijakan ketenagakerjaan perikanan	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		187. Penyiap bahan urusan perifiaksi dokumen penangkapan ikan perorangan dan koperasi	
		188. Penyiap bahan urusan perifiaksi dokumen penangkapan ikan perusahaan berbadan hukum	
		189. Penyiap bahan pertifikasi alokasi usaha penangkapan ikan	
		190. Penyiap bahan pertifikasi pengusaha penangkapan ikan	
		191. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang permodalan usaha penangkapan ikan	
		192. Penyusun bahan teknis perbenihan	
		193. Penyusun bahan teknis prasarana dan sarana budidaya	
		194. Penyusun bahan teknis usaha budidaya	
		195. Penyusun bahan adaptasi dampak perubahan iklim	
		196. Penyusun bahan benda muatan kapal tenggelam	
		197. Penyusunan bahan bimbingan teknis industri pengolahan	
		198. Penyusunan bahan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah	
		199. Penyusunan bahan data dan informasi pulau- pulau kecil	
		200. Penyusunan bahan identifikasi pulau-pulau kecil	
		201. Penyusunan bahan implementasi IPTEK	
		202. Penyusun bahan informasi dan publikasi	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		203. Penyusun bahan informasi kesehatan ikan dan lingkungan 204. Penyusun bahan informasi perbenihan 205. Penyusun bahan jaringan pasar ikan hias 206. Penyusun bahan jasa kelautan 207. Penyusun bahan kelembagaan pasar hasil perikanan 208. Penyusun bahan kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan 209. Penyusun bahan pemanfaatan jenis ikan 210. Penyusun bahan pemanfaatan kawasan 211. Penyusun bahan pemantauan dan evaluasi imfor 212. Penyusun bahan penanggulangan pencemaran sumber daya laut 213. Penyusun bahan penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir 214. Penyusun bahan perancangan konservasi jenis ikan 215. Penyusun bahan perlindungan dan pelestarian ikan 216. Penyusun bahan rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan yurisdiksi 217. Penyusun bahan sarana pulau-pulau kecil 218. Penyusun bahan tata laksana penyusun bahan teknis budidaya 219. Penyusun bahan teknis kesehatan ikan dan lingkungan	





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
16.	Kementerian Tenaga Kerja	220. Penelaah standar keselamatan kerja	179. Analis keselamatan kerja 180. Analis kesehatan kerja 181. Analis pengawasan masyarakat 182. Analis <i>higiyene</i> industri 183. Penguji hiperkes 184. Penguji K3 185. Assessor K3 186. Penyuluh K3 187. Analis kawasan transmigrasi 188. Penyuluh kawasan transmigrasi 189. Pranata ketransmigrasian 190. Pengawas ketransmigrasian 191. Analis tenaga kerja perusahaan pemerintah 192. Analis tenaga kerja perusahaan swasta 193. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
17.	Kementerian Pekerjaan Umum	221. Pengawas penyehat lingkungan 222. Pengawas tata bangunan dan perumahan 223. Pengawas pengairan 224. Juru gambar 225. Arsitek 226. Desain interior 227. Analis tataguna DAS	194. Pengawas jalan dan jembatan 195. Pengawas tata bangunan dan perumahan 196. Pengawas irigasi 197. Juru gambar 198. Arsitek 199. Desain interior 200. Pranata PAM 201. Pengawas keselamatan jalan 202. Analis investasi jalan tol 203. Analis jaringan jalan 204. Pranata pengadaan tanah 205. Pranat pengelolaan leger jalan 206. Pengawas bangunan 207. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Pekerjaan Umum)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
18.	Kementerian Kesehatan		208. Dokter spesialis syaraf 209. Dokter spesialis kandungan 210. Dosen pendidik keperawatan 211. Binatu rumah sakit 212. Pemulasaran jenazah 213. Pengadministrasi poliklinik 214. Pengelola poliklinik 215. Pramupoliklinik 216. Pranata jasmani & mental 217. Pengemudi ambulan 218. Petugas pembinaan jasmani dan mental pegawai 219. Petugas kamar gelap 220. Analis kesehatan ibu dan anak 221. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Kesehatan)
19.	Kementerian Pendidikan Nasional/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	228. Pelindung /pengonservasi bahasa dan sastra 229. Perancang pengembang kompetensi kependidikan 230. Pengendali pengguna bahasa 231. Pengkaji bahasa 232. Penyuluh bahasa 233. Penyusun acuan bahasa 234. Penyusun pemetaan pendidikan 235. Perancang evaluasi kursus dan kesetaraan 236. Perancang program pendidikan 237. Perancang tes bahasa 238. Perancang sistem evaluasi pendidikan 239. Terminilog/ pengembang istilah	222. Analis bahasa dan sastra 223. Penyuluh bahasa 224. Analis kursus dan kesetaraan 225. Analis peserta didik dan kesetaraan 226. Analis kependidikan 227. Analis kebutuhan dunia kerja 228. Analis tenaga kependidikan 229. Analis kemahasiswaan 230. Analis kompetensi dan kualifikasi pendidikan 231. Pengawas bahasa/sastra 232. Analis istilah 233. Analis leksikograf/peka- mus 234. Analis kursus dan kesetaraan 235. Analis sarana dan prasarana pendidikan 236. Analis kurikulum dan pembelajaran 237. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
20.	Kementerian Sosial	240. Analis dampak sosial	238. Analis dampak sosial 239. Analis kemasyarakatan 240. Pranata taman makam pahlawan (TMP), 241. Analis pemberdayaan masyarakat 242. Analis pengembangan model terapi & rehabilitasi 243. Fasilitator rehabilitasi 244. Analis program kerjasama lembaga masyarakat 245. Analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial 246. Penyuluh penanganan masalah sosial 247. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Sosial)
21.	Kementerian Agama	241. Pencatat nikah 242. Penasehat perkawinan 243. Analis kerukunan beragama 244. Analis penyelenggara haji	248. Analis kerukunan beragama 249. Pranata haji 250. Analis wakaf 251. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Agama)
22.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	245. Pemandu wisata 246. Analis potensi pengembangan wisata 247. Analis pengembangan ekonomi kreatif 248. Verifikator penyelenggaraan wisata	252. Pemandu wisata 253. Pengawas kepariwisataan 254. Analis perfilman 255. Analis seni pertunjukan 256. Analis kreasi dan produksi musik 257. Analis seni rupa 258. Pranata fotografi 259. Analis apresiasi karya seni 260. Analis film animasi 261. Analis komik 262. Analis tulisan fiksi 263. Analis arsitektur 264. Analis desain interior 265. Analis desain grafis 266. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
23.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	249. Analis sistem informatika 250. Pengendali teknologi informasi 251. Jurnalis 252. Juru Foto 253. Juru kamera	267. Analis informatika 268. Pengawas teknologi informasi 269. Penyuluh informatika 270. Jurnalis 271. Analis program pembangunan 272. Pengelola jaringan 273. Pengelola dan pemelihara piranti TI 274. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Komunikasi dan Informatika)
24.	Kementerian Riset Teknologi	254. Analis pemanfaatan teknologi 255. Analis pengembangan teknologi 256. Penyuluh koperasi 257. Analis koperasi 258. Pengawas koperasi	275. Analis pemanfaatan teknologi 276. Analis pengembangan teknologi 277. Pranata sumber daya iptek 278. Analis jaringan iptek 279. Pranata jaringan iptek 280. Analis revansi dan produktivitas iptek 281. Pranata revansi dan produktivitas iptek
25.	Kementerian Koperasi		282. Penyuluh koperasi 283. Analis koperasi 284. Pranata koperasi 285. Pengawas koperasi
26.	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)	259. Laboran lingkungan hidup 260. Analis pemanasan global 261. Analis daya dukung lingkungan 262. Analis daya tampung lingkungan	286. Analis lingkungan hidup 287. Penyuluh lingkungan hidup 288. Analis konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir 289. Analis penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir 290. Analis penanggulangan pencemaran sumber daya laut 291. Analis rehabilitasi 292. Analis reklamasi 293. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Lingkungan Hidup)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
27.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263. Penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak 264. Analis anak	294. Pengawas perempuan dan anak 295. Penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak 296. Analis perlindungan perempuan
28.	Kementerian PAN dan RB	265. Pengawas pelayanan publik 266. Analis ketatausahaan 267. Analis kelembagaan 268. Analis perencanaan SDM aparatur 269. Analis pengembangan SDM aparatur 270. Analis kesejahteraan SDM aparatur 271. Analis penegakan integritas SDM aparatur 272. Analis pengembangan database SDM aparatur 273. Analis kelembagaan / organisasi	297. Analis kelembagaan/ organisasi 298. Analis penegakan integritas SDM aparatur 299. Pengawas pelayanan publik
29.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	274. Analis pengembangan daerah terpencil 275. Pengawas pembangunan daerah terpencil	300. Analis pembangunan daerah terpencil 301. Penyuluh pembangunan daerah terpencil 302. Pengawas pembangunan daerah terpencil
30.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	276. Analis program pembangunan	303. Analis program 304. Pengawas program pembangunan 305. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional)
31.	Kementerian BUMN	277. Pengawas perusahaan negara 278. Analis pengembangan perusahaan	306. Analis perusahaan negara 307. Pengawas perusahaan negara
32.	Kementerian Perumahan Rakyat	279. Analis penyusunan perencanaan wilayah 280. Analis penyusunan penyiapan lahan 281. Pengawas pelaksanan pembangunan fisik 282. Penyusun perencanaan wilayah	308. Analis perumahan 309. Pengawas perumahan 310. Pengawas rumah susun 311. Analis perencanaan wilayah perumahan 312. Analis penyusun penyiapan lahan



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		283. Perencanaan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan	313. Analis lembaga swadaya nasional 314. Analis lembaga swadaya daerah dan adat 315. Analis perumahan swadaya
33.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	284. Pelatih olahraga	316. Pelatih olahraga 317. Pengawas olahraga 318. Penyuluh olahraga
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian			
34.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	285. Analis tata negara 286. Analis kebutuhan diklat 287. Evaluator program diklat 288. Penyusun kurikulum diklat 289. <i>Training offices</i> /pengelola pelatihan 290. Pengadministrasi umum 291. Pengevaluasi diklat	319. Analis diklat 320. Pengawas diklat 321. Analis kebutuhan diklat 322. Pranata diklat 323. Analis diklat prajabatan dan ujian dinas 324. Analis akreditasi lembaga diklat 325. Pranata sistem informasi diklat aparatur (SIDA) 326. Analis diklat teknis 327. Analis diklat fungsional 328. Pranata sarana dan prasarana diklat 329. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Administrasi Negara)
35.	Arsip Nasional (ANRI)	292. Analis pengembangan sistem kearsipan	330. Penyuluh kearsipan 331. Pengawas kearsipan 332. Pranata laboratorium kearsipan 333. Pranata layanan kearsipan 334. Penata preservasi arsip 335. Pranata reproduksi arsip 336. Pranata restorasi arsip 337. Kurator arsip/dokumen dan tata naskah 338. Penata usaha surat dan kearsipan 339. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Arsip Nasional)
36.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	293. Analis jabatan 294. Auditor kepegawaian 295. Asesor kepegawaian 296. Pengadministrasi kepegawaian 297. Analis data	340. Analis jabatan 341. Sekretaris 342. Administrasi umum 343. Analis organisasi 344. Analis tata laksana



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		298. Analis bahan	345. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Kepegawaian Negara)
37.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	299. Analis pengembangan elektronik pustaka (e library) 300. Asisten pustakawan	346. Penyuluh perpustakaan 347. Asisten pustakawan 348. Pengawas perpustakaan 349. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Perpustakaan Nasional)
38.	Badan Pusat Statistik (BPS)		350. Penyuluh statistik 351. Pengawas statistik 352. Administrator jaringan komputer 353. Analis sistem 354. Operator data entry 355. Programmer 356. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pusat Statistik)
39.	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	301. Analis kompetensi	358. Analis Standar Kompetensi 359. Pengawas Standar Kompetensi
40.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPATEN)	302. Perawat peralatan pengawas 303. Pemeroses penerbitan izin 304. Pemroses penerbitan izin petugas fasilitas petugas radiasi	360. Analis radiasi 361. Perawat peralatan pengawasan 362. Penyuluh radiasi 363. Pengadministrasi penerbit izin 364. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
41.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	305. Penelaah standar mutu bahan dan peralatan 306. Pengelola pengaman instalasi nuklir 307. Pengelola sistem jaminan mutu 308. Penyiap bahan program jaminan mutu 309. Penyiap bahan standar keselamatan	365. Analis standar mutu bahan dan peralatan 366. Penyuluh nuklir 367. Pranata standar keselamatan 368. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Tenaga Nuklir Nasional)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
42.	Badan Intelijen Negara (BIN)		369. Analis rahasia negara 370. Analis informasi 371. Analis intelijen 372. Analis kebutuhan perlengkapan intelijen 373. Pengadministrasi senjata api dan amunisi 374. Perawat senjata api 375. Pengawas gudang senjata 376. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Intelijen Negara)
43.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)		377. Analis persandian 378. Pranata alat persandian 379. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Sandi Negara)
44.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	310. Analis bina KB 311. Analis bahan kelangsungan hidup ibu 312. Analis bahan kelangsungan hidup bayi dan anak 313. Analis bahan pencegahan penyakit menular 314. Analis bahan penanggulangan infertilitas penyakit menular 315. Analis pencegahan kanker alat reproduksi 316. Analis jaminan pelayanan kb 317. Analis jaminan sarana KB 318. Analis kependudukan 319. Analis penyediaan sarana KB 320. Analis standarisasi pelayanan KB 321. Analis monitoring dan evaluasi pelayanan KB 322. Analis akses pelayanan KB 323. Analis kualitas pelayanan KB	380. Analis kependudukan 381. Pengawas kependudukan 382. Analis pembinaan KB 383. Analis layanan KB 384. Analis sarana KB 385. Analis standarisasi pelayanan KB 386. Pengawas pelayanan KB 387. Analis kehidupan keluarga 388. Analis penyakit menular 389. Analis kanker alat reproduksi 390. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
45.		324. Penyusun bahan 325. Penyusun bahan jaminan pelayanan KB 326. Penyusun bahan akses pelayanan KB 327. Penyusun bahan kualitas pelayanan KB 328. Penyusunan bahan kelangsungan hidup ibu 329. Penyusun bahan penanggulangan infertilitas	
46.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	330. Analis penerbangan 331. Pengawas antariksa	391. Analis penerbangan 392. Pengawas antariksa
47.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTA NAL)		393. Analis peta wilayah 394. Pengawas status peta wilayah 395. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
48.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)		396. Analis keuangan 397. Analis pembangunan 398. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
49.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)		399. Analis penelitian 400. Pengawas penelitian dan HKI 401. Analis hasil penelitian 402. Pengelola pemanfaatan hasil penelitian 403. Pengolah data penelitian bidang IPSK 404. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
50.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		405. Pranata laboratorium perekayasaan 406. Pengawas perekayasa 407. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
51.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	332. Perencana penanaman modal 333. Analisis permodalan asing	408. Analisis penanaman modal 409. Pengawas penanaman modal 410. Analisis pengembangan potensi daerah 411. Analisis asosiasi dunia usaha
52.	Badan Pertanahan Nasional	334. Analisis peta wilayah 335. Pengawas pertanahan	412. Analisis peta wilayah 413. Pengawas pertanahan 414. Penyuluh pertanahan
53.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	336. Analisis obat dan makanan	415. Analisis obat dan makanan 416. Penyuluh obat dan makanan 417. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawas Obat dan Makanan)
54.	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	337. Analisis program	418. Widyaiswara 419. Analisis program 420. Pengawas Program Lemhanas
55.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	338. Analisis cuaca	421. Analisis cuaca 422. Pengawas cuaca 423. Analisis bahan adaptasi dampak perubahan iklim 424. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)
56.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	339. Analisis tenaga kerja 340. Pengawas tenaga kerja 341. Program kebutuhan tenaga kerja	425. Analisis tenaga kerja 426. Penyuluh tenaga kerja
57.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	342. Analisis bencana alam 343. Penyuluh bencana alam 344. Petugas bencana alam	427. Analisis bencana 428. Penyuluh bencana 429. Pranata bencana





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
58.	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	345. Analis barang dan jasa 346. Pengadaan barang dan jasa	430. Analis barang dan jasa 431. Penyuluh barang dan jasa 432. Pranata barang dan jasa 433. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
59.	Badan SAR Nasional	347. Analis SAR 348. Penyuluh SAR	434. Analis SAR 435. Penyuluh SAR 436. Pranata SAR
60.	Badan Narkotika Nasional	349. Analis dampak narkotik 350. Penyuluh narkotik 351. Pengawas rehabilitasi narkotik	437. Analis narkoba 438. Penyuluh narkoba 439. Pengawas rehabilitasi narkoba 440. Analis laboratorium narkoba 441. Pembina mental 442. Instruktur vokasional 443. Analis intelijen taktis 444. Analis intelijen produk 445. Pranata pemetaan jaringan 446. Analis operasi pemutusan jaringan 447. Analis pemetaan jaringan 448. Penyidik 449. Analis sistem informasi dan jaringan 450. Petugas pengejaran 451. Petugas penindakan 452. Sipir 453. Pengawas barang bukti 454. Analis pengembangan model terapi & rehabilitasi 455. Analis manajemen monitoring & pengendalian kekambuhan dan wajib lapor 456. Fasilitator rehabilitasi 457. Petugas standarisasi dan sertifikasi
61.	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	352. Analis dampak lingkungan 353. Penyuluh kemasyarakatan	458. Analis pengamanan lingkungan 459. Analis penangkalan 460. Analis kewaspadaan 461. Analis pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP 462. Analis resosialisasi dan rehabilitasi





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			463. Analis data intelijen 464. Analis pengembangan sistem operasi 465. Analis kerjasama aparat penegak hukum 466. Analis kerjasama luar negeri 467. Analis kerjasama regional 468. Analis kerjasama multilateral 469. Analis konvensi internasional 470. Analis resolusi badan Non PBB
Lembaga Setingkat Menteri			
62.	Kejaksaan Agung RI	354. Panitera pengadilan (MA) 355. Pengamanan barang bukti 356. Pengawasan dan pengamanan terdakwa	471. Panitera pengadilan (MA) 472. Pengawal tahanan 473. Pranata tilang 474. Penyidik pidana khusus 475. Penyidik pidana umum 476. Pemeriksa intelejen 477. Analis penuntutan 478. Pranata barang bukti 479. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kejaksaan Agung RI)
63.	Kepolisian Negara RI	357. Analis gangguan keamanan 358. Penyuluh keamanan masyarakatan	480. Analis gangguan keamanan 481. Penyuluh keamanan masyarakat
64.	Sekretariat Negara (Setneg)		482. Analis pengaduan masyarakat 483. Analis media dan jurnalistik 484. Analis kerjasama teknik luar negeri 485. Pranata acara 486. Pranata acara kepresidenan 487. Pranata dekorasi 488. Pranata jamuan 489. Pranata upacara 490. Analis tanda jasa dan kehormatan 491. Koordinator pemandu wisata istana 492. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Sekretariat Negara (Sekneg)



Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
65.	Sekretariat Kabinet (Setkab)	359. Analis program kebijakan pemerintah	493. Analis media dan jurnalistik 494. Tenaga peliputan 495. Penata acara 496. Petugas protokol 497. Ajudan sekretaris kabinet
Sekretariat Lembaga Negara			
66.	Sekretariat Jenderal MPR- RI	360. Analis pemerintahan daerah 361. Analis kebijakan pengembangan pemerintah daerah	498. Analis pemerintahan daerah 499. analisis kebijakan pengembangan pemerintah daerah
67.	Sekretariat Jenderal DPR- RI	362. Transkriptor 363. Analis anggaran 364. Penyusun risalah	500. Transkriptor 501. Analis anggaran 502. Penyusun risalah 503. Penulis steno 504. Penyusun LAKIP 505. Pemeriksa anggaran
68.	Sekretariat Jenderal BPK		506. Analis pelanggaran 507. Analis akuntabilitas kinerja 508. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Sekretariat Jenderal BPK)
69.	Sekretariat Mahkamah Agung	365. Analis sengketa peradilan	509. Analis sengketa peradilan
70.	Sekretariat DPD-RI	366. Analis pemerintah daerah 367. Analis program daerah	510. Analis pemerintah daerah 511. Legislasi
71.	Sekretariat Mahkamah Konstitusi	368. Panitera pengadilan 369. Panitera muda	512. Panitera pengadilan 513. Panitera muda
72.	Sekretariat Komisi Yudisial	370. Analis keputusan pengadilan 371. Pengawas pengadilan	514. Pengawas pengadilan
Sekretariat Lembaga Non Struktural			
73.	Sekretariat Komisi Nasional HAM	372. Analis pelanggaran HAM 373. Penyuluh pelanggaran HAM	515. Analis pelanggaran HAM 516. Penyuluh pelanggaran HAM
74.	Sekretariat KPU Pusat/Provinsi/ Kab/Kota	374. Analis pemilihan umum 375. Penyuluh pemilihan umum 376. Pengawas pemilihan umum	517. Analis pemilihan umum 518. Penyuluh pemilihan umum 519. Pengawas pemilihan umum 520. Verifikator partai politik peserta pemilu 521. Verifikator perseorangan peserta pemilu





Lanjutan Tabel I.41

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
75.			522. Penyusun data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu 523. Analis distribusi pemilu 524. Penyusun dokumentasi distribusi pemilu
76.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	377. Analis keamanan laut 378. Penyuluh keamanan laut	525. Analis keamanan laut 526. Penyuluh keamanan laut
77.	PPATK	379. Analis PPATK 380. Penyuluh PPATK 381. Pengawas PPATK	527. Analis PPATK 528. Penyuluh PPATK 529. Pengawas PPATK 530. Pemeriksa transaksi keuangan
78.	Badan Pengelola Perbatasan		531. Analis wilayah/peta 532. Pengawas perbatasan

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.42 Nomenklatur Lembaga Pusat / Pemerintah Daerah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2013 dan 2015

No	Nama Instansi Pemerintah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2013	Nama Instansi Pemerintah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2015
1.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Kantor Regional III BKN Bandung
2.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3.	Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan (BPKP)	Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan (BPKP)
4.	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
5.	Kementerian Kehutanan	Kementerian Kehutanan
6.	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pertahanan
7.	Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I), Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I), Lembaga Administrasi Negara (LAN)
8.	Pemprov. Jawa Tengah	BKD Provinsi Jawa Tengah
9.	Pemprov. DI Yogyakarta	BKD Provinsi DIY
10.	Badan Diklat Pemprov. Jawa Timur	BKD Provinsi Jawa Timur
11.	Pemprov. Nusa Tenggara Barat (NTB)	BKD dan Diklat Provinsi NTB
12.	Pemprov. Nusa Tenggara Timur (NTT)	BKD Provinsi NTT
13.	Kementerian Pekerjaan Umum (sedang dalam proses persiapan)	Kementerian Pekerjaan Umum
14.	Kementerian Nakertrans (sedang dalam proses persiapan)	Kementerian Hukum dan HAM
15.	Kementerian Perdagangan (sedang dalam proses persiapan)	POLRI
16.		BKD Provinsi Maluku
17.		BKD Provinsi DKI Jakarta
18.		BKD Provinsi Jawa Barat

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013 dan Badan Kepegawaian Negara, 2015



BAGIAN II

KETATALAKSANAAN



Pada bagian ini disajikan data ketatalaksanaan (*business process*) dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data tersebut di antaranya adalah data mengenai sistem perencanaan kerja, sistem prosedur kerja, sistem pengawasan, dan sistem pelaporan.

A. Sistem Perencanaan Kerja

Bagian ini menyajikan data yang menggambarkan perencanaan kerja pemerintah, yaitu data ketersediaan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ketersediaan dokumen Penetapan Kinerja (PK). Kedua dokumen ini harus dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah karena berisikan target kinerja yang harus dicapai oleh organisasi pemerintah. Kementerian PAN dan RB mencatat, hampir seluruh instansi pusat telah memiliki IKU pada tahun 2013 yaitu mencapai 83 instansi (97,65). Sedangkan presentase provinsi yang memiliki dokumen IKU cukup tinggi dimana pada tahun 2013 mencapai 79,41% dari 34 provinsi yang ada. Namun untuk kabupaten/kota, masih rendah presentase daerah yang memiliki IKU yaitu hanya 49,80% di tahun 2013. Data ini perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan karena masih sedikit instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah yang belum memiliki dokumen IKU. Data mengenai jumlah lembaga pusat dan pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen IKU dapat dilihat pada tabel II.1 sampai II.4. Berbeda dengan kepemilikan dokumen IKU, sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dari data yang dimiliki oleh Kementerian PAN dan RB, pada tahun 2013, lembaga pusat yang telah menyusun PK sebanyak 85 (100% dari jumlah instansi pusat yang data oleh Kementerian PAN dan RB) lembaga, 31 (91,18%) propinsi, 390 (76,77%) kabupaten/kota telah memiliki dokumen PK. Data lengkap mengenai instansi yang telah menyusun dan memiliki dokumen Penetapan Kinerja disajikan pada tabel II.5 sampai tabel II.8.

B. Sistem Prosedur Kerja

Prosedur merupakan tata cara kerja untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat diperlukan prosedur yang lengkap dan memadai, baik berupa dokumen maupun alat teknologi yang digunakan. Dalam publikasi ini, data prosedur yang disajikan terdiri



dari data Pemerintah Daerah yang telah menyusun dokumen Standar Operating Procedures (SOP); jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan; pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah; penerapan e-government Pemerintah Pusat dan Daerah; dan data mengenai penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Pusat dan Daerah.

Data mengenai Daerah yang telah menyusun dokumen Standar Operating Procedures (SOP) dapat dilihat pada tabel II.9 dan II.10. Dari tabel II.9 dapat dilihat bahwa sampai pada tahun 2013 baru sebanyak 147 (27%) Pemerintah Daerah yang memiliki dokumen SOP. Sedangkan pada tabel II.10 disajikan rekapitulasi jumlah instansi pusat dan pemerintah daerah yang sudah dan belum menyusun/menerapkan SOP pada tahun 2014. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata masih banyak pemerintah pusat maupun daerah yang belum menyusun maupun menerapkan SOP. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Untuk data jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan dapat dilihat pada tabel II.11 Standar Pelayanan Minimum (SPM) berisikan indikator dan target setiap pelayanan yang harus dicapai oleh Daerah. Sampai tahun ini, belum ada penambahan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterbitkan, masih sebanyak 15 Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan sebagai pedoman dan standar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan di Daerah. Dari 15 Bidang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan tersebut, semua bidang sudah memiliki peraturan teknisnya.

Data berikutnya yang disajikan dalam publikasi ini adalah data pemerintah daerah yang telah menerapkan PTSP tahun 2014 sampai tahun 2015 pada tabel II.12. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2015 sudah sebanyak 498 (91%) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki PTSP. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi menjadi cepat, mudah dan murah. Data mengenai penerapan e-Government Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel II.13. Sementara data mengenai Pemerintah Daerah yang telah memiliki website dapat dilihat pada tabel II.15. Pada tahun ini, ada penambahan tabel baru (Tabel II.14) yaitu data mengenai jumlah domain instansi pemerintah dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa sampai dengan tahun 2015 sudah ada 6034 domain instansi pemerintah. Domain tersebut dibagi menjadi tiga tipe yaitu .go.id untuk lembaga pemerintahan; .desa.id untuk situs pemerintahan desa; dan mil.id untuk militer Indonesia. Sampai Penggunaan e-government dalam tata kerja pemerintahan sebagian besar masih terbatas pada beberapa jenis, diantaranya adalah penyediaan website lembaga sebagai sarana publikasi informasi kepada masyarakat dan aplikasi untuk manajemen internal instansi pemerintah.

Data mengenai jumlah lembaga pemerintah pusat yang telah melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2013 dapat dilihat pada tabel II.16. Sampai tahun 2013, baru sebanyak 53 (32%) Lembaga Pusat yang memiliki LPSE. Sementara itu, data jumlah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013 dapat dilihat



pada tabel II.17. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai pada tahun 2013 sudah sebanyak 462 (87%) Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu untuk dibangun dan dikembangkan di setiap instansi pemerintah untuk menjamin tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dilaksanakan secara adil, jujur dan bersaing. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini juga diharapkan dapat mengurangi praktek korupsi di lingkungan pemerintah.

C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian jalannya pemerintahan diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan meminimalisir penyimpangan yang merugikan. Dalam publikasi ini disajikan data mengenai pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Pada tabel II.18 dan tabel II. 19 disajikan data jumlah dan nomenklatur pemerintah pusat yang telah memiliki peraturan menteri/kepala K/L mengenai SPIP tahun 2009 – 2012. Dari data tersebut terlihat bahwa antara tahun 2009 sampai tahun 2012 terdapat peningkatan yang cukup signifikan lembaga pusat yang telah memiliki peraturan mengenai SPIP yaitu sebanyak dua lembaga pada tahun 2009 menjadi 86 lembaga pada tahun 2012. Sementara pada tabel II.20 dan tabel II.21 disajikan data jumlah dan nomenklatur pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen peraturan daerah mengenai SPIP. Jika dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah pada tahun 2014, maka presentase pemerintah daerah yang memiliki peraturan daerah SPIP adalah 96%. Jadi sudah hampir semua instansi daerah yang membuat peraturan SPIP.



**Tabel II.1 Jumlah Instansi Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013**

Instansi Pusat	2010	2011	2012	2013
Jumlah Instansi Pusat	79	82	81	85
Telah Memiliki IKU	69	75	80	83
Persentase	87,34	91,46	98,77	97,65

Sumber : Kementerian PAN dan RB 2015, diolah

Tabel II.2 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013

Pemerintah Provinsi	2010	2011	2012	2013
Jumlah Provinsi	33	33	34	34
Telah Memiliki IKU	18	23	25	27
Persentase	54,55	69,70	75,53	79,41

Sumber : Buku Statistik Aparatur Indonesia 2014 dan Kementerian PAN dan RB 2015, diolah

Tabel II.3 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013

Pemerintah Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kabupaten/Kota	497	497	497	508
Telah Memiliki IKU	22	20	143	253
Persentase	4,43	4,02	28,77	49,80

Sumber : Buku Statistik Aparatur Indonesia 2014 dan Kementerian PAN dan RB 2015, diolah

Tabel II.4 Jumlah Keseluruhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2010 - 2013

Total Instansi Pusat/Pemda	2010	2011	2012	2013
Jumlah Instansi Pusat/Pemda	609	612	612	627
Telah Memiliki IKU	109	118	248	363
Persentase	17,90	19,28	40,52	57,89

Sumber : Buku Statistik Aparatur Indonesia 2014 dan Kementerian PAN dan RB 2015, diolah



Tabel II.5 Jumlah Instansi Pusat yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013

Instansi Pusat	2010	2011	2012	2013
Jumlah Instansi Pusat	79	82	81	85
Telah Memiliki Tapkin	71	81	81	85
Persentase	89,87	98,78	100,00	100,00

Sumber : Kementerian PAN dan RB 2015, diolah

Tabel II.6 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013

Pemerintah Provinsi	2010	2011	2012	2013
Jumlah Provinsi	33	33	34	34
Telah Memiliki Tapkin	10	26	29	31
Persentase	30,30	78,79	85,29	91,18

Sumber : Buku Statistik Aparatur Indonesia 2014 dan Kementerian PAN dan RB 2015, diolah

Tabel II.7 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kabupaten/Kota	497	497	497	508
Telah Memiliki Tapkin	30	35	278	390
Persentase	6,04	7,04	55,94	76,77

Sumber : Buku Statistik Aparatur Indonesia 2014 dan Kementerian PAN dan RB 2015, diolah

Tabel II.8 Jumlah Keseluruhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 - 2013

Total Instansi Pusat/Pemda	2010	2011	2012	2013
Jumlah Instansi Pusat/Pemda	609	612	612	627
Telah Memiliki Tapkin	111	142	388	506
Persentase	18,23	23,20	63,40	80,70

Sumber : Buku Statistik Aparatur Indonesia 2014 dan Kementerian PAN dan RB 2015, diolah





Tabel II.9 Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2013

Provinsi	Total Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah yang Sudah Memiliki SOP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	0	4	1	5	21
Sumatera Utara	34	0	6	4	10	29
Sumatera Barat	20	0	4	2	6	30
Riau	13	0	1	0	1	8
Jambi	12	0	5	1	6	50
Sumatera Selatan	17	1	5	2	8	47
Bengkulu	11	1	2	0	3	27
Lampung	16	0	3	0	3	19
Bangka Belitung	8	0	4	1	5	63
Kepulauan Riau	8	0	0	1	1	13
DKI Jakarta	7	0	0	1	1	14
Jawa Barat	28	0	7	3	10	36
Jawa Tengah	36	0	11	1	12	33
DI Yogyakarta	6	0	2	1	3	50
Jawa Timur	39	0	13	5	18	46
Banten	9	0	0	1	1	11
Bali	10	0	4	1	5	50
Nusa Tenggara Barat	11	1	2	0	3	27
Nusa Tenggara Timur	23	0	3	0	3	13
Kalimantan Barat	15	1	1	1	3	20
Kalimantan Tengah	15	0	3	0	3	20
Kalimantan Selatan	14	0	7	1	8	57
Kalimantan Timur	11*	0	1	2	3	
Sulawesi Utara	16	1	3	1	5	31
Sulawesi Tengah	13	1	1	1	3	23
Sulawesi Selatan	25	0	10	1	11	44
Sulawesi Tenggara	14	0	2	0	2	14
Gorontalo	7	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	7	1	1	0	2	29
Maluku	12	0	1	2	3	25
Maluku Utara	11	0	0	0	0	0
Papua	30	0	0	0	0	0
Papua Barat	14	0	0	0	0	0
Kalimantan Utara**	6					
Total	542	7	106	34	147	27

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013

Catatan :

* Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dihitung persentasenya karena pada tahun 2013 Kalimantan Timur sudah dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah daerah yang memiliki dokumen SOP sebelum pemekaran yaitu 15 daerah.

** Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia datanya.





Tabel II.10 Jumlah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2014

Instansi Pusat/Pemda	Sudah Menyusun/Menerapkan	Belum Menyusun/Menerapkan
Kementerian	18	16
Lembaga Pemerintah Non Kementerian	11	17
Lembaga Non Struktural	2	87
Pemerintah Provinsi	16	18
Pemerintah Kabupaten/Kota	124	390
Total	171	528

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2015

Tabel II.11 Jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Telah Ditetapkan

No.	Bidang SPM	Dasar Hukum
1.	Pemerintah Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
2.	Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/ Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (provinsi dan kabupaten/kota)
6.	Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
7.	Keluarga Berencana dan Sejahtera	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota





Lanjutan Tabel II.11

No.	Bidang SPM	Dasar Hukum
8.	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
9.	Ketenagakerjaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.04/MEN/IV/ 2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Permenakertrans No.PER.15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan (provinsi dan kabupaten/kota)
10.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kabupaten/Kota)
11.	Ketahanan Pangan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/ 12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12.	Kesenian	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor.PM.106/HK. 501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian (Provinsi dan Kabupaten Kota)
13.	Komunikasi dan Informasi	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M. KOMINFO/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
14.	Perhubungan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
15.	Penanaman Modal	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2015

Tabel II.12 Data Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2014 - 2015

Provinsi	Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2014					Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2015				
		Prov	Kab	Kota	Total	%		Prov	Kab	Kota	Total	%
Aceh	24	1	18	5	24	100	24	1	18	5	24	100
Sumatera Utara	34	1	24	8	33	97	34	1	24	8	33	97
Sumatera Barat	20	1	12	7	20	100	20	1	12	7	20	100
Riau	13	1	10	2	13	100	13	1	10	2	13	100
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100	8	1	5	2	8	100
Jambi	12	1	9	2	12	100	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	18	1	11	4	16	89	18	1	12	4	17	94
Kepulauan Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100	8	1	6	1	8	100
Bengkulu	11	1	9	1	11	100	11	1	9	1	11	100





Lanjutan Tabel II.12

Provinsi	Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2014					Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2015				
		Prov	Kab	Kota	Total	%		Prov	Kab	Kota	Total	%
Lampung	16	1	12	2	15	94	16	1	12	2	15	94
DKI Jakarta	7	1	0	5	6	86	7	1	0	0	1	14
Jawa Barat	28	1	18	9	28	100	28	1	18	9	28	100
Banten	9	1	4	4	9	100	9	1	4	4	9	100
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100	39	1	28	9	38	97
Bali	10	1	8	1	10	100	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	7	2	10	91	11	1	8	2	11	100
Nusa Tenggara Timur	23	1	19	1	21	91	23	1	20	1	22	96
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100	15	1	12	2	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100	14	1	11	2	14	100
Kalimantan Timur	11	1	6	3	10	91	11	1	6	3	10	91
Kalimantan Utara*	6	1	4	1	6	100	6	1	4	1	6	100
Sulawesi Utara	16	1	11	4	16	100	16	1	11	4	16	100
Gorontalo	7	1	5	1	7	100	7	1	5	1	7	100
Sulawesi Tengah	14	1	11	1	13	93	14	1	12	1	14	100
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96	25	1	20	3	24	96
Sulawesi Barat	7	1	5	0	6	86	7	1	5	0	6	86





Lanjutan Tabel II.12

Provinsi	Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2014					Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2015				
		Prov	Kab	Kota	Total	%		Prov	Kab	Kota	Total	%
Sulawesi Tenggara	18	1	10	2	13	72	18	1	10	2	13	72
Maluku	12	1	8	2	11	92	12	1	8	2	11	92
Maluku Utara	11	1	5	1	7	64	11	1	5	1	7	64
Papua	30	1	9	1	11	37	30	1	9	1	11	37
Papua Barat	14	1	4	1	6	43	14	1	5	1	7	50
Total	548	34	368	97	499	91	548	34	372	92	498	91

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2015

Keterangan :

* Daerah Pemekaran / Daerah Otonomi Baru

Tabel II.13 Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Menerapkan e-Government Tahun 2012

No.	Jenis Lembaga Negara	Jumlah	Lembaga Pusat yang menerapkan e-Gov 2012	
			e-Gov 2012	%
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	5	71
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	4	1	25
3.	Kementerian	34	31	91
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	27	27	100
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	5	5	100
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2	2	100
7.	Lembaga Non Struktural	89	87	98
Total Lembaga		168	158	94

Sumber : Kemenpan RB, 2013



Tabel II.14 Jumlah Domain Instansi Pemerintah Tahun 2012-2015

Jenis Domain	2012	2013	2014	2015*
.go.id	2986	3208	3380	3510
.desa.id	0	463	1336	2252
mil.id	216	253	259	272
Total	3202	3924	4975	6034

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015

Keterangan :

* Data per Agustus 2015

Tabel II.15 Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Website Tahun 2012

Provinsi	Total Pemda 2012	Daerah yang Sudah Memiliki Website 2012				
		Prov.	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	16	5	22	92
Sumatera Utara	34	1	20	6	27	79
Sumatera Barat	20	1	11	7	19	95
Riau	13	1	9	2	12	92
Jambi	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100
Bengkulu	11	1	8	1	10	91
Lampung	15	1	11	2	14	93
Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100
DKI Jakarta*	6	1		5	6	86
Jawa Barat	27	1	17	9	27	100
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100
Banten	9	1	4	4	9	100
Bali	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100
Nusa Tenggara Timur	22	1	16	1	18	82
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100
Kalimantan Timur	15	1	7	4	12	80
Sulawesi Utara	16	1	8	4	13	81
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96
Sulawesi Tenggara	13	1	5	2	8	62
Gorontalo	7	1	3	1	5	71
Sulawesi Barat	6	1	4		5	83





Lanjutan Tabel II.15

Provinsi	Total Pemda 2012	Daerah yang Sudah Memiliki Website 2012				
		Prov.	Kab	Kota	Total	%
Maluku	12	1	3	1	5	42
Maluku Utara	10	1	5	2	8	80
Papua	30	1	18		19	63
Papua Barat	12	1	7	1	9	75
Kalimantan Utara*						
Total	530	33	346	94	473	89

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2013

Keterangan :

* Daerah otonom baru

Tabel II.16 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013

No.	Jenis Lembaga Negara	Jumlah	Lembaga Pusat yang Melaksanakan LPSE 2013	
			LPSE 2013	%
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	5	71
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	4		0
3.	Kementerian	34	27	79
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	27	15	56
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	5	4	80
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2		0
7.	Lembaga Non Struktural	89	2	2
Total Lembaga		168	53	32

Sumber : LKPP, diolah, 2013

Tabel II.17 Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013

Provinsi	Total Pemda	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
		Prov.	Kab.	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	24	100
Sumatera Utara	34	1	25	8	34	100
Sumatera Barat	20	1	12	7	20	100
Riau	13	1	10	2	13	100
Jambi	12	1	9	2	12	100



Lanjutan Tabel II.17

Provinsi	Total Pemda	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
		Prov.	Kab	Kota	Total	%
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100
Bengkulu	11	1	9	1	11	100
Lampung	15	1	12	1	14	93
Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100
DKI Jakarta*	7	1				100
Jawa Barat	27	1	16	9	26	96
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100
Banten	9	1	4	4	9	100
Bali	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100
Nusa Tenggara Timur	22	1	13	1	15	68
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	12	1	14	100
Kalimantan Timur	15	1	10	4	15	100
Sulawesi Utara	16	1	9	4	14	88
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96
Sulawesi Tenggara	13	1	10	2	13	100
Gorontalo	7	1	5	1	7	100
Sulawesi Barat	6	1	4		5	83
Maluku	12	1	2		3	25
Maluku Utara	10	1	3	1	5	50
Papua	30	1	3	1	5	17
Papua Barat	12	1	3		4	33
Total	530	33	343	87	462	87

Sumber : LKPP, diolah, 2013

Catatan : LPSE Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan LPSE.





Tabel II.18 Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No.	Kementerian / Lembaga	Peraturan Menteri / Kepala Lembaga Nomor
Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara		
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2 Tahun 2010
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	01A/PER-SEKJEN/2010
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	23/K/I-XIII.2/11/2011
4.	Mahkamah Agung	151A/KMA/SK/IX/2011
5.	Mahkamah Konstitusi	10 Tahun 2011
6.	Dewan Perwakilan Daerah	Peraturan No 03/2012
Lembaga Negara yang Diatur dalam UUD 1945 dan UU		
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	06 Tahun 2012
2.	Ombudsman Republik Indonesia	11 Tahun 2012
3.	Komisi Yudisial	2 Tahun 2011
Kementerian		
1.	Kementerian Sekretariat Negara	No.11 Tahun 2012
2.	Kementerian Dalam Negeri	40 Tahun 2010
3.	Kementerian Luar Negeri	12 Tahun 2011
4.	Kementerian Pertahanan	21 tahun 2010
5.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	M.HH-02.PW.02.03 Thn 2011
6.	Kementerian Keuangan	152/KMK.09/2011
7.	Kementerian Pertanian	23/Permentan/OT.140/5/2009
8.	Kementerian Perindustrian	199/M-IND/4/2011
9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	17 TAHUN 2011
10.	Kementerian Perhubungan	PM 78 Tahun 2011
11.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional	47 Tahun 2011
12.	Kementerian Kesehatan	238/Menkes/SK/IV/2009
13.	Kementerian Agama	24 tahun 2011
14.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PER.19/MEN/XII/2011
15.	Kementerian Sosial	91 Tahun 2011
16.	Kementerian Kehutanan	P.27/Menhut-II/2010
17.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PER.20/MEN/2011
18.	Kementerian Pekerjaan Umum	02/IN/M/2011
19.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	PER-06/MENKO/POLHUKAM/11/2011
20.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	13/M.Ekon/09/2012
21.	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	05 Tahun 2011
22.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PM.97/UM.001/MPEK/2011
23.	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	14/MBU/2012



Lanjutan Tabel II.18

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Menteri / Kepala Lembaga Nomor
24.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	06/M/PER/XII/2011
25.	Kementerian Lingkungan Hidup	114 Tahun 2011
26.	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12/Per/M.KUKM/XII/2011
27.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9 Tahun 2012
28.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	10 Tahun 2012 dan 12 Tahun 2012
29.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	5 Tahun 2011
30.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	26/PER/M.KOMINFO/12/2011
31.	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	10 Tahun 2011
32.	Kementerian Perdagangan	970/M-DAG/KEP/9/2011
33.	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	22 tahun 2011
34.	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	0022 Tahun 2012
Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri		
1.	Kejaksaan Agung	KEP-255/A/JA/12/2011
2.	Badan Intelijen Negara	02 Tahun 2012
3.	Kepolisian RI	Kep-696/XII/2011
4.	Sekretariat Kabinet	8 Tahun 2012
Lembaga Pemerintah Non Kementerian		
1.	Lembaga Sandi Negara	5 Tahun 2012
2.	Badan Pusat Statistik	26 Tahun 2011
3.	Badan Pertanahan Nasional	18 Tahun 2010
4.	Perpustakaan Nasional	No.4 Tahun 2012
5.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011
6.	Lembaga Ketahanan Nasional	04 Tahun 2012
7.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Perka BKPM No. 4 Tahun 2012
8.	Badan Narkotika Nasional	12 TAHUN 2012
9.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	173/PER/B3/2011
10.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	KEP.03 Tahun 2011
11.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1012/A/2011
12.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	201/KA/XI/2011
13.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	347 Tahun 2011
14.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	367 Tahun 2011





Lanjutan Tabel II.18

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Menteri / Kepala Lembaga Nomor
15.	Badan Standarisasi Nasional	13 Tahun 2011
16.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	11 Tahun 2011
17.	Lembaga Administrasi Negara	19 Tahun 2011
18.	Arsip Nasional Republik Indonesia	10 Tahun 2011
19.	Badan Kepegawaian Negara	175.11.KEP/2011
20.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	KEP-882/K/SU/2011
21.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	203 tahun 2011
22.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	PER.15/KA/XII/2011
23.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Tahun 2011
24.	Basarnas	PK.16 Tahun 2011
25.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	PER-03/K.BNPT/9/2012
Lembaga Pemerintah Lainnya		
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Peraturan Nomor 3/2012
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	97/PRTR/DIREKSI/TVRI/2012
Lembaga Non Struktural		
1.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	050/PRT/P/2012
2.	Dewan Ketahanan Nasional	Kep-87/Sesjen/XII/2012
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	002/TUA/X/2012
4.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	4 Tahun 2012
5.	Otorita Batam	12 TAHUN 2012
6.	Komisi Pemilihan Umum	No. 17 Tahun 2012
7.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PER-12/1.01/PPATK/09/12
8.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	2 Tahun 2012
9.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	35/PER/BP-BPWS/IX/2012
10.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	181.1.Tahun 2011
11.	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	8 Tahun 2012
12.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	09/BPKS/2012

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , 2015



Tabel II.19 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Kepala K/L Mengenai SPIP yang Diterbitkan Tahun 2009 – 2012

No.	Jenis Lembaga Negara	2009	2010	2011	2012
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara	-	2	5	6
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	-	-	1	3
3.	Kementerian	2	5	28	34
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	-	1	19	25
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	-	-	2	4
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya	-	-	-	2
7.	Lembaga Non Struktural	-	-	1	12
Total		2	8	56	86

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2015

Tabel II.20 Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP yang Diterbitkan Tahun 2009 – 2012

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah Nomor
1.	1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	09 Tahun 2010
2.	2. Kab. Aceh Barat	11 Tahun 2011
3.	3. Kab. Aceh Besar	12 Tahun 2010
4.	4. Kab. Aceh Selatan	7 Tahun 2010
5.	5. Kab. Aceh Singkil	20 Tahun 2011
6.	6. Kab. Aceh Tengah	19 Tahun 2010
7.	7. Kab. Aceh Tenggara	117 Tahun 2010
8.	8. Kab. Aceh Timur	9 Tahun 2011
9.	9. Kab. Aceh Utara	11 Tahun 2011
10.	10. Kab. Bireun	12 Tahun 2011
11.	11. Kab. Pidie	3 Tahun 2010
12.	12. Kab. Simeulue	10 Tahun 2011
13.	13. Kota Banda Aceh	21 Tahun 2010
14.	14. Kota Sabang	21 Tahun 2010
15.	15. Kota Langsa	40 Tahun 2010
16.	16. Kota Lhokseumawe	06 Tahun 2011
17.	17. Kab. Nagan Raya	3 Tahun 2011
18.	18. Kab. Aceh Jaya	5 Tahun 2010
19.	19. Kab. Aceh Barat Daya	16 Tahun 2011
20.	20. Kab. Gayo Lues	7 Tahun 2010
21.	21. Kab. Aceh Tamiang	9 Tahun 2011
22.	22. Kab. Bener Meriah	32 Tahun 2010
23.	23. Kota Subulussalam	19 Tahun 2010
24.	24. Kab. Pidie Jaya	12 Tahun 2011
25.	1. Provinsi Sumatera Utara	33 Tahun 2011
26.	2. Kab. Asahan	24 Tahun 2011
27.	3. Kab. Dairi	06 Tahun 2011





Lanjutan Tabel II.20

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah Nomor
28.	4. Kab. Deli Serdang	495 Tahun 2011
29.	5. Kab. Tanah Karo	05 Tahun 2010
30.	6. Kab. Labuhan Batu	58 Tahun 2011
31.	7. Kab. Langkat	19 Tahun 2011
32.	8. Kab. Mandailing Natal	57 Tahun 2011
33.	9. Kab. Nias	19 Tahun 2011
34.	10. Kab. Simalungun	12 Tahun 2011
35.	11. Kab. Tapanuli Selatan	49/PR/2011
36.	12. Kab. Tapanuli Tengah	04 Tahun 2010
37.	13. Kab. Tapanuli Utara	04 Tahun 2010
38.	14. Kab. Toba Samosir	37 Tahun 2011
39.	15. Kota Binjai	061-4724/2010
40.	16. Kota Medan	23 Tahun 2011
41.	17. Kota Pematang Siantar	12 Tahun 2011
42.	18. Kota Sibolga	180/15/2011
43.	19. Kota Tanjung Balai	13 Tahun 2010
44.	20. Kota Tebing Tinggi	07 Tahun 2011
45.	21. Kota Padang Sidempuan	16.B/PW/2010
46.	22. Kab. Pakpak Bharat	7 Tahun 2011
47.	23. Kab. Nias Selatan	09 Tahun 2011
48.	24. Kab. Humbang Hasundutan	13 Tahun 2010
49.	25. Kab. Serdang Berdagai	34 Tahun 2011
50.	26. Kab. Samosir	3 Tahun 2011
51.	27. Kab. Batu bara	12 Tahun 2011
52.	28. Kab. Labuhan Batu Utara	06 Tahun 2011
53.	29. Kab. Labuhan Batu Selatan	15 Tahun 2011
54.	30. Kab. Padang Lawas Utara	08 Tahun 2011
55.	31. Kab. Padang Lawas	08 Tahun 2010
56.	32. Kab Nias Utara	13 Tahun 2011
57.	33. Kab Nias Barat	11 Tahun 2011
58.	34. Kota Gunung Sitoli	7 Tahun 2011
59.	1. Provinsi Sumatera Barat	40 Tahun 2009
60.	2. Kab. Limapuluh Kota	183 Tahun 2011
61.	3. Kab. Agam	04 Tahun 2012
62.	4. Kab. Kepulauan Mentawai	01 Tahun 2012
63.	5. Kab. Padang Pariaman	14 Tahun 2011
64.	6. Kab. Pasaman	18 Tahun 2010
65.	7. Kab. Sijunjung	162 Tahun 2011
66.	8. Kab. Solok	8 Tahun 2011
67.	9. Kab. Pesisir Selatan	38 Tahun 2011
68.	10. Kab. Tanah Datar	68 Tahun 2009
69.	11. Kota Bukit Tinggi	18 Tahun 2010
70.	12. Kota Padang Panjang	16 Tahun 2011
71.	13. Kota Padang	37 Tahun 2011
72.	14. Kota Payakumbuh	68 Tahun 2010
73.	15. Kota Sawahlunto	02 Tahun 2012
74.	16. Kota Solok	6 Tahun 2011
75.	17. Kota Pariaman	67 Tahun 2010
76.	18. Kab. Pasaman Barat	28 Tahun 2011



Lanjutan Tabel II.20

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah Nomor
77.	19.	Kab. Dharmasraya	11 Tahun 2012
78.	20.	Kab. Solok Selatan	28 Tahun 2011
79.	1.	Provinsi Riau	31 Tahun 2010
80.	2.	Kab. Bengkalis	05 Tahun 2011
81.	3.	Kab. Indragiri Hilir	18 Tahun 2010
82.	4.	Kab. Indragiri Hulu	36 Tahun 2010
83.	5.	Kab. Kampar	28 Tahun 2010
84.	6.	Kab. Kuantan Singingi	8 Tahun 2012
85.	7.	Kab. Pelalawan	15 Tahun 2011
86.	8.	Kab. Rokan Hilir	26 Tahun 2009
87.	9.	Kab. Rokan Hulu	5 Tahun 2011
88.	10.	Kab. Siak	31 Tahun 2011
89.	11.	Kota Dumai	23 Tahun 2010
90.	12.	Kota Pekanbaru	24 Tahun 2010
91.	13.	Kab. Kep. Meranti	52 Tahun 2010
92.	1.	Provinsi Kepulauan Riau	16 Tahun 2010
93.	2.	Kab. Bintan	16 Tahun 2010
94.	3.	Kab. Natuna	19 tahun 2011
95.	4.	Kab. Karimun	13 tahun 2011
96.	5.	Kota Batam	10 tahun 2011
97.	6.	Kota Tanjung Pinang	31 Tahun 2011
98.	7.	Kab. Lingga	5 Tahun 2011
99.	8.	Kab. Kepulauan Anambas	15 Tahun 2011
100.	1.	Provinsi Jambi	47 Tahun 2011
101.	2.	Kab. Batanghari	26 Tahun 2012
102.	3.	Kab. Bungo	3 Tahun 2011
103.	4.	Kab. Kerinci	23 Tahun 2011
104.	5.	Kab. Merangin	28 Tahun 2010
105.	6.	Kab. Muaro Jambi	19 Tahun 2012
106.	7.	Kab. Sarolangun	19 Tahun 2012
107.	8.	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Tahun 2011
108.	9.	Kab. Tanjung Jabung Timur	15 Tahun 2010
109.	10.	Kab. Tebo	14 Tahun 2012
110.	11.	Kota Jambi	17 Tahun 2012
111.	12.	Kota Sungai Penuh	22 Tahun 2010
112.	1.	Provinsi Sumatera Selatan	51 Tahun 2010
113.	2.	Kab. Lahat	1 Tahun 2011
114.	3.	Kab. Musi Banyuasin	5 Tahun 2011
115.	4.	Kab. Musi Rawas	11 Tahun 2010
116.	5.	Kab. Muara Enim	42 Tahun 2010
117.	6.	Kab. Ogan Komering Ilir	2 Tahun 2011
118.	7.	Kab. Ogan Komering Ulu	5 Tahun 2010
119.	8.	Kota Palembang	46 Tahun 2010
120.	9.	Kota Pagar Alam	2 Tahun 2011
121.	10.	Kota Lubuk Linggau	19 Tahun 2010
122.	11.	Kota Prabumulih	2 Tahun 2011





Lanjutan Tabel II.20

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
123.	12.	Kab. Banyuasin	633 Tahun 2010
124.	13.	Kab. Ogan Ilir	3 Tahun 2011
125.	14.	Kab. OKU Timur	14 Tahun 2010
126.	15.	Kab. OKU Selatan	15 Tahun 2012
127.	16.	Kab. Empat lawang	5 Tahun 2011
128.	1.	Provinsi Bangka Belitung	28 Tahun 2010
129.	2.	Kab. Bangka	18 Tahun 2010
130.	3.	Kab. Belitung	16 Tahun 2011
131.	4.	Kota Pangkal Pinang	27 Tahun 2010
132.	5.	Kab. Bangka selatan	13 Tahun 2010
133.	6.	Kab. Bangka Tengah	Tahun 2010
134.	7.	Kab. Bangka Barat	31 Tahun 2011
135.	8.	Kab. Belitung Timur	11 Tahun 2012
136.	1.	Provinsi Bengkulu	9 Tahun 2010
137.	2.	Kab. Bengkulu Selatan	19 Tahun 2009
138.	3.	Kab. Bengkulu Utara	9 Tahun 2010
139.	4.	Kab. Rejang Lebong	12 Tahun 2010
140.	5.	Kota Bengkulu	30 Tahun 2009
141.	6.	Kab. Kaur	11 Tahun 2010
142.	7.	Kab. Seluma	11 Tahun 2010
143.	8.	Kab. Mukomuko	8 Tahun 2010
144.	9.	Kab. Lebong	367 Tahun 2010
145.	10.	Kab. Kepahiang	07 Tahun 2010
146.	11.	Kab. Bengkulu Tengah	29 Tahun 2010
147.	1.	Provinsi Lampung	12 Tahun 2010
148.	2.	Kab. Lampung Barat	10 Tahun 2010
149.	3.	Kab. Lampung Selatan	3 Tahun 2010
150.	4.	Kab. Lampung Tengah	9 Tahun 2010
151.	5.	Kab. Lampung Utara	6 Tahun 2010
152.	6.	Kab. Lampung Timur	14 Tahun 2010
153.	7.	Kab. Tanggamus	7 Tahun 2010
154.	8.	Kab. Tulang Bawang	8 Tahun 2010
155.	9.	Kab. Way Kanan	10 Tahun 2010
156.	10.	Kota Bandar Lampung	22 Tahun 2010
157.	11.	Kota Metro	4 Tahun 2010
158.	12.	Kab. Pesawaran	2 Tahun 2010
159.	13.	Kab Tulang Bawang Barat	4 Tahun 2010
160.	14.	Kab Mesuji	10 Tahun 2010
161.	15.	Kab Pringsewu	6 Tahun 2010
162.	1.	Provinsi DKI Jakarta	171 Tahun 2010
163.	1.	Provinsi Jawa Barat	10 Tahun 2011
164.	2.	Kab. Bandung	30 Tahun 2011
165.	3.	Kab. Bekasi	35 Tahun 2011
166.	4.	Kab. Bogor	49 Tahun 2011



Lanjutan Tabel II.20

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
167.	5. Kab. Ciamis	20 Tahun 2011 11
168.	6. Kab. Cianjur	12 Tahun 2011
169.	7. Kab. Cirebon	14 Tahun 2011
170.	8. Kab. Garut	504 Tahun 2011
171.	9. Kab. Indramayu	15B Tahun 2011
172.	10. Kab. Karawang	43 Tahun 2010
173.	11. Kab. Kuningan	04 Tahun 2012
174.	12. Kab. Majalengka	15 Tahun 2012
175.	13. Kab. Purwakarta	28 Tahun 2011
176.	14. Kab. Subang	25 Tahun 2011
177.	15. Kab. Sukabumi	24 Tahun 2010
178.	16. Kab. Sumedang	42 Tahun 2011
179.	17. Kab. Tasikmalaya	12 Tahun 2011
180.	18. Kota Bandung	944 Tahun 2010
181.	19. Kota Bekasi	30 Tahun 2010
182.	20. Kota Bogor	2 Tahun 2011
183.	21. Kota Cirebon	52 Tahun 2011
184.	22. Kota Depok	49 Tahun 2010
185.	23. Kota Sukabumi	16 Tahun 2011
186.	24. Kota Cimahi	20 Tahun 2011
187.	25. Kota Tasikmalaya	32 Tahun 2011
188.	26. Kota Banjar	22 Tahun 2011
189.	27. Kab. Bandung Barat	30 Tahun 2010
190.	1. Provinsi Banten	26 Tahun 2010
191.	2. Kab. Lebak	34 Tahun 2011
192.	3. Kab. Pandeglang	19 Tahun 2010
193.	4. Kab. Serang	45 Tahun 2010
194.	5. Kab. Tangerang	12 Tahun 2010
195.	6. Kota Cilegon	4 Tahun 2012
196.	7. Kota Tangerang	41 Tahun 2010
197.	8. Kota Serang	22 Tahun 2011
198.	9. Kota Tangerang Selatan	69 Tahun 2011
199.	1. Provinsi Jawa Tengah	89 Tahun 2010
200.	2. Kab. Banjarnegara	351 Tahun 2010
201.	3. Kab. Banyumas	64 Tahun 2010
202.	4. Kab. Batang	11 Tahun 2011
203.	5. Kab. Blora	84 Tahun 2010
204.	6. Kab. Boyolali	19 Tahun 2009
205.	7. Kab. Brebes	023.A Tahun 2010
206.	8. Kab. Cilacap	71 Tahun 2010
207.	9. Kab. Demak	13 Tahun 2010
208.	10. Kab. Grobogan	15 Tahun 2011
209.	11. Kab. Jepara	37 Tahun 2009
210.	12. Kab. Karanganyar	18 Tahun 2010
211.	13. Kab. Kebumen	7 Tahun 2011
212.	14. Kab. Kendal	36 Tahun 2010
213.	15. Kab. Klaten	7 Tahun 2011
214.	16. Kab. Kudus	23 Tahun 2012





Lanjutan Tabel II.20

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
215.	17. Kab. Magelang	31 Tahun 2011
216.	18. Kab. Pati	12 Tahun 2011
217.	19. Kab. Pekalongan	14 Tahun 2010
218.	20. Kab. Pemalang	11 Tahun 2011
219.	21. Kab. Purbalingga	88 Tahun 2011
220.	22. Kab. Purworejo	9 Tahun 2010
221.	23. Kab. Rembang	21 Tahun 2011
222.	24. Kab. Semarang	74 Tahun 2011
223.	25. Kab. Sragen	79 Tahun 2009
224.	26. Kab. Sukoharjo	54 Tahun 2010
225.	27. Kab. Tegal	43 Tahun 2010
226.	28. Kab. Temanggung	59 Tahun 2010
227.	29. Kab. Wonogiri	23 Tahun 2011
228.	30. Kab. Wonosobo	37 Tahun 2010
229.	31. Kota Magelang	14 Tahun 2011
230.	32. Kota Pekalongan	10 Tahun 2010
231.	33. Kota Salatiga	34 Tahun 2011
232.	34. Kota Semarang	24 Tahun 2010
233.	35. Kota Surakarta	20 Tahun 2009
234.	36. Kota Tegal	02 Tahun 2011
235.	1. Provinsi DI Yogyakarta	52 Tahun 2010
236.	2. Kab. Bantul	10 Tahun 2011
237.	3. Kab. Gunung Kidul	6 Tahun 2011
238.	4. Kab. Kulon Progo	16 Tahun 2010
239.	5. Kab. Sleman	35 Tahun 2010
240.	6. Kota Yogyakarta	61 Tahun 2010
241.	1. Provinsi Jawa Timur	66 Tahun 2010
242.	2. Kab. Bangkalan	29 Tahun 2010
243.	3. Kab. Banyuwangi	31 Tahun 2010
244.	4. Kab. Blitar	26 Tahun 2010
245.	5. Kab. Bojonegoro	41 Tahun 2010
246.	6. Kab. Bondowoso	18 Tahun 2010
247.	7. Kab. Gresik	36 Tahun 2010
248.	8. Kab. Jember	22 Tahun 2010
249.	9. Kab. Jombang	10 Tahun 2010
250.	10. Kab. Kediri	26 Tahun 2010
251.	11. Kab. Lamongan	39 Tahun 2010
252.	12. Kab. Lumajang	14 Tahun 2010
253.	13. Kab. Madiun	26 Tahun 2010
254.	14. Kab. Magetan	46 Tahun 2010
255.	15. Kab. Malang	21 Tahun 2010
256.	16. Kab. Mojokerto	52 Tahun 2010
257.	17. Kab. Nganjuk	38 Tahun 2010
258.	18. Kab. Ngawi	269 Tahun 2010
259.	19. Kab. Pacitan	26 Tahun 2010
260.	20. Kab. Pamekasan	37 A Tahun 2010
261.	21. Kab. Pasuruan	32 Tahun 2010
262.	22. Kab. Ponorogo	30 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.20

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
263.	23.	Kab. Probolinggo	22 Tahun 2010
264.	24.	Kab. Sampang	23 Tahun 2010
265.	25.	Kab. Sidoarjo	23 Tahun 2010
266.	26.	Kab. Situbondo	25 Tahun 2010
267.	27.	Kab. Sumenep	14 Tahun 2010
268.	28.	Kab. Trenggalek	72 Tahun 2010
269.	29.	Kab. Tuban	21 Tahun 2010
270.	30.	Kab. Tulungagung	43 Tahun 2010
271.	31.	Kota Blitar	18 Tahun 2010
272.	32.	Kota Kediri	37 Tahun 2010
273.	33.	Kota Madiun	23 Tahun 2010
274.	34.	Kota Malang	39 Tahun 2010
275.	35.	Kota Mojokerto	23 Tahun 2010
276.	36.	Kota Pasuruan	11 Tahun 2011
277.	37.	Kota Probolinggo	32 Tahun 2010
278.	38.	Kota Surabaya	51 Tahun 2010
279.	39.	Kota Batu	33 Tahun 2010
280.	1.	Provinsi Kalimantan Barat	30 Tahun 2010
281.	2.	Kab. Bengkayang	28 Tahun 2010
282.	3.	Kab. Landak	08 Tahun 2010
283.	4.	Kab. Kapuas Hulu	19 Tahun 2010
284.	5.	Kab. Ketapang	17 Tahun 2010
285.	6.	Kab. Pontianak	22 Tahun 2010
286.	7.	Kab. Sambas	26 Tahun 2010
287.	8.	Kab. Sanggau	27 Tahun 2010
288.	9.	Kab. Sintang	135 Tahun 2010
289.	10.	Kota Pontianak	06 Tahun 2010
290.	11.	Kota Singkawang	25 Tahun 2010
291.	12.	Kab. Sekadau	19 Tahun 2010
292.	13.	Kab. Melawi	30 Tahun 2010
293.	14.	Kab. Kayong Utara	11 Tahun 2010
294.	15.	Kab. Kubu Raya	46 Tahun 2010
295.	1.	Provinsi Kalimantan Tengah	41 Tahun 2009
296.	2.	Kab. Barito Selatan	11 Tahun 2011
297.	3.	Kab. Barito Utara	18 Tahun 2010
298.	4.	Kab. Kapuas	15 Tahun 2010
299.	5.	Kab. Kotawaringin Barat	10 Tahun 2011
300.	6.	Kab. Kotawaringin Timur	16 Tahun 2010
301.	7.	Kota Palangkaraya	53 Tahun 2010
302.	8.	Kab. Barito Timur	81 Tahun 2010
303.	9.	Kab. Murung Raya	12 Tahun 2010
304.	10.	Kab. Pulang Pisau	09 Tahun 2010
305.	11.	Kab. Gunung Mas	25 Tahun 2009
306.	12.	Kab. Lamandau	17 Tahun 2011
307.	13.	Kab. Sukamara	5 Tahun 2011
308.	14.	Kab. Katingan	24 Tahun 2010
309.	15.	Kab. Seruyan	14 Tahun 2011





Lanjutan Tabel II.20

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
310.	1.	Provinsi Kalimantan Selatan	22 Tahun 2010
311.	2.	Kab. Banjar	18 Tahun 2010
312.	3.	Kab. Barito Kuala	12 Tahun 2010
313.	4.	Kab. Hulu Sungai Selatan	14 Tahun 2010
314.	5.	Kab. Hulu Sungai Tengah	1 Tahun 2011
315.	6.	Kab. Hulu Sungai Utara	11 Tahun 2010
316.	7.	Kab. Kota Baru	31 Tahun 2010
317.	8.	Kab. Tabalong	18 Tahun 2010
318.	9.	Kab. Tanah Laut	69 Tahun 2010
319.	10.	Kab. Tapin	09 Tahun 2010
320.	11.	Kota Banjarbaru	2 Tahun 2011
321.	12.	Kota Banjarmasin	28 Tahun 2010
322.	13.	Kab. Balangan	22 Tahun 2010
323.	14.	Kab. Tanah Bumbu	18 Tahun 2010
324.	1.	Provinsi Kalimantan Timur	89 Tahun 2009
325.	2.	Kab. Berau	10 Tahun 2010
326.	3.	Kab. Bulungan	14 Tahun 2010
327.	4.	Kab. Kutai Kartanegara	63 Tahun 2012
328.	5.	Kab. Kutai Barat	60 Tahun 2010
329.	6.	Kab. Kutai Timur	02 Tahun 2011
330.	7.	Kab. Malinau	20 Tahun 2010
331.	8.	Kab. Nunukan	57 Tahun 2010
332.	9.	Kab. Paser	25 Tahun 2010
333.	10.	Kota Balikpapan	20 Tahun 2010
334.	11.	Kota Bontang	20 Tahun 2010
335.	12.	Kota Samarinda	31 Tahun 2010
336.	13.	Kota Tarakan	66 Tahun 2009
337.	14.	Kab. Penajam Paser Utara	31 Tahun 2012
338.	15.	Kab Tana Tidung	12 Tahun 2010
339.	1.	Provinsi Sulawesi Utara	23 Tahun 2010
340.	2.	Kab. Bolaang Mongondow	11 Tahun 2010
341.	3.	Kab. Minahasa	9 Tahun 2010
342.	4.	Kab. Sangihe	21 Tahun 2010
343.	5.	Kota Bitung	29 Tahun 2010
344.	6.	Kota Manado	58a Tahun 2011
345.	7.	Kab. Kepulauan Talaud	16 Tahun 2010
346.	8.	Kab. Minahasa Selatan	32 Tahun 2011
347.	9.	Kota Tomohon	24 Tahun 2011
348.	10.	Kab. Minahasa Utara	36 Tahun 2010
349.	11.	Kota Kotamobagu	22 Tahun 2010
350.	12.	Kab. Bolaang Mangondow Utara	16 Tahun 2010
351.	13.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	12 Tahun 2010
352.	14.	Kab. Minahasa Tenggara	5 Tahun 2010
353.	15.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6 Tahun 2010
354.	16.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	88 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.20

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
355.	1. Provinsi Gorontalo	17 Tahun 2010
356.	2. Kab. Boalemo	9 Tahun 2010
357.	3. Kab. Gorontalo	10 Tahun 2010
358.	4. Kota Gorontalo	2 Tahun 2010
359.	5. Kab. Pohuwato	1 Tahun 2010
360.	6. Kab. Bone Bolango	3 Tahun 2010
361.	7. Kab. Gorontalo Utara	1 Tahun 2010
362.	1. Provinsi Sulawesi Tengah	74 Tahun 2009
363.	2. Kab. Banggai	47 Tahun 2009
364.	3. Kab. Banggai Kepulauan	35 Tahun 2009
365.	4. Kab. Buol	14 Tahun 2009
366.	5. Kab. Toli Toli	25 Tahun 2009
367.	6. Kab. Donggala	58 Tahun 2009
368.	7. Kab. Morowali	7 Tahun 2009
369.	8. Kab. Poso	60 Tahun 2009
370.	9. Kota Palu	39 Tahun 2009
371.	10. Kab. Parigi Moutong	18 Tahun 2009
372.	11. Kab. Tojo Una Una	21 Tahun 2009
373.	12. Kab. Sigi	12 Tahun 2009
374.	1. Provinsi Sulawesi Selatan	62 Tahun 2010
375.	2. Kab. Bantaeng	35 Tahun 2011
376.	3. Kab. Barru	14 Tahun 2012
377.	4. Kab. Bone	25 Tahun 2010
378.	5. Kab. Bulukumba	31 Tahun 2010
379.	6. Kab. Enrekang	5 Tahun 2011
380.	7. Kab. Gowa	36 Tahun 2010
381.	8. Kab. Jeneponto	7 Tahun 2010
382.	9. Kab. Luwu	5 Tahun 2011
383.	10. Kab. Luwu Utara	11 Tahun 2010
384.	11. Kab. Maros	17 Tahun 2011
385.	12. Kab. Pangkajene Kepulauan	7 Tahun 2011
386.	13. Kab. Pinrang	20 Tahun 2010
387.	14. Kab. Kepulauan Selayar	18 Tahun 2011
388.	15. Kab. Sidenreng Rappang	19 Tahun 2012
389.	16. Kab. Sinjai	07 Tahun 2010
390.	17. Kab. Soppeng	11 Tahun 2010
391.	18. Kab. Takalar	3 Tahun 2012
392.	19. Kab. Tana Toraja	23 Tahun 2010
393.	20. Kab. Wajo	7 Tahun 2011
394.	21. Kota Parepare	23 Tahun 2010
395.	22. Kota Makassar	33 Tahun 2010
396.	23. Kota Palopo	14 Tahun 2010
397.	24. Kab. Luwu Timur	42 Tahun 2011
398.	25. Kab. Tana Toraja Utara	52 Tahun 2010
399.	1. Provinsi Sulawesi Barat	09 Tahun 2010
400.	2. Kab. Majene	17 Tahun 2012
401.	3. Kab. Mamuju	09 Tahun 2010





Lanjutan Tabel II.20

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
402.	4.	Kab. Polewali Mandar	22 Tahun 2010
403.	5.	Kab. Mamasa	7 Tahun 2012
404.	6.	Kab. Mamuju Utara	092 Tahun 2011
405.	1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	17 Tahun 2010
406.	2.	Kab. Buton	7 Tahun 2011
407.	3.	Kab. Konawe	21 Tahun 2010
408.	4.	Kab. Kolaka	2 Tahun 2010
409.	5.	Kab. Muna	10 Tahun 2010
410.	6.	Kota Kendari	3 Tahun 2010
411.	7.	Kota Bau bau	29 Tahun 2010
412.	8.	Kab. Konawe Selatan	5 Tahun 2010
413.	9.	Kab. Bombana	13 Tahun 2010
414.	10.	Kab. Wakatobi	2A Tahun 2010
415.	11.	Kab. Kolaka Utara	800/146 Tahun 2010
416.	12.	Kab. Konawe Utara	14 Tahun 2010
417.	13.	Kab. Buton Utara	23 Tahun 2010
418.	1.	Provinsi Bali	27 Tahun 2010
419.	2.	Kab. Badung	28 Tahun 2010
420.	3.	Kab. Bangli	25 Tahun 2010
421.	4.	Kab. Buleleng	37 Tahun 2010
422.	5.	Kab. Gianyar	61 Tahun 2009
423.	6.	Kab. Jembrana	26 Tahun 2010
424.	7.	Kab. Karangasem	26 Tahun 2010
425.	8.	Kab. Klungkung	18 Tahun 2010
426.	9.	Kab. Tabanan	16 Tahun 2010
427.	10.	Kota Denpasar	20 Tahun 2010
428.	1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	04 Tahun 2011
429.	2.	Kab. Bima	5 Tahun 2010
430.	3.	Kab. Dompu	30 Tahun 2010
431.	4.	Kab. Lombok Barat	24 Tahun 2010
432.	5.	Kab. Lombok Tengah	32 Tahun 2011
433.	6.	Kab. Lombok Timur	31 Tahun 2010
434.	7.	Kab. Sumbawa	43 Tahun 2010
435.	8.	Kota Mataram	13 Tahun 2010
436.	9.	Kota Bima	04 Tahun 2010
437.	10.	Kab. Sumbawa Barat	26 Tahun 2010
438.	11.	Kab. Lombok Utara	7 Tahun 2010
439.	1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	39 Tahun 2010
440.	2.	Kab. Alor	13 Tahun 2010
441.	3.	Kab. Belu	23 Tahun 2010
442.	4.	Kab. Ende	21 Tahun 2010
443.	5.	Kab. Flores Timur	13 Tahun 2010
444.	6.	Kab. Kupang	15 Tahun 2010
445.	7.	Kab. Lembata	14 Tahun 2010
446.	8.	Kab. Manggarai	24 Tahun 2010
447.	9.	Kab. Ngada	16 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.20

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
448.	10.	Kab. Sikka	10 Tahun 2010
449.	11.	Kab. Sumba Barat	10 Tahun 2010
450.	12.	Kab. Sumba Timur	10 Tahun 2010
451.	13.	Kab. Timor Tengah Selatan	11 Tahun 2010
452.	14.	Kab. Timor Tengah Utara	14 Tahun 2010
453.	15.	Kota Kupang	11A Tahun 2010
454.	16.	Kab. Rote Ndao	14 Tahun 2010
455.	17.	Kab. Manggarai Barat	19 Tahun 2010
456.	18.	Kab. Nagekeo	17 Tahun 2010
457.	19.	Kab. Sumba Barat Daya	26 Tahun 2010
458.	20.	Kab. Sumba Tengah	12 Tahun 2010
459.	21.	Kab. Manggarai Timur	22 Tahun 2010
460.	22.	Kab Sabu Raijua	12 Tahun 2010
461.	1.	Provinsi Maluku	02 Tahun 2010
462.	2.	Kab. Maluku Tenggara Barat	02 Tahun 2010
463.	3.	Kab. Maluku Tengah	40 Tahun 2010
464.	4.	Kab. Maluku Tenggara	02 Tahun 2010
465.	5.	Kab. Buru	14 Tahun 2011
466.	6.	Kota Ambon	14 Tahun 2011
467.	7.	Kab. Seram Bagian Barat	04 Tahun 2011
468.	8.	Kab. Seram Bagian Timur	36 Tahun 2011
469.	9.	Kab. Kepulauan Aru	04 Tahun 2010
470.	10.	Kab. Maluku Barat Daya	08 Tahun 2011
471.	11.	Kota Tual	04 Tahun 2010
472.	12.	Kab. Buru Selatan	15 Tahun 2011
473.	1.	Provinsi Maluku Utara	22 Tahun 2010
474.	2.	Kab. Halmahera Tengah	06 Tahun 2011
475.	3.	Kab. Halmahera Barat	08 Tahun 2010
476.	4.	Kota Ternate	07 Tahun 2011
477.	5.	Kab. Halmahera Timur	04 Tahun 2011
478.	6.	Kota Tidore Kepulauan	15 Tahun 2011
479.	7.	Kab. Kepulauan Sula	04 Tahun 2011
480.	8.	Kab. Halmahera Selatan	04 Tahun 2010
481.	9.	Kab. Halmahera Utara	7 tahun 2012
482.	10.	Kab. Pulau Morotai	10 Tahun 2012
483.	1.	Provinsi Papua	188.3/046 Tahun 2011
484.	2.	Kab. Biak Numfor	183 Tahun 2011
485.	3.	Kab. Jayapura	32 Tahun 2009
486.	4.	Kab. Jayawijaya	17 Tahun 2010
487.	5.	Kab. Merauke	10 Tahun 2012
488.	6.	Kab. Mimika	13 Tahun 2010
489.	7.	Kab. Nabire	15 Tahun 2011
490.	8.	Kab. Paniai	52 Tahun 2010
491.	9.	Kab. Puncak Jaya	58 Tahun 2010
492.	10.	Kab. Kepulauan Yapen	No.6 Tahun 2011
493.	11.	Kota Jayapura	06 Tahun 2010
494.	12.	Kab. Sarmi	72 Tahun 2010





Lanjutan Tabel II.20

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
495.	13. Kab. Keerom	8 Tahun 2011
496.	14. Kab. Yahukimo	7 Tahun 2012
497.	15. Kab. Pegunungan Bintang	700/154/2010
498.	16. Kab. Tolikara	4 Tahun 2012
499.	17. Kab. Boven Digoel	11 Tahun 2012
500.	18. Kab. Mappi	7 Tahun 2012
501.	19. Kab. Asmat	16 Tahun 2010
502.	20. Kab. Waropen	44 Tahun 2010
503.	21. Kab. Supiori	10 Tahun 2011
504.	22. Kab. Mamberamo Raya	06 Tahun 2010
505.	23. Kab. Mamberamo Tengah	700/06/BUP-MT/2012
506.	24. Kab. Yalimo	36 Tahun 2012
507.	25. Kab. Lanny Jaya	52 Tahun 2012
508.	26. Kab. Nduga	7 Tahun 2012
509.	27. Kab. Dogiyai	05 Tahun 2011
510.	28. Kab. Puncak	15 Tahun 2012
511.	29. Kab. Intan Jaya	8 Tahun 2011
512.	30. Kab. Deiyai	4 Tahun 2012
513.	1. Provinsi Papua Barat	900/10/V/2011
514.	2. Kab. Sorong	91 Tahun 2010
515.	3. Kab. Manokwari	41 Tahun 2011
516.	4. Kab. Fak Fak	14 tahun 2012
517.	5. Kota Sorong	04 Tahun 2010
518.	6. Kab. Sorong Selatan	02 Tahun 2011
519.	7. Kab. Raja Ampat	6 Tahun 2011
520.	8. Kab. Teluk Bintuni	06 Tahun 2011
521.	9. Kab. Teluk Wondama	06 Tahun 2011
522.	10. Kab. Kaimana	05 Tahun 2012
523.	11. Kab. Tambrau	48 Tahun 2010
524.	12. Kab. Maybrat	115 Tahun 2012

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015

Tabel II.21 Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Sampai Tahun 2015

Provinsi	Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Memiliki Perda SPIP				
		Prov.	Kab	Kota	Total	%
Aceh	24	1	18	5	24	100
Sumatera Utara	34	1	25	8	34	100
Sumatera Barat	20	1	12	7	20	100
Riau	13	1	10	2	13	100
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100
Jambi	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	18	1	11	4	16	89
Kepulauan Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100

Lanjutan Tabel II.21

Provinsi	Total Pemda 2014	Daerah yang Sudah Memiliki Perda SPIP				
		Prov.	Kab	Kota	Total	%
Bengkulu	11	1	9	1	11	100
Lampung	16	1	12	2	15	94
DKI Jakarta	7	1	0		1	14
Jawa Barat	28	1	17	9	27	96
Banten	9	1	4	4	9	100
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100
Bali	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100
Nusa Tenggara Timur	23	1	20	1	22	96
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100
Kalimantan Timur	11	1	6	3	10	91
Kalimantan Utara	6	0	4	1	5	83
Sulawesi Utara	16	1	11	4	16	100
Gorontalo	7	1	5	1	7	100
Sulawesi Tengah	14	1	10	1	12	86
Sulawesi Selatan	25	1	21	3	25	100
Sulawesi Barat	7	1	5	0	6	86
Sulawesi Tenggara	18	1	10	2	13	72
Maluku	12	1	9	2	12	100
Maluku Utara	11	1	7	2	10	91
Papua	30	1	28	1	30	100
Papua Barat	14	1	10	1	12	86
Total	548	33	398	93	524	96

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2015

Catatan :

Peraturan SPIP Provinsi DKI Jakarta dibuat oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta tidak membuat peraturan SPIP.

BAGIAN III

SUMBER DAYA APARATUR

Bagian ini menyajikan data statistik sumber daya manusia aparatur dalam mendukung terlaksananya pemerintahan dan pembangunan. Sumber daya manusia aparatur yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Data yang disajikan meliputi Jumlah PNS secara umum, jumlah PNS berdasarkan pendidikan, berdasarkan usia, berdasarkan golongan ruang, berdasarkan jenis kelamin. Selain jumlah PNS disajikan pula data tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, fungsional umum, fungsional tertentu. Ada beberapa jabatan fungsional tertentu yang disajikan datanya secara lebih spesifik, yaitu jabatan fungsional peneliti, guru, dosen, tenaga kesehatan, auditor, pemeriksa, penyidik, dan penyuluh KB. Sebelum mengakhiri bagian ini disajikan tentang diklat PNS, jumlah lembaga kediklatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta akreditasinya, dan data mengenai widyaiswara. Untuk mengakhiri bagian ini disajikan tentang kesejahteraan PNS dan data mengenai pensiun PNS.

A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sub Bagian ini mengemukakan data jumlah PNS yang berstatus PNS pusat maupun daerah secara umum pada tahun 2013 - 2014, tidak diklasifikasikan berdasarkan jabatan. Jumlah umum PNS ini ditampilkan pada tabel Tabel III.1. Data mengenai jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut pendidikan disajikan pada tabel III.2, tabel III.3, tabel III.4 dan tabel III.5. Data tentang jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut kelompok umur disajikan pada tabel III.6, tabel III.7, tabel III.8, tabel III.9. Dan jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.10, tabel III.11, tabel III.12 dan tabel III.13.

B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Data dalam sub bagian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu data umum jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural; fungsional tertentu dan fungsional umum; data jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural dengan variasinya; data jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan variasinya; dan data jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dengan variasinya.

Data umum jumlah, rasio, dan pertumbuhan PNS yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan rangkap, dan jabatan fungsional umum



disajikan pada tabel III.14 dan tabel III.17 Pada tabel III.18 menyajikan jumlah PNS pusat dan daerah yang menduduki jabatan struktural. Data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut kelompok umur disajikan pada tabel III.19 sampai tabel III.22. Berikutnya data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut pendidikan disajikan pada tabel III.23 sampai tabel III.26. Sementara data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut jenis kelamin disajikan pada tabel III.27 sampai tabel III.30. Dan data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut golongan/ruang disajikan pada tabel III.31 sampai tabel III.34.

Data mengenai jabatan fungsional tertentu yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data umum mengenai jabatan fungsional tertentu dengan variasi kelompok umur; pendidikan; usia dan golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.35 sampai tabel III.51. Selain itu, dalam publikasi disajikan beberapa data jabatan fungsional tertentu secara spesifik, yaitu data mengenai jabatan fungsional peneliti, guru, dosen, tenaga kesehatan, auditor, pemeriksa, penyidik, dan penyuluh KB. Jabatan fungsional ini dipilih untuk mewakili jabatan fungsional yang memberikan pelayanan dasar dan berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Data mengenai peneliti dapat dilihat pada tabel III.52 sampai tabel III.53. Sementara data mengenai tenaga pendidikan dosen dan guru dapat dilihat pada tabel III.54 sampai tabel III.94. Data mengenai jabatan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel III.95 daa tabel III.96. Data mengenai jabatan auditor ditampilkan pada tabel III.97. Sementara data mengenai jabatan pemeriksa dengan variasinya ditampilkan pada tabel III.98 sampai tabel III.105. Data mengenai jabatan penyidik KPK dan Polri dapat dilihat pada tabel III.106 sampai tabel III.111. Dan tabel mengenai jabatan penyuluh KB dengan variasinya ditampilkan pada tabel III.112 dan pada tabel 114.

Data jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum juga disajikan dengan berbagai variasi, yaitu menurut kelompok umur, pendidikan, usia dan golongan/ruang. Data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum disajikan pada tabel III.115 sampai tabel III.131.

C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

Data mengenai pendidikan dan pelatihan PNS yang ditampilkan dalam publikasi ini meliputi data jumlah PNS yang sudah mengikuti diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan; jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat fungsional dan teknis; data program diklat di Instansi Pusat dan Daerah yang sudah diakreditasi; dan data widyaiswara diklat di Instansi Pusat maupun di Daerah. Untuk data mengenai jumlah PNS yang sudah mengikuti diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan dapat dilihat pada tabel III.132. Sementara data mengenai jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat fungsional dan teknis ditampilkan pada tabel III.133. Data mengenai program diklat di Instansi Pusat dan Daerah yang sudah diakreditasi ditampilkan pada tabel III.134. Sedangkan data mengenai jumlah dan pertumbuhan widyaiswara di instansi pusat dan daerah dapat dilihat pada tabel III.135 sampai tabel III.138.





D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Data kesejahteraan PNS yang penting untuk disajikan adalah data mengenai gaji pokok pegawai, tunjangan jabatan, dan asuransi kesehatan PNS. Tabel III.139 sampai tabel III.142 menunjukkan data *time series* tahun 2013 - 2015 gaji pokok PNS golongan I sampai golongan IV. Sementara itu, tabel III.143 menjelaskan mengenai tunjangan jabatan struktural eselon I-IV dan tabel III.144 menjelaskan mengenai tunjangan jabatan fungsional tertentu. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tunjangan jabatan untuk jabatan struktural selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selain data gaji dan tunjangan, kesejahteraan PNS juga dapat dilihat dari pemanfaatan asuransi kesehatan. Pada tabel III.145 sampai tabel III.149 ditampilkan data mengenai kepesertaan dalam asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan).

E. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Data yang ditampilkan dalam sub bagian pensiun PNS adalah data total uang pensiun PNS dan data PNS yang pensiun menurut beberapa variasi. Data total uang pensiun PNS dan pertumbuhannya disajikan pada tabel III.150 dan tabel III.151. Sementara data mengenai PNS yang pensiun menurut kelompok dapat dilihat pada tabel III.152 dan tabel III.153. Data mengenai PNS yang pensiun menurut golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.154 dan tabel III.155. Dan data mengenai PNS yang pensiun menurut jenis kelamin ditampilkan pada tabel III.156 dan tabel III.157.



Tabel III.1 Jumlah PNS Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2013 - 2014

No.	Instansi	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Instansi Pusat	890.521	20,41	908.252	20,37	1,99
2.	Pemerintah Provinsi	295.142	6,76	301.786	6,77	2,25
3.	Pemerintah Kab/Kota	3.177.142	72,82	3.248.242	72,86	2,24
	Total	4.362.805	100	4.458.280	100	2,19

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.2 Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	60.451	1,4	56.385	1,30	-7
2.	SLTP	93.422	2,1	88.287	2,00	-5
3.	SLTA	1.241.248	28,5	1.204.127	27,00	-3
4.	D1	57.365	1,3	51.934	1,20	-9
5.	D II	528.450	12,1	451.512	10,10	-15
6.	D III	412.735	9,5	427.711	9,60	4
7.	D IV	30.448	0,7	36.058	0,80	18
8.	S 1	1.748.364	40,1	1.898.748	42,60	9
9.	S 2	179.719	4,1	231.305	5,20	29
10.	S 3	10.603	0,2	12.213	0,30	15
	Total	4.362.805	100,0	4.458.280	100,00	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.3 Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	10.713	1,20	10.497	1,16	-2,02
2.	SLTP	18.138	2,04	16.742	1,84	-7,70
3.	SLTA	246.555	27,69	240.847	26,52	-2,32
4.	D1	14.444	1,62	14.729	1,62	1,97
5.	D II	23.744	2,67	15.678	1,73	-33,97
6.	D III	76.224	8,56	79.100	8,71	3,77
7.	D IV	13.621	1,53	15.438	1,70	13,34
8.	S 1	375.192	42,13	38.5171	42,41	2,66
9.	S 2	101.798	11,43	118.525	13,05	16,43
10.	S 3	10.092	1,13	11.525	1,27	14,20
	Total	890.521	100,00	908.252	100,00	1,99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.4 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	5.847	1,98	5.463	1,81	-6,57
2.	SLTP	8.260	2,80	7.413	2,46	-10,25
3.	SLTA	103.104	34,93	99.151	32,85	-3,83
4.	D1	2.755	0,93	2.560	0,85	-7,08
5.	D II	13.250	4,49	10.246	3,40	-22,67
6.	D III	31.711	10,74	33.837	11,21	6,70
7.	D IV	2.673	0,91	3.148	1,04	17,77
8.	S 1	111.160	37,66	116.978	38,76	5,23
9.	S 2	16.192	5,49	22.711	7,53	40,26
10.	S 3	190	0,06	279	0,09	46,84
	Total	295.142	100,00	301.786	100,00	2,25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.5 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	43.891	1,38	40.425	1,24	-7,90
2.	SLTP	67.024	2,11	64.132	1,97	-4,31
3.	SLTA	891.589	28,06	864.129	26,60	-3,08
4.	D1	40.166	1,26	34.645	1,07	-13,75
5.	D II	491.456	15,47	425.588	13,10	-13,40
6.	D III	304.800	9,59	314.774	9,69	3,27
7.	D IV	14.154	0,45	17.472	0,54	23,44
8.	S 1	1.262.012	39,72	1.396.599	43,00	10,66
9.	S 2	61.729	1,94	90.069	2,77	45,91
10.	S 3	321	0,01	409	0,01	27,41
	Total	3.177.142	100,00	3.248.242	100,00	2,24

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.6 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	1.578	0,0	1.308	0,00	-17
2.	21 - 25	60.274	1,4	51.795	1,20	-14
3.	26 - 30	401.925	9,2	364.004	8,20	-9
4.	31 - 35	591.490	13,6	627.148	14,10	6
5.	36 - 40	567.207	13,0	603.334	13,50	6
6.	41 - 45	743.965	17,1	703.063	15,80	-5
7.	46 - 50	919.137	21,1	911.671	20,40	-1
8.	51 - 55	834.270	19,1	887.802	19,90	6
9.	56 - 60	226.151	5,2	289.282	6,50	28
10.	61 - 65	161.06	0,4	18.001	0,40	12
11.	65 +	702	0,0	872	0,00	24
	Total	4.362.805	100,0	4.458.280	100,00	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.7 Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	1.568	0,18	1.218	0,13	-22,32
2.	21 - 25	27.634	3,10	29.792	3,28	7,81
3.	26 - 30	96.509	10,84	90.028	9,91	-6,72
4.	31 - 35	130.086	14,61	130.113	14,33	0,02
5.	36 - 40	132.185	14,84	132.945	14,64	0,57
6.	41 - 45	160.315	18,00	155.422	17,11	-3,05
7.	46 - 50	158.730	17,82	161.958	17,83	2,03
8.	51 - 55	139.010	15,61	147.627	16,25	6,20
9.	56 - 60	34.991	3,93	48.004	5,29	37,19
10.	61 - 65	8.810	0,99	10.305	1,13	16,97
11.	65 +	683	0,08	840	0,09	22,99
	Total	890.521	100,00	908.252	100,00	1,99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.8 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,00	35	0,01	0.00
2.	21 - 25	3.713	1,26	3.791	1,26	2.10
3.	26 - 30	21.835	7,40	20.890	6,92	-4.33
4.	31 - 35	36.648	12,42	37.802	12,53	3.15
5.	36 - 40	38.116	12,91	39.656	13,14	4.04
6.	41 - 45	45.352	15,37	43.845	14,53	-3.32
7.	46 - 50	63.898	21,65	60.022	19,89	-6.07
8.	51 - 55	72.654	24,62	74.410	24,66	2.42
9.	56 - 60	12.135	4,11	20.478	6,79	68.75
10.	61 - 65	779	0,26	843	0,28	8.22
11.	65 +	12	0,00	14	0,00	16.67
	Total	295.142	100,00	301.786	100,00	2.25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.9 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2014 - 2015

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	10	0,00	55	0,00	450,00
2.	21 - 25	28.927	0,91	18.212	0,56	-37,04
3.	26 - 30	283.581	8,93	253.086	7,79	-10,75
4.	31 - 35	424.756	13,37	459.233	14,14	8,12
5.	36 - 40	396.906	12,49	430.733	13,26	8,52
6.	41 - 45	538.298	16,94	503.796	15,51	-6,41
7.	46 - 50	696.509	21,92	689.691	21,23	-0,98
8.	51 - 55	622.606	19,60	665.765	20,50	6,93
9.	56 - 60	179.025	5,63	220.800	6,80	23,33
10.	61 - 65	6.517	0,21	6.853	0,21	5,16
11.	65 +	7	0,00	18	0,00	157,14
	Total	3.177.142	100,00	3.248.242	100,00	2,24

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.10 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	10.253	0,2	8.782	0,20	-14
2.	Ib	20.297	0,5	19.540	0,40	-4
3.	Ic	22.858	0,5	25.450	0,60	11
4.	Id	29.663	0,7	28.667	0,60	-3
5.	Ila	219.278	5,0	201.503	4,50	-8
6.	Ilb	354.444	8,1	341.256	7,70	-4
7.	Ilc	306.839	7,0	278.987	6,30	-9
8.	Ild	200.818	4,6	228.021	5,10	14
9.	IIla	550.363	12,6	548.766	12,30	0
10.	IIlb	631.948	14,5	684.763	15,40	8
11.	IIlc	456.967	10,5	495.402	11,10	8
12.	IIld	502.741	11,5	536.961	12,00	7
13.	IVa	880.654	20,2	846.371	19,00	-4
14.	IVb	139.735	3,2	175.032	3,90	25
15.	IVc	25.874	0,6	28.027	0,60	8
16.	IVd	7.471	0,2	7.936	0,20	6
17.	IVe	2.602	0,1	2.816	0,10	8
	Total	4.362.805	100,0	4.458.280	100,00	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.11 Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	649	0,07	935	0,10	44,07
2.	Ib	2.459	0,28	2.046	0,23	-16,80
3.	Ic	2.295	0,26	2.757	0,30	20,13
4.	Id	5.489	0,62	4.706	0,52	-14,26
5.	Ila	43.796	4,92	38.825	4,27	-11,35
6.	Ilb	58.166	6,53	52.187	5,75	-10,28
7.	Ilc	70.699	7,94	69.964	7,70	-1,04
8.	Ild	48.599	5,46	51.986	5,72	6,97
9.	IIla	137.868	15,48	125.883	13,86	-8,69
10.	IIlb	181.854	20,42	191.665	21,10	5,39
11.	IIlc	110.719	12,43	121.816	13,41	10,02
12.	IIld	103.729	11,65	115.292	12,69	11,15
13.	IVa	78.972	8,87	83.508	9,19	5,74
14.	IVb	26.719	3,00	27.509	3,03	2,96





Lanjutan Tabel III.11

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
15.	IVc	10.911	1,23	11.078	1,22	1,53
16.	IVd	5.268	0,59	5.593	0,62	6,17
17.	IVe	2.329	0,26	2.502	0,28	7,43
	Total	890.521	100,00	908.252	100,00	1,99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.12 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	803	0,27	600	0,20	-25,28
2.	Ib	1.645	0,56	1.647	0,55	0,12
3.	Ic	1.940	0,66	1.790	0,59	-7,73
4.	Id	2.709	0,92	2.527	0,84	-6,72
5.	IIa	17.754	6,02	13.914	4,61	-21,63
6.	IIb	29.811	10,10	32.555	10,79	9,20
7.	IIc	15.659	5,31	14.680	4,86	-6,25
8.	IId	13.480	4,57	14.655	4,86	8,72
9.	IIIa	39.851	13,50	35.176	11,66	-11,73
10.	IIIb	53.980	18,29	60.156	19,93	11,44
11.	IIIc	29.304	9,93	31.871	10,56	8,76
12.	IIId	36.371	12,32	39.486	13,08	8,56
13.	IVa	39.473	13,37	38.294	12,69	-2,99
14.	IVb	9.242	3,13	11.190	3,71	21,08
15.	IVc	1.953	0,66	1.976	0,65	1,18
16.	IVd	1.045	0,35	1.117	0,37	6,89
17.	IVe	122	0,04	152	0,05	24,59
	Total	295.142	100,00	301.786	100,00	2,25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.13 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	8.801	0,28	7.247	0,22	-17,66
2.	Ib	16.193	0,51	15.847	0,49	-2,14
3.	Ic	18.623	0,59	20.903	0,64	12,24
4.	Id	21.465	0,68	21.434	0,66	-0,14
5.	Ila	157.728	4,96	148.764	4,58	-5,68
6.	Ilb	266.467	8,39	256.514	7,90	-3,74
7.	Ilc	220.481	6,94	194.343	5,98	-11,85
8.	Ild	138.739	4,37	161.380	4,97	16,32
9.	IIla	372.644	11,73	387.707	11,94	4,04
10.	IIlb	396.114	12,47	432.942	13,33	9,30
11.	IIlc	316.944	9,98	341.715	10,52	7,82
12.	IIld	362.641	11,41	382.183	11,77	5,39
13.	IVa	762.209	23,99	724.569	22,31	-4,94
14.	IVb	103.774	3,27	136.333	4,20	31,37
15.	IVc	13.010	0,41	14.973	0,46	15,09
16.	IVd	1.158	0,04	1.226	0,04	5,87
17.	IVe	151	0,00	162	0,00	7,28
	Total	3.177.142	100,00	3.248.242	100,00	2,24

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.14 Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014

No.	Jabatan	2013		2014		Pertumbuhan n 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan Struktural	277.745	6,4	425.602	9,50	53
2.	Jabatan Fungsional tertentu	2.335.975	53,5	2.325.851	52,20	0
3.	Jabatan Rangkap	0	0,0	819	0,00	0
4.	Jabatan Fungsional Umum	1.749.085	40,1	1.706.008	38,30	-2
	Total	4.362.805	100	4.458.280	100,00	2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.15 Jumlah Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014

No.	Jabatan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan Struktural	48.846	5,49	83.740	9,22	71,44
2.	Jabatan Fungsional tertentu	321.857	36,14	325.732	35,86	1,20
3.	Jabatan Rangkap	0	0,00	656	0,07	0,00
4.	Jabatan Fungsional Umum	519.818	58,37	498.124	54,84	-4,17
	Total	890.521	100,00	908.252	100,00	1,99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.16 Jumlah Umum PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014

No.	Jabatan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan struktural	23.670	8,02	32.997	10,93	39,40
2.	Jabatan fungsional tertentu	73.636	24,95	74.368	24,64	0,99
3.	Jabatan rangkap	0	0,00	7	0,00	0,00
4.	Jabatan fungsional umum	197.836	67,03	194.414	64,42	-1,73
	Total	295.142	100	301.786	100,00	2,25

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.17 Jumlah Umum PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014

No.	Jabatan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Jabatan struktural	205.229	6,46	308.865	9,51	50,50
2.	Jabatan fungsional tertentu	1.940.482	61,08	1.925.751	59,29	-0,76
3.	Jabatan rangkap	0	0,00	156	0,00	0,00
4.	Jabatan fungsional umum	1.031.431	32,46	1.013.470	31,20	-1,74
	Total	3.177.142	100,00	3.248.242	100,00	2,24

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.18 Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2013 - 2014

Instansi	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Pusat	48846	18	83.740	19,68	-0,42
Provinsi	23670	9	32.997	7,75	-0,28
Kab/Kota	205229	74	308.865	72,57	-0,34
Total	277745	100	425.602	100,00	-0,35

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.19 Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,0	0	0,00	0
2.	21 - 25	369	0,1	125	0,00	-66
3.	26 - 30	6.197	2,2	8.324	2,00	34
4.	31 - 35	20.512	7,4	28.430	6,70	39
5.	36 - 40	34.943	12,6	49.795	11,70	43
6.	41 - 45	51.612	18,6	71.630	16,80	39
7.	46 - 50	76.756	27,6	109.972	25,80	43
8.	51 - 55	81.246	29,3	130.846	30,70	61
9.	56 - 60	6.004	2,2	25.948	6,10	332
10.	61 - 65	95	0,0	496	0,10	422
11.	65 +	11	0,0	36	0,00	227
	Total	277.745	100,0	425.602	100,00	53

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.20 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	22	0,05	6	0,01	-72,73
3.	26 - 30	1.105	2,26	1.568	1,87	41,90
4.	31 - 35	3.748	7,67	5.388	6,43	43,76
5.	36 - 40	6.543	13,40	9.680	11,56	47,94
6.	41 - 45	10.470	21,43	15.441	18,44	47,48
7.	46 - 50	11.812	24,18	20.173	24,09	70,78
8.	51 - 55	13.295	27,22	24.677	29,47	85,61
9.	56 - 60	1.760	3,60	6.403	7,65	263,81
10.	61 - 65	80	0,16	370	0,44	362,50
11.	65 +	11	0,02	34	0,04	209,09
	Total	48.846	100,00	83.740	100,00	71,44

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.21 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	9	0,04	1	0,00	-88,89
3.	26 - 30	136	0,57	185	0,56	36,03
4.	31 - 35	761	3,22	1.009	3,06	32,59
5.	36 - 40	1.900	8,03	2.407	7,29	26,68
6.	41 - 45	3.989	16,85	5.088	15,42	27,55
7.	46 - 50	7.197	30,41	8.965	27,17	24,57
8.	51 - 55	8.862	37,44	12.502	37,89	41,07
9.	56 - 60	810	3,42	2.811	8,52	247,04
10.	61 - 65	6	0,03	28	0,08	366,67
11.	65 +	0	0,00	1	0,00	0,00
	Total	23.670	100,00	32.997	100,00	39,40

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.22 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	338	0,16	118	0,04	-65,09
3.	26 - 30	4.956	2,41	6.571	2,13	32,59
4.	31 - 35	16.003	7,80	22.033	7,13	37,68
5.	36 - 40	26.500	12,91	37.708	12,21	42,29
6.	41 - 45	37.153	18,10	51.101	16,54	37,54
7.	46 - 50	57.747	28,14	80.834	26,17	39,98
8.	51 - 55	59.089	28,79	93.667	30,33	58,52
9.	56 - 60	3.434	1,67	16.734	5,42	387,30
10.	61 - 65	9	0,00	98	0,03	988,89
11.	65 +	0	0,00	1	0,00	0,00
	Total	205.229	100,00	308.865	100,00	50,50

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.23 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	21	0,0	50	0,00	138
2.	SLTP	162	0,1	183	0,00	13
3.	SLTA	46.703	16,8	69.935	16,40	50
4.	D1	811	0,3	1.088	0,30	34
5.	D II	3.128	1,1	4.583	1,10	47
6.	D III	11.043	4,0	16.396	3,90	48
7.	D IV	5.009	1,8	7.581	1,80	51
8.	S 1	161.269	58,1	243.756	57,30	51
9.	S 2	48.565	17,5	80.345	18,90	65
10.	S 3	1.034	0,4	1.685	0,40	63
	Total	277.745	100,0	425.602	100,00	53

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.24 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	1	0,00	7	0,01	600,00
2.	SLTP	23	0,05	27	0,03	17,39
3.	SLTA	4.767	9,76	10.771	12,86	125,95
4.	D1	69	0,14	161	0,19	133,33
5.	D II	161	0,33	130	0,16	-19,25
6.	D III	1.242	2,54	2.321	2,77	86,88
7.	D IV	1.687	3,45	2.805	3,35	66,27
8.	S 1	24.456	50,07	41.920	50,06	71,41
9.	S 2	15.646	32,03	24.342	29,07	55,58
10.	S 3	794	1,63	1.256	1,50	58,19
	Total	48.846	100	83.740	100,00	71,44

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.25 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	3	0,01	2	0,01	-33,33
2.	SLTP	5	0,02	6	0,02	20,00
3.	SLTA	1.315	5,56	1.906	5,78	44,94
4.	D1	22	0,09	26	0,08	18,18
5.	D II	166	0,70	53	0,16	-68,07
6.	D III	677	2,86	901	2,73	33,09
7.	D IV	248	1,05	335	1,02	35,08
8.	S 1	14.205	60,01	18.309	55,49	28,89
9.	S 2	6.934	29,29	11.266	34,14	62,47
10.	S 3	95	0,40	193	0,58	103,16
	Total	23.670	100	32.997	100,00	39,40

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.26 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	17	0,01	41	0,01	141,18
2.	SLTP	134	0,07	150	0,05	11,94
3.	SLTA	40.621	19,79	57.258	18,54	40,96
4.	D1	720	0,35	901	0,29	25,14
5.	D II	2.801	1,36	4.400	1,42	57,09
6.	D III	9.124	4,45	13.174	4,27	44,39
7.	D IV	3.074	1,50	4.441	1,44	44,47
8.	S 1	122.608	59,74	183.527	59,42	49,69
9.	S 2	25.985	12,66	44.737	14,48	72,16
10.	S 3	145	0,07	236	0,08	62,76
	Total	205.229	100,00	308.865	100,00	50,50

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.27 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	195.592	70,4	300.001	70,50	53
2.	Perempuan	82.153	29,6	125.601	29,50	53
	Total	277.745	100,0	425.602	100,00	53

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.28 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	35.931	73,56	60.985	72,83	69,73
2.	Perempuan	12.915	26,44	22.755	27,17	76,19
	Total	48.846	100	83.740	100,00	71,44

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.29 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	16.230	68,57	22.698	68,79	39,85
2.	Perempuan	7.440	31,43	10.299	31,21	38,43
	Total	23.670	100	32.997	100,00	39,40

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.30 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	143.431	69,89	216.318	70,04	50,82
2.	Perempuan	61.798	30,11	92.547	29,96	49,76
	Total	205.229	100	308.865	100,00	50,50

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.31 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	4	0,0	4	0,00	0
2.	Ib	4	0,0	11	0,00	175
3.	Ic	10	0,0	10	0,00	0
4.	Id	20	0,0	14	0,00	-30
5.	IIa	169	0,1	204	0,00	21
6.	IIb	386	0,1	441	0,10	14
7.	IIc	527	0,2	363	0,10	-31
8.	IId	783	0,3	659	0,20	-16
9.	IIIa	5.426	2,0	5.575	1,30	3
10.	IIIb	28.489	10,3	42.730	10,00	50
11.	IIIC	74.840	26,9	109.799	25,80	47
12.	IIId	87.771	31,6	140.855	33,10	60
13.	IVa	43.941	15,8	71.377	16,80	62
14.	IVb	26.524	9,5	38.958	9,20	47
15.	IVc	6.938	2,5	11.546	2,70	66
16.	IVd	1.560	0,6	2.493	0,60	60
17.	IVe	353	0,1	563	0,10	59
	Total	277.745	100,0	425.602	100,00	53

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.32 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	1	0,00	0	0,00	0,00
3.	Ic	2	0,00	1	0,00	-50,00
4.	Id	5	0,01	1	0,00	-80,00
5.	Ila	17	0,03	19	0,02	11,76
6.	Ilb	50	0,10	58	0,07	16,00
7.	Ilc	79	0,16	83	0,10	5,06
8.	Ild	140	0,29	187	0,22	33,57
9.	IIla	944	1,93	1.638	1,96	73,52
10.	IIlb	4.251	8,70	9.351	11,17	119,97
11.	IIlc	10.655	21,81	17.536	20,94	64,58
12.	IIId	15.939	32,63	28.054	33,50	76,01
13.	IVa	8.592	17,59	13.863	16,55	61,35
14.	IVb	5.622	11,51	8.992	10,74	59,94
15.	IVc	1.290	2,64	2.049	2,45	58,84
16.	IVd	932	1,91	1.391	1,66	49,25
17.	IVe	327	0,67	517	0,62	58,10
	Total	48.846	100,00	83.740	100,00	71,44

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.33 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	0	0,00	0	0,00	0,00
3.	Ic	0	0,00	0	0,00	0,00
4.	Id	1	0,00	0	0,00	0,00
5.	Ila	6	0,03	6	0,02	0,00
6.	Ilb	14	0,06	7	0,02	-50,00
7.	Ilc	7	0,03	11	0,03	57,14
8.	Ild	22	0,09	13	0,04	-40,91
9.	IIla	110	0,46	76	0,23	-30,91
10.	IIlb	710	3,00	805	2,44	13,38
11.	IIlc	3.360	14,20	4.690	14,21	39,58
12.	IIId	8.938	37,76	12.179	36,91	36,26
13.	IVa	5.590	23,62	8.061	24,43	44,20
14.	IVb	3.940	16,65	5.563	16,86	41,19





Lanjutan Tabel III.33

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
15.	IVc	572	2,42	890	2,70	55,59
16.	IVd	383	1,62	665	2,02	73,63
17.	IVe	17	0,07	31	0,09	82,35
	Total	23.670	100,00	32.997	100,00	39,40

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.34 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	4	0,00	4	0,00	0,00
2.	Ib	3	0,00	11	0,00	266,67
3.	Ic	8	0,00	9	0,00	12,50
4.	Id	14	0,01	13	0,00	-7,14
5.	Ila	146	0,07	179	0,06	22,60
6.	Ilb	322	0,16	376	0,12	16,77
7.	Ilc	441	0,21	269	0,09	-39,00
8.	Ild	621	0,30	459	0,15	-26,09
9.	Illa	4.372	2,13	3.861	1,25	-11,69
10.	IIlb	23.528	11,46	32.574	10,55	38,45
11.	IIlc	60.825	29,64	87.573	28,35	43,98
12.	IIId	62.894	30,65	100.622	32,58	59,99
13.	IVa	29.759	14,50	49.453	16,01	66,18
14.	IVb	16.962	8,26	24.403	7,90	43,87
15.	IVc	5.076	2,47	8.607	2,79	69,56
16.	IVd	245	0,12	437	0,14	78,37
17.	IVe	9	0,00	15	0,00	66,67
	Total	205.229	100,00	308.865	100,00	50,50

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.35 Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2013 - 2014

Instansi	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Pusat	321.857	13,78	325.732	14,00	1,20
Provinsi	73.636	3,15	74.368	3,20	0,99
Kab/Kota	1.940.482	83,07	1.925.751	82,80	-0,76
Total	2.335.975	100,00	2.325.851	100,00	-0,43

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.36 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,0	1	0,00	0
2.	21 - 25	19.879	0,9	7.978	0,30	-60
3.	26 - 30	166.060	7,1	153.530	6,60	-8
4.	31 - 35	252.201	10,8	262.432	11,30	4
5.	36 - 40	251.729	10,8	261.323	11,20	4
6.	41 - 45	416.887	17,8	370.815	15,90	-11
7.	46 - 50	535.896	22,9	525.231	22,60	-2
8.	51 - 55	482.602	20,7	511.500	22,00	6
9.	56 - 60	195.014	8,3	216.805	9,30	11
10.	61 - 65	15.105	0,6	15.496	0,70	3
11.	65 +	602	0,0	740	0,00	23
	Total	2.335.975	100,0	2.325.851	100,00	0

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.37 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	21 - 25	1.712	0,53	1.165	0,36	-31,95
3.	26 - 30	16.158	5,02	14.369	4,41	-11,07
4.	31 - 35	45.294	14,07	43.934	13,49	-3,00
5.	36 - 40	55.353	17,20	56.069	17,21	1,29
6.	41 - 45	70.448	21,89	69.113	21,22	-1,90
7.	46 - 50	57.811	17,96	62.424	19,16	7,98
8.	51 - 55	44.564	13,85	45.624	14,01	2,38
9.	56 - 60	21.949	6,82	24.170	7,42	10,12
10.	61 - 65	7.981	2,48	8.148	2,50	2,09
11.	65 +	587	0,18	716	0,22	21,98
	Total	321.857	100,00	325.732	100,00	1,20

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.38 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,00	0	0	0
2.	21 - 25	941	1,28	459	0.62	-51.22
3.	26 - 30	4.423	6,01	4,682	6.3	5.86
4.	31 - 35	6.197	8,42	6,761	9.09	9.1
5.	36 - 40	6.596	8,96	6,891	9.27	4.47
6.	41 - 45	9.475	12,87	8,807	11.84	-7.05
7.	46 - 50	16.612	22,56	15,252	20.51	-8.19
8.	51 - 55	20.655	28,05	21,330	28.68	3.27
9.	56 - 60	8.006	10,87	9,432	12.68	17.81
10.	61 - 65	721	0,98	744	1	3.19
11.	65 +	10	0,01	10	0.01	0
	Total	73.636	100,00	74.368	100	0.99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.39 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 - 20	0	0,00	1	0,00	0,00
2.	21 - 25	17.226	0,89	6.354	0,33	-63,11
3.	26 - 30	145.479	7,50	134.479	6,98	-7,56
4.	31 - 35	200.710	10,34	211.737	11,00	5,49
5.	36 - 40	189.780	9,78	198.363	10,30	4,52
6.	41 - 45	336.964	17,36	292.895	15,21	-13,08
7.	46 - 50	461.473	23,78	447.555	23,24	-3,02
8.	51 - 55	417.383	21,51	444.546	23,08	6,51
9.	56 - 60	165.059	8,51	183.203	9,51	10,99
10.	61 - 65	6.403	0,33	6.604	0,34	3,14
11.	65 +	5	0,00	14	0,00	180,00
	Total	1.940.482	100,00	1.925.751	100,00	-0,76

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.40 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	246	0,0	164	0,00	-33
2.	SLTP	1.236	0,1	925	0,00	-25
3.	SLTA	398.582	17,1	350.959	15,10	-12
4.	D1	35.242	1,5	30.637	1,30	-13
5.	D II	492.391	21,1	423.709	18,20	-14
6.	D III	250.399	10,7	266.702	11,50	7
7.	D IV	10.281	0,4	13.004	0,60	26
8.	S 1	1.056.133	45,2	1.129.018	48,50	7
9.	S 2	82.787	3,5	100.793	4,30	22
10.	S 3	8.678	0,4	9.940	0,40	15
	Total	2.335.975	100,0	2.325.851	100,00	0

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.41 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	38	0,01	31	0,01	-18,42
2.	SLTP	161	0,05	120	0,04	-25,47
3.	SLTA	26.062	8,10	24.628	7,56	-5,50
4.	D1	980	0,30	934	0,29	-4,69
5.	D II	18.455	5,73	13.151	4,04	-28,74
6.	D III	24.272	7,54	25.299	7,77	4,23
7.	D IV	2.982	0,93	3.058	0,94	2,55
8.	S 1	179.509	55,77	181.135	55,61	0,91
9.	S 2	60.861	18,91	67.605	20,75	11,08
10.	S 3	8.537	2,65	9.771	3,00	14,45
	Total	321.857	100	325.732	100,00	1,20

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015





Tabel III.42 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	4	0,01	2	0,00	-50,00
2.	SLTP	48	0,07	40	0,05	-16,67
3.	SLTA	10.809	14,68	9.852	13,25	-8,85
4.	D1	1.857	2,52	1.821	2,45	-1,94
5.	D II	11.551	15,69	9.436	12,69	-18,31
6.	D III	15.267	20,73	16.873	22,69	10,52
7.	D IV	623	0,85	939	1,26	50,72
8.	S 1	30.849	41,89	31.369	42,18	1,69
9.	S 2	2.592	3,52	3.986	5,36	53,78
10.	S 3	36	0,05	50	0,07	38,89
	Total	73.636	100	74.368	100,00	0,99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.43 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	204	0,01	131	0,01	-35,78
2.	SLTP	1.027	0,05	765	0,04	-25,51
3.	SLTA	361.711	18,64	316.479	16,43	-12,51
4.	D1	32.405	1,67	27.882	1,45	-13,96
5.	D II	462.385	23,83	401.122	20,83	-13,25
6.	D III	210.860	10,87	224.530	11,66	6,48
7.	D IV	6.676	0,34	9.007	0,47	34,92
8.	S 1	845.775	43,59	916.514	47,59	8,36
9.	S 2	19.334	1,00	29.202	1,52	51,04
10.	S 3	105	0,01	119	0,01	13,33
	Total	1.940.482	100,00	1.925.751	100,00	-0,76

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.44 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	947.970	40,6	931.380	40,00	-2
2.	Perempuan	1.388.005	59,4	1.394.471	60,00	0
	Total	2.335.975	100,0	2.325.851	100,00	0

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.45 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	170.591	53,00	171.182	52,55	0,35
2.	Perempuan	151.266	47,00	154.550	47,45	2,17
	Total	321.857	100	325.732	100,00	1,20

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.46 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	27.283	37,05	27.306	36,72	0,08
2.	Perempuan	46.353	62,95	47.062	63,28	1,53
	Total	73.636	100	74.368	100,00	0,99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.47 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	750.096	38,66	732.892	38,06	-2,29
2.	Perempuan	1.190.386	61,34	1.192.859	61,94	0,21
	Total	1.940.482	100	1.925.751	100,00	-0,76

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.48 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	1	0,0	2	0,00	100
2.	Ib	3	0,0	4	0,00	33
3.	Ic	16	0,0	13	0,00	-19
4.	Id	25	0,0	37	0,00	48
5.	Ila	11.250	0,5	6.166	0,30	-45
6.	Ilb	61.497	2,6	37.996	1,60	-38
7.	Ilc	143.535	6,1	111.954	4,80	-22
8.	Ild	108.281	4,6	124.528	5,40	15
9.	IIla	225.256	9,6	228.590	9,80	1
10.	IIlb	291.915	12,5	301.058	12,90	3





Lanjutan Tabel III.48

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
11.	IIIC	259.724	11,1	282.526	12,10	9
12.	IIId	315.999	13,5	324.949	14,00	3
13.	IVa	802.125	34,3	757.405	32,60	-6
14.	IVb	97.345	4,2	130.115	5,60	34
15.	IVc	12.851	0,6	14.101	0,60	10
16.	IVd	4.330	0,2	4.428	0,20	2
17.	IVe	1.822	0,1	1.979	0,10	9
	Total	2.335.975	100,0	2.325.851	100	0,0043

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.49 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	0	0,00	2	0,00	0,00
2.	Ib	1	0,00	1	0,00	0,00
3.	Ic	0	0,00	0	0,00	0,00
4.	Id	2	0,00	5	0,00	150,00
5.	IIa	1.120	0,35	730	0,22	-34,82
6.	IIb	3.548	1,10	2.609	0,80	-26,47
7.	IIc	10.159	3,16	7.555	2,32	-25,63
8.	IId	9.399	2,92	9.989	3,07	6,28
9.	IIa	36.662	11,39	32.097	9,85	-12,45
10.	IIb	60.147	18,69	59.681	18,32	-0,77
11.	IIc	57.616	17,90	61.854	18,99	7,36
12.	IIId	52.779	16,40	58.692	18,02	11,20
13.	IVa	61.393	19,07	63.648	19,54	3,67
14.	IVb	16.159	5,02	15.915	4,89	-1,51
15.	IVc	8.007	2,49	7.905	2,43	-1,27
16.	IVd	3.264	1,01	3.321	1,02	1,75
17.	IVe	1.601	0,50	1.728	0,53	7,93
	Total	321.857	100,00	325.732	100,00	1,20

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.50 Jumlah PNS Provinsi Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	1	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	0	0,00	0	0,00	0,00
3.	Ic	0	0,00	0	0,00	0,00
4.	Id	0	0,00	0	0,00	0,00
5.	IIa	159	0,22	128	0,17	-19,50
6.	IIb	642	0,87	530	0,71	-17,45
7.	IIc	2.894	3,93	2.187	2,94	-24,43
8.	IId	4.749	6,45	5.296	7,12	11,52
9.	IIIa	5.879	7,98	5.668	7,62	-3,59
10.	IIIb	7.436	10,10	7.898	10,62	6,21
11.	IIIc	8.266	11,23	8.991	12,09	8,77
12.	IIId	9.365	12,72	10.442	14,04	11,50
13.	IVa	29.518	40,09	27.031	36,35	-8,43
14.	IVb	3.453	4,69	4.828	6,49	39,82
15.	IVc	817	1,11	884	1,19	8,20
16.	IVd	365	0,50	369	0,50	1,10
17.	IVe	92	0,12	116	0,16	26,09
	Total	73.636	100,00	74.368	100,00	0,99

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.51 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	Ib	2	0,00	3	0,00	50,00
3.	Ic	16	0,00	13	0,00	-18,75
4.	Id	23	0,00	32	0,00	39,13
5.	IIa	9.971	0,51	5.308	0,28	-46,77
6.	IIb	57.307	2,95	34.857	1,81	-39,17
7.	IIc	130.482	6,72	102.212	5,31	-21,67
8.	IId	94.133	4,85	109.243	5,67	16,05
9.	IIIa	182.715	9,42	190.825	9,91	4,44
10.	IIIb	224.332	11,56	233.479	12,12	4,08
11.	IIIc	193.842	9,99	211.681	10,99	9,20
12.	IIId	253.855	13,08	255.815	13,28	0,77
13.	IVa	711.214	36,65	666.726	34,62	-6,26
14.	IVb	77.733	4,01	109.372	5,68	40,70





Lanjutan Tabel III.51

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
15.	IVc	4.027	0,21	5.312	0,28	31,91
16.	IVd	701	0,04	738	0,04	5,28
17.	IVe	129	0,01	135	0,01	4,65
	Total	1.940.482	100,00	1.925.751	100,00	-0,76

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.52 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2010 - 2014

No	Jenjang Peneliti	2010	2011	2012	2013	2014
1	Peneliti Pertama	2020	2055	2191	2611	2728
2	Peneliti Muda	2091	2064	2177	2447	2630
3	Peneliti Madya	2613	2562	2633	2639	2715
4	Peneliti Utama	778	977	1074	1016	1015
	JUMLAH	7502	7658	8075	8713	9088

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015

Tabel III.53 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2010 – 2014

No	Jenjang Peneliti	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Peneliti Pertama	1,73	6,62	19,17	4,48
2	Peneliti Muda	-1,29	5,47	12,40	7,48
3	Peneliti Madya	-1,95	2,77	0,23	2,88
4	Peneliti Utama	25,58	9,93	-5,40	-0,10
	JUMLAH	2,08	5,45	7,90	4,30

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diolah, 2015

Tabel III.54 Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2010 - 2014

No.	Lembaga	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Universitas	136.763	123.099	115.232	124.403	140.975
2	Institut	9.737	10.444	8.727	9.647	11.008
3	Sekolah Tinggi	53.221	41.697	42.328	44.373	47.125
4	Akademi	21.631	19.568	16.423	17.008	16.569
5	Politeknik	12.038	12.699	10.234	11.210	15.238
	Jumlah	233.390	207.507	192.944	20.6641	230.915

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015



Tabel III.55 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2010 -2014

No.	Lembaga	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Universitas	-9,99	-6,39	7,96	13,32
2	Institut	7,26	-16,44	10,54	14,11
3	Sekolah Tinggi	-21,65	1,51	4,83	6,20
4	Akademi	-9,54	-16,07	3,56	-2,58
5	Politeknik	5,49	-19,41	9,54	35,93
Jumlah		-11,09	-7,02	7,10	11,75%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.56 Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013 – 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
	Dosen tetap					
1	< S1	841	0,41	2.548	1,10	202,97
2	S-1/D4	53.896	26,08	43.456	18,82	-19,37
3	S2	97.300	47,09	120.046	51,99	23,38
4	S3	1.8191	8,80	23.508	10,18	29,23
5	Spesialis	2.463	1,19	3.718	1,61	50,95
6	Profesi	2.249	1,09	2.235	0,97	-0,62
	Dosen Tidak Tetap					
1	< S1	506	0,24	397	0,17	-21,54
2	S-1/D4	20.784	10,06	18.480	8,00	-11,09
3	S2	8.909	4,31	12.426	5,38	39,48
4	S3	697	0,34	880	0,38	26,26
5	Spesialis	573	0,28	1.961	0,85	242,23
6	Profesi	232	0,11	1.260	0,55	443,10
Jumlah		206.641	100,00	230.915	100,00	11,75

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.57 Rasio Mahasiswa per Dosen (Tenaga Edukatif) Tahun 2013 - 2014

No.	Lembaga	Tahun	
		2012/2013	2013/2014
1.	Universitas	844	757
2.	Institut	360	304
3.	Sekolah Tinggi	926	807
4.	Akademi	610	583
5.	Politeknik	399	301

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015





Tabel III.58 Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	PNS	58.699	53.993	47.354	25.103	36.066
2	Non-PNS	218.136	213.583	227.745	188.720	266.116
Jumlah		276.835	267.576	275.099	213.823	302.182

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.59 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	PNS	-8,02	-12,30	-46,99	43,67 %
2	Non-PNS	-2,09	6,63	-17,14	41,01 %
Jumlah		-3,34	2,81	-22,27	41,32 %

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.60 Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	PNS	1.106.430	1.056.209	1.072.735	909.350	962.089
2	Non-PNS	521.554	588.716	477.541	624.641	577.730
Jumlah		1.627.984	1.644.925	1.550.276	1.533.991	1.539.819

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.61 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	PNS	-4,54	1,56	-15,23	5,80 %
2	Non-PNS	12,88	-18,88	30,80	-7,51 %
Jumlah		1,04	-5,75	-1,05	0,38 %

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.62 Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	PNS	343.643	346.898	358.528	360.961	351.723
2	Non-PNS	293.305	210.007	155.303	191.122	244.366
Jumlah		636.948	556.905	513.831	552.083	596.089

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015



Tabel III.63 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	PNS	0,95	3,35	0,68	-2,56 %
2	Non-PNS	-28,40	-26,05	23,06	27,86 %
Jumlah		-12,57	-7,73	7,44	7,97 %

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.64 Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	PNS	161.027	162.480	166.868	153.420	177.011
2	Non-PNS	166.136	102.032	69.040	98.985	101.700
Jumlah		327.163	264.512	235.908	252.405	278.711

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.65 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

No	Status Kepegawaian	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	PNS	0,90	2,70	-8,06	15,38 %
2	Non-PNS	-38,59	-32,33	43,37	2,74 %
Jumlah		-19,15	-10,81	6,99	10,42 %

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.66 Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	PNS	82.782	78.000	6.188	76.817	77.509
2	Non-PNS	187.619	97.656	62.994	100.039	108.892
Jumlah		270.401	175.656	159.182	176.856	186.401

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.67 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

No	Status Kepegawaian	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	PNS	-5,78	23,32	-20,14	0,90 %
2	Non-PNS	-47,95	-35,49	58,81	8,85 %
Jumlah		-35,04	-9,38	11,10	5,40 %

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015





Tabel III.68 Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 - 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	PNS	10.175	8.936	7.017	8.657	9.546
2	Non-PNS	8.749	7.166	3.066	6.545	7.267
Jumlah		18.924	16.102	10.083	15.202	16.813

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.69 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2010 – 2014

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	PNS	-12,18	-21,47	23,37	10,27 %
2	Non-PNS	-18,09	-57,21	113,47	11,03 %
Jumlah		-14,91	-37,38	50,77	10,60 %

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.70 Jumlah Guru TK Menurut Usia Tahun 2013 – 2014

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	597.39	27,9	83.886	27,8	40,42
2	31-35	41.014	19,2	57.442	19,0	40,05
3	36-40	34.539	16,2	48.757	16,1	41,17
4	41-45	37.209	17,4	52.597	17,4	41,36
5	46-50	25.173	11,8	35.997	11,9	43,00
6	51-55	10.453	4,9	15.240	5,0	45,80
7	>=56	5.642	2,6	8.263	2,7	46,46
Jumlah		213.823	100,0	302.182	100,0	41,32

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.71 Jumlah Guru SD Menurut Usia Tahun 2013 - 2014

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1.	<= 30	288.957	18,84	462.527	30,04 %	60,01
2.	31-35	211.308	13,78	271.971	17,66 %	28,71
3.	36-40	168.992	11,02	216.417	14,05 %	28,06
4.	41-45	178.973	11,67	177.616	11,53 %	-0,76
5.	46-50	220.929	14,40	223.043	14,49 %	0,96
6.	51-55	249.700	16,28	98.050	6,37 %	-60,73
7.	>=56	215.132	14,02	90.195	5,86 %	-58,07
Jumlah		1.533.991	100,00	1.539.819	100,00	0,38

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015



Tabel III.72 Jumlah Guru SMP Menurut Usia Tahun 2013 - 2014

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	75.292	13,64	81.119	13,61	7,74
2	31-35	74.787	13,55	80.953	13,58	8,24
3	36-40	71.507	12,95	77.407	12,99	8,25
4	41-45	109.347	19,81	118.704	19,91	8,56
5	46-50	117.416	21,27	126.789	21,27	7,98
6	51-55	72.498	13,13	77.786	13,05	7,29
7	>=56	31.236	5,66	33.331	5,59	6,71
Jumlah		552.083	100	596.089	100	7,97

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.73 Jumlah Guru SMA Menurut Usia Tahun 2013 - 2014

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	32.633	12,93	35.739	12,82	9,52
2	31-35	39.611	15,69	43.865	15,74	10,74
3	36-40	37.640	14,91	41.643	14,94	10,63
4	41-45	46.017	18,23	51.142	18,35	11,14
5	46-50	48.729	19,31	53.854	19,32	10,52
6	51-55	31.912	12,64	35.063	12,58	9,87
7	>=56	15.863	6,28	17.405	6,24	9,72
Jumlah		252.405	100,00	27.8711	100.00	10,42

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.74 Jumlah Guru SMK Menurut Usia Tahun 2013 - 2014

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	31.752	17,95	33.790	18,13	6,42
2	31-35	32.057	18,13	34.673	18,60	8,16
3	36-40	28.602	16,17	30.461	16,34	6,50
4	41-45	29.064	16,43	31.615	16,96	8,78
5	46-50	29.170	16,49	27.288	14,64	-6,45
6	51-55	17.752	10,04	19.354	10,38	9,02
7	>=56	8.459	4,78	9.220	4,95	9,00
Jumlah		176.856	100,00	186.401	100,00	5,40

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015





Tabel III.75 Jumlah Guru SLB Menurut Usia Tahun 2013 - 2014

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	<= 30	1.950	12,83	2.134	12,69	9,44
2	31-35	1.425	9,37	1.579	9,39	10,81
3	36-40	1.844	12,13	2.073	12,33	12,42
4	41-45	3.205	21,08	3.557	21,16	10,98
5	46-50	3.925	25,82	4.378	26,04	11,54
6	51-55	2.026	13,33	2.194	13,05	8,29
7	>=56	827	5,44	896	5,33	8,34
Jumlah		15.202	100,00	16.811	100,00	10,58

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.76 Jumlah Guru TK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	152.811	71,47	180.791	59,83	18,31
2	>= S1	61.012	28,53	121.391	40,17	98,96
Jumlah		213.823	100,00	302.182	100,00	41,32

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.77 Jumlah Guru SD Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	539.036	35,14	292.158	18,97	-45,80
2	>= S1	994.955	64,86	1.247.661	81,03	25,40
Jumlah		1.533.991	100,00	1.539.819	100,00	0,38

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.78 Jumlah Guru SMP Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	84.688	15,34	51.494	8,64	-39,20
2	>= S1	467.395	84,66	544.595	91,36	16,52
Jumlah		552.083	100,00	596.089	100,00	7,97

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015



Tabel III.79 Jumlah Guru SMA Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	16.383	6,49	19.897	7,14	21,45
2	>= S1	236.022	93,51	258.814	92,86	9,66
Jumlah		252.405	100,00	278.711	100,00	10,42

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.80 Jumlah Guru SMK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	18.601	10,52	34.096	18,29	83,30
2	>= S1	158.255	89,48	152.305	81,71	-3,76
Jumlah		176.856	100,00	186.401	100,00	5,40

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.81 Jumlah Guru SLB Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013 - 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2012/2013		2013/2014		
		Jumlah	Rasio (%)	Jumlah	Rasio (%)	
1	< S1	5.693	37,45	6.536	38,87	14,81
2	>= S1	9.509	62,55	10.277	61,13	8,08
Jumlah		15.202	100,00	16.813	100,00	10,60

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.82 Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Laki-laki	9.247	8.541	8.614	5.527	7.878
2	Perempuan	267.588	259.035	266.485	208.296	294.304
Jumlah		276.835	267.576	275.099	213.823	302.182

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.83 Persentase (%) Pertumbuhan (%) Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Laki-laki	-7,63	0,85	-35,84	42,54
2	Perempuan	-3,20	2,88	-21,84	41,29
Jumlah		-3,34	2,81	-22,27	41,32

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015





Tabel III.84 Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Laki-laki	1.430.853	624.241	584.752	549.571	570.058
2	Perempuan	197.131	1.020.684	965.524	984.420	969.761
Jumlah		1.627.984	1.644.925	1.550.276	1.533.991	1.539.819

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.85 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Laki-laki	-56,37	-6,33	-6,02	3,73
2	Perempuan	417,77	-5,40	1,96	-1,49
Jumlah		1,04	-5,75	-1,05	0,38

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.86 Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Laki-laki	310.338	248.832	226.305	240.455	256.520
2	Perempuan	326.610	308.073	287.526	311.628	339.569
Jumlah		636.948	556.905	513.831	552.083	596.089

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.87 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Laki-laki	-19,82	-9,05	6,25	6,68
2	Perempuan	-5,68	-6,67	8,38	8,97
Jumlah		-12,57	-7,73	7,44	7,97

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.88 Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Laki-laki	165.457	121.930	107.581	111.518	190.533
2	Perempuan	161.706	142.582	128.327	140.887	88.178
Jumlah		327.163	264.512	235.908	252.405	278.711

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015



Tabel III.89 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Laki-laki	-26,31	-11,77	3,66	70,85
2	Perempuan	-11,83	-10,00	9,79	-37,41
Jumlah		-19,15	-10,81	6,99	10,42

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.90 Jumlah Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Laki-laki	159.917	92.948	82.792	89.734	94.339
2	Perempuan	110.484	82.708	7.390	87.122	92.062
Jumlah		270.401	175.656	159.182	176.856	186.401

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.91 Persentase (%) Pertumbuhan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Laki-laki	-41,88	-10,93	8,38	5,13
2	Perempuan	-25,14	-7,64	14,05	5,67
Jumlah		-35,04	-9,38	11,10	5,40

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015

Tabel III.92 Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Laki-laki	7.618	5.326	3.462	4.527	5.068
2	Perempuan	11.306	10.776	6.621	10.675	11.745
Jumlah		18.033	18.924	16.102	10.083	16.813

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Tabel III.93 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
1	Laki-laki	-30,09	-35,00	30,76	11,95
2	Perempuan	-4,69	-38,56	61,23	10,02
Jumlah		-14,91	-37,38	50,77	10,60

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2015





Tabel III.94 Perkembangan Rasio Siswa Per Guru (Termasuk Kepala Sekolah) Tahun 2010 - 2014

No	Perkembangan Rasio	Tahun				
		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
1	Siswa Per Guru TK	15	15	16	14	23
2	Siswa Per Guru SD	17	18	20	17	32
3	Siswa Per Guru SMP	15	17	18	16	30
4	Siswa Per Guru SMA	12	12	18	16	30
5	Siswa Per Guru SMK	13	13	25	22	42
6	Siswa Per Guru SLB*			8	5	11

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Keterangan :

* Untuk Perkembangan Rasio Siswa Per Guru SLB Tahun 2007/2008 sampai 2010/2011 tidak tersedia datanya.

Tabel III.95 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2014

No	SDM Kesehatan	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Dokter spesialis	27.333	3,86	36.746	4,19	46.994	6,09
2.	Dokter umum	37.364	5,28	41.841	4,77	40.787	5,28
3.	Dokter gigi	11.826	1,67	11.857	1,35	12.502	1,62
4.	Perawat	235.496	33,30	288.405	32,88	237.181	30,72
5.	Bidan	126.276	17,85	137.110	15,63	124.948	16,18
6.	Farmasi	31.223	4,41	40.181	4,58	30.408	3,94
7.	Tenaga Kesehatan Lainnya	97.904	13,84	125.494	14,31	83.814	10,86
8.	Tenaga Non Kesehatan	139.812	19,77	195.454	22,28	195.444	25,31
	Total	707.234	100,00	877.088	100,00	772.078	100,00

Sumber : Profil Kesehatan, diolah, 2015

Tabel III.96 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2014

No	SDM Kesehatan	2012-2013	2013-2014
1.	Dokter spesialis	34,44	27,89
2.	Dokter umum	11,98	-2,52
3.	Dokter gigi	0,26	5,44
4.	Perawat	22,47	-17,76
5.	Bidan	8,58	-8,87
6.	Farmasi	28,69	-24,32
7.	Tenaga kesehatan lainnya	28,18	-33,21
8.	Tenaga Non Kesehatan	39,80	-0,01
	Total	24,02	-11,97

Sumber : Profil Kesehatan, diolah, 2015



Tabel III.97 Jumlah Total PNS (Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor Tahun 2013-2014

No.	Klasifikasi Auditor	Tahun				Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		2013		2014		
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Auditor Ahli						
1	Utama	9	0,09	11	0,09	22,22
2	Madya	1.557	15,46	1.850	14,50	18,82
3	Muda	3.093	30,70	3.774	29,59	22,02
4	Pertama	2.656	26,36	3.902	30,59	46,91
Auditor Terampil						
1	Penyelia	1.183	11,74	1.289	10,11	8,96
2	Pelaksana lanjutan	717	7,12	830	6,51	15,76
3	Pelaksana	859	8,53	1.099	8,62	27,94
Jumlah Total Auditor		10.074	100,00	12.755	100,00	26,61

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2015

Tabel III.98 Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2013- 2015

No.	Jenjang	Tahun					
		2013		2014		2015	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	Pemeriksa pertama	3.416	66	3.147	60,89	2.790	54,56
2	Pemeriksa muda	1.457	28	1.705	32,99	1.958	38,29
3	Pemeriksa madya	279	5	311	6,02	361	7,06
4	Pemeriksa utama	7	0,14	5	0,10	5	0,10
Jumlah		5.159	100	5.168	100,00	5.114	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015

Tabel III.99 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2013 - 2015

No.	Jenjang	Tahun	
		2013-2014	2014-2015
1	Pemeriksa pertama	-7,87	-11,34
2	Pemeriksa muda	17,02	14,84
3	Pemeriksa madya	11,47	16,08
4	Pemeriksa utama	-28,57	0,00
Jumlah Pemeriksa		0,17	-1,04

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015





Tabel III.100 Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2013 - 2015

No.	Kategori Usia	Tahun					
		2013		2014		2015	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	<30 tahun	1.443	28%	1.278	24,73	885	17,31
2	30 – 40 tahun	2.332	45%	2.453	47,47	2.808	54,91
3	40 – 50 tahun	937	18%	985	19,06	959	18,75
4	>50 tahun	447	9%	452	8,75	462	9,03
Jumlah		5.159	100%	5.168	100,00	5.114	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015

Tabel III.101 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2013 - 2015

No.	Kategori Usia	Tahun	
		2013-2014	2014-2015
1	>30 tahun	-11,43	-30,75
2	30 – 40 tahun	5,19	14,47
3	40 – 50 tahun	5,12	-2,64
4	>50 tahun	1,12	2,21
Jumlah Pemeriksa		0,17	-1,04

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015

Tabel III.102 Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2015

No.	Kategori Pendidikan	Tahun					
		2013		2014		2015	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	SLTA	183	4	161	3,12	153	2,99
2	D III	543	11	495	9,58	263	5,14
3	D IV	73	1	81	1,57	80	1,56
4	S1	3.370	65	3.442	66,60	3.417	66,82
5	S2	983	19	982	19,00	1.190	23,27
6	S3	7	0,14	7	0,14	11	0,22
Jumlah		5.159	100	5.168	100,00	5.114	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015

Tabel III.103 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2015

No.	Kategori Pendidikan	Tahun	
		2013-2014	2014-2015
1	SLTA	-12,0	-5,0
2	D III	-8,8	-46,9
3	D IV	11,0	-1,2
4	S1	2,1	-0,7
5	S2	-0,1	21,2
6	S3	0,0	57,1
Jumlah Pemeriksa		0,2	-1,0

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015



Tabel III.104 Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015

No.	Kategori	Tahun					
		2013		2014		2015	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	Laki-laki	3.071	60	3.060	59,21	3.029	59,23
2	Perempuan	2.088	40	2.108	40,79	2.085	40,77
Jumlah		5.159	100	5.168	100,00	5.114	100,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015

Tabel III.105 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015

No.	Kategori Jenis Kelamin	Tahun	
		2013-2014	2014-2015
1	Laki-laki	-0,36	-1,01
2	Perempuan	0,96	-1,09
Jumlah Pemeriksa		0,17	-1,04

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015

Tabel III.106 Jumlah Penyidik KPK Tahun 2011 - 2015

No.	Penyidik KPK	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah	83	51	75	77	86
2	Persentase Pertumbuhan	7,79	-38,55	47,06	2,67	11.69%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2015

Tabel III.107 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenjang Tahun 2014 - 2015

No.	Jenjang	2014		2015		Pertumbuhan 2014-2015 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1	Penyidik muda	59	76.62	68	79.07	15.25
2	Penyidik madya	15	19.48	13	15.12	-13.33
3	Penyidik utama	3	3.90	5	5.81	66.67
Jumlah		77	100.00	86	100.00	11.69

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2015

Tabel III.108 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 - 2015

No.	Pendidikan	2014		2015		Pertumbuhan 2014-2015 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1	>=S1	71	92.21	78	90.70	9.86
2	S2	6	7.79	8	9.30	33.33
Jumlah		77	100.00	86	100.00	11.69

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2015





Tabel III.109 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 - 2015

No.	Jenjang	2014		2015		Pertumbuhan 2014 - 2015 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1	Laki-laki	71	92.21	80	93.02	12.68
2	Perempuan	6	7.79	6	6.98	0.00
Jumlah		77	100.00	86	100.00	11.69

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2015

Tabel III.110 Jumlah SDM Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) dan Jajarannya di Seluruh Indonesia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013

No.	Pangkat/Golongan	2013	
		Jumlah	%
	Polisi		
1.	Brigjen	1	0,0
2.	Komisaris Besar Polisi (KBP)	6	0,2
3.	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)	45	1,7
4.	Komisaris Polisi (Kopol)	82	3,1
5.	Ajun Komisaris Polisi (AKP)	197	7,5
6.	Inspektur Polisi Tk.I (IPTU)	81	3,1
7.	Inspektur Polisi Tk. II (IPDA)	125	4,7
8.	Bintara (BA)	2076	78,8
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
9.	Golongan IV		
10.	Golongan III	8	0,3
11.	Golongan II	14	0,5
12.	Golongan I	1	0,0
Jumlah		2636	100

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, diolah, 2013

Tabel III.111 Jumlah SDM Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Seluruh Indonesia Tahun 2015

No.	Nama POLDA	Jumlah SDM
1.	Aceh	93
2.	Sumatera Utara	154
3.	Sumatera Barat	89
4.	Riau	63
5.	Jambi	66
6.	Bengkulu	56
7.	Sumatera Selatan	104
8.	Lampung	71
9.	Metro Jaya	123
10.	Banten	41
11.	Jawa Barat	163

Lanjutan Tabel III.111

No.	Nama POLDA	Jumlah SDM
12.	D.I Yogyakarta	50
13.	Jawa Tengah	228
14.	Polda Jatim	252
15.	Polda Bali	68
16.	Polda Nusa Tenggara Barat	53
17.	Polda Nusa Tenggara Timur	86
18.	Polda Kalimantan Barat	65
19.	Polda Kalimantan Selatan	77
20.	Polda Kalimantan Tengah	63
21.	Polda Kalimantan Timur	76
22.	Polda Sulawesi Utara	59
23.	Polda Sulawesi Tengah	64
24.	Polda Sulawesi Selatan	119
25.	Polda Sulawesi Tenggara	52
26.	Polda Maluku	33
27.	Polda Papua	195
28.	Polres Gorontalo	34
29.	Polres Bangka Belitung	33
30.	Polda Maluku Utara	42
31.	Polda Kepulauan Riau	34
32.	Ditpidkor	94
Total		2800

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, diolah, 2015

Tabel III.112 Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Jenjang Tahun 2013 - 2014

No.	Jenjang	2013		2014		Pertumbuhan 2013-2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
	PKB Terampil					
1.	Pelaksana pemula	410	2	2117	13,66	416,34
2.	Pelaksana	894	5	3565	23,00	298,77
3.	Pelaksana Lanjutan	1627	9	1563	10,08	-3,93
4.	Penyelia	3300	19	3418	22,05	3,58
	PKB Ahli					
5.	Pertama	4640	27	1577	10,17	-66,01
6.	Muda	4234	24	2106	13,59	-50,26
7.	Madya	2355	13	1156	7,46	-50,91
Jumlah		17460	100	15502	100,00	-11,21

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2014



Tabel III.113 Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

No.	Pendidikan	2013	
		Jumlah	% Rasio
1.	SMA	8519	49
2.	D1 – D3	2269	13
3.	S1	6346	36
4.	S2	326	2
5.	S3		
Jumlah		17460	100

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2013

Tabel III.114 Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Jenis Kelamin	2013	
		Jumlah	% Rasio
1.	Laki-Laki	8122	47
2.	Perempuan	9338	53
Jumlah		17460	100

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2013

Tabel III.115 Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Tahun 2013 - 2014

Instansi	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
Pusat	519.818	29,72	498.124	29,20	-4,17
Provinsi	197.836	11,31	194.414	11,40	-1,73
Kab/Kota	1.031.431	58,97	1.013.470	59,41	-1,74
Total	1.749.085	100,00	1.706.008	100,00	-2,46

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.116 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 – 20	1.578	0,1	1.307	0,1	-17
2.	21 – 25	40.026	2,3	43.692	2,6	9
3.	26 – 30	229.668	13,1	202.150	11,8	-12
4.	31 – 35	318.777	18,2	336.278	19,7	5
5.	36 – 40	280.535	16,0	292.205	17,1	4
6.	41 – 45	275.466	15,7	260.521	15,3	-5
7.	46 – 50	306.485	17,5	276.251	16,2	-10
8.	51 – 55	270.422	15,5	245.183	14,4	-9
9.	56 – 60	25.133	1,4	46.370	2,7	84



Lanjutan Tabel III.116

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
10.	61 – 65	906	0,1	1.964	0,1	117
11.	65 +	89	0,0	87	0,0	-2
	Total	1.749.085	100,0	1.706.008	100,0	-2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.117 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 – 20	1.568	0,30	1.218	0,24	-22,32
2.	21 – 25	25.900	4,98	28.621	5,75	10,51
3.	26 – 30	79.246	15,24	74.091	14,87	-6,51
4.	31 – 35	81.044	15,59	80.791	16,22	-0,31
5.	36 – 40	70.289	13,52	67.186	13,49	-4,41
6.	41 – 45	79.397	15,27	70.777	14,21	-10,86
7.	46 – 50	89.107	17,14	79.171	15,89	-11,15
8.	51 – 55	81.151	15,61	77.132	15,48	-4,95
9.	56 – 60	11.282	2,17	17.308	3,47	53,41
10.	61 – 65	749	0,14	1.748	0,35	133,38
11.	65 +	85	0,02	81	0,02	-4,71
	Total	519.818	100,00	498.124	100,00	-4,17

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.118 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 – 20	0	0,00	35	0,02	0,00
2.	21 – 25	2.763	1,40	3.331	1,71	20,56
3.	26 – 30	17.276	8,73	16.023	8,24	-7,25
4.	31 – 35	29.690	15,01	30.032	15,45	1,15
5.	36 – 40	29.620	14,97	30.358	15,62	2,49
6.	41 – 45	31.888	16,12	29.950	15,41	-6,08
7.	46 – 50	40.089	20,26	35.804	18,42	-10,69
8.	51 – 55	43.137	21,80	40.573	20,87	-5,94
9.	56 – 60	3.319	1,68	8.234	4,24	148,09
10.	61 – 65	52	0,03	71	0,04	36,54





Lanjutan Tabel III.118

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
11.	65 +	2	0,00	3	0,00	50,00
	Total	197.836	100,00	194.414	100,00	-1,73

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.119 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No.	Usia	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	18 – 20	10	0,00	54	0,01	440,00
2.	21 – 25	11.363	1,10	11.740	1,16	3,32
3.	26 – 30	133.146	12,91	112.036	11,05	-15,85
4.	31 – 35	208.043	20,17	225.455	22,25	8,37
5.	36 – 40	180.626	17,51	194.661	19,21	7,77
6.	41 – 45	164.181	15,92	159.794	15,77	-2,67
7.	46 – 50	177.289	17,19	161.276	15,91	-9,03
8.	51 – 55	146.134	14,17	127.478	12,58	-12,77
9.	56 – 60	10.532	1,02	20.828	2,06	97,76
10.	61 – 65	105	0,01	145	0,01	38,10
11.	65 +	2	0,00	3	0,00	50,00
	Total	1.031.431	100,00	1.013.470	100,00	-1,74

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.120 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	60.184	3,4	56.171	3,3	-7
2.	SLTP	92.024	5,3	87.179	5,1	-5
3.	SLTA	795.963	45,5	783.209	45,9	-2
4.	D1	21.312	1,2	20.209	1,2	-5
5.	D II	32.931	1,9	23.215	1,4	-30
6.	D III	151.293	8,6	144.607	8,5	-4
7.	D IV	15.158	0,9	15.470	0,9	2
8.	S 1	530.962	30,4	525.360	30,8	-1
9.	S 2	48.367	2,8	50.025	2,9	3
10.	S 3	891	0,1	563	0,0	-37
	Total	1.749.085	100,0	1.706.008	100,0	-2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.121 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	10.674	2,05	10.459	2,10	-2,01
2.	SLTP	17.954	3,45	16.595	3,33	-7,57
3.	SLTA	215.726	41,50	205.439	41,24	-4,77
4.	D1	13.395	2,58	13.634	2,74	1,78
5.	D II	5.128	0,99	2.396	0,48	-53,28
6.	D III	50.710	9,76	51.478	10,33	1,51
7.	D IV	8.952	1,72	9.573	1,92	6,94
8.	S 1	171.227	32,94	161.625	32,45	-5,61
9.	S 2	25.291	4,87	26.452	5,31	4,59
10.	S 3	761	0,15	473	0,09	-37,84
	Total	519.818	100,00	498.124	100,00	-4,17

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.122 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	5.840	2,95	5.459	2,81	-6,52
2.	SLTP	8.207	4,15	7.367	3,79	-10,24
3.	SLTA	90.980	45,99	87.392	44,95	-3,94
4.	D1	876	0,44	713	0,37	-18,61
5.	D II	1.533	0,77	757	0,39	-50,62
6.	D III	15.767	7,97	16.063	8,26	1,88
7.	D IV	1.802	0,91	1.874	0,96	4,00
8.	S 1	66.106	33,41	67.296	34,61	1,80
9.	S 2	6.666	3,37	7.457	3,84	11,87
10.	S 3	59	0,03	36	0,02	-38,98
	Total	197.836	100,00	194.414	100,00	-1,73

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.123 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2013 - 2014

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	SD	43.670	4,23	40.253	3,97	-7,82
2.	SLTP	65.863	6,39	63.217	6,24	-4,02





Lanjutan Tabel III.123

No.	Pendidikan	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
3.	SLTA	489.257	47,43	490.378	48,39	0,23
4.	D1	7.041	0,68	5.862	0,58	-16,74
5.	D II	26.270	2,55	20.062	1,98	-23,63
6.	D III	84.816	8,22	77.066	7,60	-9,14
7.	D IV	4.404	0,43	4.023	0,40	-8,65
8.	S 1	293.629	28,47	296.439	29,25	0,96
9.	S 2	16.410	1,59	16.116	1,59	-1,79
10.	S 3	71	0,01	54	0,01	-23,94
	Total	1.031.431	100,00	1.013.470	100,00	-1,74

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.124 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	1.117.046	63,9	1.058.107	62,0	-5
2.	Perempuan	632.039	36,1	647.901	38,0	3
	Total	1.749.085	100,0	1.706.008	100,0	-2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.125 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	334.455	64,34	316.630	63,56	-5,33
2.	Perempuan	185.363	35,66	181.494	36,44	-2,09
	Total	519.818	100	498.124	100,00	-4,17

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.126 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	124.519	62,94	120.561	62,01	-3,18
2.	Perempuan	73.317	37,06	73.853	37,99	0,73
	Total	197.836	100,00	194.414	100,00	-1,73

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.127 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2014

No.	Jenis Kelamin	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Laki-laki	658.072	63,80	620.916	61,27	-5,65
2.	Perempuan	373.359	36,20	392.554	38,73	5,14
	Total	1.031.431	100,00	1.013.470	100,00	-1,74

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.128 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	10.248	0,6	8.776	0,5	-14
2.	Ib	20.290	1,2	19.525	1,1	-4
3.	Ic	22.832	1,3	25.427	1,5	11
4.	Id	29.618	1,7	28.616	1,7	-3
5.	Ila	207.859	11,9	195.133	11,4	-6
6.	Ilb	292.561	16,7	302.813	17,7	4
7.	Ilc	162.777	9,3	166.670	9,8	2
8.	Ild	91.754	5,2	102.834	6,0	12
9.	IIla	319.681	18,3	314.596	18,4	-2
10.	IIlb	311.544	17,8	340.967	20,0	9
11.	IIlc	122.403	7,0	103.057	6,0	-16
12.	IIId	98.971	5,7	70.908	4,2	-28
13.	IVa	34.588	2,0	17.304	1,0	-50
14.	IVb	15.866	0,9	5.820	0,3	-63
15.	IVc	6.085	0,3	2.324	0,1	-62
16.	IVd	1.581	0,1	987	0,1	-38
17.	IVe	427	0,0	251	0,0	-41
	Total	1.749.085	100,0	1.706.008	100,0	-2

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.129 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	649	0,12	933	0,19	43,76
2.	Ib	2.457	0,47	2.045	0,41	-16,77
3.	Ic	2.293	0,44	2.756	0,55	20,19
4.	Id	5.482	1,05	4.700	0,94	-14,26





Lanjutan Tabel III.129

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
5.	IIa	42.659	8,21	38.076	7,64	-10,74
6.	IIb	54.568	10,50	49.520	9,94	-9,25
7.	IIc	60.461	11,63	62.326	12,51	3,08
8.	IId	39.060	7,51	41.810	8,39	7,04
9.	IIIa	100.262	19,29	92.146	18,50	-8,09
10.	IIIb	117.456	22,60	122.627	24,62	4,40
11.	IIIc	42.448	8,17	42.407	8,51	-0,10
12.	IIId	35.011	6,74	28.327	5,69	-19,09
13.	IVa	8.987	1,73	5.782	1,16	-35,66
14.	IVb	4.938	0,95	2.486	0,50	-49,66
15.	IVc	1.614	0,31	1.093	0,22	-32,28
16.	IVd	1.072	0,21	856	0,17	-20,15
17.	IVe	401	0,08	234	0,05	-41,65
	Total	519.818	100,00	498.124	100,00	-4,17

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.130 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	802	0,41	600	0,31	-25,19
2.	Ib	1.645	0,83	1.647	0,85	0,12
3.	Ic	1.940	0,98	1.790	0,92	-7,73
4.	Id	2.708	1,37	2.527	1,30	-6,68
5.	IIa	17.589	8,89	13.780	7,09	-21,66
6.	IIb	29.155	14,74	32.018	16,47	9,82
7.	IIc	12.758	6,45	12.482	6,42	-2,16
8.	IId	8.709	4,40	9.346	4,81	7,31
9.	IIIa	33.862	17,12	29.432	15,14	-13,08
10.	IIIb	45.834	23,17	51.453	26,47	12,26
11.	IIIc	17.678	8,94	18.190	9,36	2,90
12.	IIId	18.068	9,13	16.864	8,67	-6,66
13.	IVa	4.365	2,21	3.197	1,64	-26,76
14.	IVb	1.849	0,93	799	0,41	-56,79
15.	IVc	564	0,29	201	0,10	-64,36
16.	IVd	297	0,15	83	0,04	-72,05
17.	IVe	13	0,01	5	0,00	-61,54
	Total	197.836	100,00	194.414	100,00	-1,73

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015



Tabel III.131 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2013 - 2014

No.	Gol/ Ruang	2013		2014		Pertumbuhan 2013 - 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	Ia	8.797	0,85	7.243	0,71	-17,67
2.	Ib	16.188	1,57	15.833	1,56	-2,19
3.	Ic	18.599	1,80	20.881	2,06	12,27
4.	Id	21.428	2,08	21.389	2,11	-0,18
5.	IIa	147.611	14,31	143.277	14,14	-2,94
6.	IIb	208.838	20,25	221.275	21,83	5,96
7.	IIc	89.558	8,68	91.862	9,06	2,57
8.	IId	43.985	4,26	51.678	5,10	17,49
9.	IIIa	185.557	17,99	193.018	19,05	4,02
10.	IIIb	148.254	14,37	166.887	16,47	12,57
11.	IIIc	62.277	6,04	42.460	4,19	-31,82
12.	IIId	45.892	4,45	25.717	2,54	-43,96
13.	IVa	21.236	2,06	8.325	0,82	-60,80
14.	IVb	9.079	0,88	2.535	0,25	-72,08
15.	IVc	3.907	0,38	1.030	0,10	-73,64
16.	IVd	212	0,02	48	0,00	-77,36
17.	IVe	13	0,00	12	0,00	-7,69
18.	Total	1.031.431	100,00	1.013.470	100,00	-1,74

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2015

Tabel III.132 Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan Tahun 2012 - 2015

No	Jenis diklat	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Diklat Prajabatan Gol. I	0	0	2274	4,5	3745	6	5398	5,1
2	Diklat Prajabatan Gol. II	332	57,9	13395	26,5	21771	34	46920	43,9
3	Diklat Prajabatan Gol. III	205	35,8	6608	13,1	18313	29	40479	37,9
4	Diklatpim Tk. IV	36	6,3	21110	41,8	12866	20	9044	8,5
5	Diklatpim Tk. III	0	0	7094	14,1	5755	9	3977	3,7
6	Diklatpim tk. II	0	0	0	0	951	1	897	0,8
7	Diklatpim Tk. I	0	0	0	0	30	0	60	0,1
	Jumlah Total	573	100	50481	100	63431	100	106775	100

Sumber : Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2015

Catatan : Pada tahun 2012, masih banyak Badan Diklat yang belum menggunakan SIDA





Tabel III.133 Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis Tahun 2012 - 2015

No	Jenis diklat	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Diklat Fungsional	0	0	1539	15,3%	2904	14%	1478	9,3%
2	diklat teknis	0	0	8494	84,7%	17897	86%	14441	90,7%
	Jumlah Total	0	0	10033	100%	20801	100%	15919	100%

Sumber : Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2015

Catatan : Pada tahun 2012, masih banyak Badan Diklat yang belum menggunakan SIDA

Tabel III.134 Jumlah Keseluruhan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang Terakreditasi

No	Jenis Diklat	Kementrian			LPNK			Provinsi			Kab/kota		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	Prajab Gol. I dan II	2	18	-	4	7	-	4	11	-	-	1	-
2.	Prajab Gol. III	6	14	-	4	7	-	4	11	-	-	1	-
3.	Kepemimpinan TK.IV	3	15	-	5	7	-	3	10	-	-	1	-
4.	Kepemimpinan TK.III	4	13	-	5	7	-	4	11	-	-	1	-
5.	Kepemimpinan TK.II	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	15	60	-	18	28	-	17	43	-	-	4	0

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2015

Tabel III.135 Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015

NO.	KLASIFIKASI WI	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Widyaiswara Pertama									
1.	Gol. III/a	251	9	269	10	265	9,85	266	9,63
2.	Gol.III/b	180	7	204	7	215	8,00	207	7,49
Widyaiswara Muda									
3.	Gol. III/c	319	12	349	13	350	13,02	354	12,82
4.	Gol. III/d	417	16	431	16	422	15,69	426	15,42
Widyaiswara Madya									
5.	Gol. IV/a	563	21	512	19	492	18,30	497	17,99
6.	Gol. IV/b	457	17	500	18	518	19,26	542	19,62
7.	Gol. IV/c	228	9	236	9	220	8,18	238	8,62
Widyaiswara Utama									
8.	Gol. IV/d	189	7	185	7	165	6,14	183	6,63
9.	Gol. IV/e	51	2	48	2	42	1,56	49	1,77
Total		2.655	100	2.734	100	2.689	100	2.762	100,00

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2015

Tabel III.136 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015

NO.	KLASIFIKASI WI	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Widyaiswara Pertama				
1.	Gol. III/a	7,17	-1,49	0,38
2.	Gol.III/b	13,33	5,39	-3,72



Lanjutan Tabel III.136

NO.	KLASIFIKASI WI	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Widyaiswara Muda				
3.	Gol. III/c	9,40	0,29	1,14
4.	Gol. III/d	3,36	-2,09	0,95
Widyaiswara Madya				
5.	Gol. IV/a	-9,06	-3,91	1,02
6.	Gol. IV/b	9,41	3,60	4,63
7.	Gol. IV/c	3,51	-6,78	8,18
Widyaiswara Utama				
8.	Gol. IV/d	-2,12	-10,81	10,91
9.	Gol. IV/e	-5,88	-12,50	16,67
Total		2,98	-1,65	2,71

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2015

Tabel III.137 Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015

NO.	KLASIFIKASI WI	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Widyaiswara Pertama									
1.	Gol. III/a	17	2	20	3	37	4,89	36	4,70
2.	Gol.III/b	47	7	54	7	66	8,72	61	7,96
Widyaiswara Muda									
3.	Gol. III/c	84	12	113	16	124	16,38	122	15,93
4.	Gol. III/d	85	12	101	14	104	13,74	108	14,10
Widyaiswara Madya									
5.	Gol. IV/a	116	17	121	17	118	15,59	120	15,67
6.	Gol. IV/b	99	14	108	15	117	15,46	112	14,62
7.	Gol. IV/c	98	14	85	12	77	10,17	84	10,97
Widyaiswara Utama									
8.	Gol. IV/d	130	19	107	15	98	12,95	106	13,84
9.	Gol. IV/e	16	2	16	2	16	2,11	17	2,22
	Total	692	100	725	100	757	100	766	100,00

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2015

Tabel III.138 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2012 - 2015

NO.	KLASIFIKASI WI	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Widyaiswara Pertama				
1.	Gol. III/a	17,65	85,00	-2.70%
2.	Gol. III/b	14,89	22,22	-7.58%
Widyaiswara Muda				
3.	Gol. III/c	34,52	9,73	-1.61%
4.	Gol. III/d	18,82	2,97	3.85%
Widyaiswara Madya				
5.	Gol. IV/a	4,31	-2,48	1.69%
6.	Gol. IV/b	9,09	8,33	-4.27%
7.	Gol. IV/c	-13,27	-9,41	9.09%





Lanjutan Tabel III.138

NO.	KLASIFIKASI WI	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Widyaiswara Utama				
8.	Gol. IV/d	-17,69	-8,41	8.16%
9.	Gol. IV/e	0,00	0,00	6.25%
	Total	4,77	4,41	1.19%

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2015

Tabel III.139 Gaji Pokok PNS Golongan I Tahun 2013 – 2015

MKG	Golongan I/a			MKG	Golongan I/b		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0	1.323.000	1.402.400	1.486.500	0			
1				1			
2	1.364.700	1.446.500	1.533.400	2			
3				3	1.444.800	1.531.500	1.623.400
4	1.407.600	1.492.100	1.581.700	4			
5				5	1.490.300	1.579.700	1.674.500
6	1.452.000	1.539.100	1.631.500	6			
7				7	1.537.200	1.629.500	1.727.300
8	1.497.700	1.587.600	1.682.900	8			
9				9	1.585.600	1.680.800	1.781.700
10	1.544.900	1.637.600	1.735.900	10			
11				11	1.635.600	1.733.700	1.837.800
12	1.593.500	1.689.200	1.790.500	12			
13				13	1.687.100	1.788.300	1.895.700
14	1.643.700	1.742.400	1.846.900	14			
15				15	1.740.200	1.844.700	1.955.400
16	1.695.500	1.797.200	1.905.100	16			
17				17	1.795.000	1.902.700	2.016.900
18	1.748.900	1.853.800	1.965.100	18			
19				19	1.851.600	1.962.700	2.080.500
20	1.804.000	1.912.200	2.027.000	20			
21				21	1.909.900	2.024.500	2.146.000
22	1.860.800	1.972.400	2.090.800	22			
23				23	1.970.000	2.088.300	2.213.600
24	1.919.400	2.034.600	2.156.700	24			
25				25	2.032.100	2.154.000	2.283.300
26	1.979.900	2.098.600	2.224.600	26			
27				27	2.096.100	2.221.900	2.355.200



Lanjutan Tabel III.139

MKG	Golongan I/c			MKG	Golongan I/d		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0				0			
1				1			
2				2			
3	1.505.900	1.596.300	1.692.100	3	1.569.600	1.663.800	1.763.600
4				4			
5	1.553.300	1.646.500	1.745.400	5	1.619.000	1.716.200	1.819.200
6				6			
7	1.602.300	1.698.400	1.800.300	7	1.670.000	1.770.200	1.876.500
8				8			
9	1.652.700	1.751.900	1.857.000	9	1.722.600	1.826.000	1.935.600
10				10			
11	1.704.800	1.807.100	1.915.500	11	1.776.900	1.883.500	1.996.500
12				12			
13	1.758.500	1.864.000	1.975.800	13	1.832.800	1.942.800	2.059.400
14				14			
15	1.813.800	1.922.700	2.038.100	15	1.890.600	2.004.000	2.124.300
16				16			
17	1.871.000	1.983.200	2.102.300	17	1.950.100	2.067.100	2.191.200
18				18			
19	1.929.900	2.045.700	2.168.500	19	2.011.500	2.132.200	2.260.200
20				20			
21	1.990.700	2.110.100	2.236.800	21	2.074.900	2.199.400	2.331.400
22				22			
23	2.053.400	2.176.600	2.307.200	23	2.140.200	2.268.700	2.404.800
24				24			
25	2.118.100	2.245.100	2.379.900	25	2.207.600	2.340.100	2.480.500
26				26			
27	2.184.800	2.315.800	2.454.800	27	2.277.200	2.413.800	2.558.700

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014; dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.





Tabel III.140 Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2013 - 2015

MKG	Golongan II/a			MKG	Golongan II/b		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0	1.714.100	1.816.900	1.926.000	0			
1	1.741.100	1.845.600	1.956.300	1			
2				2			
3	1.795.900	1.903.700	2.017.900	3	1.871.900	1.984.200	2.103.300
4				4			
5	1.852.500	1.963.600	2.081.500	5	1.930.900	2.046.700	2.169.500
6				6			
7	1.910.800	2.025.500	2.147.000	7	1.991.700	2.111.200	2.237.900
8				8			
9	1.971.000	2.089.300	2.214.700	9	2.054.400	2.177.700	2.308.300
10				10			
11	2.033.100	2.155.100	2.284.400	11	2.119.100	2.246.200	2.381.100
12				12			
13	2.097.100	2.223.000	2.356.400	13	2.185.800	2.317.000	2.456.000
14				14			
15	2.163.200	2.293.000	2.430.600	15	2.254.700	2.390.000	2.533.400
16				16			
17	2.231.300	2.365.200	2.507.100	17	2.325.700	2.465.200	2.613.200
18				18			
19	2.301.600	2.439.700	2.586.100	19	2.398.900	2.542.900	2.695.500
20				20			
21	2.374.100	2.516.500	2.667.500	21	2.474.500	2.623.000	2.780.400
22				22			
23	2.448.800	2.595.800	2.751.600	23	2.552.400	2.705.600	2.867.900
24				24			
25	2.526.000	2.677.500	2.838.200	25	2.632.800	2.790.800	2.958.300
26				26			
27	2.605.500	2.761.900	2.927.600	27	2.715.700	2.878.700	3.051.400
28				28			
29	2.687.600	2.848.800	3.019.800	29	2.801.300	2.969.300	3.147.600
30				30			
31	2.772.200	2.938.600	3.114.900	31	2.889.500	3.062.900	3.246.700
32				32			
33	2.859.500	3.031.100	3.213.100	33	2.980.500	3.159.300	3.348.900



Lanjutan Tabel III.140

MKG	Golongan II/c			MKG	Golongan II/d		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0				0			
1				1			
2				2			
3	1.951.100	2.068.100	2.192.300	3	2.033.600	2.155.600	2.285.000
4				4			
5	2.012.500	2.133.300	2.261.300	5	2.097.700	2.223.500	2.357.000
6				6			
7	2.075.900	2.200.500	2.332.500	7	2.163.700	2.293.500	2.431.200
8				8			
9	2.141.300	2.269.800	2.406.000	9	2.231.900	2.365.800	2.507.800
10				10			
11	2.208.700	2.341.300	2.481.800	11	2.302.200	2.440.300	2.586.700
12				12			
13	2.278.300	2.415.000	2.559.900	13	2.374.700	2.517.200	2.668.200
14				14			
15	2.350.100	2.491.100	2.640.600	15	2.449.500	2.596.400	2.752.300
16				16			
17	2.424.100	2.569.500	2.723.700	17	2.526.600	2.678.200	2.838.900
18				18			
19	2.500.400	2.650.400	2.809.500	19	2.606.200	2.762.600	2.928.300
20				20			
21	2.579.200	2.733.900	2.898.000	21	2.688.300	2.849.600	3.020.600
22				22			
23	2.660.400	2.820.000	2.989.300	23	2.772.900	2.939.300	3.115.700
24				24			
25	2.744.200	2.908.800	3.083.400	25	2.860.300	3.031.900	3.213.800
26				26			
27	2.830.600	3.000.400	3.180.500	27	2.950.300	3.127.400	3.315.100
28				28			
29	2.919.800	3.094.900	3.280.700	29	3.013.300	3.225.900	3.419.500
30				30			
31	3.011.700	3.192.400	3.384.000	31	3.139.100	3.327.500	3.527.200
32				32			
33	3.106.600	3.293.000	3.490.600	33	3.238.000	3.432.300	3.638.200

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014; dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.





Tabel III.141 Gaji Pokok PNS Golongan III Tahun 2013 - 2015

MKG	Golongan III/a			MKG	Golongan III/b		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0	2.186.400	2.317.600	2.456.700	0	2.278.900	2.415.600	2.560.600
1				1			
2	2.255.200	2.390.600	2.534.000	2	2.350.600	2.491.700	2.641.200
3				3			
4	2.326.300	2.465.900	2.613.800	4	2.424.700	2.678.900	2.724.400
5				5			
6	2.399.500	2.543.500	2.696.200	6	2.501.000	2.763.300	2.810.200
7				7			
8	2.475.100	2.623.600	2.781.100	8	2.579.800	2.850.300	2.898.700
9				9			
10	2.553.100	2.706.300	2.868.700	10	2.661.100	2.940.000	2.990.000
11				11			
12	2.633.500	2.791.500	2.959.000	12	2.744.900	3.032.600	3.084.200
13				13			
14	2.716.400	2.879.400	3.052.200	14	2.831.300	3.001.200	3.181.300
15				15			
16	2.802.000	2.970.100	3.148.300	16	2.920.500	3.095.700	3.281.500
17				17			
18	2.890.000	3.063.600	3.247.500	18	3.012.500	3.193.200	3.384.900
19				19			
20	2.981.300	3.160.100	3.349.800	20	3.107.400	3.293.800	3.491.500
21				21			
22	3.075.100	3.259.700	3.455.300	22	3.205.200	3.397.500	3.601.400
23				23			
24	3.172.000	3.362.300	3.564.100	24	3.306.200	3.504.500	3.714.900
25				25			
26	3.271.900	3.468.200	3.676.400	26	3.410.300	3.614.900	3.831.900
27				27			
28	3.374.900	3.577.400	3.792.100	28	3.517.700	3.728.800	3.952.600
29				29			
30	3.481.200	3.690.100	3.911.600	30	3.628.500	3.846.200	4.077.000
31				31			
32	3.590.900	3.806.300	4.034.800	32	3.742.800	3.967.300	4.205.400



Lanjutan Tabel III.141

MKG	Golongan III/c			MKG	Golongan III/d		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0	2.375.300	2.517.800	2.668.900	0	2.475.700	2.624.300	2.781.800
1				1			
2	2.450.100	2.597.100	2.752.900	2	2.553.700	2.706.900	2.869.400
3				3			
4	2.527.200	2.678.900	2.839.700	4	2.634.100	2.792.200	2.959.800
5				5			
6	2.606.800	2.763.300	2.929.100	6	2.717.100	2.880.100	3.053.000
7				7			
8	2.688.900	2.850.300	3.021.300	8	2.802.700	2.970.800	3.149.100
9				9			
10	2.773.600	2.940.000	3.116.500	10	2.891.000	3.064.400	3.248.300
11				11			
12	2.861.000	3.032.600	3.214.700	12	2.982.000	3.160.900	3.350.600
13				13			
14	2.951.100	3.128.200	3.315.900	14	3.075.900	3.260.500	3.456.200
15				15			
16	3.044.000	3.226.700	3.420.300	16	3.172.800	3.363.200	3.565.000
17				17			
18	3.139.900	3.328.300	3.528.100	18	3.272.700	3.469.100	3.677.300
19				19			
20	3.238.800	3.433.100	3.639.200	20	3.375.800	3.578.400	3.912.600
21				21			
22	3.340.800	3.541.300	3.753.800	22	3.482.100	3.691.100	3.912.600
23				23			
24	3.446.000	3.652.800	3.872.000	24	3.591.800	3.807.300	4.035.800
25				25			
26	3.554.600	3.767.800	3.994.200	26	3.704.900	3.927.200	4.162.900
27				27			
28	3.666.500	3.886.500	4.119.700	28	3.821.600	4.050.900	4.294.000
29				29			
30	3.782.000	4.008.900	4.249.500	30	3.942.000	4.178.500	4.429.300
31				31			
32	3.901.100	4.135.200	4.383.300	32	4.066.100	4.310.100	4.568.800

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014; dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.





Tabel III.142 Gaji Pokok PNS Golongan IV Tahun 2013 – 2015

MKG	Golongan IV/a			MKG	Golongan IV/b		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0	2.580.500	2.735.300	2.899.500	0	2.689.600	2.851.000	3.022.100
1				1			
2	2.661.700	2.821.400	2.990.800	2	2.774.300	2.940.800	3.117.300
3				3			
4	2.745.600	2.910.300	3.085.000	4	2.861.700	3.033.400	3.215.500
5				5			
6	2.832.000	3.002.000	3.182.100	6	2.951.800	3.128.900	3.316.700
7				7			
8	2.921.200	3.096.500	3.282.400	8	3.044.800	3.227.500	3.421.200
9				9			
10	3.013.200	3.194.000	3.385.700	10	3.140.700	3.329.100	3.528.900
11				11			
12	3.108.100	3.294.600	3.492.400	12	3.239.600	3.434.000	3.640.100
13				13			
14	3.206.000	3.398.400	3.602.400	14	3.341.700	3.542.200	3.754.700
15				15			
16	3.307.000	3.505.400	3.715.800	16	3.446.900	3.653.700	3.873.000
17				17			
18	3.411.200	3.615.800	3.832.800	18	3.555.500	3.768.800	3.995.000
19				19			
20	3.518.600	3.729.700	3.953.600	20	3.667.400	3.887.500	4.120.800
21				21			
22	3.629.400	3.847.200	4.078.100	22	3.782.900	4.009.900	4.250.600
23				23			
24	3.743.700	3.968.300	4.206.500	24	3.902.100	4.136.200	4.384.400
25				25			
26	3.861.600	4.093.300	4.339.000	26	4.025.000	4.266.500	4.522.500
27				27			
28	3.983.300	4.222.300	4.475.700	28	4.151.700	4.400.900	4.665.000
29				29			
30	4.108.700	4.355.200	4.616.600	30	4.282.500	4.539.500	4.811.900
31				31			
32	4.238.100	4.492.400	4.762.000	32	4.417.400	4.682.400	4.963.400



Lanjutan Tabel III.142

MKG	Golongan IV/c			MKG	Golongan IV/d		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
0	2.803.400	2.971.600	3.149.900	0	2.922.000	3.097.300	3.283.200
1				1			
2	2.891.700	3.065.200	3.249.100	2	3.014.000	3.194.800	3.386.600
3				3			
4	2.982.800	3.161.700	3.351.500	4	3.108.900	3.295.500	3.493.200
5				5			
6	3.076.700	3.261.300	3.457.000	6	3.206.800	3.399.300	3.603.300
7				7			
8	3.173.600	3.364.000	3.565.900	8	3.307.800	3.506.300	3.716.700
9				9			
10	3.273.600	3.470.000	3.678.200	10	3.412.000	3.616.700	3.833.800
11				11			
12	3.376.700	3.579.300	3.794.100	12	3.519.500	3.730.700	3.954.600
13				13			
14	3.483.000	3.692.000	3.913.600	14	3.630.300	3.848.200	4.079.100
15				15			
16	3.592.700	3.808.300	4.036.800	16	3.744.700	3.969.400	4.207.600
17				17			
18	3.705.900	3.928.200	4.164.000	18	3.862.600	4.094.400	4.340.100
19				19			
20	3.822.600	4.051.900	4.295.100	20	3.984.300	4.223.300	4.476.800
21				21			
22	3.943.000	4.179.500	4.430.400	22	4.109.700	4.356.300	4.617.800
23				23			
24	4.067.100	4.311.200	4.569.900	24	4.239.200	4.493.500	4.763.200
25				25			
26	4.195.200	4.447.000	4.713.800	26	4.372.700	4.635.100	4.913.200
27				27			
28	4.327.400	4.587.000	4.862.300	28	4.510.400	4.781.000	5.068.000
29				29			
30	4.463.700	4.731.500	5.015.400	30	4.652.500	4.931.600	5.227.600
31				31			
32	4.604.200	4.880.500	5.173.400	32	4.799.000	5.086.900	5.392.200





Lanjutan Tabel III.142

MKG	Golongan IV/e		
	2013	2014	2015
0	3.045.600	3.228.300	3.422.100
1			
2	3.141.500	3.330.000	3.529.800
3			
4	3.240.400	3.434.900	3.641.000
5			
6	3.342.500	3.543.000	3.755.700
7			
8	3.447.800	3.654.600	3.874.000
9			
10	3.556.400	3.769.700	3.996.000
11			
12	3.668.400	3.888.500	4.121.800
13			
14	3.783.900	4.010.900	4.251.600
15			
16	3.903.100	4.137.300	4.385.600
17			
18	4.026.000	4.267.600	4.523.700
19			
20	4.152.800	4.402.000	4.666.100
21			
22	4.283.600	4.540.600	4.813.100
23			
24	4.418.500	4.683.600	4.964.700
25			
26	4.557.700	4.831.100	5.121.100
27			
28	4.701.200	4.983.300	5.282.300
29			
30	4.849.300	5.140.200	5.448.700
31			
32	5.002.000	5.302.100	5.620.300

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014; dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.



Tabel III.143 Tunjangan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Tunjangan Jabatan PNS		
		Keppres No.99/2000	Perpres No.3/2006	Perpres No.26/2007
1.	Eselon IA	4.500.000,-	4.500.000,-	5.500.000,-
2.	Eselon IB	3.500.000,-	3.500.000,-	4.375.000,-
3.	Eselon IIA	2.500.000,-	2.500.000,-	3.250.000,-
4.	Eselon IIB	1.500.000,-	1.500.000,-	2.025.000,-
5.	Eselon IIIA	600.000,-	900.000,-	1.260.000,-
6.	Eselon IIIB	450.000,-	675.000,-	980.000,-
7.	Eselon IVA	240.000,-	360.000,-	540.000,-
8.	Eselon IVB	210.000,-	315.000,-	490.000,-
9.	Eselon VA	150.000,-	225.000,-	360.000,-

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.144 Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2015

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Perpres
		Tertinggi	Terendah	
1.	Adikara Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
2.	Administrator Kesehatan	Rp.715.000,-	Rp. 253.000,-	No. 54 Tahun 2007
3.	Agen (BIN)	A.Rp. 1.100.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 48 Tahun 2007
4.	Analisis Kebijakan	N/A	N/A	N/A
5.	Analisis Kepegawaian	A.Rp.1.080.000,- T.Rp. 600.000,-	A.Rp. 480.000,- T.Rp. 330.000,-	No. 17 Tahun 2013
6.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	A.Rp.900.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 400.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 6 Tahun 2014
7.	Andalan Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
8.	Apoteker	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	No. 54 Tahun 2007
9.	Arsiparis	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 46 Tahun 2007
10.	Asisten Apoteker	Rp.440.000,-	Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
11.	Assesor SDM Aparatur	N/A	N/A	N/A
12.	Auditor	A.Rp.1.400.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 450.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 5 Tahun 2014
13.	Auditor Kepegawaian	N/A	N/A	N/A
14.	Bidan	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 9 Tahun 2010
15.	Diplomat	Rp.1.400.000,-	Rp. 400.000,-	No. 22 Tahun 2008
16.	Dokter	Rp.1.230.000,-	Rp.1.230.000,-	54 Tahun 2007
17.	Dokter Gigi	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	54 Tahun 2007
18.	Dokter Pendidik Klinis	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	42 Tahun 2009
19.	Dosen	A.Rp.1.350.000,- T.Rp. 5.500.000,-	A.Rp. 375.000,- T.Rp. 1.350.000,-	65 Tahun 2007





Lanjutan Tabel III.144

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Perpres
		Tertinggi	Terendah	
20.	Epidemiolog Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	54 Tahun 2007
21.	Entomolog Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	54 Tahun 2007
22.	Fisikawan Medis	Rp.850.000,-	Rp. 300.000,-	42 Tahun 2009
23.	Fisioterapis	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	34 Tahun 2008
24.	Guru	Rp. 389.000,-	Rp. 286.000,-	108 Tahun 2007
25.	Inspektur Ketenagalistrikan	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	71 Tahun 2007
26.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	71 Tahun 2007
27.	Inspektur Tambang	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	71 Tahun 2007
28.	Instruktur	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	58 Tahun 2007
29.	Jaksa	Rp.2.500.000,-	Rp. 600.000,-	117 Tahun 2014
30.	Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	A.Rp.285.000,- T.Rp. 245.000,-	A.Rp. 250.000,- T.Rp. 215.000,-	25 Tahun 2007
31.	Kataloger	N/A	N/A	N/A
32.	Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Rp 5.500.000,00	Rp 900.000,00	87 Tahun 2012
33.	Medik Veteriner	Rp.1.560.000,-	Rp. 540.000,-	16 Tahun 2013
34.	Nutrisionis	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 197.000,-	54 Tahun 2007
35.	Okupasi Terapis	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	34 Tahun 2008
36.	Operator Transmisi Sandi	A.Rp. 957.000,- T.Rp. 495.000,-	A.Rp. 264.000,- T.Rp. 197.000,-	105 Tahun 2006
37.	Ortosis Prostesis	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	34 Tahun 2008
38.	Pamong Belajar	Rp. 345.000,-	Rp. 225.000,-	108 Tahun 2007
39.	Pamong Budaya	A.Rp.530.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	74 Tahun 2007
40.	Paramedik Veteriner	Rp.810.000,-	Rp. 300.000,-	16 Tahun 2013
41.	Pekerja Sosial	A.Rp. 790.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	61 Tahun 2007
42.	Pembimbing Kesehatan Kerja	N/A	N/A	N/A
43.	Pemeriksa	N/A	N/A	N/A
44.	Pemeriksa Bea dan Cukai	A.Rp. 1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	53 Tahun 2007
45.	Pemeriksa Merk	A.Rp.900.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	41 Tahun 2007
46.	Pemeriksa Pajak	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	53 Tahun 2007
47.	Pemeriksa Paten	Rp.1.100.000,-	Rp. 300.000,-	41 Tahun 2007
48.	Penata Ruang	Rp.1.260.000,-	Rp. 540.000,-	20 Tahun 2013
49.	Peneliti	Rp.5.200.000,-	Rp. 1.100.000,-	100 tahun 2012
50.	Penera	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	70 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.144

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Perpres
		Tertinggi	Terendah	
51.	Penerjemah	Rp 1.300.000,00	Rp 375.000,00	70 Tahun 2008
52.	Pengamat Gunung Api	A.Rp.400.000,- T.Rp. 260.000,-	A.Rp. 260.000,- T.Rp. 230.000,-	67 Tahun 2007
53.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	56 Tahun 2007
54.	Pengantar Kerja	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	62 Tahun 2007
55.	Pengawas Benih Tanaman	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	16 Tahun 2013
56.	Pengawas Bibit Ternak	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	16 Tahun 2013
57.	Pengawas Farmasi dan Makanan	A.Rp.1.400.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 260.000,-	52 Tahun 2007
58.	Pengawas Keselamatan Pelayaran	N/A	N/A	N/A
59.	Pengawas Ketenagakerjaan	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	51 Tahun 2007
60.	Pengawas Lingkungan Hidup	Rp 1.200.000,00	Rp 530.000,00	75 Tahun 2013
61.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	A.Rp.1.175.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 300.000,-	39 Tahun 2009
62.	Pengawas Mutu Pakan	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	16 Tahun 2013
63.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah	Rp.900.000,-	Rp. 300.000,-	4 Tahun 2012
64.	Pengawas Perikanan (merger dengan Pengawas Benih Ikan)	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	32 Tahun 2007
65.	Pengawas Radiasi	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 300.000,-	168 Tahun 2014
66.	Pengawas Sekolah	Rp. 725.000,-	Rp. 485.000,-	108 Tahun 2007
67.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Rp.1.320.000,-	Rp. 540.000,-	22 Tahun 2013
68.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	N/A	N/A	N/A
69.	Pengendalian Dampak Lingkungan	A.Rp.975.000,- T.Rp. 400.000,-	A.Rp. 310.000,- T.Rp. 240.000,-	35 Tahun 2007
70.	Pengendali Ekosistem Hutan	A.Rp. 1.175.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 300.000,-	170 Tahun 2014
71.	Pengendali Frekuensi Radio	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	33 Tahun 2008
72.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	A.Rp.660.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	32 Tahun 2007





Lanjutan Tabel III.144

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Perpres
		Tertinggi	Terendah	
73.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	A.Rp.1.140.000,- T.Rp. 660.000,-	A.Rp. 510.000,- T.Rp. 300.000,-	16 Tahun 2013
74.	Penggerak Swadaya Masyarakat	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	63 Tahun 2007
75.	Penghulu	Rp.500.000,-	Rp. 260.000,-	73 Tahun 2007
76.	Penguji Kendaraan Bermotor	Rp.440.000,-	Rp.200.000,-	107 Tahun 2006
77.	Penguji Mutu Barang	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	70 Tahun 2007
78.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	53 Tahun 2007
79.	Penilik	Rp.345.000,-	Rp.225.000,-	108 Tahun 2007
80.	Penyelidik Bumi	Rp.1.200.000,-	Rp. 300.000,-	38 Tahun 2007
81.	Penyuluh Agama	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	50 Tahun 2007
82.	Penyuluh Kehutanan	A.Rp. 1.500.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	171 Tahun 2014
83.	Penyuluh Keluarga Berencana	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	64 Tahun 2007
84.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 197.000,-	54 Tahun 2007
85.	Penyuluh Perikanan	A.Rp. 1.500.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	169 Tahun 2014
86.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	A.Rp.5.000.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	60 Tahun 2007
87.	Penyuluh Pajak	N/A	N/A	N/A
88.	Penyuluh Pertanian	A.Rp.1.500.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	16 Tahun 2013
89.	Penyuluh Sosial	Rp.700.000,-	Rp. 300.000,-	11 Tahun 2009
90.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	43 Tahun 2007
91.	Perantara Hubungan Industrial	Rp.500.000,-	Rp. 270.000,-	42 Tahun 2007
92.	Perawat	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	54 Tahun 2007
93.	Perawat Gigi	Rp.440.000,-	Rp. 183.000,-	54 Tahun 2007
94.	Perekam Medis	Rp.440.000,-	Rp. 197.000,-	54 Tahun 2007
95.	Perekayasa	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	31 Tahun 2007
96.	Perencana	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	44 Tahun 2007
97.	Petugas Pemasyarakatan	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	72 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.144

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Perpres
		Tertinggi	Terendah	
98.	Polisi Kehutanan	A.Rp. 1.380.000,- T.Rp. 840.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	18 Tahun 2013
99.	Pranata Hubungan Masyarakat	A.Rp. 650.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	29 Tahun 2007
100.	Pranata Komputer	A.Rp. 1.200.000,- T.Rp. 425.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	39 Tahun 2007
101.	Pranata Laboratorium Kesehatan	A.Rp. 715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	54 Tahun 2007
102.	Pranata Laboratorium Pendidikan	A.Rp. 1.260.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	21 Tahun 2013
103.	Pranata Nuklir	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 220.000,-	55 Tahun 2007
104.	Psikolog Klinis	Rp. 850.000,-	Rp. 300.000,-	42 Tahun 2009
105.	Pustakawan	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	47 Tahun 2007
106.	Radiografer	Rp. 440.000,-	Rp. 197.000,-	54 Tahun 2007
107.	Refraksionis Optisien	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	34 Tahun 2008
108.	Sandiman	Rp. 1.500.000,-	Rp. 300.000,-	79 Tahun 2008
109.	Sanitarian	A.Rp. 715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	54 Tahun 2007
110.	Statistisi	A.Rp. 900.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	40 Tahun 2007
111.	Surveyor Pemetaan	A.Rp. 920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	37 Tahun 2007
112.	Teknik Jalan dan Jembatan	A.Rp. 1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	36 Tahun 2007
113.	Teknik Pengairan	A.Rp. 1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	36 Tahun 2007
114.	Teknik Penyehatan Lingkungan	A.Rp. 1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	36 Tahun 2007
115.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	A.Rp. 1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	36 Tahun 2007
116.	Teknik Elektromedis	Rp. 440.000,-	Rp. 197.000,-	54 Tahun 2007
117.	Teknisi Gigi	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	34 Tahun 2008
118.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Rp. 450.000,-	Rp. 220.000,-	31 Tahun 2007
119.	Teknisi Penerbangan	Rp. 500.000,-	Rp. 260.000,-	69 Tahun 2007
120.	Teknisi Siaran	Rp. 300.000,-	Rp. 220.000,-	68 Tahun 2007
121.	Teknisi Transfusi Darah	Rp. 500.000,-	Rp. 220.000,-	34 Tahun 2008
122.	Terapis Wicara	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	34 Tahun 2008
123.	Widyaiswara	Rp. 1.400.000,-	Rp. 325.000,-	59 Tahun 2007

Sumber : Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu, diolah, 2015

Keterangan : A adalah Jabatan Fungsional Ahli dan T adalah Jabatan Fungsional Terampil





Tabel III.145 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2012 - 2014

No	Jenis Kepesertaan	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PNS aktif *	11.769.536	71,13	11.169.847	69,22	11.658.945	70,20
2.	Penerimaan pensiun PNS*	3.010.500	18,20	3.341.358	20,71	3.346.834	20,15
3.	Penerimaan pensiun TNI/POLRI	1.146.284	6,93	1.128.790	6,99	1.124.522	6,77
4.	Veteran/ perintis kemerdekaan	570.983	3,45	452.306	2,80	432.282	2,60
5.	PTT (dokter/bidan)	43.379	0,26	39.622	0,25	44.495	0,27
6.	Jamkesmas	2.873	0,02	2.765	0,02	-	-
7.	Jamkestama	1.867	0,01	2.445	0,02	-	-
	Jumlah	16.545.422	100,00	16.137.133	100,00	16.607.078	100,00

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah, 2015

Keterangan :

* Termasuk Pejabat Negara

Tabel III.146 Persentase (%) Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan PNS Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2012 - 2014

No.	Jenis Kepesertaan	2012-2013	2013-2014
1.	PNS aktif*	-5,10	4,38
2.	Penerimaan pensiun PNS*	10,99	0,16
3.	Penerimaan pensiun TNI/POLRI	-1,53	-0,38
4.	Veteran/perintis kemerdekaan	-20,78	-4,43
5.	PTT (dokter/bidan)	-8,66	12,30
6.	Jamkesmas	-3,76	-
7.	Jamkestama	30,96	-
	Jumlah	-2,47	2,91

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah, 2015

Keterangan :

* Termasuk Pejabat Negara

Tabel III.147 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2012 - 2014

No	Jenis Kepesertaan	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Golongan I	917.020	5,99	766.660	4,75	789.558	4,75
2.	Golongan II	4.803.037	31,35	4.282.818	26,54	4.440.390	26,74
3.	Golongan III	6.559.144	42,82	6.961.033	43,14	7.248.782	43,65
4.	Golongan IV	3.040.366	19,85	4.126.622	25,57	4.128.348	24,86
	Jumlah	15.319.567	100	16.137.133	100,00	16.607.078	100,00

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah, 2015



Tabel III.148 Persentase (%) Pertumbuhan Peserta BPJS Kesehatan PNS Menurut Golongan Kepegawaian 2012 - 2014

No.	Jenis Kepesertaan	2012-2013	2013-2014
1.	Golongan I	-16,40	2,99
2.	Golongan II	-10,83	3,68
3.	Golongan III	6,13	4,13
4.	Golongan IV	35,73	0,04
	Jumlah	5,34	2,91

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah, 2015

Tabel III.149 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) BPJS Kesehatan PNS Menurut Kelompok Umur Tahun 2013 - 2014

No	Kelompok Umur	2013		2014		Pertumbuhan 2013 – 2014 (%)
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	
1.	0-4	429.343	2,66	408.681	2,46	-4,81
2.	5-9	758.112	4,70	830.788	5,00	9,59
3.	10-14	926.022	5,74	946.669	5,70	2,23
4.	15-19	1.166.842	7,23	1.176.196	7,08	0,80
5.	20-24	1.131.529	7,01	1.292.271	7,78	14,21
6.	25-29	453.263	2,81	489.983	2,95	8,10
7.	30-34	873.319	5,41	816.665	4,92	-6,49
8.	35-39	952.497	5,90	961.688	5,79	0,96
9.	40-44	1.161.870	7,20	1.051.556	6,33	-9,49
10.	45-49	1.532.562	9,50	1.443.673	8,69	-5,80
11.	50-54	1.617.014	10,02	1.603.575	9,66	-0,83
12.	55-59	1.295.578	8,03	1.421.741	8,56	9,74
13.	60-64	1.022.394	6,34	1.085.998	6,54	6,22
14.	65-69	768.161	4,76	824.847	4,97	7,38
15.	70-74	812.137	5,03	715.646	4,31	-11,88
16.	75-79	496.179	3,07	666.950	4,02	34,42
17.	80-84	376.059	2,33	365.843	2,20	-2,72
18.	>85	364.252	2,26	504.308	3,04	38,45
	Jumlah	16.137.133	100,00	16.607.078	100,00	2,91

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah, 2015





Tabel III.150 Jumlah Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2012 - 2014

No.	Kelompok Pensiun	2012		2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	1.867.776.496.400	41,98	1.982.515.673.306	38,75	1.958.906.921.800	37,69
2.	Pejabat negara	9.546.104.600	0,21	9.681.685.465	0,19	9.422.378.800	0,18
3.	ABRI	300.936.204.100	6,76	298.845.506.846	5,84	282.714.561.900	5,44
4.	Veteran/ dahor	162.196.750.100	3,65	164.795.761.800	3,22	158.972.014.200	3,06
5.	PKRI/KNIP	1.663.623.200	0,04	1.627.089.100	0,03	1.505.606.200	0,03
6.	Sipil daerah	2.107.479.238.900	47,36	2.659.349.359.224	51,97	2.785.212.726.000	53,60
	JUMLAH	4.449.598.417.300	100	5.116.815.075.741	100	5.196.734.208.900	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015

Tabel III.151 Persentase (%) Pertumbuhan Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2012 - 2014

No.	Kelompok Pensiun	2012-2013	2013-2014
1.	Sipil pusat	6,14	-1,19
2.	Pejabat negara	1,42	-2,68
3.	ABRI	-0,69	-5,40
4.	Veteran/ dahor	1,60	-3,53
5.	PKRI/KNIP	-2,20	-7,47
6.	Sipil daerah	26,19	4,73
	JUMLAH	14,99	1,56

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015

Tabel III.152 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2012 - 2014

No	Kelompok Pensiun	2012		2013		2014	
		Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio	Jumlah	% Rasio
1	Sipil pusat	1.001.029	42,44	964.752	39,85	940.881	39,09
2	Pejabat negara	5.507	0,23	5.510	0,23	5.527	0,23
3	ABRI	217.157	9,21	203.611	8,41	190.511	7,91
4	Veteran/dahor	170.206	7,22	161.931	6,69	152.596	6,34
5	PKRI/KNIP	1.068	0,05	979	0,04	873	0,04
6	Sipil Daerah	963.686	40,86	1.084.333	44,79	1.116.615	46,39
	JUMLAH	2358653	100	2421116	100	2.407.003	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015

Tabel III.153 Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Per Kelompok Tahun 2012 - 2014

No.	Kelompok Pensiun	2012-2013	2013-2014
1.	Sipil pusat	-3,62	-2,47
2.	Pejabat negara	0,05	0,31
3.	ABRI	-6,24	-6,43
4.	Veteran/ dahor	-4,86	-5,76
5.	PKRI/KNIP	-8,33	-10,83
6.	Sipil daerah	12,52	2,98
	JUMLAH	2,65	-0,58

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015



Tabel III.154 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2014

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2012		2013		2014	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	1	113.262	4,80	104.615	4,32	96.525	4,01
		2	283.668	12,03	256.956	10,61	246.337	10,23
		3	377.757	16,02	370.988	15,32	363.389	15,10
		4	226.342	9,60	232.193	9,59	234.630	9,75
2.	Pejabat negara	4	5.507	0,23	5.510	0,23	5.527	0,23
3.	ABRI	1	41.981	1,78	39.312	1,62	36.945	1,53
		2	143.132	6,07	134.516	5,56	126.024	5,24
		3	19.277	0,82	17.781	0,73	16.438	0,68
		4	12.767	0,54	12.002	0,50	11.104	0,46
4.	Veteran/ dahor	1	170.206	7,22	14.605	0,60	0	0
		2	0	0	6.663	0,28	0	0
		3	0	0	21.260	0,88	0	0
		4	0	0	119.403	4,93	0	0
		VET/ PKRI	0	0	0	0	152.596	6,34
5.	PKRI/KNIP	1	1.068	0,05	979	0,04	0	0
		2	0	0	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0
		4	0	0	0	0	0	0
		VET/ PKRI	0	0	0	0	873	0,04
6.	Sipil daerah	1	50.485	2,14	48171	1,99	45.443	1,89
		2	225.793	9,57	251803	10,40	235.832	9,80
		3	289.957	12,29	319834	13,21	322.535	13,40
		4	397.451	16,85	464525	19,19	512.805	21,30
	Total		2.358.653	100	2.421.116	100	2.407.003	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015

Tabel III.155 Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2012 - 2014

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2012-2013	2013-2014
1.	Sipil pusat	1	-7,63	-7,73
		2	-9,42	-4,13
		3	-1,79	-2,05
		4	2,59	1,05
2.	Pejabat negara	4	0,05	0,31





Lanjutan Tabel III.155

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2012-2013	2013-2014
3.	ABRI	1	-6,36	-6,02
		2	-6,02	-6,31
		3	-7,76	-7,55
		4	-5,99	-7,48
4.	Veteran/ dahor	1	-91,42	-100,00
		2	-	-100,00
		3	-	-100,00
		4	-	-100,00
		VET/PKRI	-	-
5.	PKRI/KNIP	1	-8,33	-100,00
		2	-	-
		3	-	-
		4	-	-
		VET/PKRI	-	-
6.	Sipil daerah	1	-4,58	-5,66
		2	11,52	-6,34
		3	10,30	0,84
		4	16,88	10,39

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015

Tabel III.156 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2014

No.	Kelompok Pensiun	Jenis Kelamin	2012		2013		2014	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	L	463.655	19,66	435.114	17,97	417.154	17,33
		P	537.374	22,78	529.638	21,88	523.727	21,76
2.	Pejabat negara	L	3.349	0,14	3.327	0,14	3.378	0,14
		P	2.158	0,09	2.183	0,09	2.149	0,09
3.	ABRI	L	60.208	2,55	53.317	2,20	47.148	1,96
		P	156.949	6,65	150.294	6,21	143.363	5,96
4.	Veteran/ dahor	L	79.256	3,36	74.775	3,09	69.652	2,89
		P	90.950	3,86	87.156	3,60	82.944	3,45
5.	PKRI/KNIP	L	243	0,01	215	0,01	189	0,01
		P	825	0,03	764	0,03	684	0,03
6.	Sipil daerah	L	539.540	22,87	608.211	25,12	610.134	25,35
		P	424.146	17,98	476.122	19,67	506.481	21,04
	Total		2.358.653	100	2.421.116	100	2.407.003	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015



Tabel III.157 Persentase (%) Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2014

No.	Kelompok Pensiun	Jenis Kelamin	2012-2013	2013-2014
1.	Sipil pusat	L	-6,16	-4,13
		P	-1,44	-1,12
2.	Pejabat negara	L	-0,66	1,53
		P	1,16	-1,56
3.	ABRI	L	-11,45	-11,57
		P	-4,24	-4,61
4.	Veteran/ dahor	L	-5,65	-6,85
		P	-4,17	-4,83
5.	PKRI/KNIP	L	-11,52	-12,09
		P	-7,39	-10,47
6.	Sipil daerah	L	12,73	0,32
		P	12,25	6,38
	Total		2,65	-0,58

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2015



BAGIAN IV

KEUANGAN PEMERINTAH

Bagian ini menyajikan data keuangan pemerintah. Aspek keuangan memang bukan merupakan dimensi yang terkait langsung dengan aparatur. Namun, aspek keuangan sangat mempengaruhi kinerja aparatur, sehingga banyak data mengenai keuangan yang juga harus disajikan untuk dapat melengkapi analisis mengenai aparatur dan kinerjanya. Data mengenai keuangan yang ditampilkan dalam bagian ini diantaranya adalah data mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, alokasi belanja negara untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, anggaran belanja negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan alokasi belanja pemerintah daerah.

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sub bagian pertama dalam bagian ini menampilkan data anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.1. Tabel tersebut menunjukkan data APBN antara tahun 2012 sampai tahun 2015. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pendapatan negara dari tahun 2012 hingga 2015 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sekitar 1.311 miliar rupiah menjadi sekitar 1.793 miliar rupiah pada tahun 2015. Demikian pula untuk belanja negara. Belanja negara dari tahun 2012 hingga 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.435 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi 2.039 miliar rupiah pada tahun 2015.

B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Sub bagian berikutnya menampilkan data alokasi Belanja Negara untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Data anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dipilih karena ketiga sektor tersebut merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komponen anggaran pendidikan mencakup 3 (tiga) hal diantaranya Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Untuk anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Sedangkan, untuk Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional) cukup bervariasi di setiap tahunnya.



Untuk lebih jelasnya, data mengenai alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan disajikan pada Tabel IV.2.

Sementara itu, tabel IV.3 memuat informasi mengenai Alokasi Belanja Negara pada Sektor Kesehatan baik yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat maupun melalui transfer daerah. Untuk Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat, pada tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan dalam realisasi di setiap tahunnya, yaitu 36,8 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 62,9 triliun rupiah pada tahun 2015.

Tabel berikutnya berisi informasi mengenai data alokasi Belanja Negara dalam hal infrastruktur, dimana Kementerian Negara/Lembaga menjadi penyumbang terbesar dalam pemakaian belanja Negara bila dibandingkan dengan total pemakaian belanja Negara untuk Non Kementerian/Lembaga. Berdasarkan data pada tahun 2012 hingga tahun 2015, dari 14 (empat belas) uraian, Kementerian Pekerjaan Umum menempati urutan pertama dalam hal penggunaan alokasi belanja Negara untuk sektor infrastruktur. Meskipun demikian, baik Kementerian Negara/ Lembaga Non Kementerian Negara/Lembaga cukup fluktuatif dalam penggunaan Belanja Negara di sektor infrastruktur, kadang mengalami peningkatan ataupun penurunan untuk masing-masing instansi. Untuk lebih lengkapnya, pada Tabel IV.4. disajikan data alokasi belanja negara untuk Sektor Infrastruktur secara lebih terinci.

C. Alokasi Belanja Negara untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sub Bagian ini menampilkan data mengenai alokasi belanja Negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Data ini ditampilkan karena korupsi saat ini merupakan salah satu masalah bangsa yang harus diselesaikan. Selain itu, penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, perlu disajikan sejumlah data terkait upaya pemberantasan korupsi, termasuk anggarannya sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan terkait pemberantasan korupsi. Saat ini ada dua lembaga Negara yang diberi kewenangan terkait upaya pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dengan demikian, disajikan data anggaran pemberantasan korupsi dari dua lembaga tersebut pada tabel IV.5 sampai tabel IV.7. Dari data yang ditampilkan terlihat bahwa antara tahun 2012 sampai 2015 anggaran di kedua lembaga ini meningkat. Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014 naik sekitar 19,44% dari anggaran tahun 2013 Sementara anggaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada tahun 2015 stabil di angka yang sama.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Data berikutnya yang disajikan adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 -2015 yang ditampilkan dalam Tabel IV.8 sampai Tabel IV.11. Tabel IV.8 dan tabel IV.9 menunjukkan data jumlah dan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi, sementara tabel IV.10 dan tabel IV.11 menampilkan data jumlah dan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota. Dilihat dari data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 total Anggaran Pendapatan dan Belanja seluruh provinsi mengalami





penurunan. Sedangkan di Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Total APBD Provinsi tahun 2015 turun sebesar 17% dari tahun 2014 dan Total APBD Kabupaten/Kota tahun 2015 naik sebesar 19% dari tahun 2014. Dengan adanya peningkatan maupun penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah ini akan berdampak pada kualitas dan kuantitas ketersediaan fasilitas publik dan kualitas pelayanan publik.

E. Pendapatan Asli Daerah

Sub bagian berikutnya menampilkan data Jumlah Pemerintah daerah berdasarkan persentase Kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar Kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah daerah yang memiliki Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan; kedua adalah daerah yang memiliki Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan; dan yang ketiga adalah daerah yang memiliki Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tahun 2013 hingga tahun 2015 terlihat bahwa sebagian PAD pemerintah daerah Provinsi memiliki kontribusi yang sedang terhadap total keseluruhan pendapatan pemerintah daerah. Namun untuk kabupaten/kota, sebagian besar memberikan Kontribusi yang kecil terhadap total keseluruhan pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut. Pada tahun 2015, ada sebanyak 472 kab/kota yang memiliki kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapan. Hal ini menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mampu untuk mengoptimalkan potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, dilihat dari Total PAD Pemerintah Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami fluktuatif. Total PAD Pemerintah Provinsi pada tahun 2014 naik sekitar 29% dari tahun 2013, namun turun sebesar 19% pada tahun 2015. Sedangkan total PAD Pemerintah Kabupaten/Kota terus meningkat dimana pada tahun 2014 naik sekitar 22% dari tahun 2013 dan pada tahun 2015 naik sebesar 34% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.16 dan table IV.17.

F. Dana Perimbangan

Setelah menampilkan data mengenai kategorisasi pemerintah daerah berdasarkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada bagian sebelumnya, berikut disajikan data mengenai kategorisasi pemerintah daerah berdasarkan rasio dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) terhadap total pendapatan daerah. Data ini dapat membantu menjelaskan sejauhmana ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Tabel IV.18 sampai tabel IV.21 menunjukan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan dan pada tabel IV.22 menunjukkan total alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah baik DAU Provinsi maupun DAU Kabupaten/Kota. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAU terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah daerah yang memiliki kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran



pendapatan; dan ketiga yaitu daerah yang memiliki kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tabel IV.20 dan tabel IV.21 dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2015 Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi besar, yaitu antara 50%-75% dari pendapatan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2015, ada sebanyak 395 kab/kota yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% terhadap anggaran pendapatan, meningkat 5,05% dari tahun 2014 yang sebanyak 376 kab/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mandiri karena masih tergantung dari dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Tabel IV.24 sampai tabel IV.29 berikut menampilkan data mengenai Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan dan total jumlah alokasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Daerah baik DAK Provinsi maupun DAK Kabupaten/Kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah daerah yang memiliki kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, daerah yang memiliki kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga adalah daerah yang memiliki kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tabel IV.24 dan tabel IV.26 terlihat bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah tidak besar, anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota hanya disumbang kurang dari 50% dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel berikutnya, yaitu tabel IV.30 sampai tabel IV.35 menunjukkan kontribusi dana bagi hasil (DBH) bagi anggaran pendapatan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU dan DAK, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DBH terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah daerah yang memiliki kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan; kedua, daerah yang memiliki kontribusi DBH antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga yaitu daerah yang memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan.

Tabel IV.30 dan tabel IV.33 menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) hanya menyumbang kurang dari 25% dari anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pada tahun 2015, sebanyak 28 provinsi memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan dan 449 kab/kota memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana transfer yang memberikan kontribusi tinggi bagi anggaran pendapatan pemerintah daerah.



G. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah

Data pada sub bagian ini menjelaskan alokasi belanja pemerintah daerah untuk belanja pegawai, belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, dan belanja sektor infrastruktur. Dalam menyajikan data mengenai alokasi belanja pemerintah daerah, juga dirumuskan beberapa kategorisasi untuk melihat perbandingan antara belanja pemda untuk belanja pegawai, belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur dengan total belanja pemerintah daerah.

Sementara itu, Untuk melihat belanja pegawai pemda dirumuskan tiga kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 75% dari total anggaran belanja; pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai antara 50%-75% dari total anggaran belanja; dan kategori pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai kurang dari 50% dari total anggaran belanja. Sementara itu, untuk melihat belanja sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dirumuskan dua kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/ kesehatan/ infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari total anggaran belanja; dan pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/ kesehatan/ infrastruktur kurang dari 20% dari total anggaran belanja.

Tabel IV.36 sampai tabel IV.41 menunjukkan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja serta Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota. Bila dilihat dari total dana belanja pegawai pemerintah pada tabel IV.40, provinsi antara tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Sedangkan pada kabupaten/kota mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, total dana belanja pegawai pemerintah provinsi turun sekitar 29% dari tahun 2014. Dan total dana belanja pegawai pemerintah kab/kota naik sekitar 19% dari tahun 2014. Sementara itu, dilihat dari tabel IV.36 dan tabel IV.38 tampak bahwa antara tahun 2013 - 2015 belanja pegawai dari sebagian besar pemerintah provinsi dibawah 50% dari total belanja daerah, dan belanja pegawai dari pemerintah kabupaten/kota sebagian antara 50% - 75% dan sebagian lagi kurang dari 50% dari total belanja daerah . Pada tahun 2015, tidak ada perubahan signifikan dalam kategorisasi jumlah pemda kab/kota berdasarkan persentase belanja pegawai terhadap anggaran belanja. Namun ada satu Kabupaten/Kota yang memiliki Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja.



Tabel IV.1 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 – 2015 (dalam Miliar Rupiah)

Rincian/Description	2012	2013	2014	2015
Pendapatan dan hibah/revenue and grants	1.311.387	1.529.673	1.667.141	1.793.589
Penerimaan dalam negeri/domestic revenue	1.310.562	1.525.189	1.665.781	1.790.333
Penerimaan pajak/tax revenue	1.032.570	1.192.994	1.280.389	1.379.992
Pajak dalam negeri/ domestic taxes	989.637	1.134.289	1.226.474	1.328.488
Pajak perdagangan internasional/internasional trade taxes	42.933	58.705	53.915	51.504
Penerimaan Bukan Pajak/Non Tax Revenue	277.992	332.195	385.392	410.341
Penerimaan sumber daya alam/natural resources revenue	177.264	197.205	225.955	254.270
Bagian Laba BUMN/Profit Transfer from SOE	28.001	33.500	40.000	44.000
Penerimaan bukan pajak lainnya/other non-tax revenue	53.492	77.991	94.088	89.824
Pendapatan badan layanan umum (BLU)	19.235	23.499	25.349	22.247
Hibah / grants	825	4.484	1.360	3.256
Pengeluaran / expenditures	1.435.407	1.683.011	1.842.495	2.039.483
Pengeluaran pemerintah pusat/central government expenditures	964.997	1.154.381	1.249.943	1.392.442
Belanja pegawai/personel expenditures	215.862	241.606	637.842	647.310
Belanja barang/material expenditures	188.002	200.735	612.101	745.132
Belanja modal/capital expenditures	151.975	184.364	-	-
Pembayaran bunga utang/interest payments	122.217	113.244	-	-
Subsidi/subsidies	208.850	317.219	-	-
Subsidi BBM/Oil subsidy	168.560	274.743	-	-
Subsidi non BBM/Non-Oil subsidy	40.290	42.476	-	-
Belanja hibah/grants	1.797	3.621	-	-
Bantuan social/social expenditures	47.764	73.609	-	-
Belanja lainnya/Other expenditures	28.530	19.983	-	-
Pengeluaran untuk daerah/Expenditure for regions	470.410	528.630	592.552	647.041
Transfer ke Daerah	-	528.630	592.552	637.975
Dana perimbangan/Balance funds	399.986	444.798	592.552	516.401
Dana bagi hasil/revenue sharing	100.055	101.962	487.931	127.692
Dana alokasi umum/general allocation funds	273.815	311.139	341.219	352.888
Dana alokasi khusus/Specific allocation funds	26.116	31.697	33.000	35.821





Lanjutan Tabel IV.1

Rincian/description	2012	2013	2014*	2015
Dana otonomi khusus dan penyeimbang/ <i>Special automous region and balancing funds</i>	70.424	83.832	104.621	121.574
Dana Desa				9.066
Keseimbangan Primer/Primary Balance	-1.802	-40.094	-54.069	-93.926
Surplus/Defisit anggaran/Overal balance	-124.020	-153.338	-175.354	-245.895
Pembiayaan bersih/Financing Net	124.020	153.338	175.354	245.895
Pembiayaan dalam negeri/Domestic financing	125.912	172.792	196.258	269.710
Perbankan dalam negeri/ <i>Domestic bank financing</i>	8.947	14.307	4.398	4.468
Nonperbankan dalam negeri/ <i>domestic non-banking financing</i>	116.965	158.485	191.860	265.242
Pembiayaan Luar Negeri/Foreign financing	-1.892	-19.454	-20.904	-23.815
Pinjaman bruto luar negeri/ <i>Gross drawing</i>	54.282	45.919	39.132	47.037
Penerusan pinjaman/ <i>subsidiary loan agreement</i>	-8.914	-6.968	-1.226	-4.319
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri/ <i>Amortizations</i>	-47.260	-58.405	-5.881	-66.533

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Keterangan :

*Angka RAPBN



Tabel IV.2 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan Tahun 2012 – 2015 (dalam Triliun Rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2012	2013	2014	2015
1. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat	117,2	126,2	130,3	154,4
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	77,2	79,2	76,2	53,3
b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	-	-	-	42,7
c. Kementerian Agama	33,5	38,5	44,6	49,4
d. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	6,6	7,8	7,1	9,0
2. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah	186,6	214,1	238,6	254,2
a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	1,0	0,9	1,2	0,6
b. DAK Pendidikan	10,0	11,1	10,0	10,0
c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	113,9	128,1	135,6	13,50
d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2,9	2,4	1,9	1,1
e. Tunjangan Profesi Guru	30,6	43,1	60,5	70,3
f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	3,3	3,7	4,1	4,2
g. Dana Insentif Daerah	1,4	1,4	1,4	1,7
h. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	-	-	-	-
i. Bantuan Operasional Sekolah	23,6	23,4	24,1	31,3
j. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Pendidikan	-	-	-	-
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan	7,0	5,0	8,4	-
4. Anggaran pendidikan (1+2+3)	310,8	345,3	368,9	408,5
5. Total belanja negara	1.548,3	1.726,2	1.842,5	1.984,1
Rasio anggaran pendidikan (4:5) x 100%	20,1	20,0	20,0	20,6

Sumber : Kementerian Keuangan, 2015





Tabel IV.3 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan Tahun 2012 – 2015 (dalam Triliun Rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2012	2013	2014	2015	
	REAL	REAL	APBNP	APBN	APBNP
1. Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat	36,8	42,1	56,4	61,9	62,9
A. Melalui K/L	34,2	39,1	51,6	53,2	56,7
68 Kementerian Kesehatan	30,6	35,2	47,5	47,8	51,3
63 Badan POM	1,1	1,1	1,0	1,2	1,2
68 BKKBN	2,2	2,4	2,5	3,3	3,3
K/L Lainnya	0,3	0,4	0,5	0,9	0,9
B. Melalui Belanja Non K/L	2,6	3,0	4,9	8,7	6,2
1. Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS)	2,6	3,0	4,9	5,3	5,3
2. Cadangan PBI	0	0	0	3,4	0,9
2. Anggaran kesehatan melalui transfer daerah	4,2	4,4	4,7	4,9	7,9
1. DAK Kesehatan	3,0	3,0	3,0	3,4	6,2
2. DAK keluarga berencana	0,4	0,4	0,7	0,5	0,6
3. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1
Melalui pembiayaan	-	-	-	-	3,5
Penyertaan modal negara kepada BPJS Kesehatan					3,5
3. Total anggaran kesehatan	41,0	46,5	61,2	66,8	74,2
4. Total belanja negara	1.491,4	1.650,6	1.842,5	2.039,5	1.984,1
Rasio anggaran kesehatan (3:4) x100%	2,7	2,8	3,3	3,3	3,7

Sumber : Kementerian Keuangan, 2015

Tabel IV.4 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur Tahun 2012 – 2015 (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	
	REAL	REAL	APBNP	APBN	APBNP
1. K/L	122,6	122,6	149,4	155,4	209,9
033 KEMEN PU	56,5	63,5	63,8	68,1	105,0
022 KEMENHUB	25,3	26,0	27,3	35,0	52,5
020 KEMEN ESDM	6,7	7,7	9,3	5,9	5,9
023 KEMENDIKBUD	1,6	1,9	3,3	3,7	-
K/L Lainnya	32,6	35,9	45,7	42,7	46,4
2. Non K/L	22,8	21,0	28,5	35,9	80,5
a. Resiko Kenaikan Harga Tanah (land capping)	0,3	0,9	1,6	1,0	1,0
b. Cadangan VGF	-	-	0,2	1,8	1,2
c. Belanja Hibah	-	1,3	2,8	3,4	4,5
d. Dana Alokasi Khusus	6,3	10,5	12,4	14,5	29,7
e. Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur	1,0	1,0	2,5	2,5	3,0
f. Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	6,0	1,2	3,0	5,1	5,1
g. Pembangkit tenaga Listrik Menggunakan Batubara	-	0,6	0,9	0,8	0,8
h. Penyertaan Modal Negara	5,0	2,0	3,0	2,0	28,8
i. LPDB KUKM	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	145,5	155,9	177,9	191,3	290,3

Sumber : Kementerian Keuangan, 2015

Tabel IV.5 Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 – 2014

No.	Unit	2012		2013		2014	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Penindakan	20.330.373.611	6	26.777.599.330	6	26.239.780.465	4,7
2.	Pencegahan	33.895.906.560	10	25.265.045.453	5	24.558.922.251	4,4
3.	INDA	48.110.046.038	14	69.471.555.629	15	38.704.302.270	6,9
4.	PIPM	2.296.253.903	1	2.266.461.586	0,5	2.659.436.942	0,48
5.	Setjen	231.927.718.776	69	344.054.411.384	74	466.603.186.635	83,5
	Total	336.560.298.888	100	467.835.073.382	100	558.765.628.563	100

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2015

Catatan :

INDA : Informasi dan Data

PIPM : Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Persentase (%) yang dimaksudkan di atas adalah % anggaran setiap unit terhadap total anggaran yang dimiliki oleh KPK.

Tabel IV.6 Persentase (%) Pertumbuhan Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2014

No.	Unit	2012-2013	2013-2014
1.	Penindakan	31,71	-2,01
2.	Pencegahan	-25,46	-2,79
3.	INDA	44,40	-44,29
4.	PIPM	-1,30	17,34
5.	Setjen	48,35	35,62
	Total	39,00	19,44

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2015

Tabel IV.7 Anggaran Lidik-Sidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun 2012 – 2015 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Kategori	2012	2013	2014	2015
1.	Total Anggaran	14,378	7,235	4,785	4,785
2.	Pertumbuhan (%)		-50	-51	0

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, 2015



Tabel IV.8 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total Anggaran	2013	2014	2015
1.	Pendapatan	198.011.520,0	245.811.132	202.801.606
2.	Belanja	212.918.920,7	257.876.380	213.911.874

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.9 Persentase (%) Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2013 – 2015

No	Total Anggaran	2013-2014	2014-2015
1.	Pendapatan	24	-17
2.	Belanja	21	-17

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.10 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total Anggaran	2013	2014	2015
1.	Pendapatan	485.552.562	523.311.878	622.411.055
2.	Belanja	524.762.020	570.389.888	671.394.564

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.11 Persentase (%) Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015

No	Total Anggaran	2013-2014	2014-2015
1.	Pendapatan	8	19
2.	Belanja	9	18

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.12 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi PAD	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	9	27	8	24	8	23,53
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	15	45	17	50	16	47,06
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	9	27	9	26	9	26,47
4.	Tidak ada Data PAD	-	-	-	-	1	2,94
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015



Tabel IV.13 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi PAD	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	12,50	0
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	0	-0.0588
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	-10,0	0
4.	Tidak ada Data PAD	0.00	0.00

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.14 Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi PAD	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	474	97	456	90	472	92,91
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	16	3	22	4,5	29	5,71
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	1	0,2	2	0,5	2	0,39
4.	Tidak ada data PAD			25	5	5	0,98
	Jumlah	491	100	505	100	500	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.15 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi PAD	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	-3,80	0,0351
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	37,50	0,3182
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	100	0
4.	Tidak ada Data PAD	0,00	-0,8

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

**Tabel IV.16 Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)**

No.	Total PAD	2013	2014	2015
1.	PAD Provinsi	92.449.998	118.977.123	95.994.443
2.	PAD Kabupaten/Kota	47.878.219	58.522.076	78.320.397

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.17 Persentase (%) Pertumbuhan Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015

No.	Total PAD	2013-2014	2014-2015
1.	PAD Provinsi	29	-19%
2.	PAD Kabupaten/Kota	22	34%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.18 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAU	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	6	18	6	18	5	14,71
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	27	82	28	82	28	82,35
4.	Tidak ada Data DAU	-	-	-	-	1	2,94
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.19 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAU	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	-16,67
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	3,70	0
4.	Tidak ada Data DAU	0	0

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015





Tabel IV.20 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAU	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	63	13	38	8	4	0,79
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	363	74	376	74	395	77,76
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	64	13	68	13	104	20,47
4.	Tidak ada data DAU	1	0	23	5	5	0,98
	Jumlah	491	100	5505	100	508	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.21 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAU	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	-39,68	-89,47
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	3,58	5,05
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	6,25	52,94
4.	Tidak ada Data DAU	2200	-78,26

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.22 Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DAU	2013	2014	2015
1.	DAU Provinsi	30.960.353	34.121.947	35.971.974
2.	DAU Kabupaten/ Kota	289.864.359	294.249.763	316.827.208

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.23 Persentase (%) Pertumbuhan Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015

No.	Total DAU	2013-2014	2014-2015
1.	DAU Provinsi	10	8
2.	DAU Kabupaten/ Kota	18	3

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015



Tabel IV.24 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAK	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	33	100	33	97	31	91,18
4.	Tidak ada data DAK			1	3	3	8,82
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.25 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAK	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	0	-6,06
4.	Tidak ada Data DAK	0	200

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.26 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAK	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0	0	0	0	0
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	481	98	471	93	486	95,67
4.	Tidak ada data DAK	10	2	34	4	22	4,33
	Jumlah	491	100	505	100	508	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015





Tabel IV.27 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DAK	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	-2,08	3,18
4.	Tidak ada Data DAK	240	-35,29

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.28 Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DAK	2013	2014	2015
1.	DAK Provinsi	1.821.376	1.868.494	2.037.473
2.	DAK Kabupaten/ Kota	29.559.812	30.500.149	33.159.409

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.29 Persentase (%) Pertumbuhan Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015

No.	Total DAK	2013-2014	2014-2015
1.	DAK Provinsi	3	9
2.	DAK Kabupaten/ Kota	3	9

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.30 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DBH	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	8	24	2	6	0	0
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	2	6	4	12	5	14,71
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	23	70	28	82	28	82,35
4.	Tidak ada Data DBH					1	2,94
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015



Tabel IV.31 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DBH	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	-75,00	-100,00
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	100,00	25,00
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	21,74	0
4.	Tidak ada Data DBH	0	0

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.32 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DBH	2013		2014		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	67	14	14	3	13	2,56
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	30	6	34	7	40	7,87
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	392	80	434	86	449	88,39
4.	Tidak ada Data DBH	2	0	23	4	6	1,18
	Jumlah	491	100	505	100	508	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.33 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Kontribusi DBH	2013-2014	2014-2015
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	-79,10	-7,14
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	13,33	17,65
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	10,71	3,46
4.	Tidak ada Data DBH	1050,00	-73,91

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.34 Total Dana Bagi Hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DBH	2013	2014	2015
1.	DBH Provinsi	44.850.478	42.630.900	22.086.632
2.	DBH Kabupaten/Kota	99.208.376	58.137.201	70.534.726

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015





Tabel IV.35 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015

No.	Total DBH	2013-2014	2014-2015
1.	DBH Provinsi	-5	-48
2.	DBH Kabupaten/Kota	-41	21

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.36 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja Pegawai	2013		2014		2015	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0	0	0	0	0
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	0	0	0	0	0	0
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	33	100	34	100	33	97,06
4.	Tidak ada Data Belanja Pegawai					1	2,94
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.37 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja Pegawai	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	0	0
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	3.03	-2,94
4.	Tidak ada Data Belanja Pegawai	0	0

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015



Tabel IV.38 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja Pegawai	2013		2014		2015	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0	0	0	1	0,20
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	276	56	250	49	233	45,87
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	215	44	232	46	269	52,95
4.	Tidak ada Data Belanja Pegawai			23	5	5	0,98
	Jumlah	491	100	505	100	508	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.39 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja Pegawai	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	-9,42	-6,80
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	7,91	15,95
4.	Tidak ada Data Belanja Pegawai	0	-78,26

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.40 Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Total Belanja Pegawai	2013	2014	2015
1.	Belanja Pegawai Provinsi	39.019.039.81	42.909.078	30.620.074
2.	Belanja Pegawai Kabupaten / Kota	257.798.873.2	269.761.391	321.428.340

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.41 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Total Belanja Pegawai	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja Pegawai Provinsi	10	-29
2.	Belanja Pegawai Kabupaten / Kota	5	19

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015





Tabel IV.42 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2013		2014		2015	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	1	3	0	0	0	0
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	32	97	32	94	25	73,53
3.	Tidak ada Data Belanja Pendidikan			2	6	9	26,47
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.43 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	-100	0
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	0	-21,88
3.	Tidak ada Data Belanja Pendidikan	0	350

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.44 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2013		2014		2015	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	423	86	391	78	357	70,28
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	68	14	62	12	52	10,24
3.	Tidak ada Data Belanja Pendidikan			52	10	99	19,49
	Jumlah	491	100	505	100	508	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.45 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	-7,57	-8,70
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	-8,82	-16,13
3.	Tidak ada Data Belanja Pendidikan	0,00	90,38

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.46 Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015

No	Total Belanja Sektor Pendidikan	2013	2014	2015
1.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi	18.644.391,12	7.520.347,05	5.402.111,038
2.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten/ Kota	175.778.032,3	185.811.424,01	182.876.755,4

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.47 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015

No	Total Belanja Sektor Pendidikan	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi	-60	-28
2.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten/ Kota	6	-2

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.48 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2013		2014		2015	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	0	0	1	3	1	2,94
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	33	100	31	91	24	70,59
3.	Tidak ada Data Belanja Kesehatan			2	6	9	26,47
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.49 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	0	0
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	-6,06	-22,58
3.	Tidak ada Data Belanja Kesehatan	0	350

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.50 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2013		2014		2015	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	5	1	3	1	10	1,97
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	486	99	450	89	399	78,54
3.	Tidak ada Data Belanja Kesehatan			52	10	99	19,49
	Jumlah	491	100	505	100	508	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.51 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	-40,00	233,33
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	-7,41	-11,33
3.	Tidak ada Data Belanja Kesehatan	0,00	90,38

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.52 Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015

No	Total Belanja Sektor Kesehatan	2013	2014	2015
1.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi	17.512.928,42	14.567.657,90	14.175.561,65
2.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Kabupaten/ Kota	51.388.353,8	58.888.413,39	62.955.087,16

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015



Tabel IV.53 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015

No	Total Belanja Sektor Kesehatan	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi	-17	-3
2.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Kabupaten/ Kota	15	7

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.54 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	10	30	10	29	7	20,59
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	23	70	22	65	18	52,94
3.	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur			2	6	9	26,47
	Jumlah	33	100	34	100	34	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.55 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	0	-30,00
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	-4,35	-18,18%
3.	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur	0	350

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015





Tabel IV.56 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	121	24,6	144	29	101	19,88
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	370	75,4	309	67	308	60,63
3.	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur			52	4	99	19,49
	Jumlah	491	100	505	100	508	100

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.57 Persentase (%) Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2013 – 2015

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	19,01	-29,86
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	-8,65	-8,88
3.	Tidak ada Data Belanja Infrastruktur	0	330,43

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.58 Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015

No	Total Belanja Sektor Infrastruktur	2013	2014	2015
1.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Provinsi	32.770.774,27	28.010.994,06	24.336.542,38
2.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/ Kota	92.269.679,81	103.818.150,30	92.072.399,01

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

Tabel IV.59 Persentase (%) Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2013 – 2015

No	Total Belanja Sektor Infrastruktur	2013-2014	2014-2015
1.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Provinsi	-15	-13
2.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/ Kota	13	-11

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2015

BAGIAN V

KINERJA APARATUR /

BIROKRASI

Bagian ini menyajikan data mengenai kinerja aparatur/birokrasi yang dilihat dari beberapa indikator, baik indikator nasional maupun indikator internasional. Untuk indikator kinerja aparatur/birokrasi dalam skala nasional adalah opini BPK terhadap Laporan Keuangan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Hasil Penilaian LAKIP oleh Kemenpan, Integritas Sektor Publik, dan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk indikator kinerja aparatur/birokrasi dalam skala internasional adalah Peringkat *Doing Business*, Indeks Persepsi Korupsi, Peringkat *E-government* dan Peringkat dan Nilai *Human Development Index*.

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi

Tabel V.1 sampai tabel V.5 menyajikan data kualifikasi hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Opini tertinggi BPK yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari tahun 2011–2013, terjadi peningkatan jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP dari BPK dan semakin menurunnya jumlah K/L yang mendapatkan opini WDP bahkan TMP. Hal ini menunjukkan semakin baiknya hasil laporan keuangan pemerintah pusat.

Pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah lembaga pemerintah pusat dalam memperoleh opini WTP. Jika pada tahun 2012 terdapat 68 pemerintah pusat yang memperoleh opini WTP, pada tahun 2013 terdapat 64 instansi yang memperoleh opini WTP. Sedangkan pada pemerintah daerah mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 terdapat 120 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 158 daerah. Opini WTP merupakan prestasi tertinggi dalam penilaian kualitas laporan keuangan instansi, walaupun bukan berarti lembaga atau pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini yang baik bebas dari penyimpangan.

B. Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan

Penilaian LAKIP oleh Kemenpan merupakan salah satu indikator kinerja aparatur. Subbagian ini menampilkan data Penilaian LAKIP lembaga pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Untuk data akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga pemerintah pusat dapat dilihat dari tabel V.6 dan tabel V.7. Sedangkan untuk data akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari tabel V.8 sampai tabel V.11. Pada tahun 2014, Kemenpan memberikan nilai A untuk 7 K/L, nilai B untuk 43 K/L, nilai CC untuk 32 K/L, dan nilai C untuk 1 K/L. Sementara itu, untuk LAKIP pemerintah daerah, Kemenpan memberikan nilai dari A untuk 2 Provinsi, B untuk 8 Provinsi dan 11 kabupaten/kota; nilai CC untuk 19 Provinsi dan 172 kabupaten/kota; nilai C untuk 4 Provinsi dan 240 kabupaten/kota; dan nilai D untuk 37 kabupaten/kota.

Dari data yang ada, tidak satupun institusi pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah yang mendapatkan nilai AA. Bahkan di Daerah, tidak satupun institusi pemerintah yang mendapatkan nilai A. Hal ini tentu harus menjadi kajian serius mengingat LAKIP merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap apa yang telah dilakukannya.

C. Integritas Sektor Publik

Integritas sektor publik merupakan survey yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur persepsi masyarakat tentang pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Adapun responden dalam survey ini adalah para pengguna layanan langsung dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut. Skala penilaian dimulai dari 0 sampai dengan 10, dimana semakin mendekati 10, maka semakin baik integritas sektor publik. Integritas Sektor Publik Tingkat nasional pada Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat dari 3 kategori yaitu variabel pengalaman integritas, variabel potensi integritas dan indeks integritas nasional (IIN). Data mengenai kategori tersebut dapat dilihat pada tabel V.12. Dari data tersebut terlihat bahwa indeks integritas nasional (IIN) dari tahun 2008 sampai 2012 nilainya fluktuatif berkisar antara nilai 5-6. Sedangkan data perkembangan indeks integritas unit layanan di kementerian/lembaga pada tahun 2011 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel V.13 dimana dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.

D. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja sesuai dengan amanah dari PP Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten /kota dalam wilayah provinsi dan juga pemerintahan provinsi. Sumber informasi utama yang



digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja aparatur, terutama aparatur pemerintah daerah.

Aspek penilaian EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksanaan kebijaksanaan daerah. Pada tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : ketentraman dan ketertiban umum daerah, keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah, keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah, efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD, efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan, Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan, ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan, intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah, transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil, intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah, efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD, Pengelolaan potensi daerah, terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat capaian SPM, penataan kelembagaan daerah, pengelolaan kepegawaian daerah, Perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat. Pada tabel V.14 ditampilkan data mengenai peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kota tahun 2012 dan 2013.

E. Peringkat *Doing Business* Indonesia dan Negara ASEAN

Doing Business report merupakan laporan yang menyediakan penilaian objektif mengenai regulasi berusaha yang berdampak pada kemudahan berusaha di negara-negara yang disurveinya. Selain itu, laporan ini dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antar negara dan mengidentifikasi reformasi yang telah dilakukan. Pada tabel V.15 disajikan peringkat *Doing Business* di Indonesia dan negara ASEAN lain sebagai perbandingan. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat 129, sementara pada tahun 2013, peringkat *Doing Business* Indonesia naik sedikit menjadi 128. Pada tahun 2014, peringkat *Doing Business* Indonesia naik delapan peringkat menjadi 120. Dan pada tahun 2015, peringkat *Doing Business* Indonesia kembali naik menjadi 114. Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, Indonesia memang masih berada dibawah Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Namun kenaikan peringkat Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang baik.



F. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN

Indeks persepsi korupsi merupakan pengukuran terhadap tingkat korupsi di suatu negara yang dilakukan secara berkala oleh lembaga Transparency International. Indeks ini merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari berbagai polling, kumpulan pendapat ahli terkait dengan korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka. Indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.

Tabel V.17 menampilkan skor Indeks persepsi korupsi Indonesia dan negara ASEAN, sementara pada tabel V.18. ditampilkan data mengenai peringkat Indeks persepsi korupsi Indonesia dan Negara ASEAN sebagai perbandingan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2010, Indonesia memperoleh skor 2,8 dengan peringkat 110. Sementara pada tahun 2012, Indonesia memperoleh skor 3,2 dengan peringkat 118. Dan pada tahun 2015, peringkat IPK Indonesia naik menjadi 107 dengan skor 34.

Selain menampilkan data *outcomes* yang berupa pengukuran indeks persepsi korupsi, sub bagian ini juga menampilkan data *output* (hasil) upaya pemberantasan korupsi ya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Data tersebut ditampilkan pada tabel V.19 sampai tabel V.21. Setelah itu, pada tabel V.22 ditampilkan data laporan gratifikasi yang diterima oleh KPK tahun 2009-2014 dan pada tabel V.23 disajikan data jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima oleh KPK Tahun 2012-2014.

G. Peringkat dan Nilai *Human Development Index* Indonesia dan Negara ASEAN

Human Development Index atau indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran yang dilakukan oleh UNDP secara berkala untuk melihat perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih khusus dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dan aparatur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel V.24 menampilkan data mengenai Rangking (*Rank*) dan Nilai (*Value*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2011-2013 Sementara itu, tabel V.25 menampilkan Nilai Komponen (*Components*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2012-2013. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rangking indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat, tahun 2012 Indonesia menempati peringkat 121, tetapi pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat 108.



H. Peringkat dan Nilai e-Government Indonesia dan Negara ASEAN

Buku ini juga menampilkan data mengenai peringkat dan nilai e-government di Negara ASEAN dan antar instansi pemerintah di Indonesia. Data ini perlu di sajikan karena implementasi e-government merupakan salah satu kontributor dalam reformasi birokrasi. E-government merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik. Karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik , transparansi dan efisiensi. Oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tabel V.225 menyajikan data peringkat e-government negara ASEAN dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Selama tiga tahun tersebut, peringkat Indonesia naik turun dimana pada tahun 2010 menempati peringkat 109, lalu naik menjadi peringkat 92 tahun berikutnya namun turun pada tahun 2014 di peringkat 106. Kemudian pada tabel V.26 sampai tabel V. 28 merupakan data peringkat e-government (PeGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lima dimensi yang dinilai dalam implementasi e-government di instansi pemerintah adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Tabel V.1 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 - 2013

No.	LKPP	Opini
1.	Tahun 2004	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
2.	Tahun 2005	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
3.	Tahun 2006	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
4.	Tahun 2007	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
5.	Tahun 2008	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
6.	Tahun 2009	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
7.	Tahun 2010	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
8.	Tahun 2011	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
9.	Tahun 2012	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
10.	Tahun 2013	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2014

Tabel V.2 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2011 - 2013

No.	Opini	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	WTP	66	77	68	74	64	74
2.	WDP	18	21	22	24	19	22
3.	TW	0	0	0	0	0	0
4.	TMP	2	2	2	2	3	4
	Jumlah	86	100	92	100	86	100

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2014

Tabel V.3 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2011 - 2013

No.	Kementerian/Lembaga	2011	2012	2013
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WDP	WTP	WTP
5.	Kejaksaan Republik Indonesia	WTP - DPP	WTP - DPP	WTP
6.	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP - DPP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP - DPP	WTP - DPP	WDP
8.	Kementerian Luar Negeri	WTP - DPP	WTP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP - DPP	WTP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP-DPP	WTP
11.	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WTP - DPP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WTP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2011	2012	2013
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	WDP	WTP
17.	Kementerian Kesehatan	WDP	WTP-DPP	WTP
18.	Kementerian Agama	WTP - DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP
20.	Kementerian Sosial	WTP - DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
21.	Kementerian Kehutanan	WTP - DPP	WTP - DPP	WTP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP - DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WTP - DPP	WTP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	TMP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WDP
30.	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP - DPP	WTP - DPP	WTP
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP - DPP	WDP
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP
33.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WDP	WTP - DPP
34.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP
35.	Lembaga Sandi Negara	WTP - DPP	WTP	WTP - DPP
36.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
37.	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP
38.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP
39.	Badan Pertahanan Nasional	WDP	WTP - DPP	WTP
40.	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP	WDP
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP
42.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP - DPP	WTP - DPP	WTP
43.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP	TMP	WDP
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP - DPP
45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2011	2012	2013
46.	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP-DPP
47.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WTP-DPP	WTP
48.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP - DPP	WTP	WTP
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP
51.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP
52.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WDP	WTP
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP	WTP
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP	WDP
58.	Badan Informasi Geospasial	WTP	WDP	TMP
59.	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WDP	WTP
61.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP
63.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP
65.	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP
66.	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WDP	WTP-DPP
67.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP
68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP
69.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP
70.	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP
71.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP-DPP
72.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WDP
73.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	WTP
74.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WDP
75.	Badan SAR Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP
76.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WDP	WTP	WTP

Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2011	2012	2013
77.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	WDP	WDP	WDP
78.	Ombudsman Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP
79.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	TMP	WDP	WDP
80.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	TMP*)		TMP
81.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		WDP	WTP
82.	Sekretariat Kabinet		WTP	WTP
83.	Badan Pengawas Pemilihan Umum		WDP	WDP
84.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia		WDP	WDP
85.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia		WDP	WDP
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang		TMP	wdp
87.	APP 61 (Pembayar Bunga Utang)	*	*	
88.	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	*	*	
89.	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	*	*	
90.	APP 70 (Dana Perimbangan)	*	*	
91.	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	*	*	
92.	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	*	*	
93.	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	*	*	
94.	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	*	*	
95.	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	*	*	
96.	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	WTP	WTP-DPP	
97.	BA 999.02 - Pengelolaan Hibah	WDP	WTP-DPP	
98.	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	WTP-DPP	WTP-DPP	
99.	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	WTP	WTP	
100.	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WTP	WTP	
101.	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	*	*	
102.	BA 999.07 - Belanja Subsidi	WTP	WTP-DPP	
103.	BA 999.08 - Belanja Lain-Lain	WTP-DPP	WTP	
104.	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP
105.	Badan Rehabilitas dan Rekontruksi NAD-Nias	****	****	
Badan Lainnya				
106.	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP
107.	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP
108.	Pusat Investasi Pemerintah	*****	*****	*****
109.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	*****	*****	*****
110.	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	WDP	WDP	

Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2011	2012	2013
111.	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada proyek <i>management office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project</i> (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta			
112.	Loan ABD 2575-INO Pada Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010	WTP	WTP	WTP
113.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	WTP	WTP	WTP
114.	Loan ABD 2654-INO Pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2011	WTP	WTP	WDP
115.	Loan ABD 2768-INO Pada Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) support to PNPM Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2012		WTP	WDP
116.	PT. Jamsostek	WTP-DPP		

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2014

Catatan :

- (*) : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam LK Tahun 2011 diperiksa pada Tahun 2012
 * : Perubahan nomor Bagian Anggaran (BA)
 ** : BA baru
 *** : Dalam Laporan Auditor Independen (LAI) tidak memuat paragraf yang menyatakan opini
 **** : Dibubarkan tahun 2009
 ***** : Belum diperiksa
 ***** : Tidak diperiksa

BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

Tabel V.4 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2013

No.	Opini	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	WTP	67	13	120	23	158	30
2.	WDP	349	67	319	61	310	59
3.	TW	8	2	6	1	11	2
4.	TMP	96	18	78	15	45	9
	Jumlah	520	100	523	100	524	100

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2014

**Tabel V.5 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2011 - 2013**

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
1.	1.	Prov. Aceh	WDP	WDP	WDP
2.	2.	Kab. Aceh Barat	WDP	WDP	WDP
3.	3.	Kab. Aceh Barat Daya	WDP	WDP	WDP
4.	4.	Kab. Aceh Besar	WDP	WTP	WTP
5.	5.	Kab. Aceh Jaya	WDP	WTP	WDP
6.	6.	Kab. Aceh Selatan	WDP	WDP	WDP
7.	7.	Kab. Aceh Singkil	WDP	WDP	WDP*
8.	8.	Kab. Aceh Tamiang	WDP	WDP	WDP
9.	9.	Kab. Aceh Tengah	WDP	WTP DPP	WDP
10.	10.	Kab. Aceh Tenggara	WDP	WDP	WDP
11.	11.	Kab. Aceh Timur	WDP	WDP	WDP
12.	12.	Kab. Aceh Utara	WDP	WDP	WDP
13.	13.	Kab. Bener Meriah	WDP	WDP	WDP
14.	14.	Kab. Bireuen	WDP	WDP	WDP
15.	15.	Kab. Gayo Lues	WDP	WDP	WDP
16.	16.	Kab. Nagan Raya	WTP	WTP DPP	WTP
17.	17.	Kab. Pidie	WDP	WDP	WDP
18.	18.	Kab. Pidie Jaya	WDP	WDP	WDP
19.	19.	Kab. Simeulue	WDP	WDP	WDP*
20.	20.	Kota Banda Aceh	WTP	WTP DPP	WTP
21.	21.	Kota Langsa	WDP	WDP	WTP
22.	22.	Kota Lhokseumawe	WDP	WDP	WDP
23.	23.	Kota Sabang	WDP	WTP	WTP
24.	24.	Kota Subulussalam	WDP	WTP	WTP
25.	1.	Prov. Sumatera Utara	WDP	WDP	WDP
26.	2.	Kab. Asahan	WDP	WDP	WDP
27.	3.	Kab. Batubara	TMP	WDP	WDP
28.	4.	Kab. Dairi	WDP	WDP	WDP
29.	5.	Kab. Deli Serdang	TMP	TW	TMP
30.	6.	Kab. Humbang Hasundutan	WTP	WTP DPP	WTP
31.	7.	Kab. Karo	WDP	WDP	WDP
32.	8.	Kab. Labuhanbatu	WDP	WDP	WDP
33.	9.	Kab. Labuhanbatu Selatan	WDP	WDP	WTP DPP
34.	10.	Kab. Labuhanbatu Utara	TMP	WDP	WDP
35.	11.	Kab. Langkat	WDP	WDP	WDP
36.	12.	Kab. Mandailing Natal	WDP	TMP	TMP
37.	13.	Kab. Nias	TMP	TMP	WDP
38.	14.	Kab. Nias Barat	TMP	TMP	TMP*
39.	15.	Kab. Nias Selatan	TMP	TMP	TMP*
40.	16.	Kab. Nias Utara	TMP	TMP	TMP*
41.	17.	Kab. Padang Lawas	TMP	TMP	TMP*
42.	18.	Kab. Padang Lawas Utara	WDP	WDP	WDP*
43.	19.	Kab. Pakpak Bharat	WDP	WDP	WTP DPP
44.	20.	Kab. Samosir	WDP	WDP	WDP
45.	21.	Kab. Serdang Bedagai	WDP	WDP	WDP
46.	22.	Kab. Simalungun	WDP	WDP	TMP

Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
47.	23.	Kab. Tapanuli Selatan	WDP	WDP	WDP
48.	24.	Kab. Tapanuli Tengah	TMP	WDP	WDP
49.	25.	Kab. Tapanuli Utara	WDP	WDP	WDP
50.	26.	Kab. Toba Samosir	WDP	WDP	WDP*
51.	27.	Kota Binjai	WDP	WDP	WDP
52.	28.	Kota Gunung Sitoli	WDP	WDP	WDP*
53.	29.	Kota Medan	WTP	WTP DPP	WTP DPP
54.	30.	Kota Padangsidimpuan	WDP	WDP	WDP
55.	31.	Kota Pematangsiantar	WDP	WDP	WDP
56.	32.	Kota Sibolga	WTP DPP	WDP	WDP
57.	33.	Kota Tanjung Balai	WDP	TMP	TMP
58.	34.	Kota Tebing Tinggi	WDP	TMP	WDP
59.	1.	Prov. Sumatera Barat	WDP	WTP DPP	WTP DPP
60.	2.	Kab. Agam	WDP	WDP	WDP
61.	3.	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WDP
62.	4.	Kab. Kep. Mentawai	WDP	WDP	WDP
63.	5.	Kab. Lima Puluh Kota	WDP	WDP	WDP
64.	6.	Kab. Padang Pariaman	WDP	WDP	WTP DPP
65.	7.	Kab. Pasaman	WDP	WDP	WTP DPP
66.	8.	Kab. Pasaman Barat	WDP	WDP	WDP
67.	9.	Kab. Pesisir Selatan	WDP	WDP	WTP DPP
68.	10.	Kab. Sijunjung	WDP	WDP	WDP
69.	11.	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP
70.	12.	Kab. Solok Selatan	TMP	WDP	WDP**
71.	13.	Kab. Tanah Datar	WDP	WTP DPP	WTP
72.	14.	Kota Bukittinggi	WDP	WDP	WTP DPP
73.	15.	Kota Padang	WDP	WTP DPP	WDP
74.	16.	Kota Padang Panjang	WDP	WTP DPP	WTP DPP
75.	17.	Kota Pariaman	WDP	WTP	WDP
76.	18.	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WDP
77.	19.	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP
78.	20.	Kota Solok	WDP	WTP DPP	WDP
79.	1.	Prov. Riau	WDP	WTP DPP	WTP DPP
80.	2.	Kab. Bengkalis	TMP	WDP	WTP DPP*
81.	3.	Kab. Indragiri Hilir	WDP	WDP	WDP*
82.	4.	Kab. Indragiri Hulu	WDP	WDP	WDP*
83.	5.	Kab. Kampar	WDP	WDP	WDP
84.	6.	Kab. Kepulauan Meranti	WDP	WTP DPP	WTP DPP
85.	7.	Kab. Kuantan Singingi	WTP DPP	WTP	WTP
86.	8.	Kab. Pelalawan	WDP	WTP DPP	WTP DPP
87.	9.	Kab. Rokan Hilir	WDP	WDP	WDP*
88.	10.	Kab. Rokan Hulu	WDP	WDP	WTP DPP
89.	11.	Kab. Siak	WTP DPP	WTP DPP	WTP
90.	12.	Kota Dumai	WDP	WDP	WDP
91.	13.	Kota Pekanbaru	WDP	WDP	WDP

Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
92.	1.	Prov. Jambi	WDP	WTP DPP	WTP DPP
93.	2.	Kab. Batang Hari	WDP	WTP DPP	WTP DPP
94.	3.	Kab. Bungo	WDP	WDP	WDP
95.	4.	Kab. Kerinci	WDP	WDP	WDP
96.	5.	Kab. Merangin	WDP	WDP	WDP
97.	6.	Kab. Muaro Jambi	WDP	WTP	WTP
98.	7.	Kab. Sarolangun	WDP	WDP	WDP
99.	8.	Kab. Tanjung Jabung Barat	WDP	WDP	WDP
100.	9.	Kab. Tanjung Jabung Timur	WDP	WTP DPP	WTP DPP
101.	10.	Kab. Tebo	WDP	WDP	WDP
102.	11.	Kota Jambi	WDP	WDP	WDP
103.	12.	Kota Sungai Penuh	WDP	WTP	WDP
104.	1.	Prov. Sumatera Selatan	WDP	WDP	WDP
105.	2.	Kab. Banyuasin	WTP DPP	WTP	WTP
106.	3.	Kab. Empat Lawang	WDP	TMP	WDP
107.	4.	Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP
108.	5.	Kab. Muara Enim	WDP	WDP	WTP DPP
109.	6.	Kab. Musi Banyuasin	WDP	WDP	WTP DPP
110.	7.	Kab. Musi Rawas	WDP	WDP	WDP
111.	8.	Kab. Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP
112.	9.	Kab. Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP
113.	10.	Kab. Ogan Komering Ulu	WDP	WDP	WDP
114.	11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	WDP	WDP
115.	12.	Kab. Ogan Komering ulu Timur	WDP	WTP	WTP
116.	13.	Kota Lubuklinggau	WTP	WTP	WTP
117.	14.	Kota Pagaralam	WDP	WDP	WDP
118.	15.	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP DPP
119.	16.	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WTP DPP
120.	1.	Prov. Bengkulu	WTP	WTP	WTP
121.	2.	Kab. Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP
122.	3.	Kab. Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WTP
123.	4.	Kab. Bengkulu Utara	WDP	WTP	WTP
124.	5.	Kab. Kaur	WTP	WTP	WTP
125.	6.	Kab. Kapahiang	WDP	TMP	WDP
126.	7.	Kab. Lebong	WDP	WTP DPP	WTP
127.	8.	Kab. Mukomuko	WTP	WTP	WTP
128.	9.	Kab. Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP
129.	10.	Kab. Seluma	TW	WDP	WDP
130.	11.	Kota Bengkulu	WTP	WDP	WDP
131.	1.	Prov. Lampung	WTP DPP	WTP	WDP
132.	2.	Kab. Lampung Barat	WTP DDP	WTP	WTP
133.	3.	Kab. Lampung Selatan	WTP DDP	WDP	WDP

Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
134.	4.	Kab. Lampung Tengah	WDP	WTP	WDP
135.	5.	Kab. Lampung Timur	TMP	WDP	WDP
136.	6.	Kab. Lampung Utara	WDP	TW	TW
137.	7.	Kab. Mesuji	TMP	WDP	WDP
138.	8.	Kab. Pesawaran	WDP	WDP	WDP
139.	9.	Kab. Pesisir Barat			
140.	10.	Kab. Pringsewu	WDP	TMP	WDP
141.	11.	Kab. Tanggamus	WDP	WDP	WDP
142.	12.	Kab. Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP
143.	13.	Kab. Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP
144.	14.	Kab. Way Kanan	WTP	WTP	WTP
145.	15.	Kota Bandar Lampung	WTP DPP	WTP	WTP
146.	16.	Kota Metro	WTP	WTP	WTP
147.	1.	Prov. Bangka Belitung	WDP	WDP	WDP
148.	2.	Kab. Bangka	WTP	WTP DPP	WTP DPP
149.	3.	Kab. Bangka Barat	WDP	WDP	WTP DPP
150.	4.	Kab. Bangka Selatan	WDP	WDP	WDP
151.	5.	Kab. Bangka Tengah	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP
152.	6.	Kab. Belitung	WDP	WDP	WDP
153.	7.	Kab. Belitung Timur	WDP	WDP	WDP
154.	8.	Kota Pangkalpinang	WDP	WDP	WDP
155.	1.	Prov. Kepulauan Riau	WTP	WTP	WTP
156.	2.	Kab. Bintan	WTP	WTP	WTP
157.	3.	Kab. Karimun	WDP	WTP	WTP
158.	4.	Kab. Kepulauan Anambas	WDP	WDP	WDP
159.	5.	Kab. Lingga	WDP	WDP	WDP
160.	6.	Kab. Natuna	WDP	WTP	WTP
161.	7.	Kota Batam	WDP	WTP	WTP
162.	8.	Kota Tanjungpinang	WDP	WDP	WDP
163.	1.	Prov. DKI Jakarta	WTP DPP	WTP DPP	WDP
164.	1.	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP
165.	2.	Kab. Bandung	WDP	WDP	TMP
166.	3.	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP
167.	4.	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP
168.	5.	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP
169.	6.	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WTP DPP
170.	7.	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP
171.	8.	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP
172.	9.	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP
173.	10.	Kab. Indramayu	WDP	WDP	TMP
174.	11.	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP
175.	12.	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP
176.	13.	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WTP DPP
177.	14.	Kab. Pangandaran			
178.	15.	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
179.	16.	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP
180.	17.	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP
181.	18.	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP
182.	19.	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP
183.	20.	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP
184.	21.	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP
185.	22.	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP
186.	23.	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP
187.	24.	Kota Cimahi	WDP	WDP	WTP DPP
188.	25.	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP
189.	26.	Kota Depok	WTP DPP	WTP	WTP
190.	27.	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP
191.	28.	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP
192.	1.	Prov. Jawa Tengah	WTP DPP	WTP	WTP DPP
193.	2.	Kab. Banjarnegara	WDP	WDP	WTP DPP
194.	3.	Kab. Banyumas	WTP	WTP	WTP
195.	4.	Kab. Batang	WDP	WDP	WDP
196.	5.	Kab. Blora	WDP	WDP	WDP
197.	6.	Kab. Boyolali	WTP	WTP	WTP
198.	7.	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP
199.	8.	Kab. Cilacap	WDP	WDP	WDP
200.	9.	Kab. Demak	WDP	WDP	WDP
201.	10.	Kab. Grobogan	WDP	WDP	WDP
202.	11.	Kab. Jepara	WTP	WTP	WTP DPP
203.	12.	Kab. Karanganyar	WDP	WDP	WDP
204.	13.	Kab. Kebumen	WTP	WTP	WDP
205.	14.	Kab. Kendal	WDP	WDP	WDP
206.	15.	Kab. Klaten	WDP	WDP	WDP
207.	16.	Kab. Kudus	WDP	WTP DPP	WTP DPP
208.	17.	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP
209.	18.	Kab. Pati	WDP	WDP	WDP
210.	19.	Kab. Pekalongan	WDP	WDP	WDP
211.	20.	Kab. Pemalang	WDP	WDP	WDP
212.	21.	Kab. Purbalingga	WDP	WDP	WDP
213.	22.	Kab. Purworejo	WDP	WTP	WTP
214.	23.	Kab. Rembang	WDP	WDP	WDP
215.	24.	Kab. Semarang	WTP	WTP	WTP
216.	25.	Kab. Sragen	WDP	WDP	WDP
217.	26.	Kab. Sukoharjo	WDP	WDP	WDP
218.	27.	Kab. Tegal	WDP	WDP	WDP
219.	28.	Kab. Temanggung	WDP	WTP	WTP
220.	29.	Kab. Wonogiri	WDP	WDP	WDP
221.	30.	Kab. Wonosobo	WDP	WDP	WDP
222.	31.	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP
223.	32.	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP
224.	33.	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP
225.	34.	Kota Semarang	WDP	WTP	WTP DPP
226.	35.	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
227.	36.	Kota Tegal	WTP	WDP	
228.	1.	Prov. D.I Yogyakarta	WTP DPP	WTP	WTP
229.	2.	Kab. Bantul	WDP	WTP DPP	WTP DPP
230.	3.	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP
231.	4.	Kab. Kulon Progo	WDP	WDP	WTP DPP
232.	5.	Kab. Sleman	WTP DPP	WTP DPP	WTP
233.	6.	Kota Yogyakarta	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP
234.	1.	Prov. Jawa Timur	WTP DPP	WTP	WTP DPP
235.	2.	Kab. Bangkalan	WTP	WTP	WTP
236.	3.	Kab. Banyuwangi	WDP	WTP	WTP
237.	4.	Kab. Blitar	WDP	WDP	WDP
238.	5.	Kab. Bojonegoro	WDP	WDP	WDP
239.	6.	Kab. Bondowoso	WTP DPP	WTP	WDP
240.	7.	Kab. Gresik	WDP	WDP	WDP
241.	8.	Kab. Jember	WDP	WTP	WDP
242.	9.	Kab. Jombang	WDP	WDP	WTP DPP
243.	10.	Kab. Kediri	WDP	WDP	WDP
244.	11.	Kab. Lamongan	WDP	WDP	WDP
245.	12.	Kab. Lumajang	WDP	WDP	WDP
246.	13.	Kab. Madiun	WDP	WDP	WTP DPP
247.	14.	Kab. Magetan	WDP	WDP	WDP
248.	15.	Kab. Malang	WDP	WDP	WDP
249.	16.	Kab. Mojokerto	TMP	WDP	TW
250.	17.	Kab. Nganjuk	WDP	WTP	WTP DPP
251.	18.	Kab. Ngawi	WDP	WDP	WTP DPP
252.	19.	Kab. Pacitan	WTP DPP	WDP	WTP DPP
253.	20.	Kab. Pamekasan	WTP DPP	WDP	WDP
254.	21.	Kab. Pasuruan	WDP	WDP	WTP DPP
255.	22.	Kab. Ponorogo	WDP	WTP	WTP DPP
256.	23.	Kab. Probolinggo	WDP	WDP	WTP DPP
257.	24.	Kab. Sampang	WDP	WDP	WDP
258.	25.	Kab. Sidoarjo	WDP	WDP	WTP DPP
259.	26.	Kab. Situbondo	WDP	WDP	WDP
260.	27.	Kab. Sumenep	WDP	WDP	WDP
261.	28.	Kab. Trenggalek	WDP	WDP	WDP
262.	29.	Kab. Tuban	WTP DPP	WDP	WDP
263.	30.	Kab. Tulungagung	WTP DPP	WTP	WTP DPP
264.	31.	Kota Batu	WDP	WDP	WDP
265.	32.	Kota Blitar	WTP DPP	WTP	WTP DPP
266.	33.	Kota Kediri	WDP	WDP	WDP
267.	34.	Kota Madiun	WDP	WDP	WDP
268.	35.	Kota Malang	WTP DPP	WTP	WTP DPP
269.	36.	Kota Mojokerto	WTP DPP	WTP	WDP**
270.	37.	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WDP
271.	38.	Kota Probolinggo	WTP DPP	WTP	WTP DPP
272.	39.	Kota Surabaya	WDP	WTP	WTP DPP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
273.	1.	Prov. Banten	WDP	WDP	TMP
274.	2.	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP
275.	3.	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	WDP
276.	4.	Kab. Serang	WTP DPP	WTP	WTP DPP
277.	5.	Kab. Tangerang	WTP	WTP	WTP DPP
278.	6.	Kota Cilegon	WDP	WDP	WTP DPP
279.	7.	Kota Serang	WDP	WDP	WDP
280.	8.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP
281.	9.	Kota Tangerang Selatan	WTP	WTP DPP	WDP
282.	1.	Prov. Bali	WDP	WDP	WTP DPP
283.	2.	Kab. Badung	WTP DPP	WTP	TW
284.	3.	Kab. Bangli	WDP	WDP	TMP
285.	4.	Kab. Buleleng	WDP	WDP	WDP
286.	5.	Kab. Gianyar	WDP	WDP	WDP
287.	6.	Kab. Jembrana	WDP	WDP	WDP
288.	7.	Kab. Karangasem	WDP	WDP	WDP
289.	8.	Kab. Klungkung	WDP	WDP	WDP
290.	9.	Kab. Tabanan	WDP	TMP	WDP
291.	10.	Kota Denpasar	WDP	WTP	WTP
292.	1.	Prov. Nusa Tenggara Barat	WTP	WTP	WTP
293.	2.	Kab. Bima	TMP	WDP	WDP
294.	3.	Kab. Dompu	TMP	WDP	WDP
295.	4.	Kab. Lombok Barat	WDP	WDP	WDP
296.	5.	Kab. Lombok Tengah	WDP	WTP DPP	WTP
297.	6.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP
298.	7.	Kab. Lombok Utara	WDP	WDP	WDP
299.	8.	Kab. Sumbawa	WDP	WTP DPP	WTP
300.	9.	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WDP	WDP
301.	10.	Kota Bima	WDP	WDP	WDP
302.	11.	Kota Mataram	WDP	WDP	WDP
303.	1.	Prov. Nusa Tenggara Timur	WDP	WDP	WDP
304.	2.	Kab. Alor	TMP	TMP	WDP*
305.	3.	Kab. Belu	WDP	WDP	WDP*
306.	4.	Kab. Ende	WDP	WDP	WDP
307.	5.	Kab. Flores Timur	WDP	WDP	WDP
308.	6.	Kab. Kupang	TMP	TMP	TMP*
309.	7.	Kab. Lembata	TMP	WDP	WDP*
310.	8.	Kab. Manggarai	WDP	WDP	WDP*
311.	9.	Kab. Manggarai Barat	WDP	WDP	WDP
312.	10.	Kab. Manggarai Timur	TMP	TMP	WDP*
313.	11.	Kab. Nagekeo	WDP	WDP	WDP*
314.	12.	Kab. Ngada	TMP	WDP	WDP
315.	13.	Kab. Rote Ndao	TMP	TMP	TMP
316.	14.	Kab. Sabu Raijua	WDP	WDP	WDP
317.	15.	Kab. Sikka	WDP	WDP	WDP
318.	16.	Kab. Sumba Barat	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
319.	17.	Kab. Sumba Darat Daya	WDP	WDP	WDP*
320.	18.	Kab. Sumba Tengah	WDP	WDP	WDP*
321.	19.	Kab. Sumba Timur	WDP	WDP	WDP
322.	20.	Kab. Timor Tengah Selatan	WDP	WDP	WDP
323.	21.	Kab. Timor Tengah Utara	TMP	WDP	WDP*
324.	22.	Kota Kupang	WDP	WDP	WDP
325.	1.	Prov. Kalimantan Barat	WDP	WTP DPP	WTP DPP*
326.	2.	Kab. Bengkayang	WDP	WDP	WDP
327.	3.	Kab. Kapuas hulu	WDP	WDP	WDP
328.	4.	Kab. Kayong Utara	WDP	WDP	WDP
329.	5.	Kab. Ketapang	WDP	WDP	WDP
330.	6.	Kab. Kubu Raya	WDP	WDP	WDP
331.	7.	Kab. Landak	WDP	WDP	WTP DPP
332.	8.	Kab. Melawi	TW	WDP	WDP
333.	9.	Kab. Pontianak/Mempawah	WDP	WDP	WDP
334.	10.	Kab. Sambas	WDP	WDP	WDP
335.	11.	Kab. Sanggau	WDP	WDP	WDP
336.	12.	Kab. Sekadau	WDP	WTP DPP	WTP DPP
337.	13.	Kab. Sintang	WDP	WTP DPP	WTP DPP
338.	14.	Kota Pontianak	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP
339.	15.	Kota Singkawang	WDP	WDP	WDP
340.	1.	Prov. Kalimantan Tengah	WDP	TMP	WDP
341.	2.	Kab. Barito Selatan	TMP	WDP	TMP
342.	3.	Kab. Barito Timur	TMP	TMP	TW
343.	4.	Kab. Barito Utara	TMP	TMP	WDP
344.	5.	Kab. Gunung Mas	WDP	WTP DPP	WDP
345.	6.	Kab. Kapuas	WDP	WDP	WDP
346.	7.	Kab. Katingan	TMP	WDP	WTP DPP
347.	8.	Kab. Kotawaringin Barat	WDP	WDP	WDP*
348.	9.	Kab. Kotawaringin Timur	WDP	TMP	WDP*
349.	10.	Kab. Lamandau	WDP	WDP	WTP DPP
350.	11.	Kab. Murung Raya	WDP	WDP	WDP
351.	12.	Kab. Pulang Pisang	TW	TMP	TW
352.	13.	Kab. Seruyan	TMP	TMP	WDP*
353.	14.	Kab. Sukamara	WDP	WTP	WTP DPP
354.	15.	Kota Palangka Raya	WDP	TMP	TMP*
355.	1.	Prov. Kalimantan Selatan	WDP	WDP	WTP DPP
356.	2.	Kab. Balangan	WDP	WDP	WTP DPP
357.	3.	Kab. Banjar	WDP	WDP	WTP DPP
358.	4.	Kab. Barito Kuala	WDP	WDP	WDP
359.	5.	Kab. Hulu Sungai Selatan	WDP	WDP	WTP DPP
360.	6.	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP	WDP	WTP DPP
361.	7.	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WDP
362.	8.	Kab. Kotabaru	WDP	TW	WDP
363.	9.	Kab. Tabalong	TMP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
364.	10.	Kab. Tanah Bumbu	WDP	WDP	WTP
365.	11.	Kab. Tanah Laut	WDP	WDP	WTP
366.	12.	Kab. Tapih	WDP	WDP	WDP
367.	13.	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WDP
368.	14.	Kota Banjarmasin	WDP	WDP	WTP
369.	1.	Prov. Kalimantan Timur	WDP	WTP	WDP*
370.	2.	Kab. Berau	WDP	WDP	WDP
371.	3.	Kab. Kutai Barat	WDP	WDP	WDP*
372.	4.	Kab. Kutai Kartanegara	TMP	WTP	WTP DPP*
373.	5.	Kab. Kutai Timur	TW	WDP	WDP*
374.	6.	Kab. Paser	WDP	WDP	WTP DPP
375.	7.	Kab. Penajam Paser Utara	WDP	WDP	WDP
376.	8.	Kab. Balikpapan	WDP	WDP	WTP DPP
377.	9.	Kota Bontang	WDP	WDP	WDP
378.	10.	Kota Samarinda	TMP	WDP	WDP
379.	1.	Prov. Kalimantan Utara			
380.	2.	Kab. Bulungan	WDP	WDP	WDP
381.	3.	Kab. Malinau	WDP	WDP	WDP
382.	4.	Kab. Nunukan	WDP	WDP	WDP
383.	5.	Kab. Tana Tidung	TMP	WDP	WDP*
384.	6.	Kota Tarakan	WDP	WTP	WTP DPP
385.	1.	Prov Sulawesi Utara	WDP	WTP DPP	WDP*
386.	2.	Kab. Bolaang Mongondow	TMP	TMP	TW
387.	3.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	TMP	WDP	WDP
388.	4.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	TMP	WDP	WTP DPP
389.	5.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	TMP	TMP	WDP
390.	6.	Kab. Kepulauan Sangihe	TMP	TMP	WDP
391.	7.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	WDP	WDP	WTP DPP
392.	8.	Kab. Kepulauan Taulad	TMP	TW	TW
393.	9.	Kab. Minahasa	WDP	TW	WDP
394.	10.	Kab. Minahasa Selatan	TMP	TMP	TW*
395.	11.	Kab. Minahasa Tenggara	TMP	TMP	TW*
396.	12.	Kab. Minahasa Utara	TMP	WDP	WDP
397.	13.	Kota Bitung	WTP DPP	WTP DPP	WTP
398.	14.	Kota Kotamobagu	TW	WDP	WTP DPP
399.	15.	Kota Manado	TW	WDP	WDP*
400.	16.	Kota Tomohon	TMP	WDP	WTP DPP
401.	1.	Prov. Sulawesi Tengah	WDP	WTP DPP	WDP
402.	2.	Kab. Banggai	WDP	WTP	WTP
403.	3.	Kab. Banggai Kepulauan	WTP DPP	WTP	WTP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
404.	4.	Kab. Buol	WDP	TMP	WDP
405.	5.	Kab. Donggala	WTP DPP	WTP	WTP
406.	6.	Kab. Morowali	WDP	WTP DPP	WDP
407.	7.	Kab. Parigi Moutong	WDP	WDP	WDP
408.	8.	Kab. Poso	WDP	WTP DPP	WDP
409.	9.	Kab. Sigi	WTP DPP	WTP	WDP
410.	10.	Kab. Tojo Una-Una	WDP	WTP	WTP
411.	11.	Kab. tolitoli	WDP	WDP	WDP
412.	12.	Kota Palu	WDP	WTP	WDP
413.	1.	Prov. Sulawesi Selatan	WTP	WTP	WTP DPP
414.	2.	Kab. Bantaeng	WDP	WDP	WDP
415.	3.	Kab. Barru	WDP	WDP	WTP DPP
416.	4.	Kab. Bone	WDP	WDP	WDP
417.	5.	Kab. Bulukumba	WDP	WTP DPP	WTP
418.	6.	Kab. Enrekang	WDP	WDP	WDP
419.	7.	Kab. Gowa	WTP	WTP	WTP
420.	8.	Kab. Jeneponto	TMP	TMP	TMP
421.	9.	Kab. Kep. Selayar	TMP	TMP	TMP
422.	10.	Kab. Luwu	WDP	TMP	WDP
423.	11.	Kab. Luwu Timur	WTP	WTP DPP	WDP
424.	12.	Kab. Luwu Utara	WDP	WDP	WTP DPP
425.	13.	Kab. Maros	WDP	WDP	WTP DPP
426.	14.	Kab. Pangkajene dan kepulauan	WDP	WTP DPP	WTP
427.	15.	Kab. Pinrang	WDP	WTP DPP	WTP
428.	16.	Kab. sindereng Rappang	WDP	WDP	WDP
429.	17.	Kab. Sinjai	WDP	WDP	WDP
430.	18.	Kab. Soppeng	WDP	TMP	WDP
431.	19.	Kab. Takalar	TMP	TMP	TMP
432.	20.	Kab. Tana Toraja	TMP	WDP	WDP
433.	21.	Kab. Toraja Utara	WDP	WDP	WDP
434.	22.	Kab. Wajo	WDP	WTP DPP	WDP
435.	23.	Kota Makassar	WDP	WDP	WDP
436.	24.	Kota Palopo	TMP	WDP	TMP
437.	25.	Kota Pare-Pare	TMP	TMP	WDP
438.	1.	Prov. Sulawesi Tenggara	WDP	WDP	WTP
439.	2.	Kab. Bombana	TMP	WDP	WTP DPP
440.	3.	Kab. Buton	WDP	WDP	WTP DPP
441.	4.	Kab. Buton Utara	TMP	TMP	WDP
442.	5.	Kab. Kolaka	WDP	WDP	WDP
443.	6.	Kab. Kolaka Utara	WDP	WDP	WDP
444.	7.	Kab. Konawe	WDP	WDP	WDP
445.	8.	Kab. Konawe Selatan	WDP	WDP	WDP
446.	9.	Kab. Konawe Utara	TMP	TMP	WDP
447.	10.	Kab. Muna	WDP	WDP	WDP

Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
448.	11.	Kab. Wakatobi	WDP	WDP	WDP
449.	12.	Kota Bau-Bau	WDP	WDP	WDP
450.	13.	Kota Kendari	WDP	WDP	WTP DPP
451.	1.	Prov. Gorontalo	WDP	WDP	WTP
452.	2.	Kab. Boalemo	WDP	WDP	WTP
453.	3.	Kab. Bone Bolango	WDP	WDP	WTP
454.	4.	Kab. Gorontalo	WDP	WTP	WTP
455.	5.	Kab. Gorontalo Utara	WDP	WDP	WDP
456.	6.	Kab. Pohuwato	WDP	WDP	WTP
457.	7.	Kota Gorontalo	WDP	WDP	WDP
458.	1.	Prov. Sulawesi Barat	WDP	WDP	WDP
459.	2.	Kab. Majene	WDP	WDP	WDP
460.	3.	Kab. Mamasa	WDP	TMP	TMP*
461.	4.	Kab. Mamuju	WDP	WTP DPP	WTP
462.	5.	Kab. Mamuju Utara	WDP	WDP	WDP
463.	6.	Kab. Polewali Mandar	WDP	WDP	WDP
464.	1.	Prov. Maluku	TMP	TMP	WDP
465.	2.	Kab. Buru	TMP	TMP	WDP
466.	3.	Kab. Buru Selatan	TMP	TMP	TMP*
467.	4.	Kab. Kepulauan Aru	TMP	TMP	TMP*
468.	5.	Kab. Maluku Barat Daya	TMP	TMP	TMP*
469.	6.	Kab. Maluku Tengah	TMP	WDP	WDP
470.	7.	Kab. Maluku Tenggara	WDP	WDP	WDP
471.	8.	Kab. Maluku Tenggara Barat	TMP	TMP	WDP
472.	9.	Kab. Seram Bagian Barat	TMP	TMP	TMP*
473.	10.	Kab. Seram Bagian Timur	TMP	TMP	TMP*
474.	11.	Kota Ambon	TMP	TMP	WDP*
475.	12.	Kota Tual	TMP	TMP	WDP*
476.	1.	Prov. Maluku Utara	TMP	TMP	TMP
477.	2.	Kab. Halmahera Barat	TMP	WDP	WDP
478.	3.	Kab. Halmahera Selatan	WDP	WDP	WDP
479.	4.	Kab. Halmahera Tengah	TMP	WDP	TW
480.	5.	Kab. Halmahera Timur	TMP	WDP	WDP
481.	6.	Kab. Halmahera Utara	TMP	WDP	WDP
482.	7.	Kab. Kepulauan Sula	TMP	TMP	TMP
483.	8.	Kab. Pulau Morotai	TMP	TMP	WDP
484.	9.	Kota Ternate	WDP	WDP	WDP
485.	10.	Kota Tidore Kepulauan	WDP	WDP	WDP
486.	1.	Prov. Papua	TMP	TMP	WDP
487.	2.	Kab. Asmat	WDP	WDP	WTP
488.	3.	Kab. Baik Numfor	TMP	WDP	WDP

Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
489.	4.	Kab. Boven Digoel	TMP	TMP	TMP*
490.	5.	Kab. Deiyai	TMP	TMP	TMP*
491.	6.	Kab. Dogiyai	TMP	TMP	TMP*
492.	7.	Kab. Intan Jaya	TMP	TMP	TMP*
493.	8.	Kab. Jayapura	WDP	WDP	WDP
494.	9.	Kab. Jayawijaya	WDP	WDP	WDP
495.	10.	Kab. Keerom	TMP	TMP	TMP*
496.	11.	Kab. Kepulauan Yapen	WDP	WDP	WDP
497.	12.	Kab. Lanny Jaya	TMP	TMP	TMP*
498.	13.	Kab. Memberamo Raya	TMP	TMP	TMP*
499.	14.	Kab. Memberamo Tengah	TMP	TMP	TMP*
500.	15.	Kab. Mappi	TMP	TMP	TMP
501.	16.	Kab. Marauke	TMP	TMP	WDP
502.	17.	Kab. Mimika	WDP	WDP	WDP
503.	18.	Kab. Nabire	TW	TW	WDP
504.	19.	Kab. Nduga	TMP	TMP	TMP*
505.	20.	Kab. Paniai	TMP	TMP	TMP
506.	21.	Kab. Pegunungan Bintang	TW	WDP	WDP
507.	22.	Kab. Puncak	TMP	TMP	TMP*
508.	23.	Kab. Puncak Jaya	WDP	TMP	TW
509.	24.	Kab. Sarmi	TMP	TMP	TMP*
510.	25.	Kab. Supiori	TMP	TMP	WDP*
511.	26.	Kab. Tolikara	TMP	TMP	TMP*
512.	27.	Kab. Waropen	TMP	TMP	TMP*
513.	28.	Kab. Yahukimo	TMP	TMP	WDP
514.	29.	Kab. Yalimo	TMP	TMP	WDP
515.	30.	Kota Jayapura	WDP	WDP	WTP
516.	1.	Prov. Papua Barat	TMP	TMP	WDP*
517.	2.	Kab. Fakfak	TMP	TMP	TMP*
518.	3.	Kab. Kaimana	TMP	WDP	WTP
519.	4.	Kab. Manokwari	TMP	TMP	TMP*
520.	5.	Kab. Manokwari Selatan			
521.	6.	Kab. Maybrat	TMP	TMP	WDP*
522.	7.	Kab. Pegunungan Arfak			
523.	8.	Kab. Raja Ampat	TMP	WDP	WDP*
524.	9.	Kab. Sorong	TMP	TMP	WTP
525.	10.	Kab. Sorong Selatan	WDP	WDP	WTP*
526.	11.	Kab. Tambora	TMP	TMP	WDP*
527.	12.	Kab. Teluk Bintuni	WDP	WDP	WTP DPP*
528.	13.	Kab. Teluk Wondama	TMP	TMP	TMP*
529.	14.	Kota Sorong	TMP	TMP	WDP*

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2014

Catatan :

* : Opini LKPD Tahun 2013 yang masuk ke IHPS II 2014

** : Dalam IHPS I Tahun 2014 tertulis WTP DPP seharusnya WDP

Tabel V.6 Data Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014

No.	Kementerian/Lembaga	PREDIKAT HASIL EVALUASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan					
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	C	CC	CC	B	B
2.	Kementerian Dalam Negeri	B	B	B	B	B
3.	Kementerian Luar Negeri	CC	CC	CC	CC	B
4.	Kementerian Hukum dan HAM	CC	B	B	B	B
5.	Kementerian Pertahanan	CC	CC	CC	CC	B
6.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	CC	CC	CC	B	B
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	B	B	B	A	A
8.	Kejaksaan Agung	C	C	CC	CC	CC
9.	Mahkamah Agung (MA)	C	CC	CC	CC	CC
10.	Mahkamah Konstitusi (MK)	B	B	B	B	B
11.	Komisi Yudisial (KY)	C	C	CC	CC	CC
12.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	CC	CC	CC	CC	CC
13.	Kepolisian Negara RI (POLRI)	C	CC	CC	CC	B
14.	Sekretariat Negara	CC	B	B	B	B
15.	Sekretariat Kabinet	CC	CC	CC	CC	B
16.	Setjen MPR	CC	CC	CC	CC	CC
17.	Setjen DPD	C	CC	CC	CC	CC
18.	Setjen DPR	C	CC	CC	CC	CC
19.	Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)	CC	CC	CC	CC	CC
20.	Badan Intelijen Negara (BIN)	C	C	CC	CC	B
21.	Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia	-	-	-	-	-
22.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	C	CC	CC	CC	B
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	CC	CC	B	B	B
24.	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	CC	CC	B	B	B
25.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	CC	CC	CC	CC	CC
26.	Setjen Dewan Ketahanan Nasional	C	C	C	C	CC
27.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	C	C	CC	CC	CC

Lanjutan Tabel V.6

No.	Kementerian/Lembaga	PREDIKAT HASIL EVALUASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
28.	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)	CC	CC	CC	CC	CC
29.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	D	C	CC	CC	-
30.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	C	C	C	CC	CC
31.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	C	C	CC	CC	CC
32.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	-	-	-	D	CC
33.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	B	A	A	A	A
34.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	-	C	C	CC	CC
35.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI	-	-	-	C	-
36.	Ombudsman	-	-	-	D	CC
Bidang Perekonomian						
37.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	C	B	B	B	B
38.	Kementerian Keuangan	B	B	A	A	A
39.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	B	B	B	B	B
40.	Kementerian Perindustrian	CC	CC	B	B	B
41.	Kementerian Perdagangan	CC	B	B	B	B
42.	Kementerian Pertanian	CC	B	B	B	B
43.	Kementerian Kehutanan	CC	CC	B	B	B
44.	Kementerian Perhubungan	CC	CC	B	B	B
45.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	CC	B	B	A	A
46.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	CC	CC	CC	CC	CC
47.	Kementerian Pekerjaan Umum	CC	B	B	B	B
48.	Kementerian Riset dan Teknologi	CC	CC	B	B	B
49.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	CC	CC	CC	CC	CC
50.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	C	CC	CC	CC	CC
51.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	CC	B	B	B	A
52.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	C	CC	CC	CC	B

Lanjutan Tabel V.6

No.	Kementerian/Lembaga	PREDIKAT HASIL EVALUASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
53.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	B	B	B	B	B
54.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	C	CC	CC	B	B
55.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	B	A	A	A	A
56.	Badan Pusat Statistik (BPS)	C	CC	CC	B	B
57.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	B	B	B	A	A
58.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	CC	CC	CC	CC	CC
59.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	C	CC	CC	CC	CC
60.	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	CC	CC	CC	CC	CC
61.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	CC	CC	CC	B	B
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	C	C	CC	CC	B
63.	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	CC	CC	B	B	B
64.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	CC	CC	B	B	B
65.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)	B	B	B	B	B
66.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	C	CC	CC	CC	CC
67.	Badan Informasi Geospasial (BIG), dulunya Bakosurtanal	CC	CC	CC	B	B
68.	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	CC	CC	B	B	B
69.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	-	C	C	CC	CC
70.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	C	C

Lanjutan Tabel V.6

No.	Kementerian/Lembaga	PREDIKAT HASIL EVALUASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
71.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	CC	CC	CC	CC	CC
Bidang Kesejahteraan Rakyat						
72.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	C	CC	CC	B	B
73.	Kementerian Kesehatan	CC	CC	B	B	B
74.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	B	B	B	B	B
75.	Kementerian Sosial	C	CC	CC	B	B
76.	Kementerian Agama	CC	CC	CC	CC	CC
77.	Kementerian Lingkungan Hidup	C	CC	CC	CC	CC
78.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	C	CC	CC	B	B
79.	Kementerian Perumahan Rakyat	CC	CC	CC	B	B
80.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	CC	CC	CC	CC	CC
81.	Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS)	C	C	CC	CC	CC
82.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	CC	CC	CC	CC	B
83.	Badan SAR Nasional	D	C	CC	CC	CC
84.	Perpustakaan Nasional	CC	CC	CC	CC	CC
85.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	C	CC	CC	CC	B
86.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	CC	CC	CC	CC	B
87.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	-	C	-	-	-

Sumber : Kementerian PAN RB, 2015

Tabel V.7 Perkembangan Evaluasi Akuntabilitas Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014

Predikat	2010	2011	2012	2013	2014
A	0	2	3	6	7
B	11	17	26	33	43
CC	39	49	48	41	32
C	27	14	4	3	1
D	2	0	0	2	0
Jumlah Dievaluasi	79	82	81	85	83
% Akuntabel	63%	83%	95%	94%	99%

Sumber : Kementerian PAN RB, 2015

Tabel V.8 Data Akuntabilitas Kinerja Provinsi Tahun 2010-2014

No.	Provinsi	PREDIKAT HASIL EVALUASI				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
1.	Aceh	C	C	CC	CC	CC
2.	Sumatera Utara	C	CC	CC	CC	CC
3.	Riau	C	CC	CC	CC	CC
4.	Kepulauan Riau	C	CC	CC	B	B
5.	Sumatera Barat	C	CC	CC	CC	CC
6.	Jambi	C	C	CC	CC	CC
7.	Sumatera Selatan	CC	CC	B	B	B
8.	Kepulauan Bangka Belitung	D	C	C	CC	CC
9.	Bengkulu	C	C	CC	CC	CC
10.	Lampung	C	C	CC	CC	CC
11.	Banten	C	C	CC	CC	CC
12.	DKI Jakarta	CC	CC	CC	CC	CC
13.	Jawa Barat	CC	CC	CC	CC	CC
14.	Jawa Timur	C	CC	B	B	A
15.	Jawa Tengah	CC	B	B	B	B
16.	Daerah Istimewa Yogyakarta	C	CC	B	B	A
17.	Kalimantan Barat	CC	CC	CC	B	B
18.	Kalimantan Timur	CC	B	B	B	B
19.	Kalimantan Selatan	CC	CC	B	B	B
20.	Kalimantan Tengah	C	C	C	CC	CC
21.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
22.	Bali	C	CC	CC	CC	B
23.	Nusa Tenggara Barat	CC	CC	CC	CC	CC
24.	Nusa Tenggara Timur	CC	CC	CC	CC	CC
25.	Sulawesi Utara	C	CC	CC	B	B
26.	Sulawesi Tengah	C	CC	CC	CC	CC
27.	Sulawesi Barat	-	C	C	C	C
28.	Sulawesi Tenggara	-	-	C	CC	CC
29.	Gorontalo	C	C	C	C	CC
30.	Sulawesi Selatan	C	C	CC	CC	CC
31.	Maluku Utara	-	-	C	C	C
32.	Maluku	C	CC	CC	CC	CC
33.	Papua	D	C	C	C	C
34.	Papua Barat	-	-	C	C	C

Sumber : Kementerian PAN RB, 2015

Tabel V.9 Perkembangan Evaluasi Akuntabilitas Provinsi Tahun 2010-2014

Predikat	2010	2011	2012	2013	2014
A	0	0	0	0	2
B	0	2	6	9	8
CC	9	17	19	19	19
C	18	11	8	5	4
D	2	0	0	0	0
Jumlah Dievaluasi	29	30	33	33	33
% Akuntabel	31%	63%	76%	85%	88%

Sumber : Kementerian PAN RB, 2015

Tabel V.10 Data Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam					
1.	Aceh Barat			D	C	CC
2.	Aceh Barat Daya				C	C
3.	Aceh Besar				CC	C
4.	Aceh Jaya			C	C	C
5.	Aceh Selatan				CC	CC
6.	Aceh Singkil			D	D	C
7.	Aceh Tamiang			C	C	C
8.	Aceh Tengah			C	C	C
9.	Aceh Tenggara				CC	C
10.	Aceh Timur			C	C	C
11.	Aceh Utara				CC	CC
12.	Bener Meriah	C			CC	CC
13.	Bireuen				C	C
14.	Gayo Lues			C	C	C
15.	Nagan raya			D	C	C
16.	Pidie				C	C
17.	Pidie jaya			D	C	C
18.	Simeulue					
19.	Kota Banda Aceh			C	CC	CC
20.	Kota Langsa			D	C	C
21.	Kota Lhokseumawe	C		CC	CC	C
22.	Kota Sabang			C	C	C
23.	Kota Subulussalam				C	C
	Provinsi Sumatera Utara					
24.	Asahan			C	C	C
25.	Batubara					D
26.	Dairi			C	C	C
27.	Deli Serdang			D		D
28.	Humbang Hasundutan			D	C	C
29.	Karo			D	D	D
30.	Labuhanbatu				D	C

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
31.	Labuhanbatu Selatan			C	C	C
32.	Labuhanbatu Utara			D	C	C
33.	Langkat	C		C	C	C
34.	Mandailing Natal			C		D
35.	Nias			C	C	C
36.	Nias Barat			D	D	C
37.	Nias Selatan			D	C	C
38.	Nias Utara			D	D	D
39.	Padang Lawas				C	C
40.	Padang Lawas Utara			D		D
41.	Pakpak Bharat			C	CC	CC
42.	Samosir		C	C	C	C
43.	Serdang Bedagai	C		C	C	C
44.	Simalungun					D
45.	Tapanuli Selatan			C	C	C
46.	Tapanuli Tengah			D	C	C
47.	Tapanuli Utara					D
48.	Toba Samosir			C	C	C
49.	Kota Binjai			D	C	C
50.	Kota Gunung Sitoli	D		C	C	C
51.	Kota Medan				CC	CC
52.	Kota Padangsidempuan			C		C
53.	Kota Pematangsiantar				D	C
54.	Kota Sibolga			CC	CC	C
55.	Kota Tanjungbalai				C	CC
56.	Kota Tebing Tinggi			C	CC	CC
Provinsi Sumatera Barat						
57.	Agam			C	C	C
58.	Dharmasraya			D	C	C
59.	Kep. Mentawai			C		
60.	Lima Puluh Kota				C	C
61.	Padang Pariaman			C	C	C
62.	Pasaman			C	CC	CC
63.	Pasaman Barat			D	C	C
64.	Pesisir Selatan			C	C	CC
65.	Sijunjung				C	C
66.	Solok			C	C	CC
67.	Solok Selatan			C	C	C
68.	Tanah Datar	C		C	CC	CC
69.	Kota Bukittinggi		C	C	C	C
70.	Kota Padang			C	CC	CC
71.	Kota Padang Panjang			C	CC	CC
72.	Kota Pariaman			C	C	C
73.	Kota Payakumbuh			C	C	CC
74.	Kota Sawahlunto			C	C	C
75.	Kota Solok	C			CC	CC

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
	Provinsi Riau					
76.	Bengkalis				C	C
77.	Indragiri Hilir			C	D	CC
78.	Indragiri Hulu			C	C	CC
79.	Kampar	C			C	C
80.	Kep. Meranti				D	D
81.	Kuantan Singingi				C	C
82.	Pelalawan			C	C	C
83.	Rokan Hilir				C	C
84.	Rokan hulu			CC	CC	CC
85.	Siak		D	D	C	CC
86.	Kota Dumai	CC	C		CC	CC
87.	Kota Pekanbaru	C		C	C	C
	Provinsi Kepulauan Riau					
88.	Bintan		C	CC	CC	
89.	Karimun	C	CC	CC	CC	
90.	Kep. Anambas			D	C	
91.	Lingga				C	
92.	Natuna			D	C	
93.	Kota Batam	C			CC	
94.	Kota Tanjungpinang			C	CC	
	Provinsi Jambi					
95.	Batang Hari	CC	CC		CC	CC
96.	Bungo	C		C	C	CC
97.	Kerinci			CC	C	C
98.	Merangin			CC	C	C
99.	Muaro Jambi			C	C	C
100.	Sarolangun			C	C	C
101.	Tanjung Jabung Barat			CC	CC	C
102.	Tanjung Jabung Timur		C	CC	CC	CC
103.	Tebo		C	C	CC	CC
104.	Kota Jambi			C	C	C
105.	Kota Sungai Penuh			C	C	C
	Provinsi Sumatera Selatan					
106.	Banyuasin	C		CC	CC	CC
107.	Empat Lawang			D	D	D
108.	Lahat			C	C	C
109.	Muara Enim			CC	CC	B
110.	Musi Banyuasin	CC	CC		CC	CC
111.	Musi Rawas		C		CC	CC
112.	Ogan Ilir			C	CC	CC
113.	Ogan Komering Ilir				C	CC
114.	Ogan Komering Ulu		C	C	C	C
115.	Ogan Komering Ulu Selatan			CC	CC	CC
116.	Ogan Komering Ulu Timur				CC	CC
117.	Kota Lubuklinggau				CC	CC
118.	Kota Pagar Alam			C	C	C

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
119.	Kota Palembang			CC	CC	CC
120.	Kota Prabumulih				C	C
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
121.	Bangka		C	C	C	CC
122.	Bangka Barat	D		C	C	CC
123.	Bangka Selatan	C		C	C	C
124.	Bangka Tengah			CC	CC	CC
125.	Belitung			C	C	C
126.	Belitung Timur			C	C	C
127.	Kota Pangkalpinang				CC	CC
Provinsi Bengkulu						
128.	Bengkulu Selatan		C	C	C	C
129.	Bengkulu Tengah			D	C	CC
130.	Bengkulu Utara			C	C	C
131.	Kaur			C	C	C
132.	Kepahiang			C	C	C
133.	Lebong			C	C	CC
134.	Mukomuko			C	C	CC
135.	Rejang Lebong	C		CC	C	C
136.	Seluma			D	D	C
137.	Kota Bengkulu	C		C	C	C
Provinsi Lampung						
138.	Lampung Barat			CC	CC	C
139.	Lampung Selatan			C	C	C
140.	Lampung Tengah			C	C	C
141.	Lampung Timur			C		C
142.	Lampung Utara			C	C	C
143.	Mesuji			C	C	C
144.	Pesawaran			C	C	C
145.	Pesisir Barat					
146.	Pringsewu			D		C
147.	Tanggamus			C	C	C
148.	Tulang Bawang		D	CC	CC	CC
149.	Tulang Bawang Barat			D	C	C
150.	Way Kanan			CC	CC	C
151.	Kota Bandar Lampung	C		C	C	C
152.	Kota Metro	C		CC	CC	CC
Provinsi Banten						
153.	Lebak			CC	CC	CC
154.	Pandeglang			CC	CC	C
155.	Serang			CC	CC	CC
156.	Tangerang		C	CC	CC	CC
157.	Kota Cilegon	C		CC	CC	CC
158.	Kota Serang				C	CC
159.	Kota Tangerang	C		CC	CC	CC
160.	Kota Tangerang Selatan			CC	CC	CC

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
	Provinsi DKI Jakarta					
161.	Kepulauan Seribu					
162.	Kodya Jakarta Barat					
163.	Kodya Jakarta Pusat					
164.	Kodya Jakarta Selatan					
165.	Kodya Jakarta Timur					
166.	Kodya Jakarta Utara					
	Provinsi Jawa Barat					
167.	Bandung				C	CC
168.	Bandung Barat			C	C	C
169.	Bekasi			C	C	CC
170.	Bogor			CC	CC	CC
171.	Ciamis	C		CC	CC	CC
172.	Cianjur			CC	CC	CC
173.	Cirebon			C	C	CC
174.	Garut		CC	CC	CC	CC
175.	Indramayu			C	C	C
176.	Karawang			CC	CC	CC
177.	Kuningan			C	C	C
178.	Majalengka			C	C	C
179.	Pangandaran					
180.	Purwakarta			CC	CC	C
181.	Subang			D	C	D
182.	Sukabumi			CC	CC	CC
183.	Sumedang			C	C	C
184.	Tasikmalaya			C	C	C
	Provinsi Jawa Timur					
185.	Bangkalan			C	CC	CC
186.	Banyuwangi				CC	CC
187.	Blitar			D	C	C
188.	Bojonegoro			C	C	CC
189.	Bondowoso			C	C	C
190.	Gresik			CC	CC	CC
191.	Jember			C	CC	CC
192.	Jombang			C	C	CC
193.	Kediri			C		C
194.	Lamongan	C		C	C	C
195.	Lumajang			C		CC
196.	Madiun			CC	CC	CC
197.	Magetan			C	C	C
198.	Malang			C	CC	CC
199.	Mojokerto				C	CC
200.	Nganjuk			C	CC	CC
201.	Ngawi			C	CC	CC
202.	Pacitan	C	CC	CC	CC	CC
203.	Pamekasan			C	C	C
204.	Pasuruan			C	C	C
205.	Ponorogo			D	C	CC

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
206.	Probolinggo			CC	CC	CC
207.	Sampang			C		C
208.	Sidoarjo			CC	CC	CC
209.	Situbondo			C	C	C
210.	Sumenep			CC	CC	CC
211.	Trenggalek			C	C	C
212.	Tuban			C		C
213.	Tulungagung			CC	CC	CC
214.	Kota Batu			C	C	C
215.	Kota Blitar			CC	CC	CC
216.	Kota Kediri			D	C	C
217.	Kota Madiun			C	C	CC
218.	Kota Malang		CC	CC	CC	CC
219.	Kota Mojokerto				C	C
220.	Kota Pasuruan			CC	CC	CC
221.	Kota Probolinggo			C	C	C
222.	Kota Surabaya			C	CC	CC
Provinsi Jawa Tengah						
223.	Banjarnegara			C	CC	CC
224.	Banyumas			CC	CC	C
225.	Batang			D	C	CC
226.	Blora			C	C	C
227.	Boyolali	C			CC	CC
228.	Brebes			C	C	C
229.	Cilacap			C	C	CC
230.	Demak			C	CC	CC
231.	Grobongan	C		C	C	C
232.	Jepara				C	C
233.	Karanganyar		C		CC	CC
234.	Kebumen			C	CC	CC
235.	Kendal			C	CC	CC
236.	Klaten			C	C	C
237.	Kudus			C	CC	CC
238.	Magelang			C	CC	CC
239.	Pati			C	C	C
240.	Pekalongan			C	C	C
241.	Pemalang			C	C	C
242.	Purbalingga			C	CC	CC
243.	Purworejo			C	C	C
244.	Rembang			C	CC	CC
245.	Semarang			C	C	C
246.	Sragen			C	CC	CC
247.	Sukoharjo			C	C	C
248.	Tegal			CC	CC	CC
249.	Temanggung		C		CC	C
250.	Wonogiri			C	C	C
251.	Wonosobo			C	C	C
252.	Kota Magelang			C	C	CC

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
253.	Kota Pekalongan			C	C	C
254.	Kota Salatiga			C	C	C
255.	Kota Semarang			CC	CC	CC
256.	Kota Surakarta			CC	CC	CC
257.	Kota Tegal			CC	C	CC
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta						
258.	Bantul			C	C	B
259.	Gunung Kidul	C		CC	CC	CC
260.	Kulon Progo			C	C	B
261.	Sleman	CC	CC	B	B	B
262.	Kota Yogyakarta		C	CC	CC	B
Provinsi Kalimantan Barat						
263.	Bengkayang	C		CC	CC	CC
264.	Kapuas Hulu			CC	C	C
265.	Kayong Utara			C	C	C
266.	Ketapang			C	C	C
267.	Kubu Raya			C	C	C
268.	Landak			C	C	C
269.	Melawi		D	C	C	C
270.	Pontianak			CC	CC	CC
271.	Sambas			C	C	C
272.	Sanggau			CC	CC	C
273.	Sekadau			C	C	C
274.	Sintang			C	CC	CC
275.	Kota Pontianak			CC	CC	CC
276.	Kota Singkawang	C		CC	CC	CC
Provinsi Kalimantan Tengah						
277.	Barito Selatan			C	C	C
278.	Barito Timur			C		C
279.	Barito Utara			C	C	C
280.	Gunung Mas			CC	CC	CC
281.	Kapuas	C		CC	CC	CC
282.	Katingan		C		CC	C
283.	Kotawaringin Barat			C	C	C
284.	Kotawaringin Timur	C		CC	CC	CC
285.	Lamandau			C	C	C
286.	Murung Raya			C		C
287.	Pulang Pisau			D	D	D
288.	Seruyan			C	C	C
289.	Sukamara			C	C	C
290.	Kota Palangkaraya			D	D	C
Provinsi Kalimantan Selatan						
291.	Balangan			C	C	CC
292.	Banjar			CC	CC	CC
293.	Barito Kuala			C	CC	C
294.	Hulu Sungai Selatan			CC	CC	CC
295.	Hulu Sungai Tengah			C	C	CC
296.	Hulu Sungai Utara			C	C	CC

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
297.	Kotabaru			C	C	C
298.	Tabalong			C	C	C
299.	Tanah Bumbu	C		CC	CC	CC
300.	Tanah Laut		C	CC	CC	CC
301.	Tapin			CC	CC	C
302.	Kota Banjarbaru			CC	CC	CC
303.	Kota Banjarmasin	C			CC	CC
Provinsi Kalimantan Timur						
304.	Berau			C	C	CC
305.	Kutai Barat			C	C	CC
306.	Kutai Kartanegara			D	CC	CC
307.	Kutai Timur			C	CC	CC
308.	Paser	C		CC	CC	CC
309.	Penajam Paser Utara				CC	CC
310.	Kota Balikpapan			C	CC	CC
311.	Kota Bontang				CC	CC
312.	Kota Samarinda	D		C	C	CC
Provinsi Kalimantan Utara						
313.	Bulungan			C	C	C
314.	Malinau		C	C	C	C
315.	Nunukan			C	CC	CC
316.	Tana Tidung			D		
317.	Kota Tarakan				CC	CC
Provinsi Bali						
318.	Badung			CC	B	B
319.	Bangli			D	C	C
320.	Buleleng	D		C	C	C
321.	Gianyar			D	C	C
322.	Jembrana			CC	CC	C
323.	Karangasem			CC	CC	CC
324.	Klungkung			C	C	C
325.	Tabanan		C	CC	CC	CC
326.	Kota Denpasar	C	C	C	C	CC
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
327.	Bima			C	CC	CC
328.	Dompu			C	C	
329.	Lombok Barat				CC	CC
330.	Lombok Tengah	C			C	C
331.	Lombok Timur	C		C	CC	CC
332.	Lombok Utara					D
333.	Sumbawa		D	C	CC	CC
334.	Sumbawa Barat			C		D
335.	Kota Bima			C	C	C
336.	Kota Mataram			C	CC	CC
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
337.	Alor			C	C	C
338.	Belu			D	C	C
339.	Ende			C	C	C

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
340.	Flores Timur	C		D	C	C
341.	Kupang			D	C	C
342.	Lembata			C	C	C
343.	Manggarai			C	C	CC
344.	Manggarai Barat			C	C	C
345.	Manggarai Timur			D		C
346.	Nagekeo			C	C	CC
347.	Ngada			C	C	C
348.	Rote Ndao			C	C	C
349.	Sabu Raijua			D	C	C
350.	Sikka	D		D	C	C
351.	Sumba Barat			C	C	C
352.	Sumba Barat Daya			D	C	C
353.	Sumba Tengah			D	D	C
354.	Sumba Timur			C	C	C
355.	Timor Tengah Selatan		C	CC	CC	CC
356.	Timor Tengah Utara			C	C	C
357.	Kota Kupang			C	C	CC
Provinsi Sulawesi Utara						
358.	Bolaang Mongondow				C	C
359.	Bolaang Mongondow Selatan			D	D	D
360.	Bolaang Mongondow Timur			D	C	C
361.	Bolaang Mongondow Utara			C	C	C
362.	Kep. Sangihe			C	C	C
363.	Kep. Siau Tagulandang Biaro			D	C	C
364.	Kep. Talaud			C	C	C
365.	Minahasa				C	C
366.	Minahasa Selatan	C		C	C	C
367.	Bolaang Mongondow				C	C
368.	Minahasa Tenggara			D	C	C
369.	Minahasa Utara				CC	CC
370.	Kota Bitung		CC		CC	CC
371.	Kota Kotamobagu			C	C	C
372.	Kota Manado	C		CC	B	B
373.	Kota Tomohon			C	C	C
Provinsi Sulawesi Tengah						
374.	Banggai			C	C	C
375.	Banggai Kepulauan			D	D	D
376.	Buol			D	D	D
377.	Donggala	C	C		CC	CC
378.	Morowali			D	C	C
379.	Parigi Moutong		C	C	C	C
380.	Poso			C	C	C
381.	Sigi			C	C	CC



Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
382.	Tojo Una-una	C		C	CC	CC
383.	Tolotoli			D	C	C
384.	Kota Palu				C	C
Provinsi Sulawesi Selatan						
385.	Bantaeng			C	C	C
386.	Barru			C	C	C
387.	Bone			D	C	C
388.	Bulukumba	D		CC	CC	CC
389.	Enrekang		C	CC	CC	CC
390.	Gowa					CC
391.	Jeneponto					
392.	Kep. Selayar			C	C	C
393.	Luwu			C	C	C
394.	Luwu Timur	C		C	C	C
395.	Luwu Utara			C	CC	CC
396.	Maros				C	C
397.	Pangkajene & Kepulauan			C	CC	CC
398.	Pinrang			D	C	C
399.	Sidenreng Rappang			D	C	C
400.	Sinjai			D	C	CC
401.	Soppeng			CC	C	C
402.	Takalar			D	C	CC
403.	Tana Toraja			C	C	C
404.	Toraja Utara			D	D	C
405.	Wajo					
406.	Kota Makassar		C	C	CC	CC
407.	Kota Palopo				C	C
408.	Kota Pare-Pare			D	C	C
Provinsi Sulawesi Tenggara						
409.	Bombana			D	D	
410.	Buton			D		C
411.	Buton Utara			D	D	D
412.	Kolaka			CC	CC	CC
413.	Kolaka Utara			D	C	C
414.	Konawe			C		
415.	Konawe Selatan			D	C	C
416.	Konawe Utara			D	C	C
417.	Muna			C	C	C
418.	Wakatobi			C	CC	CC
419.	Kota Bau-Bau			C	C	C
420.	Kota Kendari				C	C
Provinsi Gorontalo						
421.	Boalemo			C	C	C
422.	Bone Bolango		C	CC	CC	CC
423.	Gorontalo	C		CC	CC	CC
424.	Gorontalo Utara			C	C	C
425.	Pohuwato			CC	CC	CC
426.	Kota Gorontalo	C			CC	CC



Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
	Provinsi Sulawesi Barat					
427.	Majene			C	C	C
428.	Mamasa				D	D
429.	Mamuju				C	C
430.	Mamuju Utara			C	C	C
431.	Polewali Mandar		C	CC	CC	CC
432.	Mamuju Tengah					
	Provinsi Maluku					
433.	Buru	D		C	C	C
434.	Buru Selatan			D		D
435.	Kepulauan Aru			C		C
436.	Maluku Barat Daya					C
437.	Maluku Tengah	C		C	C	C
438.	Maluku Tenggara			C	CC	CC
439.	Maluku Tenggara Barat			C	CC	CC
440.	Seram Bagian Barat					
441.	Seram Bagian Timur			C		C
442.	Kota Ambon			C	C	C
443.	Kota Tual			C	C	C
	Provinsi Maluku Utara					
444.	Halmahera Barat			D		D
445.	Halmahera Selatan				C	D
446.	Halmahera Tengah					D
447.	Halmahera Timur					
448.	Halmahera Utara			C	C	C
449.	Kep. Sula					
450.	Pulau Morotai					
451.	Kota Ternate				C	C
452.	Kota Tidore kepulauan			C	C	C
	Provinsi Papua					
453.	Asmat					D
454.	Biak Numfor				D	D
455.	Boven Digoel					
456.	Deiyai					
457.	Dogiyai					
458.	Intan Jaya					
459.	Jayapura	C		C	D	C
460.	Jayawijaya					D
461.	Keerom			C	C	D
462.	Kep. Yapen					C
463.	Lanny Jaya					D
464.	Mamberamo Raya					D
465.	Mamberamo Tengah					
466.	Mappi					D
467.	Merauke		C	D	C	C
468.	Mimika	C			C	C
469.	Nabire					D
470.	Nduga					

Lanjutan Tabel V.10

No.	Kabupaten/Kota	Predikat Hasil Evaluasi				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
471.	Paniai					
472.	Pegunungan Bintang			D		D
473.	Puncak					
474.	Puncak Jaya					
475.	Sarmi			D		D
476.	Supiori					
477.	Tolikara					
478.	Waropen					
479.	Yahukimo					
480.	Yalimo					
481.	Kota Jayapura			D	C	C
Provinsi Papua Barat						
482.	Fakfak					D
483.	Kaimana			D		D
484.	Manokwari			C		
485.	Maybrat					
486.	Raja Ampat					
487.	Sorong			C	D	C
488.	Sorong Selatan					
489.	Tambrauw					D
490.	Teluk Bintuni					
491.	Teluk Wondama				D	D
492.	Kota Sorong				D	C
493.	Manokwari Selatan					
494.	Pegunungan Arfak					

Sumber : Kementerian PAN RB, 2015

Tabel V.11 Perkembangan Evaluasi Akuntabilitas Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

Predikat	2010	2011	2012	2013	2014
A	0	0	0	0	0
B	1	1	2	4	11
CC	4	8	85	148	172
C	46	27	224	247	240
D	7	4	72	25	37
Jumlah Dievaluasi	58	40	383	424	460
% Akuntabel	9%	23%	23%	36%	40%

Sumber : Kementerian PAN RB, 2015

Tabel V.12 Perkembangan Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Tahun 2008 - 2012

No.	Kategori	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pengalaman Integritas	7,21	6,71	5,70	6,48	6,89
2.	Potensi Integritas	5,96	5,87	4,86	5,97	5,34
3.	Indeks Integritas	6,84	6,50	5,42	6,31	6,37

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013

Tabel V.13 Perkembangan Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga Tahun 2011 - 2014

No.	Kategori	2011	2012	2013	2014
4.	Pengalaman Integritas	6,67	6,93	7,17	7,41
5.	Potensi Integritas	6,13	5,36	6,05	6,83
6.	Indeks Integritas	6,49	6,41	6,80	7,22

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , 2015

Tabel V.14 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Secara Nasional Tahun 2012 – 2013

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
1.	Prov.Aceh	30	1,7867	Sedang	18	2,3148	Tinggi
2.	Kab. Aceh Barat	361	0,8482	Rendah	252	2,1464	Tinggi
3.	Kab. Aceh Barat Daya	343	1,1334	Sedang	213	2,3348	Tinggi
4.	Kab. Aceh Besar	157	2,4072	Tinggi	232	2,2561	Tinggi
5.	Kab. Aceh Jaya	244	1,9436	Sedang	209	2,3539	Tinggi
6.	Kab. Aceh Selatan	176	2,2825	Tinggi	229	2,2628	Tinggi
7.	Kab. Aceh Singkil	178	2,2688	Tinggi	220	2,2972	Tinggi
8.	Kab. Aceh Tamiang	306	1,4634	Sedang	233	2,2404	Tinggi
9.	Kab. Aceh Tengah	302	1,5125	Sedang	188	2,4271	Tinggi
10.	Kab. Aceh Tenggara	334	1,2365	Sedang	304	1,7038	Sedang
11.	Kab. Aceh Timur	284	1,6896	Sedang	259	2,1464	Tinggi
12.	Kab. Aceh Utara	181	2,2502	Tinggi	276	1,9457	Sedang
13.	Kab. Bener Meriah	281	1,7352	Sedang	336	1,4378	Sedang
14.	Kab. Bireuen	196	2,2099	Tinggi	243	2,1875	Tinggi
15.	Kab. Gayo Lues	314	1,4123	Sedang	297	1,7500	Sedang
16.	Kab. Nagan Raya	180	2,2527	Tinggi	179	2,4707	Tinggi
17.	Kab. Pidie	266	1,8287	Sedang	226	2,2972	Tinggi
18.	Kab. Pidie Jaya	280	1,7474	Sedang	327	1,5108	Sedang
19.	Kab. Simeulue	278	1,7505	Sedang	193	2,4014	Tinggi
20.	Kota Banda Aceh	33	2,8271	Tinggi	62	2,3532	Tinggi
21.	Kota Langsa	85	1,6173	Sedang	73	2,1284	Tinggi
22.	Kota Lhokseumawe	78	1,7366	Sedang	77	1,9395	Sedang
23.	Kota Sabang	80	1,7212	Sedang	69	2,2204	Tinggi
24.	Kota Subulussalam	90	1,1481	Sedang	80	1,8080	Sedang
25.	Prov. Sumatera Utara	19	2,1965	Tinggi	11	2,5299	Tinggi
26.	Kab. Asahan	144	2,4655	Tinggi	163	2,5206	Tinggi
27.	Kab. Batubara	298	1,5433	Sedang	189	2,4244	Tinggi
28.	Kab. Dairi	325	1,3029	Sedang	279	1,9028	Sedang
29.	Kab. Deli Serdang	146	2,4560	Tinggi	180	2,4626	Tinggi
30.	Kab. Humbang Hasundutan	39	3,0391	Sangat Tinggi	28	3,0923	Sangat Tinggi
31.	Kab. Karo	296	1,5635	Sedang	255	2,1297	Tinggi
32.	Kab. Labuhan batu	175	2,3022	Tinggi	121	2,7572	Tinggi
33.	Kab. Labuhan batu Selatan				231	2,2561	Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
34.	Kab. Labuhan batu Utara				340	1,3866	Sedang
35.	Kab. Langkat	190	2,2243	Tinggi	261	2,0854	Tinggi
36.	Kab. Mandailing Natal	286	1,6691	Sedang	318	1,5724	Sedang
37.	Kab. Nias	331	1,2640	Sedang	302	1,7246	Sedang
38.	Kab. Nias Barat						
39.	Kab. Nias Selatan	223	2,0836	Tinggi	353	1,1729	Sedang
40.	Kab. Nias Utara						
41.	Kab. Padang Lawas	188	2,2295	Tinggi	142	2,6594	Tinggi
42.	Kab. Padang Lawas Utara	132	2,5403	Tinggi	182	2,4531	Tinggi
43.	Kab. Pakpak Bharat	104	2,7368	Tinggi	42	3,0249	Sangat Tinggi
44.	Kab. Samosir	56	2,9576	Tinggi	67	2,9539	Tinggi
45.	Kab. Serdang Bedagai	135	2,5018	Tinggi	88	2,8701	Tinggi
46.	Kab. Simalungun	213	2,1426	Tinggi	345	1,3108	Sedang
47.	Kab. Tapanuli Selatan	259	1,8780	Sedang	224	2,2791	Tinggi
48.	Kab. Tapanuli Tengah	260	1,8727	Sedang	140	2,6756	Tinggi
49.	Kab. Tapanuli Utara	349	1,0458	Sedang	245	2,1828	Tinggi
50.	Kab. Toba Samosir	147	2,4512	Tinggi	237	2,2284	Tinggi
51.	Kota Binjai	62	2,1901	Tinggi	46	2,7009	Tinggi
52.	Kota Gunung Sitoli						
53.	Kota Medan	50	2,5002	Tinggi	22	2,9956	Tinggi
54.	Kota Padang Sidempuan	67	2,0499	Tinggi	59	2,4619	Tinggi
55.	Kota Pematang Siantar	63	2,1553	Tinggi	66	2,2851	Tinggi
56.	Kota Sibolga	75	1,8044	Sedang	70	2,1885	Tinggi
57.	Kota Tanjung Balai	61	2,2012	Tinggi	68	2,2268	Tinggi
58.	Kota Tebing Tinggi	49	2,5130	Tinggi	65	2,2851	Tinggi
59.	Prov. Sumatera Barat	10	2,4612	Tinggi	20	2,2352	Tinggi
60.	Kab. Agam	129	2,577	Tinggi	334	1,4729	Sedang
61.	Kab. Dharmasraya	172	2,3123	Tinggi	175	2,4841	Tinggi
62.	Kab. Kep. Mentawai	225	2,0681	Tinggi	307	1,6521	Sedang
63.	Kab. Lima Puluh Kota	118	2,6477	Tinggi	275	1,9611	Sedang
64.	Kab. Padang Pariaman	195	2,2136	Tinggi	291	1,7706	Sedang
65.	Kab. Pasaman	4	3,2618	Sangat Tinggi	9	3,2316	Sangat Tinggi
66.	Kab. Pasaman Barat	139	2,4756	Tinggi	159	2,5770	Tinggi
67.	Kab. Pesisir Selatan	228	2,0567	Tinggi	81	2,8885	Tinggi
68.	Kab. Sijunjung	121	2,625	Tinggi	125	2,7289	Tinggi
69.	Kab. Solok	273	1,7759	Sedang	338	1,3990	Sedang
70.	Kab. Solok Selatan	307	1,4536	Sedang	300	1,7400	Sedang
71.	Kab. Tanah Datar	100	2,7492	Tinggi	120	2,7578	Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
72.	Kota Bukittinggi	74	1,8254	Sedang	72	2,1295	Tinggi
73.	Kota Padang	58	2,2428	Tinggi	54	2,5256	Tinggi
74.	Kota Padang Panjang	51	2,4721	Tinggi	79	1,8205	Tinggi
75.	Kota Pariaman	46	2,6054	Tinggi	42	2,7446	Tinggi
76.	Kota Payakumbuh	24	2,9600	Tinggi	47	2,6907	Tinggi
77.	Kota Sawahlunto	18	3,0303	Sangat Tinggi	33	2,8501	Tinggi
78.	Kota Solok	19	3,0248	Sangat Tinggi	21	2,9980	Tinggi
79.	Prov. Riau	25	1,9955	Sedang	29	2,0266	Tinggi
80.	Kab. Bengkalis	87	2,8139	Tinggi	128	2,7181	Tinggi
81.	Kab. Indragiri Hilir	179	2,2618	Tinggi	288	1,8035	Sedang
82.	Kab. Indragiri Hulu	115	2,6676	Tinggi	246	2,1828	Tinggi
83.	Kab. Kampar	316	1,3941	Sedang	357	1,0977	Sedang
84.	Kab. Kepulauan Meranti	299	1,5354	Sedang	344	1,3241	Sedang
85.	Kab. Kuantan Singingi	145	2,4649	Tinggi	219	2,3058	Tinggi
86.	Kab. Pelalawan	269	1,7999	Sedang	306	1,6792	Sedang
87.	Kab. Rokan Hilir				262	2,0663	Tinggi
88.	Kab. Rokan Hulu	311	1,4250	Sedang	348	1,2454	Sedang
89.	Kab. Siak	117	2,6652	Tinggi	19	3,1334	Sangat Tinggi
90.	Kota Dumai	66	2,0986	Tinggi	71	2,1885	Tinggi
91.	Kota Pekanbaru	83	1,6580	Sedang	84	1,5915	Sedang
92.	Prov. Jambi	17	2,2188	Tinggi	17	2,3222	Tinggi
93.	Kab. Batang Hari	122	2,6239	Tinggi	157	2,5986	tinggi
94.	Kab. Bungo	45	3,0017	Sangat tinggi	80	2,8911	Tinggi
95.	Kab. Kerinci	300	1,5205	Sedang	238	2,2221	Tinggi
96.	Kab. Merangin	252	1,9064	Sedang	69	2,9343	Tinggi
97.	Kab. Muaro Jambi	276	1,7587	Sedang	161	2,5603	Tinggi
98.	Kab. Sarolangun	246	1,9378	Sedang	138	2,6906	Tinggi
99.	Kab. Tanjung Jabung Barat	272	1,7857	Sedang	192	2,4127	Tinggi
100.	Kab. Tanjung Jabung Timur	216	2,1307	Tinggi	268	2,0245	Tinggi
101.	Kab. Tebo	248	1,9331	Sedang	267	2,0356	Tinggi
102.	Kota Jambi	70	2,0018	Tinggi	82	1,5915	Sedang
103.	Kota Sungai Penuh	48	2,5136	Tinggi	44	2,7177	Tinggi
104.	Prov. Sumatera Selatan	13	2,2961	Tinggi	12	2,5298	Tinggi
105.	Kab. Banyuasin	97	2,7559	Tinggi	115	2,7700	Tinggi
106.	Kab. Empat Lawang	141	2,4692	Tinggi	186	2,4319	Tinggi
107.	Kab. Lahat	130	2,556	Tinggi	152	2,6294	Tinggi
108.	Kab. Muara Enim	70	2,9157	Tinggi	24	3,1037	Sangat Tinggi
109.	Kab. Musi Banyuasin	63	2,9441	Tinggi	59	2,9795	Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
110.	Kab. Musi Rawas	182	2,2484	Tinggi	83	2,8859	Tinggi
111.	Kab. Musi Rawas Utara						
112.	Kab. Ogan Ilir	107	2,7199	Tinggi	143	2,6578	Tinggi
113.	Kab. Ogan Komering Ilir	110	2,6911	Tinggi	113	2,7810	Tinggi
114.	Kab. Ogan Komering Ulu	214	2,1366	Tinggi	172	2,4942	Tinggi
115.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	112	2,6736	Tinggi			
116.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	204	2,1745	Tinggi	256	2,1240	Tinggi
117.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir						
118.	Kab. Oku selatan				176	2,4795	Tinggi
119.	Kota Lubuk Linggau	52	2,4695	Tinggi	24	2,9772	Tinggi
120.	Kota Pagaralam	56	2,2698	Tinggi	61	2,3532	Tinggi
121.	Kota Palembang	42	2,6743	Tinggi	51	2,6020	Tinggi
122.	Kota Prabumulih	47	2,5486	Tinggi	48	2,6711	Tinggi
123.	Prov. Bengkulu	24	2,0580	Tinggi	26	2,1177	Tinggi
124.	Kab. Bengkulu Selatan	243	1,9528	Sedang	323	1,5296	Sedang
125.	Kab. Bengkulu Tengah	218	2,1123	Tinggi	292	1,7696	Sedang
126.	Kab. Bengkulu Utara	168	2,3271	Tinggi	271	1,9920	Sedang
127.	Kab. Kaur	171	2,3153	Tinggi	101	2,8074	Tinggi
128.	Kab. Kepahiang	318	1,3670	Sedang	242	2,1957	Tinggi
129.	Kab. Lebong	241	1,9687	Sedang	136	2,7011	Tinggi
130.	Kab. Muko muko	233	2,0285	Tinggi	151	2,6338	Tinggi
131.	Kab. Rejang Lebong	288	1,6483	Sedang	196	2,3934	Tinggi
132.	Kab. Seluma	291	1,623	Sedang	366	0,9900	Rendah
133.	Kota Bengkulu	79	1,7248	Sedang	86	1,4748	Sedang
134.	Prov. Lampung	29	1,8189	Sedang	15	2,4001	Tinggi
135.	Kab. Lampung Barat	344	1,1300	Sedang	77	2,9010	Tinggi
136.	Kab. Lampung Selatan	256	1,885	Sedang	247	2,1699	Tinggi
137.	Kab. Lampung Tengah	102	2,7393	Tinggi	210	2,3523	Tinggi
138.	Kab. Lampung Timur	164	2,3583	Tinggi	286	1,8315	Sedang
139.	Kab. Lampung Utara	192	2,2172	Tinggi	284	1,8429	Sedang
140.	Kab. Mesuji						
141.	Kab. Pesawaran	236	2,0054	Tinggi	183	2,4392	Tinggi
142.	Kab. Pesisir Barat						
143.	Kab. Pringsewu						
144.	Kab. Tanggamus	350	1,0412	Sedang	258	2,1211	Tinggi
145.	Kab. Tulang Bawang	303	1,5100	Sedang	281	1,8790	Sedang



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
146.	Kab.Tulang Bawang Barat						
147.	Kab. Way Kanan	140	2,4717	Tinggi	230	2,2575	Tinggi
148.	Kota Bandar Lampung	35	2,8049	Tinggi	59	2,3586	Tinggi
149.	Kota Metro	91	0,9733	Rendah	83	1,5915	Sedang
150.	Prov. Bangka Belitung	12	2,3393	Tinggi	14	2,4294	Tinggi
151.	Kab. Bangka	165	2,3581	Tinggi	221	2,2958	Tinggi
152.	Kab. Bangka Barat	138	2,4776	Tinggi	222	2,2845	Tinggi
153.	Kab. Bangka Selatan	189	2,2264	Tinggi	316	1,6139	Sedang
154.	Kab. Bangka Tengah	159	2,3973	Tinggi	53	2,9977	Tinggi
155.	Kab. Belitung	148	2,4493	Tinggi	181	2,4568	Tinggi
156.	Kab. Belitung Timur	57	2,9551	Tinggi	54	2,9948	Tinggi
157.	Kota Pangkal Pinang	53	2,4173	Tinggi	35	2,8405	Tinggi
158.	Prov. Kepulauan Riau	5	2,6900	Tinggi	4	2,7587	Tinggi
159.	Kab. Bintan	30	3,0667	Sangat Tinggi	15	3,1815	Sangat Tinggi
160.	Kab. Karimun	38	3,0428	Sangat Tinggi	78	2,9009	Tinggi
161.	Kab. Kepulauan Anambas	161	2,3777	Tinggi	156	2,6027	Tinggi178
162.	Kab. Lingga	205	2,1720	Tinggi	130	2,7174	Tinggi
163.	Kab. Natuna	124	2,606	Tinggi	139	2,6821	tinggi
164.	Kota Batam	39	2,7631	Tinggi	16	3,0479	Sangat Tinggi
165.	Kota Tanjung Pinang	32	2,8426	Tinggi	14	3,0774	Sangat Tinggi
166.	Prov. DKI Jakarta	6	2,6620	Tinggi	8	2,6718	Tinggi
167.	Prov. Jawa Barat	4	2,6934	Tinggi	5	2,7267	Tinggi
168.	Kab. Bandung	234	2,0184	Tinggi	87	2,8833	Tinggi
169.	Kab. Bandung Barat	69	2,9166	Tinggi	114	2,7734	Tinggi
170.	Kab. Bekasi	177	2,2808	Tinggi	62	2,9759	Tinggi
171.	Kab. Bogor	11	3,1874	Sangat Tinggi	84	2,8833	Tinggi
172.	Kab. Ciamis	12	3,1846	Sangat Tinggi	71	2,9283	Tinggi
173.	Kab. Cianjur	79	2,8605	Tinggi	95	2,8461	Tinggi
174.	Kab. Cirebon	123	2,6134	Tinggi	57	2,9835	Tinggi
175.	Kab. Garut	113	2,6706	Tinggi	29	3,0843	Sangat Tinggi
176.	Kab. Indramayu	103	2,7384	Tinggi	145	2,6578	Tinggi
177.	Kab. Karawang	150	2,4410	Tinggi	124	2,7297	Tinggi
178.	Kab. Kuningan	217	2,1279	Tinggi	289	1,7979	Sedang
179.	Kab. Majalengka	119	2,6281	Tinggi	97	2,8356	Tinggi
180.	Kab. Pangandaran						
181.	Kab. Purwakarta	74	2,8982	Tinggi	184	2,4333	Tinggi
182.	Kab.Subang	109	2,6921	Tinggi	58	2,9818	Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
183.	Kab.Sukabumi	34	3,0523	Sangat Tinggi	46	3,0156	Sangat Tinggi
184.	Kab. Sumedang	158	2,4028	Tinggi	329	1,4839	Sedang
185.	Kab. Tasikmalaya	75	2,891	Tinggi	277	1,9283	Sedang
186.	Kota Bandung	23	2,9610	Tinggi	15	3,0606	Sangat Tinggi
187.	Kota Banjar	36	2,7947	Tinggi	25	2,9535	Tinggi
188.	Kota Bekasi	31	2,8430	Tinggi	27	2,9434	Tinggi
189.	Kota Bogor	37	2,7811	Tinggi	50	2,6329	Tinggi
190.	Kota Cimahi	26	2,9543	Tinggi	8	3,1095	Sangat Tinggi
191.	Kota Cirebon	34	2,8232	Tinggi	19	3,0318	Sangat Tinggi
192.	Kota Depok	9	3,1212	Sangat Tinggi	10	3,0926	Sangat Tinggi
193.	Kota Sukabumi	30	2,8960	Tinggi	17	3,0366	Sangat Tinggi
194.	Kota Tasikmalaya	64	2,1057	Tinggi	33	2,8501	Tinggi
195.	Prov. Jawa Tengah	2	2,8963	Tinggi	2	2,9217	Tinggi
196.	Kab. Banjarnegara	120	2,6264	Tinggi	48	3,0109	Sangat Tinggi
197.	Kab. Banyumas	90	2,8087	Tinggi	13	3,2067	Sangat Tinggi
198.	Kab. Batang	54	2,9729	Tinggi	178	2,4716	tinggi
199.	Kab. Blora	68	2,9177	Tinggi	32	3,0565	Sangat Tinggi
200.	Kab. Boyolali	52	2,9773	Tinggi	45	3,0193	Sangat tinggi
201.	Kab. Brebes	262	1,8489	Sedang	111	2,7908	tinggi
202.	Kab. Cilacap	94	2,7713	Tinggi	49	3,0047	Sangat Tinggi
203.	Kab. Demak	76	2,8818	Tinggi	56	2,9844	Tinggi
204.	Kab. Grobogan	62	2,9468	Tinggi	147	2,6521	Tinggi
205.	Kab. Jepara	3	3,2739	Sangat Tinggi	92	2,8597	Tinggi
206.	Kab. Karanganyar	77	2,8799	Tinggi	204	2,3659	Tinggi
207.	Kab. Kebumen	28	3,0839	Sangat Tinggi	112	2,7860	Tinggi
208.	Kab. Kendal	42	3,0301	Sangat Tinggi	109	2,7940	Tinggi
209.	Kab. Klaten	108	2,7022	Tinggi	122	2,7472	Tinggi
210.	Kab. Kudus	105	2,7318	Tinggi	31	3,0795	Sangat Tinggi
211.	Kab. Magelang	89	2,8088	Tinggi	207	2,3575	Tinggi
212.	Kab. Pati	37	3,0470	Sangat Tinggi	33	3,0545	Sangat tinggi
213.	Kab. Pekalongan	60	2,9524	Tinggi	239	2,2129	Tinggi
214.	Kab.Pemalang	47	2,9992	Tinggi	20	3,1310	Sangat Tinggi
215.	Kab. Purbalingga	6	3,2406	Sangat Tinggi	3	3,3013	Sangat Tinggi
216.	Kab. Purworejo	53	2,9731	Tinggi	104	2,8032	Tinggi
217.	Kab. Rembang	19	3,1367	Sangat Tinggi	96	2,8359	Tinggi
218.	Kab. Semarang	48	2,9938	Tinggi	17	3,1396	Sangat tinggi
219.	Kab. Sragen	93	2,7772	Tinggi	162	2,5425	Tinggi
220.	Kab. Sukoharjo	26	3,0895	Sangat Tinggi	91	2,8692	Tinggi
221.	Kab. Tegal	136	2,4871	Tinggi	313	1,6203	Sedang





Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
222.	Kab. Temanggung	13	3,1489	Sangat Tinggi	26	3,1004	Sangat Tinggi
223.	Kab. Wonogiri	116	2,6657	Tinggi	132	2,7132	Tinggi
224.	Kab. Wonosobo	32	3,0559	Sangat Tinggi	249	2,1622	Tinggi
225.	Kota Magelang	45	2,6260	Tinggi	58	2,4654	Tinggi
226.	Kota Pekalongan	25	2,9579	Tinggi	39	2,7967	Tinggi
227.	Kota Salatiga	10	3,1126	Sangat Tinggi	13	3,0828	Sangat Tinggi
228.	Kota Semarang	1	3,2950	Sangat Tinggi	7	3,2246	Tinggi
229.	Kota Surakarta	3	3,1805	Sangat Tinggi	26	2,9521	Tinggi
230.	Kota Tegal	7	3,1292	Sangat Tinggi	57	2,4791	Tinggi
231.	Prov. DI Yogyakarta	8	2,4930	Tinggi	3	2,7669	Tinggi
232.	Kab. Bantul	86	2,8177	Tinggi	8	3,2526	Sangat Tinggi
233.	Kab. Gunung Kidul	173	2,3073	Tinggi	66	2,9575	Tinggi
234.	Kab. Kulon Progo	1	3,3465	Sangat Tinggi	4	3,3013	Sangat Tinggi
235.	Kab. Sleman	5	3,2614	Sangat Tinggi	5	3,2581	Sangat Tinggi
236.	Kota Yogyakarta	15	3,0620	Sangat Tinggi	9	3,0938	Sangat tinggi
237.	Prov. Jawa Timur	1	3,0576	Sangat Tinggi	1	3,0519	Sangat Tinggi
238.	Kab. Bangkalan	8	3,2089	Sangat Tinggi	11	3,2287	Sangat Tinggi
239.	Kab. Banyuwangi	16	3,1452	Sangat Tinggi	39	3,0364	Sangat Tinggi
240.	Kab. Blitar	35	3,0510	Sangat Tinggi	51	3,0013	Sangat Tinggi
241.	Kab. Bojonegoro	22	3,1208	Sangat Tinggi	85	2,8799	Tinggi
242.	Kab. Bondowoso	40	3,0381	Sangat Tinggi	68	2,9410	Tinggi
243.	Kab. Gresik	21	3,1222	Sangat Tinggi	55	2,9927	Tinggi
244.	Kab. Jember	111	2,6823	Tinggi	61	2,9781	Tinggi
245.	Kab. Jombang	10	3,1910	Sangat Tinggi	14	3,1934	Sangat Tinggi
246.	Kab. Kediri	36	3,0487	Sangat Tinggi			
247.	Kab. Lamongan	20	3,1228	Sangat Tinggi	2	3,3766	Sangat Tinggi
248.	Kab. Lumajang	24	3,0926	Sangat Tinggi	47	3,0147	Sangat tinggi
249.	Kab. Madiun	49	2,9913	Tinggi	118	2,7629	Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
250.	Kab. Magetan	50	2,9911	Tinggi	82	2,8879	Tinggi
251.	Kab. Malang	95	2,7696	Tinggi	60	2,9784	Tinggi
252.	Kab. Mojokerto	41	3,0323	Sangat Tinggi	35	3,0498	Sangat Tinggi
253.	Kab. Nganjuk	99	2,7506	Tinggi	76	2,9038	Tinggi
254.	Kab. Ngawi	58	2,9547	Tinggi	41	3,0333	Sangat Tinggi
255.	Kab. Pacitan	7	3,2400	Sangat Tinggi	25	3,1020	Sangat Tinggi
256.	Kab. Pamekasan	23	3,1159	Sangat Tinggi	74	2,9261	Tinggi
257.	Kab. Pasuruan	46	3,0001	Sangat Tinggi	40	3,0352	Sangat Tinggi
258.	Kab. Ponogoro	15	3,1455	Sangat Tinggi	72	2,9274	Tinggi
259.	Kab. Probolinggo	91	2,8039	Tinggi	149	2,6413	Tinggi
260.	Kab. Sampang	27	3,0856	Sangat Tinggi	37	3,0446	Sangat Tinggi
261.	Kab. Sidoarjo	17	3,1415	Sangat Tinggi	7	3,2526	Sangat Tinggi
262.	Kab. Situbondo	33	3,0525	Sangat Tinggi	137	2,6916	Tinggi
263.	Kab. Sumenep	84	2,849	Tinggi	90	2,8695	tinggi
264.	Kab. Trenggalek	43	3,0183	Sangat Tinggi	75	2,9144	Tinggi
265.	Kab. Tuban	9	3,2079	Sangat Tinggi	1	3,3879	Sangat Tinggi
266.	Kab. Tulungagung	25	3,0918	Sangat Tinggi	12	3,2104	Sangat Tinggi
267.	Kota Batu	40	2,7115	Tinggi	28	2,9396	Tinggi
268.	Kota Blitar	17	3,0369	Sangat Tinggi	2	3,3340	Sangat Tinggi
269.	Kota Kediri	14	3,0827	Sangat Tinggi	23	2,9859	Tinggi
270.	Kota Madiun	2	3,2157	Sangat Tinggi	1	3,3702	Sangat Tinggi
271.	Kota Malang	11	3,1045	Sangat Tinggi	30	2,9119	Tinggi
272.	Kota Mojokerto	6	3,1473	Sangat Tinggi	4	3,3248	Sangat Tinggi
273.	Kota Pasuruan	12	3,0940	Sangat Tinggi	18	3,0318	Sangat Tinggi
274.	Kota Probolinggo	4	3,1601	Sangat Tinggi	3	3,3248	Sangat tinggi
275.	Kota Surabaya	13	3,0918	Sangat Tinggi	5	3,2898	Sangat tinggi
276.	Prov. Banten	20	2,1961	Tinggi	23	2,1358	Tinggi
277.	Kab. Lebak	338	1,1942	Sedang	244	2,1869	Tinggi
278.	Kab. Pandeglang	279	1,7483	Sedang	43	3,0228	Sangat Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
279.	Kab. Serang	29	3,0763	Sangat Tinggi	131	2,7143	Tinggi
280.	Kab. Tangerang	80	2,8569	Tinggi	93	2,8562	Tinggi
281.	Kota Cilegon	28	2,9260	Tinggi	59	2,4619	Tinggi
282.	Kota Serang	44	2,6335	Tinggi	88	1,4409	Sedang
283.	Kota Tangerang	5	3,1533	Sangat Tinggi	32	2,8789	Tinggi
284.	Kota Tangerang Selatan						
285.	Prov. Bali	28	1,8767	Sedang	31	1,5958	Sedang
286.	Kab. Badung	322	1,3153	Sedang	205	2,3659	Tinggi
287.	Kab. Bangli	366	0,7093	Rendah	324	1,5284	Sedang
288.	Kab. Buleleng	92	2,7829	Tinggi	174	2,4875	Tinggi
289.	Kab. Gianyar	229	2,0505	Tinggi	106	2,7986	tinggi
290.	Kab. Jembrana	114	2,6704	Tinggi	305	1,6959	Sedang
291.	Kab. Karangasem	312	1,4245	Sedang	358	1,0942	Sedang
292.	Kab. Klungkung	83	2,8524	Tinggi	73	2,9268	Tinggi
293.	Kab. Tabanan	133	2,5262	Tinggi	169	2,4978	Tinggi
294.	Kota Denpasar	41	2,6986	Tinggi	64	2,3008	Tinggi
295.	Prov. Nusa Tenggara Barat	18	2,1986	Tinggi	9	2,5953	Tinggi
296.	Kab. Bima	154	2,4250	Tinggi	191	2,4187	Tinggi
297.	Kab. Dompu	149	2,4466	Tinggi	250	2,1502	Tinggi
298.	Kab. Lombok Barat	64	2,9325	Tinggi	116	2,7695	Tinggi
299.	Kab. Lombok Tengah	261	1,8554	Sedang	105	2,7999	Tinggi
300.	Kab. Lombok Timur	153	2,4302	Tinggi	287	1,8220	Sedang
301.	Kab. Lombok Utara	203	2,1787	Tinggi	173	2,4921	Tinggi
302.	Kab. Sumbawa	245	1,9404	Sedang	16	3,1815	Sangat Tinggi
303.	Kab. Sumbawa Barat	201	2,1859	Tinggi	160	2,5612	Tinggi
304.	Kota Bima	88	1,5233	Sedang	52	2,5671	Tinggi
305.	Kota Mataram	29	2,9239	Tinggi	49	2,6507	Tinggi
306.	Prov. Nusa Tenggara Timur	31	1,7313	Sedang	28	2,0819	Tinggi
307.	Kab. Alor	174	2,3050	Tinggi	200	2,3782	Tinggi
308.	Kab. Belu	353	0,9588	Rendah	325	1,5197	Sedang
309.	Kab. Ende	371	0,5291	Rendah	290	1,7889	Sedang
310.	Kab. Flores Timur	352	0,9825	Rendah	295	1,7543	Sedang
311.	Kab. Kupang	184	2,2428	Tinggi			
312.	Kab. Lembata	354	0,9529	Rendah	214	2,3278	Tinggi
313.	Kab. Malaka						
314.	Kab. Manggarai	209	2,1502	Tinggi	123	2,7472	Tinggi
315.	Kab. Manggarai Barat				119	2,7629	Tinggi
316.	Kab. Manggarai Timur	155	2,4236	Tinggi	206	2,3579	Tinggi
317.	Kab. Nagekeo	167	2,3279	Tinggi	211	2,3491	Tinggi
318.	Kab. Ngada	363	0,7524	Rendah	337	1,4058	Sedang



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
319.	Kab. Rote Ndao	231	2,0440	Tinggi	199	2,3802	Tinggi
320.	Kab. Sabu Raijua				241	2,2048	Tinggi
321.	Kab. Sikka	365	0,7187	Rendah	127	2,7213	Tinggi
322.	Kab. Sumba Barat	211	2,148	Tinggi	253	2,1430	Tinggi
323.	Kab. Sumba Darat Daya	271	1,7866	Sedang	328	1,4942	Sedang
324.	Kab. Sumba Tengah	270	1,7903	Sedang	298	1,7451	Sedang
325.	Kab. Sumba Timur	194	2,2144	Tinggi	312	1,6210	Sedang
326.	Kab. Timor Tengah Selatan	356	0,9290	Rendah	265	2,0414	Tinggi
327.	Kab. Timor Tengah Utara	186	2,2366	Tinggi	198	2,3821	Tinggi
328.	Kota Kupang	65	2,1003	Tinggi	55	2,5021	Tinggi
329.	Prov. Kalimantan Barat	22	2, 1457	Tinggi	16	2,3828	Tinggi
330.	Kab. Bengkayang	264	1,8397	Sedang	177	2,4731	Tinggi
331.	Kab. Kapuas hulu	187	2,2352	Tinggi	168	2,5001	Tinggi
332.	Kab. Kayong Utara	327	1,2869	Sedang	332	1,4766	Sedang
333.	Kab. Ketapang	220	2,1018	Tinggi	349	1,2454	Sedang
334.	Kab. Kubu Raya	321	1,3545	Sedang	333	1,4729	Sedang
335.	Kab. Landak	162	2,3751	Tinggi	117	2,7650	Tinggi
336.	Kab. Melawi	206	2,1713	Tinggi	272	1,9919	Sedang
337.	Kab. Pontianak	198	2,1952	Tinggi	197	2,3893	Tinggi
338.	Kab. Sambas	313	1,4200	Sedang	225	2,2766	tinggi
339.	Kab. Sanggau	221	2,1011	Tinggi	194	2,4005	Tinggi
340.	Kab. Sekadau	283	1,7023	Sedang	195	2,3991	Tinggi
341.	Kab. Sintang	247	1,9354	Sedang	70	2,9283	Tinggi
342.	Kota Pontianak	27	2,9307	Tinggi	38	2,7996	Tinggi
343.	Kota Singkawang	76	1,7772	Sedang	78	1,9395	Sedang
344.	Prov. Kalimantan Tengah	9	2,4894	Tinggi	27	2,1054	Tinggi
345.	Kab. Barito Selatan	254	1,8929	Sedang	99	2,8349	Tinggi
346.	Kab. Barito Timur	335	1,2136	Sedang	257	2,1217	Tinggi
347.	Kab. Barito Utara	359	0,8588	Rendah	227	2,2762	Tinggi
348.	Kab. Gunung Mas	208	2,1533	Tinggi	223	2,2796	Tinggi
349.	Kab. Kapuas	332	1,2631	Sedang	167	2,5006	Tinggi
350.	Kab. Katingan	268	1,8041	Sedang	185	2,4329	Tinggi
351.	Kab. Kotawaringin Barat	151	2,4381	Tinggi	311	1,6286	Sedang
352.	Kab. Kotawaringin Timur	237	2,0042	Tinggi	254	2,1423	Tinggi
353.	Kab. Lamandau	239	1,9763	Sedang	235	2,2341	Tinggi
354.	Kab. Murung Raya	191	2,2205	Tinggi	274	1,9659	Sedang
355.	Kab. Pulang Pisang	317	1,3744	Sedang	141	2,6743	Tinggi
356.	Kab. Seruyan	183	2,2441	Tinggi	171	2,4943	Tinggi
357.	Kab. Sukamara	199	2,1907	Tinggi	301	1,7258	Sedang
358.	Kota Palangkaraya	89	1,2890	Sedang	75	2,0071	Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
359.	Prov. Kalimantan Selatan	11	2,4338	Tinggi	13	2,4809	Tinggi
360.	Kab. Balangan	106	2,7273	Tinggi	146	2,6528	Tinggi
361.	Kab. Banjar	78	2,8688	Tinggi	153	2,6210	Tinggi
362.	Kab. Barito Kuala	67	2,9251	Tinggi	110	2,7939	tinggi
363.	Kab. Hulu Sungai Selatan	55	2,9706	Tinggi	64	2,9757	Tinggi
364.	Kab. Hulu Sungai Tengah	156	2,4073	Tinggi	158	2,5892	Tinggi
365.	Kab. Hulu Sungai Utara	101	2,7469	Tinggi	38	3,0420	Sangat Tinggi
366.	Kab. Kotabaru	98	2,7518	Tinggi	94	2,8469	Tinggi
367.	Kab. Tabalong	249	1,9242	Sedang	283	1,8485	Sedang
368.	Kab. Tanah Bumbu	85	2,8361	Tinggi	34	3,0506	Sangat Tinggi
369.	Kab. Tanah Laut	143	2,4662	Tinggi	216	2,3252	Tinggi
370.	Kab. Tapin	96	2,7627	Tinggi	135	2,7039	Tinggi
371.	Kota Banjarbaru	54	2,3993	Tinggi	37	2,8061	Tinggi
372.	Kota Banjarmasin	57	2,2487	Tinggi	31	2,8935	Tinggi
373.	Prov. Kalimantan Timur	7	2,5914	Tinggi	7	2,6718	Tinggi
374.	Kab. Berau	61	2,9506	Tinggi	27	3,0936	Sangat tinggi
375.	Kab. Kutai Barat	142	2,4662	Tinggi	126	2,7241	Tinggi
376.	Kab. Kutai Kartanegara	14	3,1468	Sangat tinggi	10	3,2289	Sangat Tinggi
377.	Kab. Kutai Timur	152	2,4306	Tinggi	107	2,7983	Tinggi
378.	Kab. Paser	207	2,1570	Tinggi	131	2,7174	Tinggi
379.	Kab. Penajam Paser Utara	125	2,604	Tinggi	103	2,8036	Tinggi
380.	Kab. Mahakam Hulu						
381.	Kota Balikpapan	8	3,1278	Sangat tinggi	11	3,0872	Sangat Tinggi
382.	Kota Bontang	16	3,0378	Sangat tinggi	12	3,0829	Sangat Tinggi
383.	Kota Samarinda	20	2,9782	Tinggi	6	3,2332	Sangat Tinggi
384.	Prov. Kalimantan utara	-	-	-	-	-	-
385.	Kab. Bulungan	65	2,9273	Tinggi	102	2,8037	Tinggi
386.	Kab. Malinau	73	2,9015	Tinggi	86	2,8777	Tinggi
387.	Kab. Nunukan	125	2,604	Tinggi	100	2,8129	Tinggi
388.	Kab. Tana Tidung	134	2,5099	Tinggi	326	1,5197	Sedang
389.	Kota Tarakan	21	2,9765	Tinggi	41	2,7672	Tinggi
390.	Prov Sulawesi Utara	14	2,2822	Tinggi	24	2,1284	Tinggi
391.	Kab. Bolaang Mongondow	362	0,8254	Rendah	377	0,6904	Rendah
392.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan				350	1,2325	Sedang



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
393.	Kab. Bolaang Mongondow Timur				368	0,9628	Rendah
394.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	200	2,1903	Tinggi	187	2,4304	Tinggi
395.	Kab. Kepulauan Sangihe	360	0,8536	Rendah	299	1,7402	Sedang
396.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	348	1,0529	Sedang			
397.	Kab. Kepulauan Taulad	308	1,4514	Sedang	285	1,8388	Sedang
398.	Kab. Minahasa	212	2,1474	Tinggi	359	1,0907	Sedang
399.	Kab. Minahasa Selatan	324	1,3049	Sedang	308	1,6422	Sedang
400.	Kab. Minahasa Tenggara	341	1,1763	Sedang	218	2,3134	Tinggi
401.	Kab. Minahasa Utara	347	1,0710	Sedang	346	1,2944	Sedang
402.	Kab. Kepulauan sitaro				369	0,9535	Rendah
403.	Kota Bitung	73	1,8323	Sedang	89	1,3804	Sedang
404.	Kota Kotamobagu	86	1,6026	Sedang	90	1,0027	Sedang
405.	Kota Manado	22	2,9759	Tinggi	46	2,7001	Tinggi
406.	Kota Tomohon	82	1,6852	Sedang	74	2,0793	Tinggi
407.	Prov. Sulawesi Tengah	15	2,2540	Tinggi	25	2,1267	Tinggi
408.	Kab. Banggai	210	2,1494	Tinggi	330	1,4832	Sedang
409.	Kab. Banggai Kepulauan	263	1,8465	Sedang	264	2,0535	Tinggi
410.	Kab. Banggai Laut						
411.	Kab. Buol	346	1,0900	Sedang	371	0,8849	Rendah
412.	Kab. Donggala	127	2,5948	Tinggi	236	2,1335	Tinggi
413.	Kab. Morowali	301	1,5134	Sedang	363	1,0574	Sedang
414.	Kab. Morowali Utara						
415.	Kab. Parigi Moutong	131	2,5503	Tinggi	165	2,5157	Tinggi
416.	Kab. Poso	287	1,6610	Sedang	381	0,6125	Rendah
417.	Kab. Sigi				362	1,0629	Sedang
418.	Kab. Tojo Una-Una	250	1,9212	Sedang	170	2,4946	Tinggi
419.	Kab. Tolitoli	251	1,9143	Sedang	278	1,9131	Sedang
420.	Kota Palu	69	2,0021	Tinggi	67	2,2372	Tinggi
421.	Prov. Sulawesi Selatan	3	2,7260	Tinggi	6	2,6905	Tinggi
422.	Kab. Bantaeng	163	2,3646	Tinggi	89	2,8698	Tinggi
423.	Kab. Barru	59	2,9524	Tinggi	63	2,9757	Tinggi
424.	Kab. Bone	51	2,9808	Tinggi	44	3,0218	Sangat Tinggi
425.	Kab. Bulukumba	226	2,0671	Tinggi	50	3,0028	Sangat Tinggi
426.	Kab. Enrekang	82	2,8526	Tinggi	212	2,3411	Tinggi
427.	Kab. Gowa	2	3,2897	Sangat Tinggi	18	3,1369	Sangat Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
428.	Kab. Jeneponto	364	0,7198	Rendah	315	1,6157	Sedang
429.	Kab. Kep. Selayar	330	1,2667	Sedang	150	2,6370	Tinggi
430.	Kab. Luwu	253	1,8996	Sedang	296	1,7533	Sedang
431.	Kab. Luwu Timur	18	3,1410	Sangat Tinggi	30	3,0811	Sangat Tinggi
432.	Kab. Luwu Utara	31	3,0573	Sangat Tinggi	23	3,1072	Sangat Tinggi
433.	Kab. Maros	238	1,9865	Sedang	100	2,8129	Tinggi
434.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	219	2,1108	Tinggi	228	2,2635	Tinggi
435.	Kab. Pinrang	242	1,9566	Sedang	6	3,2557	Sangat Tinggi
436.	Kab. Sindereng Rappang	240	1,9712	Sedang	65	2,9608	Tinggi
437.	Kab. Sinjai	81	2,8532	Tinggi	108	2,7967	Tinggi
438.	Kab. Soppeng	71	2,9118	Tinggi	79	2,8999	Tinggi
439.	Kab. Takalar	193	2,2145	Tinggi	164	2,5203	Tinggi
440.	Kab. Tana Toraja	72	2,9082	Tinggi	21	3,1229	Sangat Tinggi
441.	Kab. Toraja Utara				134	2,7039	Tinggi
442.	Kab. Wajo	169	2,3260	Tinggi	293	1,7670	Sedang
443.	Kota Makassar	55	2,056	Tinggi	36	2,8154	Tinggi
444.	Kota Palopo	43	2,468	Tinggi	63	2,3027	Tinggi
445.	Kota Pare-Pare	38	2,769	Tinggi	20	3,0126	Sangat Tinggi
446.	Prov. Sulawesi Tenggara	27	1,8989	Sedang	19	2,2684	Tinggi
447.	Kab. Bombana	333	1,2502	Sedang	273	1,9669	Sedang
448.	Kab. Buton	275	1,7600	Sedang	148	2,6477	Tinggi
449.	Kab. Buton Utara	372	0,4536	Rendah	317	1,5819	Sedang
450.	Kab. Kolaka	339	1,1845	Sedang	202	2,3677	Tinggi
451.	Kab. Kolaka Utara	224	2,0823	Tinggi	155	2,6176	Tinggi
452.	Kab. Kolaka Timur						
453.	Kab. Konawe	370	0,5748	Rendah	314	1,6169	Sedang
454.	Kab. Konawe Selatan	282	1,7348	Sedang	321	1,5470	Sedang
455.	Kab. Konawe Utara	373	0,1656	Rendah	374	0,8567	Rendah
456.	Kab. Muna	128	2,5876	Tinggi	217	2,3134	Tinggi
457.	Kab. Wakatobi	351	1,0285	Sedang	133	2,7132	Tinggi
458.	Kota Bau-Bau	77	1,7679	Sedang	91	0,8310	Rendah
459.	Kota Kendari	87	1,5992	Sedang	40	2,7734	Tinggi
460.	Prov. Gorontalo	16	2,2263	Tinggi	10	2,5310	Tinggi
461.	Kab. Boalemo	137	2,4859	Tinggi	144	2,6578	Tinggi
462.	Kab. Bone Bolango	215	2,1364	Tinggi	203	2,3671	Tinggi
463.	Kab. Gorontalo	66	2,9270	Tinggi	36	3,0465	Sangat tinggi
464.	Kab. Gorontalo Utara	319	1,3646	Sedang	154	2,6198	Tinggi
465.	Kab. Pohuwato	44	3,0066	Sangat Tinggi	22	3,1228	Sangat Tinggi
466.	Kota Gorontalo	68	2,0471	Tinggi	29	2,9234	Tinggi



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
467.	Prov. Sulawesi Barat	21	2,1653	Tinggi	21	2,2301	Tinggi
468.	Kab. Majene	88	2,8106	Tinggi	190	2,4230	Tinggi
469.	Kab. Mamasa	340	1,1796	Sedang	166	2,5157	Tinggi
470.	Kab. Mamuju	160	2,3819	Tinggi	260	2,0970	Tinggi
471.	Kab. Mamuju Utara	222	2,0868	Tinggi	251	2,1478	Tinggi
472.	Kab. Mamuju Tengah						
473.	Kab. Polewali Mandar	197	2,1978	Tinggi	201	2,3746	Tinggi
474.	Prov. Maluku	23	2,1043	Tinggi	22	2,2045	Tinggi
475.	Kab. Buru	326	1,2933	Sedang	269	2,0143	Tinggi
476.	Kab. Buru Selatan	337	1,1949	Sedang	339	1,3973	Sedang
477.	Kab. Kepulauan Aru	336	1,1969	Sedang	351	1,2325	Sedang
478.	Kab. Konawe Kepulauan						
479.	Kab. Maluku Barat Daya				303	1,7181	Sedang
480.	Kab. Maluku Tengah	166	2,3453	Tinggi	248	2,1643	Tinggi
481.	Kab. Maluku Tenggara	257	1,8835	Sedang	266	2,0361	Tinggi
482.	Kab. Maluku Tenggara Barat	267	1,8125	Sedang	379	0,6618	Rendah
483.	Kab. Seram Bagian Barat	235	2,0072	Tinggi	240	2,2125	Tinggi
484.	Kab. Seram Bagian Timur	310	1,4397	Sedang	234	2,2370	Tinggi
485.	Kota Ambon	72	1,8363	Sedang	53	2,5354	Tinggi
486.	Kota Tual	81	1,7060	Sedang	81	1,7554	Sedang
487.	Prov. Maluku Utara	33	1,3720	Sedang	33	1,3523	Sedang
488.	Kab. Halmahera Barat	309	1,4409	Sedang	294	1,7627	Sedang
489.	Kab. Halmahera Selatan	369	0,6040	Rendah	310	1,6367	Sedang
490.	Kab. Halmahera Tengah	323	1,3066	Sedang	331	1,4780	Sedang
491.	Kab. Halmahera Timur	230	2,0462	Tinggi	341	1,3773	Sedang
492.	Kab. Halmahera Utara	357	0,9163	Rendah	263	2,0579	Tinggi
493.	Kab. Kepulauan Sula	265	1,8295	Sedang	270	2,0121	Tinggi
494.	Kab. Pulau Morotai	329	1,2786	Sedang	322	1,5308	Sedang
495.	Kab. Pulau Taliabu						
496.	Kota Ternate	60	2,2117	Tinggi	85	1,5144	Sedang
497.	Kota Tidore Kepulauan	84	1,6519	Sedang	43	2,7177	Tinggi
498.	Prov. Papua	26	1,9259	Sedang	33	1,3523	Sedang
499.	Kab. Asmat	274	1,7678	Sedang	335	1,4492	Sedang
500.	Kab. Biak Numfor	297	1,5508	Sedang	343	1,3368	Sedang
501.	Kab. Boven Digoel	304	1,4987	Sedang			



Lanjutan Tabel V.14

No.	Kabupaten/ Kota	2012			2013		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
502.	Kab. Deiyai				383	0,5502	Rendah
503.	Kab. Dogiyai						
504.	Kab. Intan Jaya				356	1,1386	Sedang
505.	Kab. Jayapura	328	1,2836	Sedang	373	0,8618	Rendah
506.	Kab. Jayawijaya	258	1,8804	Sedang	380	0,6340	Rendah
507.	Kab. Keerom	342	1,1411	Sedang	372	0,8653	Rendah
508.	Kab. Kepulauan Yapen	185	2,2386	Tinggi	347	1,2560	Sedang
509.	Kab. Lanny Jaya				382	0,5772	Rendah
510.	Kab. Memberamo Raya	355	0,9470	Rendah	361	1,0724	Sedang
511.	Kab. Memberamo Tengah						
512.	Kab. Mappi	285	1,6715	Sedang	342	1,3693	Sedang
513.	Kab. Marauke	202	2,1798	Tinggi	352	1,2203	Sedang
514.	Kab. Mimika	170	2,3230	Tinggi	376	0,7052	Rendah
515.	Kab. Nabire	255	1,8903	Sedang	378	0,6708	Rendah
516.	Kab. Nduga						
517.	Kab. Paniai	368	0,6224	Rendah	364	1,0257	Sedang
518.	Kab. Pegunungan Bintang	290	1,6288	Sedang			
519.	Kab. Puncak						
520.	Kab. Puncak Jaya	292	1,6118	Sedang	309	1,6379	Sedang
521.	Kab. Sarmi	227	2,0630	Tinggi	354	1,1740	Sedang
522.	Kab. Supiori	305	1,4932	Sedang	375	0,8510	Rendah
523.	Kab. Tolikara	295	1,5803	Sedang	370	0,9323	Rendah
524.	Kab. Waropen	232	2,0307	Tinggi	320	1,5584	Sedang
525.	Kab. Yahukimo	367	0,6343	Rendah	360	1,0905	Sedang
526.	Kab. Yalimo				367	0,9678	Rendah

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-4761 Tahun 2014.

Tabel V.15 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2009-2014

No.	Negara	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Singapura	3	1	5	5	5	7
2.	Malaysia	56	56	60	54	53	50
3.	Thailand	84	78	80	88	102	85
4.	Philipina	139	134	129	105	94	85
5.	Indonesia	111	110	100	118	114	107
6.	Vietnam	120	116	112	123	116	119
1.	Laos			154	160	140	145
2.	Myanmar			180	172	157	156
3.	Kamboja			164	157	160	156
4.	Brunei Darussalam	39	38	44	46	38	-

Sumber : Transparency International Corruption Perceptions Index 2014,

[http://www.ej.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/\\$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf](http://www.ej.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf) diakses pada tanggal 1

Juni 2015



Tabel V.16 Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2009 - 2014

No.	Negara	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Singapura	9,2	9,3	9,2	87	86	84
2.	Malaysia	4,5	4,4	4,3	49	50	52
3.	Thailand	3,4	3,5	3,4	37	35	38
4.	Philipina	2,4	2,4	2,6	34	36	38
5.	Indonesia	2,8	2,8	3,0	32	32	34
6.	Vietnam	2,7	2,7	2,9	31	31	31
7.	Laos	2	2,1	2,2	21	26	25
8.	Kamboja	2	2,1	2,1	22	20	21
9.	Myanmar	1,4	1,4	1,5	15	21	21
10.	Brunei Darussalam	5,5	5,5	5,2	55	60	-

Sumber : Transparency International Corruption Perceptions Index 2014,

[http://www.ej.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/\\$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf](http://www.ej.com/Publication/vwLUAssets/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014/$FILE/EY-transparency-international-corruption-perceptions-index-2014.pdf) diakses pada tanggal 1

Juni 2015

Keterangan :

Skala skor untuk data tahun 2009-2011 adalah dari 0 (sangat korupsi) sampai 10 (sangat bersih).

Sedangkan skala skor untuk data tahun 2012-2014 adalah dari 0 (sangat korupsi) sampai 100 (sangat bersih).

Tabel V.17 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2010 –2015

No.	Jenis Penanganan	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Penyelidikan	54	78	77	81	80	35
2.	Penyidikan	40	39	48	70	56	11
3.	Penuntutan	32	40	36	41	50	17
4.	<i>Inkracht</i>	34	34	28	40	40	13
5.	Eksekusi	36	35	32	44	48	16
	Jumlah	196	226	221	276	274	92

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015

Keterangan :

*data per Juni 2015

Tabel V.18 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh KPK Tahun 2010 – 2015

No.	Jabatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Anggota DPR dan DPRD	27	5	16	8	4	2
2.	Kepala lembaga/ kementerian	2		1	4	9	2
3.	Duta besar	1					
4.	Komisioner						
5.	Gubernur	1			2	2	2
6.	Walikota/bupati dan wakil	4	3	3	3	12	
7.	Eselon I, II dan III	12	15	8	7	2	
8.	Hakim	1	2	2	3	2	
9.	Swasta	8	10	16	24	15	5
10.	Lain-lain	9	3	3	8	8	
	Jumlah	65	38	49	59	54	11

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015

Keterangan :

*data per Juni 2015



Tabel V.19 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Dittipidkor Polri Tahun 2011 – 2015

No.	Jenis Penanganan	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	P.21	498	610	905	1050	342
2.	SP3	26	39	69	34	17
3.	Limpah	2	8	2	1	0
4.	Proses sidik	432	591	424	569	779
	Jumlah	958	1248	1400	1654	1138

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, 2015

Catatan :

P.21 : Berkas dinyatakan lengkap dan dikirim ke kejaksanaan

SP 3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Limpah : Dilimpahkan ke Instansi Lain

*data per Juni 2015

Tabel V.20 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima oleh KPK Tahun 2009 – 2014

No.	Instansi	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	MPR/DPR	17	22	18	18	20	6
2.	DPRD	5	82	28	3	1	7
3.	DPD	1	-	-	1	-	2
4.	Kepresidenan	-	4	2	-	-	-
5.	Kementerian Sekretaris Negara RI						58
6.	Kementerian Koordinator	1	1	4	4	3	2
7.	Kementerian	37	66	61	74	182	554
8.	Kementerian Negara	3	5	8	-	3	4
9.	Lembaga Setingkat Kementerian	17	12	16	9	11	17
10.	LPNK	12	41	19	10	34	40
11.	Lembaga ekstra struktural	2	1	6	44	32	17
12.	Pemerintah Daerah	166	48	106	75	98	276
13.	Yudikatif	1	5	9	3	5	381
14.	Inspektif (BPK)	10	10	-	-	-	
15.	Lembaga Independen	54	57	39	23	21	65
16.	BUMN/BUMD	9	39	1057	894	981	795
	Jumlah	335	393	1373	1158	1391	2224

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015

Tabel V.21 Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Diterima oleh KPK Tahun 2012 - 2014

No.	Bidang	Jenis	2012		2013		2014	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Eksekutif	Jumlah wajib lapor	170.378	74	149.964	67	174.561	68
		Jumlah yang melaporkan	126.194		100.327		118.923	
2.	Legislatif	Jumlah wajib lapor	17.467	99	2.907	96	10.233	28
		Jumlah yang melaporkan	17.219		2.780		2.894	
3.	Yudikatif	Jumlah wajib lapor	11.602	87	11.128	86	11.052	87
		Jumlah yang melaporkan	10.149		9.598		9.632	
4.	BUMN/D	Jumlah wajib lapor	19.827	87	15.698	82	22.064	77
		Jumlah yang melaporkan	17.168		12.799		16.906	

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015

Tabel V.22 Peringkat Doing Business Negara ASEAN Tahun 2012 - 2015

No.	Negara	2012	2013	2014	2015
1.	Singapura	1	1	1	1
2.	Malaysia	18	12	6	18
3.	Thailand	17	18	18	26
4.	Vietnam	98	99	99	78
5.	Philipina	136	138	108	95
6.	Brunei Darussalam	83	79	59	101
7.	Indonesia	129	128	120	114
8.	Kamboja	138	133	137	135
9.	Laos		163	159	148

Sumber : Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency,

<http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf> diakses pada tanggal 1 Juni 2015

Tabel V.23 Rangka (Rank) dan Nilai (Value) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN Tahun 2011 - 2013

No.	Negara	HDI Rank			HDI Values		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1.	Singapura	26	18	9	0,866	0,895	0,901
2.	Brunei Darussalam	33	30	30	0,838	0,855	0,852
3.	Malaysia	61	64	62	0,761	0,769	0,773
4.	Thailand	103	103	89	0,682	0,690	0,722
5.	Philipina	112	114	117	0,644	0,654	0,660
6.	Indonesia	124	121	108	0,617	0,629	0,684
7.	Kamboja	139	138	136	0,523	0,543	0,584
8.	Myanmar	149	149	150	0,483	0,498	0,524
9.	Laos	138	138	139	0,524	0,543	0,569
10.	Vietnam	128	127	121	0,593	0,617	0,638

Sumber : Human Development Report 2014, UNDP,

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf> diakses pada tanggal 16 November 2015

Tabel V.24 Nilai Komponen (components) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN Tahun 2012 - 2013

No	Negara	Health		Education				Living Standard	
		Life Expectancy at birth		Mean Years of schooling		Expected Years of schooling		Gross National Income (GNI) per capita	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1.	Singapura	81,2	82,3	10,1	10,2	14,4	15,4	52.613	72.371
2.	Brunei Darussalam	78,1	78,5	8,6	8,7	15,0	14,5	45.690	70.883
3.	Malaysia	74,5	75,0	9,2	9,5	12,6	12,7	13.676	21.824
4.	Thailand	74,3	74,4	6,6	7,3	12,3	13,1	7.722	13.364
5.	Philipina	69,0	68,7	8,9	8,9	11,7	11,3	3.752	6.381
6.	Indonesia	69,8	70,8	5,8	7,5	12,9	12,7	4.154	8.970
7.	Kamboja	63,6	71,9	5,8	5,8	10,5	10,9	2.095	2.805
8.	Myanmar	65,7	65,2	3,9	4,0	9,4	8,6	1.817	3.998
9.	Laos	67,8	68,3	4,6	4,6	10,1	10,2	2.435	4.351
10.	Vietnam	75,4	75,9	5,5	5,5	11,9	11,9	2.970	4.892

Sumber : Human Development Report 2014, UNDP,

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf> diakses pada tanggal 16 November 2015

Tabel V.25 Peringkat e-Government Negara ASEAN Tahun 2010 - 2014

No.	Country	2010		2012		2014	
		Rank	Index	Rank	Index	Rank	Index
1.	Singapore	11	0.7476	10	0.8474	3	0.9076
2.	Malaysia	32	0.6101	40	0.6703	52	0.6115
3.	Brunei Darussalam	68	0.4796	54	0.6250	86	0.5042
4.	Vietnam	90	0.4454	83	0.5217	99	0.4705
5.	Philippines	78	0.4637	88	0.5130	95	0.4768
6.	Thailand	76	0.4653	92	0.5093	102	0.4631
7.	Indonesia	109	0.4026	97	0.4949	106	0.4487
8.	Laos	151	0.2637	153	0.2935	152	0.2659
9.	Kamboja	140	0.2878	155	0.2902	139	0.2999
10.	Myanmar	141	0.2818	160	0.2703	175	0.1869

Sumber : United Nations E-Government Survey 2014,

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf diakses pada tanggal 16 November 2015

Tabel V.26 Pemeringkatan e-Government Indonesia Tingkat Kementerian Tahun 2013-2014

No.	Kementerian	2013			2014		
		Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori	Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori
1.	Kementerian Keuangan	1	3,57	Sangat Baik	1	3,57	Sangat Baik
2.	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	2	3,55	Baik	2	3,43	Baik
3.	Kementerian Pekerjaan Umum	3	3,21	Baik	5	3,16	Baik

Lanjutan Tabel V.26

No.	Kementerian	2013			2014		
		Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori	Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori
1.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	4	3,17	Baik	4	3,26	Baik
2.	Kementerian Luar Negeri	5	3,17	Baik	3	3,31	Baik
3.	Kementerian Pertahanan	6	3,14	Baik	25	2,23	Kurang
4.	Kementerian Sekretariat Negara	7	3,10	Baik	14	2,81	Baik
5.	Kementerian ESDM	8	3,06	Baik	8	2,98	Baik
6.	Kementerian Komunikasi & Informatika	9	2,98	Baik	7	3,03	Baik
7.	Kementerian Perindustrian	10	2,85	Baik			
8.	Kementerian Perdagangan	11	2,84	Baik	9	2,96	Baik
9.	Kementerian Pertanian	12	2,84	Baik	13	2,90	Baik
10.	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	13	2,83	Baik	11	2,93	Baik
11.	Kementerian Kesehatan	14	2,81	Baik	10	2,95	Baik
12.	Kementerian PAN dan RB	15	2,69	Baik	28	2,05	Kurang
13.	Kementerian Perhubungan	16	2,67	Baik	22	2,27	Kurang
14.	Kementerian Koperasi & UKM	17	2,65	Baik	26	2,21	Kurang
15.	Kementerian Kelautan & Perikanan	18	2,65	Baik	6	3,09	Baik
16.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	19	2,57	Baik	15	2,52	Baik
17.	Kementerian BUMN	20	2,50	Baik	12	2,92	Baik
18.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	21	2,49	Kurang	20	2,35	Kurang
19.	Kementerian Agama	22	2,46	Kurang	18	2,44	Kurang
20.	Kementerian Kehutanan	23	2,43	Kurang	16	2,48	Kurang
21.	Kementerian Pemuda & Olah Raga	24	2,40	Kurang	21	2,33	Kurang
22.	Kementerian Riset & Teknologi	25	2,34	Kurang	19	2,39	Kurang

Lanjutan Tabel V.26

No.	Kementerian	2013			2014		
		Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori	Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori
23.	Kementerian Hukum & HAM	26	2,29	Kurang	27	2,15	Kurang
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan	27	2,27	Kurang			
25.	Kementerian Sosial	28	2,16	Kurang	23	2,24	Kurang
26.	Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif	29	2,13	Kurang	17	2,47	Kurang
27.	Kementerian Perumahan Rakyat	30	2,11	Kurang	31	1,78	Kurang
28.	Kementerian Lingkungan Hidup	31	2,08	Kurang	24	2,24	Kurang
29.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	32	1,37	Kurang	30	1,92	Kurang
30.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	33	1,34	Kurang	29	1,93	Kurang
	Rata-rata		2,66	Baik		2,62	Baik

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015

Tabel V.27 Pemeringkatan e-Government Indonesia Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2013-2014

No.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2013			2014		
		Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori	Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori
1.	Badan Pengawasan Obat & Makanan (BPOM)	1	3,37	Baik			
2.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	2	3,14	Baik	5	2,93	Baik
3.	Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT)	3	3,11	Baik	2	3,11	Baik
4.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)	4	3,07	Baik	3	3,08	Baik
5.	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	5	2,95	Baik	10	2,67	Baik
6.	Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	6	2,85	Baik	9	2,73	Baik

Lanjutan Tabel V.27

No.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2013			2014		
		Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori	Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori
7.	Badan Pusat Statistik (BPS)	7	2,84	Baik	1	3,16	Baik
8.	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)	8	2,81	Baik	8	2,80	Baik
9.	Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional (LAPAN)	9	2,78	Baik	11	2,66	Baik
10.	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	10	2,63	Baik	12	2,64	Baik
11.	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	11	2,55	Baik	19	2,28	Kurang
12.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	12	2,53	Baik	18	2,39	Kurang
13.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	13	2,52	Baik	16	2,50	Baik
14.	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN)	14	2,51	Baik	15	2,55	Baik
15.	Badan Informasi Geospasial (BIG)	15	2,46	Kurang	4	2,98	Baik
16.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	15	2,31	Kurang	23	1,98	Kurang
17.	Badan Perlindungan & Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	17	2,26	Kurang	20	2,24	Kurang
18.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	18	2,17	Kurang	6	2,83	Baik
19.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	19	2,10	Kurang	22	2,08	Kurang
20.	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)				7	2,82	Baik
21.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)				13	2,58	Baik
22.	Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika (BMKG)				14	2,57	Baik
23.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)				17	2,42	Kurang

Lanjutan Tabel V.27

No.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2013			2014		
		Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori	Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori
24.	Badan SAR Nasional (BASARNAS)				21	2,22	Kurang
25.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)				24	1,52	Kurang
	Rata-rata		2,68			2,57	Baik

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015

Tabel V.28 Pemeringkatan e-Government Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2013-2014

No.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	2013			2014		
		Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori	Peringkat	Nilai Rata-rata	Kategori
1.	Jawa barat	1	3.39	Baik	2	3.01	Baik
2.	DKI Jakarta	2	3.27	Baik	1	3.08	Baik
3.	Jawa timur	3	3.05	Baik	3	2.89	Baik
4.	Gorontalo	4	3.03	Baik	6	2.65	Baik
5.	Yogyakarta	5	3.02	Baik	4	2.88	Baik
6.	Jawa tengah	6	3.01	Baik	5	2.73	Baik
7.	Kalimantan tengah	7	2.98	Baik	17	1.97	Kurang
8.	Sumatera utara	8	2.77	Baik	8	2.61	Baik
9.	Aceh	9	2.53	Baik	9	2.56	Baik
10.	Papua	10	2.52	Baik	21	1.69	Kurang
11.	Lampung	11	2.50	Baik	18	1.89	Kurang
12.	Jambi	12	2.46	Kurang			
13.	Sumatera selatan	13	2.41	Kurang	14	2.05	Kurang
14.	Nusa tenggara barat	14	2.23	Kurang	13	2.14	Kurang
15.	Riau	15	2.13	Kurang	12	2.20	Kurang
16.	Sulawesi utara	16	2.10	Kurang			
17.	Nusa tenggara timur	17	2.06	Kurang	22	1.59	Kurang
18.	Bangka Belitung	18	2.00	Kurang	11	2.23	Kurang
19.	Sulawesi barat	19	1.76	Kurang	19	1.74	Kurang
20.	Kalimantan barat	20	1.71	Kurang	15	2.05	Kurang
21.	Kalimantan selatan	21	1.55	Kurang			
22.	Bali				7	2.64	Baik
23.	Kalimantan Timur				10	2.24	Kurang
24.	Sumatera Barat				16	2.01	Kurang
25.	Sulawesi Tengah				20	1.71	Kurang
	Rata-rata		2.50			2.30	Kurang

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 12 /PI.1/HKM.03.2**

TENTANG

**TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN DATABASE APARATUR TAHAP IV**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Candra Setya Nugroho, SH.	Koordinator Penelitian
2.	Yunni Susanty, SE	Sekretariat Penelitian
3.	Priswanti Rahayu, SAB	Sekretariat Penelitian
4.	Kurnia Angraeni Dewi, ST.	Sekretariat Penelitian
5.	Kezia Larasati S., A.Mk	Sekretariat Penelitian
6.	Rahmawati, SAP	Sekretariat Penelitian
7.	Yuyu Yuningsih, SE.	Sekretariat Penelitian
8.	RR. Harida Indraswari, S.Sos.	Pembantu Peneliti
9.	Dra. Marifa Ayu Kencana, MIS	Pembantu Peneliti
10.	Sulistianingsih, S.Pd.	Pembantu Peneliti
11.	M. Dani Ramadansyah, ST.	Pembantu Peneliti
12.	Wuri Indri Pramesti, S.Sos.,M.BIS.	Pembantu Peneliti
13.	2 Orang	Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan
14.	16 Orang	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan
15.	1 Orang	Narasumber Pakar/ Praktisi

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 5 Januari 2015

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR I LAN,


Dr. H. Joni Dawud, DEA &
NIP. 19680531 199401 1 001

